



# MAJELIS



## MPR 5 TAHUN KE DEPAN FOKUS KAJIAN AMANDEMEN DAN SOSIALISASI EMPAT PILAR







MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**EMPAT PILAR MPR RI**  
 Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara  
 UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara  
 NKRI Sebagai Bentuk Negara  
 Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara



**EMPAT PILAR MPR**  
 PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



**INDONESIA**  
 MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



**MPR**  
**RUMAH KEBANGSAAN**  
**PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA**  
**DAN KEDAULATAN RAKYAT**



**EMPAT PILAR MPR RI**  
Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara  
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara  
NKRI Sebagai Bentuk Negara  
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara



**EMPAT PILAR MPR**  
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



**INDONESIA**  
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

# Daftar Isi

EDISI NO.01/TH.XIV/JANUARI 2020



## 08 BERITA UTAMA

### MPR 5 Tahun ke Depan

Agenda dan program kerja MPR selama lima tahun ke depan, menjalankan amanah UU MD3, yaitu memasyarakatkan Empat Pilar MPR RI, mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.



## 16 Nasional Pimpinan MPR Bahas Amandemen Terbatas UUD



## 56 Sosialisasi MPR Menjaga Tradisi Budaya Indonesia



## 39 SELINGAN Jangan Abai Pada Konvensi ICERD



## 76 Profil Bambang soesatyo

Pengantar Redaksi .....	04
Lantai Tujuh .....	06
Catatan Akhir Tahun .....	24
Aspirasi Masyarakat .....	47
Diskusi Majelis .....	48
Gema Pancasila .....	66
Varia MPR .....	68
Wawancara .....	70
Figur .....	72
Ragam .....	74
Dari Rumah Kebangsaan .....	80
Rehal .....	82



**COVER**  
Edisi No.01/TH.XIV/Januari 2020  
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa



**Budi Muliawan**  
Koordinator Reportase

## Pengantar Redaksi



### PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

### PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

### PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

### DEWAN REDAKSI

Yana Indrawan, Dyastasita,  
Heri Herawan, Maifrizal

### REDAKTUR PELAKSANA

Budi Muliawan

### KOORDINATOR REPORTASE

Budi Muliawan

### REDAKTUR FOTO

Oni Arief Benyamin,  
Sucipto, Slamet Eko Suprayitno

### REPORTER

Ana Suzana, Yenita Revi,  
Tengku Novan Muda Mulya

### FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,  
Restu, Suprianto, Sugeng, Wira,  
A. Ariyana, Agus Darto

### PENANGGUNG JAWAB

### DISTRIBUSI

Elen Magdalena

### KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayat

### STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Amiruddin,  
Anggun Permana, Kiki Tri Murjono,  
Armansyah, Dhita Fitasari  
Junaid

### SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

### TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,  
Ardi Winangun, Budi Sucahyo,  
Derry Irawan, M. Budiono

## Program MPR Lima Tahun ke Depan

**A**NGGOTA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masa jabatan 2019 – 2024 telah mengucapkan sumpah dan janji di depan Ketua Mahkamah Agung pada 1 Oktober 2019 lalu dalam Sidang Paripurna MPR Awal Masa Jabatan Anggota MPR periode 2019 – 2024. Dalam sidang paripurna MPR dua hari berikutnya, 3 Oktober 2019, dengan agenda pemilihan pimpinan MPR, telah terpilih Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar sebagai Ketua MPR periode 2019 – 2024. Sesuai dengan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Ketua MPR didampingi sembilan orang wakil ketua.

Untuk Wakil Ketua MPR ditetapkan berdasarkan ajuan dari seluruh fraksi parpol dan kelompok DPD, minus fraksi Partai Golkar. Mereka adalah: Ahmad Basarah (Fraksi PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (Fraksi Partai Gerindra), Jazilul Fawaid (Fraksi PKB), Syarifudin Hasan (Fraksi Partai Demokrat), Lestari Moerdijat (Fraksi Partai Nasdem), Hidayat Nur Wahid (Fraksi PKS), Zulkifli Hasan (Fraksi PAN), Arsul Sani (Fraksi PPP), dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD). Jadi, pimpinan MPR periode 2019 – 2014 ini merupakan representasi dari kekuatan partai politik di parlemen.

Setelah dilantik, agenda pertama MPR periode 2019 – 2024 adalah menyiapkan sidang paripurna pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2019 sesuai mandat dari konstitusi. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, "Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat". Dalam sidang paripurna pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Ahad, 20 Oktober 2019, Ir. H. Joko Widodo mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia, dan K.H. Ma'ruf Amin mengucapkan sumpah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Berikutnya, Pimpinan MPR menjalankan rekomendasi dari MPR periode 2014 – 2019, terutama terkait dengan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN. MPR Periode 2014 – 2019 merekomendasikan kepada MPR Periode 2019 – 2024 untuk mengkaji lebih mendalam reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN yang masih menyisakan persoalan tentang bentuk hukum dari haluan negara itu, apakah dalam bentuk Ketetapan MPR (yang berarti harus melakukan amendemen UUD NRI Tahun 1945) atau dalam bentuk Undang-Undang. Karena itulah, sejak awal pelantikan MPR periode 2019 – 2024, muncul isu amandemen UUD NRI Tahun 1945.

Merespon rekomendasi itu, langkah awal Pimpinan MPR adalah menyerap aspirasi masyarakat terkait haluan negara. Untuk mendengar aspirasi masyarakat, Pimpinan MPR melakukan silaturahmi kebangsaan ke berbagai kalangan dan elemen masyarakat, serta partai politik. Setelah agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019, Pimpinan MPR gencar melakukan pertemuan dan silaturahmi kebangsaan, antara lain dengan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Gereja Indonesia (PGI), pimpinan Partai Nasdem, PKS, dan lainnya. Hingga Januari 2020, silaturahmi kebangsaan itu masih berlangsung.

Tampaknya satu hal yang paling menonjol dan menjadi fokus dalam program kerja MPR periode 2019 – 2024 adalah soal haluan negara, baik materi atau isi haluan Negara maupun bentuk hukumnya. Dalam waktu efektif tiga tahun ke depan, paling tidak sudah ada gambaran tentang realisasi haluan negara ini. Sementara program kerja lainnya hampir mengikuti dan melanjutkan program kerja yang sudah berjalan dan sudah dilakukan MPR periode sebelumnya. □

### ALAMAT REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Layanan Informasi, Biro Humas, Sekretariat Jenderal MPR-RI Gedung Nusantara III, Lt. 5 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6, Senayan, Jakarta 10270. Telp. (021) 57895237, 57895238 Fax.: (021) 57895237 Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



### Implementasi Sila-sila Pancasila



- Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur



- Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa.



- Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan



- Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat
- Berhenti besar kepala, mulailah bertampang dada
- Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyawarah



- Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi



ILUSTRASI: SUSTANTO





Dr. H. Ma'ruf Cahyono, SH., MH. Sekretaris Jenderal MPR RI

## Renstra MPR Periode 2019 - 2024

**M**AJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempunyai rencana strategis (Renstra) selama periode lima tahun. Renstra periode 2014 – 2019 sudah dilaksanakan dengan capaian kinerja yang cukup menggembirakan. MPR sudah menjalankan semua wewenang dan tugas yang dimandatkan konstitusi dan Undang-Undang (UU) dengan sukses. MPR sudah menunaikan amanah konstitusi, yaitu Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945, dengan menyelenggarakan sidang paripurna dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2019. Sidang paripurna sebagai pelaksanaan proses legitimasi kepemimpinan nasional merupakan bagian dari kinerja MPR.

Setelah lima tahun menjalankan wewenang dan tugas dengan baik, MPR juga menyusun rencana strategis untuk masa jabatan 2019 – 2024. MPR menjabarkan wewenang dan tugas yang diamanahkan konstitusi dan UU dalam Renstra yang memuat rencana-rencana kerja setiap tahun, mulai dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, hingga akhir masa jabatan. Renstra MPR mencakup: *Pertama*, Renstra tentang pelaksanaan wewenang konstitusional yang dimandatkan oleh konstitusi. *Kedua*, pelaksanaan tugas yang diamanahkan oleh UU. Amanat konstitusi dan UU itu dipertegas dan dijabarkan kembali melalui Peraturan Tata Tertib MPR. Konstitusi, UU MD3, dan Keputusan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR menjadi dasar penyusunan rencana strategis MPR.

Pada dasarnya MPR periode 2019 – 2024 meneruskan program kerja MPR periode 2014 – 2019, karena program kerja merupakan penjabaran dari tugas yang dimandatkan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pertama, memasyarakatkan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Juga memasyarakatkan produk hukum Ketetapan MPR dan Ketetapan MPRS. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, Ketetapan MPR berada pada hierarki kedua setelah UUD dan di atas UU.

Kedua, Pasal 5 UU MD3 juga memberi tugas kepada MPR untuk mengkaji sistem ketatanegaraan, mengkaji konstitusi, dan mengkaji

pelaksanaan UUD. Ketiga, sebagai lembaga perwakilan yang merupakan representasi perwakilan politik (DPR) dan perwakilan daerah (DPD) yang tergabung dalam MPR maka tugas MPR menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan UUD. Implementasi UUD di masyarakat menjadi obyek kajian MPR. Ketiga hal itu menjadi rencana kerja yang dijalankan lembaga MPR.

Untuk menjalankan Renstra periode lima tahun, 2019 – 2024, MPR memiliki perangkat, yaitu alat kelengkapan lembaga MPR, yakni: Badan Sosialisasi, Badan Kajian, Badan Penganggaran, dan didukung Komisi Kajian Ketatanegaraan. Masing-masing alat kelengkapan MPR itu menyusun program kerja yang menjadi penjabaran Renstra yang didasarkan pada konstitusi, UU, dan Peraturan Tata Tertib MPR. Dari masing-masing alat kelengkapan MPR ini muncul rencana operasional yang terlihat pada kegiatan-kegiatan. Dengan demikian, Renstra periode lima tahun yang dibagi menjadi rencana kerja tahunan tampak pada kegiatan-kegiatan di alat kelengkapan MPR (badan dan Komisi Kajian), termasuk Pimpinan MPR.

Di samping mengaktualisasikan dan menjabarkan Renstra, penyusunan program dan rencana kerja tentu sudah berdasarkan evaluasi pelaksanaan program periode lima tahun sebelumnya. Ini dimaksudkan agar pelaksanaan wewenang dan tugas MPR semakin berkualitas, sesuai sasaran, dan berdampak positif untuk masyarakat. Dari hasil evaluasi akan muncul program-program kegiatan yang memang menjadi kebutuhan, baik kebutuhan sekarang maupun yang akan datang.

### Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014 – 2019

Di dalam Renstra juga termasuk melaksanakan putusan-putusan MPR. Salah satunya Keputusan MPR tentang Rekomendasi MPR masa jabatan 2014 – 2019. Muatan rekomendasi itu antara lain:

1. Pokok-Pokok Haluan Negara untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai substansi dan bentuk hukum, termasuk membangun konsensus politik yang memungkinkan ditetapkannya dalam Ketetapan MPR.
2. Penataan Sistem Ketatanegaraan meliputi: penataan ke-



wenangan MPR, penataan kewenangan DPD, penataan sistem presidensial, penataan kekuasaan kehakiman, dan penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara.

3. Pelaksanaan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika serta Ketetapan MPR RI.

Rekomendasi ini sangat strategis karena muncul dari kehendak masyarakat yang kemudian diformulasi melalui Keputusan MPR. Keputusan MPR ini telah mendapat persetujuan anggota MPR sebagai representasi wakil rakyat dan wakil daerah, sehingga mempunyai posisi yang kuat. Sebagai mandat yang dilegitimasi melalui produk hukum, rekomendasi itu harus menjadi perhatian utama. Rekomendasi ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan dinamika, perkembangan politik maupun kehendak dan aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu, rekomendasi itu menjadi acuan kerja. Program untuk melakukan penyerapan aspirasi akan semakin massif, sehingga jika ada pengambilan keputusan maka momentum politik itu memang sudah sesuai dengan kehendak mayoritas masyarakat. MPR mengolah aspirasi masyarakat dan menjadikan instrumen yang menjembatani antara rakyat dan kebijakan-kebijakan yang diambil

bermasyarakat, mulai dari aspek yang bersifat religius, humanis, nasionalis, demokratis, hingga perilaku adil.

Selain itu, dalam Empat Pilar MPR, roda negara dan pemerintahan berjalan jika semua dijalankan secara konstitusional. Karena itu, tugas MPR untuk menyosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 dan membuat kesadaran berkonstitusi juga sangat penting. Hal ini juga menjadi prioritas agar sosialisasi dan kesadaran berkonstitusi harus sampai pada para stakeholder yang memiliki pengaruh, sehingga sasaran sosialisasi itu membawa manfaat langsung, baik terhadap kehidupan masyarakat maupun penyelenggaraan negara.

Prioritas lainnya terkait dengan rekomendasi MPR masa jabatan 2014 – 2019, khususnya dorongan untuk melakukan perubahan UUD. MPR perlu melakukan kajian lebih mendalam. Dengan kajian itulah kita mampu membuat parameter bahwa aspirasi yang berkembang sudah menjadi *mainstream* atau arus besar. Karena itu, kajian MPR harus mampu menciptakan metode yang mampu merepresentasikan kehendak masyarakat, sehingga kajian-kajian yang dilakukan benar-benar memiliki legitimasi. Badan Pengkajian MPR akan merumuskan sehingga konsep konstitusi yang ingin ditata ke depan berdasarkan analisis yang kuat, pendekatan yang konseptual dan akademik.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Negara, khususnya MPR. Menjadi tugas Badan Pengkajian MPR untuk mengidentifikasi dan pemetaan serta melakukan tahapan-tahapan dalam kurun waktu lima tahun.

Dari identifikasi dan pemetaan pada akhirnya akan diambil kebijakan, apakah tindak lanjut rekomendasi itu berupa perbaikan regulasi dalam tataran konstitusi atau perbaikan regulasi dalam implementasi. Perbaikan regulasi dalam tataran konstitusi menjadi domain MPR. Tetapi, jika tindak lanjut rekomendasi berupa perbaikan dalam implementasi maka cukup dengan UU. Badan Pengkajian akan melakukan kajian lebih mendalam dan lebih kritis. Hasil kajian MPR periode lalu cukup komprehensif yang bisa dijadikan acuan, sehingga hanya memerlukan afirmasi terhadap perubahan aspirasi satu sampai lima tahun ke depan.

### Prioritas

Semua program kerja MPR sama pentingnya. Tapi, karena fondasi bangsa Indonesia adalah ideologi maka internalisasi nilai-nilai Empat Pilar menjadi prioritas. Empat Pilar MPR adalah membangun *nation and character building*. Negara akan semakin kokoh jika kita semua memiliki pegangan kuat terhadap ideologi bangsa. Pada prinsipnya lima sila Pancasila adalah karakter bangsa yang menjadi pedoman bernegara dan acuan tingkah laku dan pola hidup sehari-hari dalam

Tahun 2020 ini, MPR masa jabatan 2019 – 2024 secara efektif mulai melaksanakan wewenang dan tugas sesuai konstitusi dan UU. Pada tahun pertama ini diharapkan muncul terobosan-terobosan yang tertuang dalam rencana kerja dan rencana operasional sebagai acuan pelaksanaan tugas selama satu tahun. Tahun pertama ini menjadi pijakan untuk tahun-tahun berikutnya sampai di akhir masa jabatan. Pada gilirannya, tahun 2024, kita berharap mimpi dan visi MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dapat terwujud dengan kondisi sistem ketatanegaraan yang semakin kokoh, ketahanan masyarakat terhadap ideologi dan dasar negara semakin kuat, kesadaran berkonstitusi yang semakin berkualitas, termasuk demokrasi yang semakin baik, demokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Program dan rencana kerja MPR tidak hanya soal kuantitas dari kegiatan, tapi juga kualitas berdasarkan visi lembaga MPR. Program kerja MPR tidak hanya sarat dengan rencana-rencana kerja, tapi juga sarat dengan *message* atau pesan-pesan untuk terus menjaga nilai-nilai ideologi Pancasila, melaksanakan konstitusi, dan lainnya. Renstra MPR adalah Renstra yang tidak boleh keluar dari mimpi-mimpi kita untuk terus mengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat yang menjadikan MPR sebagai Rumah Rakyat, Rumah Kebangsaan. □

## MPR 5 Tahun ke Depan

# Fokus Kajian Amandemen

## dan Sosialisasi Empat Pilar



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**A**GENDA dan program kerja MPR selama lima tahun ke depan, selain menindaklanjuti tiga muatan rekomendasi dari MPR masa jabatan 2014 – 2019, juga menjalankan amanah UU MD3, yaitu memasyarakatkan Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika), mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.

Hidangan kue, kacang, dan buah jeruk sudah tersedia di meja. Hidangan itu disajikan di sebuah ruangan pertemuan di lantai satu kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jl. T.B. Simatupang, Jakarta Selatan. Kursi-kursi pun sudah disiapkan di depan meja-meja kecil. Pada akhir November 2019 itu, Pimpinan MPR dijadwalkan mengadakan silaturahmi kebangsaan ke Pimpinan PKS. Dalam kondisi cuaca hujan, kedatangan Ketua MPR Bambang Soesatyo didampingi Wakil Ketua Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, Jazilul Fawaid, dan Ahmad Muzani disambut petinggi PKS.

Presiden PKS Sohibul Iman didampingi Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal menyambut kedatangan Bambang Soesatyo di depan pintu masuk Gedung DPP PKS. Setelah bercipika-cipiki, mereka masuk ke ruang pertemuan. Tampak hadir petinggi PKS lainnya, yaitu: Ketua Fraksi PKS MPR Tiffatul Sembiring, Ketua Dewan Syariah Surahman

Hidayat, Sekretaris Majelis Syuro Untung Wahono, dan Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman. Di dalam ruangan, mereka meriung berbincang ringan. Pertemuan memang dilakukan secara informal.

Selain ke PKS, sebelumnya Pimpinan MPR juga melakukan silaturahmi kebangsaan serupa ke Pimpinan Partai Nasdem di kantor DPP Partai Nasdem, Jl. Gondangdia, Jakarta Pusat. Di jadwal berikutnya, Pimpinan MPR juga menyambangi petinggi Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan partai politik lainnya. Bukan hanya partai politik, Pimpinan MPR juga mengadakan silaturahmi kebangsaan ke organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Juga ke beberapa organisasi keagamaan lainnya, seperti Persatuan Gereja Indonesia (PGI) dan Parisada Hindhu Dharma Indonesia (PHDI). Tak kalah penting, Pimpinan MPR juga berkunjung ke kantor redaksi media massa.

Usai pelaksanaan Sidang Paripurna MPR dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019 pada Ahad, 20 Oktober 2019, Pimpinan MPR langsung bergerak menjalankan agenda dan program MPR. Agenda pertama adalah mengadakan silaturahmi kebangsaan ke berbagai elemen masyarakat, baik partai politik maupun organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, serta media media massa. Silaturahmi kebangsaan ini terkait dengan keinginan MPR untuk



menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan pokok-pokok haluan negara.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menjelaskan, silaturahmi kebangsaan ini dilakukan dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat terkait amandemen terbatas dan keinginan menghadirkan haluan negara. “Ini penting bagi MPR. Sebab, kami menerima ‘warisan’ dari MPR periode lalu berupa rekomendasi tentang amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, untuk menyikapi hal penting tersebut, kami rasa perlu melakukan silaturahmi dengan pimpinan partai politik dan tokoh masyarakat,” tutur Bamsoet ketika berkunjung ke DPP PAN, pada pertengahan Desember 2019.

Memang, ada beberapa agenda MPR pada masa bakti 2019 – 2024 ini. Tentu, agenda dan program kerja MPR periode 2019 – 2024 terikat dengan “warisan” rekomendasi dari MPR periode 2014 – 2019. Sebab, pada

dasarnya program kerja MPR periode 2019 – 2024 adalah menindaklanjuti rekomendasi dari MPR masa jabatan sebelumnya. Dalam Sidang Akhir Masa Jabatan MPR pada akhir September 2019, Pimpinan MPR menyebutkan “warisan” muatan rekomendasi dari MPR periode 2014 – 2019 untuk ditindaklanjuti MPR periode 2019 – 2024, antara lain:

*Pertama*, untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, termasuk membangun konsensus politik yang memungkinkan ditetapkan dalam Ketetapan MPR.

*Kedua*, melakukan penataan sistem ketatanegaraan yang meliputi: penataan kewenangan MPR, penataan kewenangan DPD, penataan sistem presidensial, penataan kekuasaan kehakiman, dan penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai

sumber segala sumber hukum negara. MPR masa jabatan 2019 – 2024 perlu melanjutkan kajian lebih mendalam.

*Ketiga*, melaksanakan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR RI.

Agenda dan program kerja MPR selama lima tahun ke depan, paling tidak, menindaklanjuti tiga muatan rekomendasi dari MPR masa jabatan 2014 – 2019. Ketiga muatan rekomendasi itu juga erat kaitannya dengan tugas MPR sesuai dengan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), yaitu: pertama, memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, serta pelaksanaannya. Ketiga, menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.

### Kajian dan Sosialisasi Empat Pilar

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengungkapkan, MPR terus mengkaji wacana amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 untuk menghadirkan kembali haluan negara (Pokok-Pokok Haluan Negara). Oleh karena itu, Pimpinan MPR terus mendatangi berbagai elemen masyarakat dan tokoh bangsa untuk menyampaikan beberapa rencana agenda MPR pada masa bakti 2019 – 2024. Salah satu yang terpenting adalah rencana MPR untuk menghadirkan kembali haluan negara. “Terkait rekomendasi MPR periode sebelumnya tentang amandemen UUD, Pimpinan MPR melakukan safari ke pimpinan partai politik, ormas, dan organisasi keagamaan, untuk menyerap aspirasi soal amandemen UUD untuk menghadirkan kembali haluan negara,” katanya.

Jazilul tak memungkiri tantangan yang dihadapi MPR ke depan semakin berat, terutama berkaitan dengan wacana amandemen UUD tadi. Pasalnya, amandemen membutuhkan kehendak dari semua pihak, bukan hanya kehendak pimpinan MPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di MPR.

Politisi PKB itu menambahkan bahwa amandemen UUD merupakan tuntutan perkembangan zaman. Sejak terakhir diamandemen pada 2002, tidak pernah muncul pemikiran untuk kembali meng-amandemen UUD NRI Tahun 1945. Baru pada 2019 lalu wacana amandemen ini menguat. “MPR periode lalu, 2014 – 2019, menangkap aspirasi itu, dan pada akhir masa jabatannya di tahun 2019 mengeluarkan rekomendasi kepada MPR periode 2019 - 2024 tentang amandemen terbatas soal GBHN,” jelasnya.

Melalui perangkat Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR, lanjut Jazilul, wacana itu akan dikaji lebih mendalam. Namun, sebelumnya MPR ingin mendengar aspirasi dan masukan dari masyarakat Indonesia soal amandemen ini. “Kita ingin mengetahui apakah mereka (rakyat) setuju amandemen, membutuhkan haluan negara atau tidak, dan apa keinginan rakyat untuk Indonesia ke depan,” ujarnya.

“Aspirasi-aspirasi dan masukan-masukan masyarakat Indonesia tersebut, nantinya akan kami bawa ke MPR untuk kami lakukan kajian secara mendalam. Nanti setelah melalui berbagai prosedur di MPR akan



Jazilul Fawaid

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

muncul apakah amandemen dan GBHN itu dibutuhkan rakyat dan negara Indonesia atau tidak. Pada intinya, apakah amandemen atau tidak semuanya kembali untuk kesejahteraan rakyat seluruhnya,” sambungnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR, Benny K Harman, sejalan dengan pemikiran Jazilul Fawaid. Menurut Benny, setelah 20 tahun amandemen konstitusi, saat ini terjadi dinamika dan perubahan sosial dan muncul tantangan-tantangan baru. Tugas MPR adalah mengkaji apakah konstitusi ini masih adaptif, responsif, dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

“Kita sedang berusaha menjawab perubahan itu, tetapi perubahan yang akan kita lakukan tidak boleh melewati batas-batas koridor Empat Pilar MPR. Kalau ada kehendak melakukan perubahan konstitusi maka hal itu merupakan tuntutan zaman. Bukan sesuatu yang aneh. Tapi kita mau perubahan ke arah mana? Apakah perubahan hanya untuk kepentingan sesaat? Atau apakah perubahan hanya untuk kelompok tertentu?”



Arwani Thomafi

ucapnya.

Benny juga menyebutkan beberapa persoalan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Beberapa persoalan tersebut bisa menjadi kajian MPR. *Pertama*, ancaman serius terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman itu adalah ketidakadilan dan kemiskinan. *Kedua*, ancaman terhadap demokrasi. Ada kompetisi antara demokrasi individual dan demokrasi komunal. Ini harus menjadi kajian di MPR,” ujarnya.

*Ketiga*, berkembangnya paham radikalisme dan sekularisme. Keduanya adalah paham yang berbahaya bagi Indonesia. Sekularisme dan radikalisme menjadi ancaman bagi Pancasila. *Keempat*, terkait kebhinnekaan sebagai identitas dan realitas bangsa Indonesia. “Yang menjadi kerisauan adalah munculnya kompetisi antarkelompok untuk mendominasi visi dan misi bangsa ke depan. Inilah yang akan kami kaji dengan semangat kebersamaan dijiwai nilai-nilai Empat Pilar MPR,” katanya.



Benny K Harman

Maka tak berlebihan bila agenda dan program kerja MPR adalah menjadikan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, yaitu tempat untuk membicarakan masalah-masalah mendasar dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rumah untuk mengamankan ideologi Pancasila, melaksanakan konstitusi UUD NRI Tahun 1945, menjaga keutuhan NKRI, serta mengawal tegaknya kehidupan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Di sinilah pentingnya Sosialisasi Empat Pilar MPR. Pasalnya, banyak generasi muda yang tidak lagi mengenal Pancasila. Bahkan ada di antara mereka yang lebih menyukai ideologi lain di luar Pancasila, sehingga sering ditemukan tindakan intoleran serta sikap dan perilaku yang semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Karena itu, MPR ke depan diharapkan mampu menunjukkan eksistensinya dalam mengatasi persoalan-persoalan ideologis di tengah masyarakat. Tugas itu termaktub dalam UU MD3, yakni memasyarakatkan Empat Pilar. MPR diharapkan menjadi lembaga terdepan memimpin penguatan Empat Pilar secara luas.

Untuk menjawab tantangan-tantangan kebangsaan itu, Ketua Fraksi PPP Arwani Thomafi berpendapat, MPR perlu lebih membumikan Pancasila, terutama di kalangan milenial. Menjadi tugas alat kelengkapan di MPR, seperti Badan Sosialisasi dan Badan Pengkajian, untuk membuat format sosialisasi Empat Pilar MPR yang pas untuk kalangan milenial. “Jadi tidak sekadar sosialisasi Empat Pilar, tapi format yang pas untuk generasi muda. Ini menjadi tantangan MPR dalam menjawab persoalan-persoalan di masyarakat,” katanya.

Tak jauh berbeda, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Idris Laena, mengatakan, prioritas MPR lima tahun ke depan adalah melaksanakan tugas rutin yang diamanahkan oleh UU MD3, yaitu memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. “Sosialisasi Empat Pilar MPR sudah pasti harus dilaksanakan karena ini adalah perintah UU. Jika pada tahun 2019, setiap anggota mendapat lima kali sosialisasi, maka pada tahun 2020 ini akan ditingkatkan menjadi enam kali sosialisasi setahun di daerah pemilihan masing-masing,” ujarnya kepada *Majelis*.

Penambahan kuantitas sosialisasi Empat



**Idris Laena**

Pilar MPR, lanjut Idris Laena, tentu membawa konsekuensi, yaitu penambahan anggaran. “Konsekuensinya anggaran MPR harus lebih diperbesar. Selain itu, metode sosialisasi Empat Pilar MPR perlu dilakukan inovasi-inovasi agar dapat menyentuh kalangan milenial,” tuturnya.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR, El Nino M. Hoesein, mengakui bahwa saat ini belum ada satu lembaga negara pun yang melakukan kajian terhadap UUD NRI Tahun 1945 dengan melibatkan masyarakat. Padahal UUD merupakan aturan hukum dasar di NKRI. “Oleh karena itu, salah satu prioritas MPR ke depan adalah lebih memasifkan lagi pengkajian UUD dengan setiap lapisan masyarakat, baik dalam bentuk sosialisasi maupun kajian dan lainnya,” katanya kepada *Majelis*.

Menurut El Nino, sosialisasi (Empat Pilar MPR) maupun pengkajian UUD ke depan perlu dilakukan secara kreatif sehingga benar-benar efektif dan efisien, terutama



**El Nino M. Hoesein**

disesuaikan dengan perkembangan informasi teknologi yang begitu cepat. Ia mengusulkan beberapa metode dalam sosialisasi dan pengkajian UUD. Pertama, memanfaatkan informasi teknologi seperti podcast, live streaming, dan media sosial lainnya. Dalam hal ini perlu mengajak influencer yang smart dan melek politik sehingga bisa interaktif dengan masyarakat dalam membahas nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kedua, metode sosialisasi dalam bentuk outbound untuk kalangan milenial perlu lebih dilakukan secara masif dengan menambahkan beberapa inovasi dan kreativitas dalam menginternalisasikan nilai-nilai Empat Pilar ke dalam jiwa generasi milenial. Ketiga, dalam kegiatan sosialisasi dan pengkajian perlu melibatkan narasumber dari kalangan NGO, tokoh masyarakat, aktivis organisasi, dan lainnya. Selama ini sosialisasi dan pengkajian hanya melibatkan kalangan akademisi.

Keempat, metode cerdas cermat Empat Pilar MPR yang selama ini hanya dilakukan di tingkat SLTA perlu juga dilaksanakan mulai dari tingkat SD dan perguruan tinggi. “Mungkin seperti cerdas cermat P4 yang pernah diprogramkan oleh pemerintah pada masa Orde Baru,” katanya.

Kelima, semua Pimpinan MPR adalah petugas penjaga konstitusi sekaligus *gatekeeper* yang mengatur arus informasi apabila terjadi amandemen konstitusi. Oleh karena itu, sebelum proses amandemen itu dimulai, perlu melibatkan elemen masyarakat agar pelaksanaan amandemen bisa diterima oleh masyarakat luas. “Tidak seperti RUU KUHP yang pada akhirnya ditolak masyarakat karena kurangnya elemen masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi maupun pengkajian RUU tersebut,” katanya.

Terakhir, lanjut El Nino, satu hal penting yang perlu dicatat adalah transparansi anggaran MPR RI. Selama ini MPR sering memperoleh penghargaan dan pengakuan dari berbagai institusi berkaitan dengan efektivitas penggunaan anggaran. “Namun ada baiknya informasi tentang anggaran MPR juga dapat diakses oleh masyarakat luas. Dengan keterbukaan dan kejujuran anggaran maka rakyat akan semakin percaya kepada lembaga MPR,” tuturnya. □

**DER/EFP/BSC**

# Sekilas Program Kerja MPR Periode Lalu

Beberapa program kerja MPR periode 2014 - 2019 kiranya bisa menjadi acuan untuk program kerja Pimpinan dan anggota MPR periode 2019 - 2024.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**P**IMPINAN dan anggota MPR periode 2014 – 2019 telah selesai menjalankan program kerja selama lima tahun. Program kerja itu juga telah dilaporkan Pimpinan MPR dalam Sidang Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2014 – 2019 pada 28 September 2019 lalu. Apa program kerja MPR selama lima tahun tersebut? Berikut ini beberapa program kerja MPR periode 2014 – 2019 yang kiranya bisa menjadi acuan untuk dilanjutkan dalam program kerja Pimpinan dan anggota MPR periode 2019 – 2024.

Anggota MPR masa jabatan 2014 – 2019 berjumlah 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah hasil pemilihan umum 9 April 2014. Pada 1 Oktober 2014, anggota MPR mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dipandu Ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna Awal Masa Jabatan MPR periode 2014 – 2019. Selanjutnya, dibentuk fraksi dan kelompok DPD yang mencerminkan konfigurasi partai politik peserta pemilihan umum dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dalam Sidang Awal Masa Jabatan MPR Periode 2014 – 2019 pun dilakukan pemilihan Pimpinan MPR (Ketua dan para wakil ketua). Setelah melalui pemungutan suara (voting) sistem paket terpilih paket Ketua MPR Zulkifli Hasan dari Fraksi PAN, dan empat wakil ketua masing-masing Mahyudin (Fraksi Partai Golkar), E.E. Mangindaan (Fraksi Partai Demokrat), Hidayat Nur Wahid (Fraksi PKS), dan Oesman Sapta (Kelompok DPD). Formasi Pimpinan MPR ini berubah pada 2018 (setelah revisi UU MD3), dengan penambahan tiga pimpinan MPR. Ketiga pimpinan MPR tambahan yang dilantik pada 28 Maret 2018 adalah Ahmad Basarah (Fraksi PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (Fraksi Partai Gerindra) dan Muhaimin Iskandar (Fraksi PKB).

Agenda pertama Pimpinan MPR di awal masa jabatan adalah melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum sesuai amanah konstitusi. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 9 ayat (1) menyebutkan: “Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau

berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kala itu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung pada 20 Oktober 2014. Presiden Terpilih Ir. H. Joko Widodo mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia, dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla mengucapkan sumpah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Agenda dan program berikutnya, Pimpinan MPR mendapat tugas untuk menjalankan rekomendasi MPR Masa Jabatan 2009 – 2014. Rekomendasi itu tertuang dalam Keputusan MPR Nomor 4 Tahun 2014. Adapun muatan rekomendasi tersebut meliputi:

1. Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara adendum;
- Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara;
  - Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa;
  - Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya;
  - Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR RI;
  - Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara; dan
  - Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

MPR masa jabatan 2014 – 2019 merealisasikan tujuh rekomendasi itu dalam agenda dan program kerja. Dalam kurun waktu lima tahun, MPR masa jabatan 2014 – 2019 telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut, antara lain dengan membentuk Lembaga Pengkajian MPR, menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR dalam rangka memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kerjanya kepada masyarakat. Sidang Tahunan MPR telah dilaksanakan pada 2015 dan terus berlanjut setiap tahun. Sidang Tahunan MPR terakhir untuk MPR Periode 2014 – 2019 dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2019 lalu.

Untuk rekomendasi melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, Pimpinan MPR telah mendorong pemerintah untuk memasukkan dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai ke tingkat perguruan tinggi. Dalam periode ini pula, atas desakan Pimpinan MPR, pemerintah telah membentuk suatu badan khusus bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018.



Terhadap rekomendasi untuk melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara, MPR periode 2014 – 2019 telah melakukan kegiatan dengar pendapat dengan masyarakat, serta pengkajian dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR. Kesimpulannya, perlu kajian lebih mendalam lagi berkenaan dengan substansi dan bentuk hukumnya, termasuk membangun konsensus politik yang memungkinkan ditetapkannya dalam Ketetapan MPR.

Dengan demikian, secara substansial, MPR masa jabatan 2014-2019 telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014.

Selain menindaklanjuti rekomendasi MPR masa jabatan 2009 – 2014, MPR periode 2014

– 2019 juga melanjutkan agenda dan program kerja memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai mandat UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Program itu berjalan baik. Seluruh anggota MPR telah melaksanakan sosialisasi Empat Pilar kepada seluruh elemen masyarakat di seluruh Indonesia. Melalui berbagai kegiatan yang terprogram secara baik, Badan Sosialisasi tanpa mengenal lelah melaksanakan sosialisasi Empat Pilar MPR dengan berbagai metode, seperti training of trainers, outbound Empat Pilar bagi mahasiswa, bela negara melalui kemah Empat Pilar, sosialisasi untuk memenuhi undangan, dan lain sebagainya.

Sampai dengan September 2019, kinerja MPR dalam melaksanakan mandat UU MD3 sungguh sangat menggembirakan. Dari survei yang dilakukan MPR bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi menunjukkan: tingkat keterpaparan masyarakat oleh kegiatan sosialisasi Empat Pilar mencapai 32,8% penduduk Indonesia atau telah mencapai sekitar 87 juta orang; pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara mencapai angka 99,8%; pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi mencapai 97,8%. Lebih lanjut mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia, 99,1% warga masyarakat mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia, dan bahkan menyatakan siap dan bersedia membela negara dari berbagai ancaman; dan yang menggembirakan lagi, mengenai Bhinneka Tunggal Ika, sebanyak 99,8% warga masyarakat Indonesia berpendapat bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menghormati sesama warga bangsa walaupun berbeda suku, agama, dan keyakinan.

Itulah sekilas agenda dan program kerja selama lima tahun MPR periode 2014 – 2019. Agenda lainnya, antara lain: Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, peringatan Hari Konstitusi setiap 18 Agustus, peringatan Hari Lahir MPR setiap 29 Agustus, melakukan pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya. □

BSC



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**Jazilul Fawaid** Wakil Ketua MPR RI

## Kerja MPR Harus Berdampak Baik bagi Rakyat

**P**ADA awal 2020, pimpinan dan anggota MPR periode 2019 – 2024 mulai efektif menjalankan program kerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selama lima tahun ke depan. Setelah melaksanakan agenda besar, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019 pada 20 Oktober 2019, Pimpinan MPR periode 2019-2024 langsung tancap gas. Hampir tanpa jeda, Pimpinan MPR langsung melakukan silaturahmi kebangsaan ke berbagai elemen masyarakat untuk menyerap aspirasi terkait rekomendasi MPR Periode 2014 – 2019, khususnya untuk mengkaji lebih mendalam soal reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN.

Untuk mengetahui lebih jauh program kerja MPR lima tahun ke depan, wartawan Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid. Berikut petikan wawancara dengan politisi PKB ini.

**Apa yang menjadi prioritas utama program kerja MPR dalam lima tahun ke depan?**

Pertama-tama saya sampaikan memasuki tahun 2020 ini menjadi semangat baru buat bangsa Indonesia, mudah-mudahan ke depan semua masalah bangsa bisa diselesaikan dan Indonesia bisa mencapai kemajuan seperti yang ditargetkan pemerintah. Dan, khusus MPR yang memiliki tugas menjaga Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI

Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) ini semakin kokoh di tengah permasalahan bangsa, baik nasional maupun internasional.

Di awal tahun 2020 ini muncul permasalahan nasional dan internasional, seperti bencana alam yang sangat ekstrim, seperti banjir, tanah longsor, dan lainnya. Juga permasalahan internasional, antara lain memanasnya kawasan Teluk yang harus diprediksi, karena akan berdampak kepada perekonomian dalam negeri, seperti kenaikan harga minyak bumi atau dampak negatif lainnya.

Saya harap Indonesia, melalui pemerintah bisa memainkan perannya dan meminimalisir dampak-dampak negatifnya. MPR secara kelembagaan bersama pemerintah bisa berperan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Program MPR ke depan, prioritasnya masih membahas dan mengkaji amandemen UUD NRI Tahun 1945 sesuai rekomendasi MPR periode lalu, periode 2014-2019. Yang lainnya adalah MPR mesti memiliki peran diplomasi dengan negara-negara lain sehingga MPR bisa menjadi bagian dari penguatan hubungan internasional.

**Bagaimana dengan program sosialisasi? Tetap berlanjut? Apakah ada inovasi metode sosialisasi?**

Sosialisasi Empat Pilar MPR sebagai bentuk pelaksanaan perintah UU MD3 ke depan masih sangat diperlukan dan menjadi

program MPR. Apalagi di era saat ini di mana tantangan bangsa, baik dari dalam dan luar, sangat tinggi dan makin kompleks. Sejak MPR periode 2019-2024 dilantik sampai saat ini kami Pimpinan MPR telah melakukan sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat. Di lapangan, saya melihat masyarakat memang sangat perlu memahami nilai-nilai luhur bangsanya, yakni Empat Pilar.

Soal inovasi-inovasi, pola-pola atau metode-metode sosialisasi, perlu ada peningkatan dan pembaruan. Sosialisasi mesti mengena dan disesuaikan dengan elemen masyarakat yang sangat beragam sebagai target sosialisasi. Misalnya, sosialisasi untuk para pelajar SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi. Juga sosialisasi dengan target elemen masyarakat profesional, birokrasi, masyarakat umum, nelayan, petani, buruh. Tujuannya agar mereka memahami apa yang disampaikan, terutama generasi muda.

Sosialisasi kepada generasi muda bangsa penekanannya terletak pada dua sisi, yaitu agama dan Negara. Dua sisi ini yang tak terpisahkan ini akan membentengi generasi muda kita dari pemahaman-pemahaman radikal. Selain itu, sosialisasi juga diharapkan akan membentengi generasi muda dari bahaya narkoba, seks bebas, kriminalitas, itulah sebabnya di situ ada penekanan agama. Namun, sekali lagi disampaikan dengan gaya bahasa yang dipahami generasi muda, tidak kaku dan tidak membosankan.



Intinya, ke depan, pimpinan dan anggota MPR mesti mampu juga memberikan sinyal yang kuat terkait pemahaman Empat Pilar kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang sangat beragam tersebut tumbuh ketertarikannya dan memberikan respon yang kuat juga untuk berpartisipasi dalam sosialisasi. Kemudian, setelah memahami serta menjalankan Empat Pilar, kemudian dengan kesadaran sendiri melakukan sosialisasi Empat Pilar di tengah-tengah lingkungannya masing-masing.

Jadi, tujuan akhirnya diharapkan memang seperti itu. MPR hanya sebagai pemicu agar masyarakat tergerak kesadarannya secara pribadi mencari informasi tentang Empat Pilar, lalu memahami, menjalankan, dan menularkannya kepada lingkungan sekitar.

Satu lagi terkait sosialisasi. Mesti dibangun atau terbangun sinergitas antara MPR dan lembaga lain, seperti BPIP, lembaga-lembaga negara lain, kementerian-kementerian untuk melakukan Sosialisasi Empat Pilar. Sebagai contoh kerjasama dengan Kementerian Pendidikan agar Pancasila masuk kurikulum pendidikan nasional dan lainnya. Sebab, memasyarakatkan Empat Pilar sejatinya adalah tanggung jawab bersama.

Keterlibatan lembaga-lembaga negara dan kementerian dalam penguatan Empat Pilar sangat penting, agar jangan sampai lembaga-lembaga negara dan kementerian disusupi aliran-aliran yang tidak sesuai dengan Empat Pilar. Mulai tahun 2020 ini dan ke depannya, saya sangat berharap lembaga-lembaga negara ikut concern pada penguatan Empat Pilar, entah bentuknya seperti apa nanti, kita ramu bersama-sama.

**Bagaimana dengan program pengkajian? Apakah akan memperdalam dan menyerap aspirasi masyarakat soal amendemen UUD untuk menghadirkan pokok-pokok haluan negara? Bagaimana konkretnya?**

Amandemen UUD merupakan tuntutan perkembangan zaman, sebab sejak amendemen terakhir pada 2002 tidak pernah muncul pemikiran untuk melakukan amendemen kembali. Wacana ini menguat di tahun 2019 yang menjadikan amendemen sebagai sebuah kebutuhan. MPR periode lalu, 2014-2019, menangkap itu dan pada akhir masa jabatannya di 2019 mengeluarkan rekomendasi kepada MPR periode 2019-2024 tentang amendemen terbatas soal GBHN.

Saat rekomendasi tentang amendemen terbatas soal GBHN ini kami terima, tentu kami bahas dan dikaji di MPR, sebab MPR memiliki perangkat terkait pengkajian. Tapi,

karena MPR adalah lembaga musyawarah dan mufakat maka untuk soal amendemen harus mengikutserakan masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia diminta masukannya, apakah mereka butuh amendemen, butuh GBHN atau tidak, dan apa keinginan rakyat untuk Indonesia ke depan.

Untuk itu, kami Pimpinan MPR melakukan kegiatan serap aspirasi dengan melakukan silaturahmi, menyambangi berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, seperti kepada tokoh-tokoh bangsa, para pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, hingga ke pimpinan media massa. Kepada elemen-elemen masyarakat tersebut, kami sampaikan soal wacana amendemen, dan kami tentunya mendengar masukan, aspirasi mereka.

Aspirasi-aspirasi dan masukan-masukan masyarakat Indonesia tersebut, nantinya, akan kami bawa ke MPR untuk kami lakukan kajian secara mendalam. Nanti setelah melalui berbagai prosedur di MPR maka akan muncul apakah amendemen dan GBHN itu dibutuhkan rakyat dan negara Indonesia atau tidak. Pada intinya, apakah akan ada amendemen atau tidak, semuanya kembali untuk kesejahteraan rakyat seluruhnya.

**Bagaimana dengan program kerja MPR terkait dengan pelaksanaan rekomendasi MPR periode sebelumnya 2014 - 2019? Misalnya soal penguatan kewenangan DPD, penguatan kewenangan kekuasaan kehakiman?**

Hal tersebut juga tergantung hasil kajian dari masukan aspirasi masyarakat Indonesia, apakah amendemen menyentuh juga hal-hal tersebut. Jika rakyat menghendaki adanya penguatan tersebut maka akan menjadi agenda untuk dibahas.

**Apakah soal amendemen UUD masuk dalam program kerja MPR lima tahun ke depan? Batas waktu tiga tahun apakah akan melakukan atau tidak amendemen UUD?**

Saat ini ada proses pematangan terkait wacana amendemen UUD, yakni melalui masukan aspirasi dari masyarakat, dan sampai saat ini proses tersebut masih berjalan. Soal apakah ada batas waktu proses penerimaan masukan dari masyarakat, saya katakan tidak ada batas waktu. Jika keluar hasil kajian dan Pimpinan MPR bersepakat soal amendemen, di tahun ini bisa mulai dibentuk Panitia Kerja Amendemen atau Panitia Adhoc terkait amendemen. Untuk itulah dilihat dahulu hasil kajian di MPR yang mengolah masukan-masukan dari berbagai

elemen masyarakat Indonesia. Baru setelah itu Pimpinan MPR mengambil langkah melalui pembentukan Panitia Kerja.

**Ada keinginan MPR periode ini meninggalkan legacy amendemen UUD, apa pendapat Bapak?**

Legacy tentu yang baik-baik. Sesuatu yang baik untuk rakyat dan bangsa tentu saja menjadi harapan kami. Kami berharap dapat bekerja sesuai amanah yang dibebankan kepada kami sebagai Pimpinan MPR, dan kami berupaya agar kerja kami bisa berdampak baik secara luas bagi rakyat Indonesia, serta memberikan legacy yang bermanfaat untuk rakyat dan negara.

Intinya, kita semua berupaya dengan



amandemen ataupun tidak harus menjadi jalan bagi percepatan kemakmuran Indonesia, walaupun Fraksi PKB mempertimbangkan untuk amendemen. Kalau, rakyat Indonesia menginginkan adanya amendemen dan amendemen tersebut sebuah jalan mempercepat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat maka itulah legacy kami.

Maka, yang ditekankan adalah perubahan tersebut mesti menjadikan Indonesia lebih baik. Buat apa ada perubahan tapi tidak mengubah keadaan Indonesia menjadi lebih baik. Jadi, bagi Pimpinan MPR, jika ada amendemen, itu adalah atas kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bukan kehendak dan kepentingan golongan tertentu. □

**Pertemuan dengan Partai Nasdem**

**Pimpinan MPR  
Bahas Amandemen Terbatas UUD**



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Perubahan terbatas UUD NRI Tahun 1945 bukanlah semata-mata perhitungan matematis sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, tetapi memerlukan konsensus politik seluruh kekuatan politik.

**K**ETUA MPR RI Bambang Soesatyo bersama para Wakil Ketua MPR RI lainnya bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan jajaran pengurus pusat Partai Nasdem. Selain untuk mempererat ikatan kebangsaan antara lembaga MPR RI dengan partai politik, silaturahmi ini juga untuk membahas agenda MPR RI ke depan, khususnya terkait perubahan terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI Tahun 1945) untuk menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara.

“Sesuai hasil Kongres ke-2 Partai Nasdem beberapa waktu lalu, Partai Nasdem memiliki perhatian khusus terkait wacana amandemen UUD NRI Tahun 1945. Partai Nasdem, sebagaimana juga MPR RI, sepakat untuk sama-sama mendengarkan masukan rakyat terkait perubahan terbatas UUD NRI Tahun 1945 tersebut,” ujar Bamsoet saat memimpin rombongan pimpinan MPR RI bersilaturahmi ke kantor

DPP Partai Nasdem, di Jakarta, Rabu (13/11/19).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Lestari Moerdijat (F-Nasdem), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Arsul Sani (F-PPP). Sedangkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh didampingi Ketua DPP Charles Meikyansah, Willy Aditya, Hermawi Taslim, Suyoto, dan Zulfan Lindan.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menuturkan, pandangan dan dukungan Surya Paloh sebagai salah satu senior dalam perpolitikan Indonesia dengan jam terbang yang tinggi, sangat diperlukan untuk mempermudah kinerja MPR RI dalam perubahan terbatas UUD NRI 1945. Sehingga bisa terjadi konsensus antarberbagai elemen bangsa, khususnya dari partai politik, yang merupakan tulang punggung demokrasi.

“Perubahan terbatas UUD NRI Tahun 1945 bukanlah semata-mata perhitungan matematis sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 UUD



NRI Tahun 1945, tetapi memerlukan konsensus politik seluruh kekuatan politik. Tidak boleh ada voting dalam urusan hukum dasar ini. Dan, yang jauh lebih penting adalah seluruh rakyat Indonesia memang mem-

butuhkannya,” tutur Bamsuet.

“Sebagai bangsa yang memegang teguh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana sila pertama Pancasila, perkumpulan organisasi sosial keagamaan di Indonesia

memiliki kekuatan sosial yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, MPR RI menilai, konsensus dalam perubahan terbatas UUD NRI Tahun 1945 juga perlu melibatkan para pemuka agama. Sehingga hasil perubahan tersebut selain memiliki kekuatan politik, juga memiliki kekuatan sosial keagamaan,” pungkas Bamsuet.

Dalam kesempatan tersebut, Surya Paloh menaruh harapan sekaligus keyakinan, di bawah kepemimpinan Bambang Soesatyo, MPR dapat melahirkan negarawan-negarawan baru. MPR diharapkan dapat menjaga marwah sebagai lembaga perekat bangsa, dengan mengoptimalkan peran di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. □

BSC

Silaturahmi ke DPP PAN

# Tetap Dalam Posisi Mendorong Amandemen Terbatas

Pimpinan MPR sambangi Pimpinan DPP PAN terkait amandemen terbatas dan pentingnya munculnya GBHN dalam konstitusi Indonesia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**A**MANDEMEN terbatas UUD NRI Tahun 1945 untuk memunculkan kembali Pokok Pokok Haluan Negara model GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) sudah menjadi ruang diskusi yang panjang di tengah masyarakat. Terjadi pro dan kontra seiring dengan pembahasan dan kajian mendalam yang dilakukan oleh MPR periode 2014-2019.

Hasil kajian lengkap tentang usulan amandemen terbatas tersebut kemudian menjadi sebuah keputusan dikeluarkan oleh

MPR periode 2014-2019 dalam bentuk rekomendasi yang diserahkan kepada MPR periode 2019-2024. Pimpinan MPR periode 2019-2024 pun bekerja cepat, pasca dilantik Oktober 2019 lalu, langsung membahas tentang rekomendasi MPR periode 2014-2019 tentang amandemen terbatas dan perlunya arah pembangunan nasional model GBHN.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsuet) mengungkapkan bahwa pem-

bahasan dan keputusan soal perlu tidaknya amandemen terbatas tersebut sangatlah penting. “MPR sangat hati-hati dalam soal ini. Kita tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan, sebab kami tahu betul dampaknya jika sampai salah mengambil keputusan,” katanya, usai bertemu Pimpinan DPP PAN, di Jakarta, Selasa (12/11/2019). Turut hadir para Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, Lestari Moerdijat, dan Syarifuddin





Hasan.

Dalam konteks kehati-hatian itulah, menurut Bamsuet, Pimpinan MPR mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu sebelum mengambil keputusan. MPR perlu meminta masukan dari berbagai elemen masyarakat Indonesia, mulai dari para pimpinan partai politik dan tokoh-tokoh masyarakat, organi-

sasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan, seperti Ketua Muhammadiyah, PBNU, Wali Gereja dan lainnya.

Maka digagaslah kegiatan ‘Silaturahmi Kebangsaan’ dengan agenda menyambangi para pimpinan parpol dan tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan diskusi, mendengarkan masukan-masukan seputar

amandemen terbatas untuk memunculkan GBHN.

“Silaturahmi Kebangsaan ini muncul dan sudah kami gelorakan sejak sebelum pelantikan Presiden RI beberapa waktu lalu. Agenda tersebut adalah kerja-kerja politik yang dilakukan Pimpinan MPR dalam rangka menjangir aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat atas kebutuhan konstitusi bangsa Indonesia,” terangnya.

Hasilnya, kata Bamsuet, dalam silaturahmi pertama dengan Pimpinan DPP PAN terkait amandemen terbatas, PAN secara tegas menyatakan tetap dalam posisi untuk mendorong dilakukannya amandemen terbatas, dan perlunya dihadirkan kembali Pokok Pokok Haluan Negara model GBHN.

“Tentunya nanti dalam agenda silaturahmi selanjutnya akan muncul masukan dan pendapat lain. Intinya, MPR membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kepada kami, kira-kira arah konstitusi negara kita mau dibawa kemana ke depan,” ujarnya. □



DER

Silaturahmi ke DPP PKS

# Pimpinan MPR Serap Aspirasi Amandemen UUD NRI Tahun 1945

PKS menegaskan, amandemen UUD NRI Tahun 1945 harus didasarkan pada aspirasi dan kehendak rakyat Indonesia bukan didasarkan pada kepentingan elit atau kelompok tertentu saja.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**D**ALAM rangkaian silaturahmi kebangsaan ke berbagai elemen masyarakat, Pimpinan MPR berkunjung ke DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jl. Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2019). Ketua MPR Bambang Soesatyo memimpin rombongan MPR dan diterima Presiden PKS Sohibul Iman dan jajaran DPP PKS.

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Jazilul Fawaid (F-PKB), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), dan Arsul Sani (F-PPP). Sedangkan jajaran pimpinan DPP PKS yang hadir, antara lain Presiden PKS Sohibul Iman, Sekretaris Jenderal Mustafa Kamal, Sekretaris Majelis Syuro Untung Wahono, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Suharna Surapranata, Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Almuzammil Yusuf, dan Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring.

Usai pertemuan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, wacana perubahan masa kepemimpinan Presiden - Wakil Presiden dari 2 periode menjadi 3 periode dengan masa jabatan 5 tahun/periode, ataupun wacana perpanjangan masa perodesasi kepemimpinan menjadi cukup 1 periode dengan masa jabatan 7 tahun, bukanlah bersumber dari kajian internal MPR

RI. Melainkan disampaikan publik sebagai respon atas masifnya pemberitaan MPR RI yang akan melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945.

“MPR RI tak bisa membendung respon masyarakat yang memberikan banyak usulan terkait amandemen UUD NRI Tahun 1945. Waktu, persiapan, dan kajian juga masih sangat panjang. Biarkan wacana itu berkembang sebagai bagian dari dialektika bangsa. Jikapun ada perubahan masa kepemimpinan presiden - wakil presiden, baik dari perodesasi maupun masa jabatan, maupun berbagai perubahan lainnya dalam UUD NRI Tahun 1945, itu bukanlah untuk pemerintah saat ini. Melainkan untuk yang akan datang,” ujar Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, silaturahmi kebangsaan yang dilakukan MPR RI kepada pengurus partai politik dilakukan, selain untuk bertukar gagasan, juga sebagai langkah memperkuat kemitraan MPR RI dengan partai politik. Sebelumnya, pimpinan MPR RI sudah berkunjung ke PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, Demokrat, dan PAN.

“Diskusi yang sangat produktif dengan PKS menghasilkan banyak pemikiran segar dan menyegarkan. Antara lain, usulan penegasan menjadikan MPR RI sebagai

lembaga legislatif yang selalu mengedepankan musyawarah dibanding voting dalam setiap pengambilan keputusan. Sehingga perlunya dilakukan amandemen guna mengubah Pasal 2 Ayat 3 UUD NRI 1945. Usulan PKS untuk menghadirkan lembaga pemberantasan korupsi yang permanen melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945 juga merupakan sebuah wacana menarik yang perlu disimak,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini memaparkan, saat ini setidaknya ada enam usulan pokok yang berkembang di masyarakat seputar amandemen UUD NRI 1945. Pertama, perubahan terbatas untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara. Kedua, kembali ke UUD 1945 yang asli, setelah itu baru kemudian melakukan perubahan melalui adendum.

“Ketiga, kembali ke UUD sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Keempat, penyempurnaan UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen keempat. Kelima, perubahan UUD NRI Tahun 1945 secara menyeluruh. Dan keenam, tidak perlu melakukan amandemen. Semua usulan tersebut akan dilaborasi lebih lanjut oleh MPR RI, khususnya melalui Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI,” papar Bamsoet.



Terkait wacana amandemen UUD NRI 1945, PKS menegaskan, keinginan amandemen UUD NRI Tahun 1945 harus didasarkan pada aspirasi dan kehendak rakyat Indonesia. Bukan didasarkan pada kepentingan elit atau kelompok tertentu saja.

“Wacana amandemen UUD juga harus melibatkan ahli-ahli di bidangnya dan benar-benar lahir dari kehendak dan keinginan rakyat. Oleh karena itu, PKS akan sangat mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi dan kehendak rakyat Indonesia dalam mendukung atau menolak amandemen

UUD NRI Tahun 1945,” kata Presiden PKB Sohibul Iman.

Jika aspirasi dan kehendak rakyat menginginkan amandemen UUD NRI Tahun 1945, lanjut Sohibul, maka PKS memperjuangkan dua hal dan menolak dua hal. Dua hal yang diusulkan dan diperjuangkan dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah PKS mendorong dibentuknya lembaga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat permanen dalam konstitusi. Bukan lembaga ad hoc atau sementara yang selama ini menjadi per-

debatan elit.

“Kedua, PKS mendorong perubahan pasal 2 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 tentang MPR yang berbunyi ‘segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak’. “Menurut kami putusan dengan suara terbanyak ini harus diganti dengan musyawarah mufakat yang menjadi semangat nilai-nilai Pancasila. Jika tidak terpenuhi mufakat baru kemudian diputuskan dalam suara terbanyak,” jelas Sohibul.

Sedangkan dua hal yang ditolak PKS dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah, PKS menolak wacana perpanjangan kekuasaan presiden dan wakil presiden tiga periode. “PKS berkomitmen untuk menjaga semangat reformasi dan demokrasi dengan membatasi kekuasaan, bukan memperbesar kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan,” terang Sohibul.

Kedua, PKS menolak wacana pemilihan presiden dan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan tetap menginginkan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat Indonesia. “Pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR adalah langkah mundur demokrasi dan menghilangkan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya,” imbuh Sohibul. □

BSC

Bertemu PP Muhammadiyah

# Muhammadiyah Setuju Amandemen Terbatas



**K**ETUA MPR Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, dan Arsul Sani, pada 16 Desember 2019 melakukan kunjungan ke jajaran Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, di Kantor Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta. Kedatangan pimpinan MPR ini disambut langsung oleh jajaran pengurus organisasi yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan itu. “Selamat datang di Kantor Pusat Muhammadiyah”, ujar Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir. “Suatu kehormatan bagi Muhammadiyah bisa bertemu dengan pimpinan MPR”, tambah pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, itu.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang Soesatyo mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh jajaran pengurus Muhammadiyah yang sangat terbuka. Dikatakan, kedatangan pimpinan MPR untuk melakukan silaturahmi kebangsaan. Di mana silaturahmi ini, menurut pria yang akrab dipanggil Bamsuet, juga telah dilakukan ke PBNU, PHDI, Permabudhi, serta berbagai partai politik. “Sejak dilantik kami melakukan silaturahmi ke berbagai kelompok masyarakat dan partai politik untuk menyerap

aspirasi terkait konstitusi”, ujarnya.

Bamsuet mengatakan, apakah UUD NRI Tahun 1945 saat ini dirasakan oleh masyarakat masih ‘up to date’ atau masih bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman, sehingga tak perlu dilakukan perubahan. Atau ada hal-hal yang lain sehingga konstitusi ini perlu dilakukan penyempurnaan lewat amandemen. Terkait itulah membuat MPR melakukan penyerapan dan meminta

masukan ke berbagai kelompok masyarakat dan partai politik.

Melakukan serap aspirasi dan keinginan untuk melakukan amandemen, menurut Bamsuet, karena hal itu merupakan Rekomendasi MPR Periode 2014-2019. Salah satu rekomendasi itu adalah tentang pokok-pokok haluan negara. “Rekomendasi yang ingin menghidupkan kembali haluan negara ala GBHN sebagai pedoman pembangunan”,





tuturnya.

Mantan aktivis FKPPi itu mengakui, selama MPR melakukan serap aspirasi, wacana yang muncul terkait amandemen berkembang tidak hanya soal menghidupkan kembali haluan Negara, namun juga pada masalah-masalah yang lain, seperti periode jabatan Presiden hingga 3 periode, hingga soal Pemilihan Presiden sebaiknya dikembalikan ke MPR. Menanggapi melebarnya keinginan tersebut, Bamsuet menilai sebagai hal yang wajar. “Pendapat yang demikian sah-sah saja”, ungkapnya. Semua pendapat dihargai. Dia mengakui, tantangan bangsa ini ke depan semakin berat sehingga masalah-masalah yang demikian perlu dipikirkan bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Haedar Nashir mengatakan, terkait isu-isu kebangsaan, Muhammadiyah mempunyai pandangan bahwa bangsa Indonesia dibangun secara berkesinambungan dengan waktu yang panjang. Setelah Orde Lama, Orde Baru, selanjutnya masa reformasi. Masa reformasi, kata Haedar, sebagai koreksi dari masa-masa sebelumnya. Salah satu buah dari reformasi, menurut Haedar Nashir, adalah Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. “Untuk itulah Pemilihan Presiden langsung oleh rakyat harus dipertahankan”, ujarnya seraya memberi alasan, Pemilihan Presiden langsung merupakan tonggak pertama reformasi.



Terkait amandemen, Haedar mengatakan, harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendasar. Dia setuju amandemen terbatas untuk menghidupkan kembali GBHN. Dia menyebut GBHN sebagai wadah untuk mengelaborasi tujuan bangsa, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. “Presiden harus punya pedoman dalam pembangunan”, tuturnya. “Visi dan misi Presiden tak boleh lepas dari GBHN”, tambahnya. Untuk itulah, dia kembali menegaskan, Muhammadiyah setuju amandemen terbatas untuk menghidupkan kembali haluan negara.

Sedangkan masalah masa jabatan Presiden, Haedar Nashir menegaskan, cukup

dua periode. Baginya tak boleh ada kekuasaan yang tidak terbatas.

Dalam silaturahmi yang diliput berbagai media, Bamsuet menerima tiga buku terbitan Muhammadiyah yang berisi mengenai masalah kebangsaan dan keummatan. Dengan buku-buku tersebut, pikiran Muhammadiyah tentang masalah-masalah yang disampaikan oleh MPR bisa digali. Bamsuet sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Haedar Nashir bahwa untuk mengupas masalah GBHN perlu dilakukan kajian yang mendalam. “Amandemen juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat”, tegasnya. □

AWG



## Kemenangan yang Mempersatukan

Nurani kebangsaan mendorong Joko Widodo dan kawan-kawan dalam Koalisi Indonesia Maju memilih model penyelesaian politik yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Inilah catatan terpenting bagi warga bangsa selama mengarungi 2019, tahun politik itu.

**D**ALAM hitungan hari, tahun segera berganti, 2019 berakhir, untuk kemudian bersama menyongsong tahun 2020. Ada sejumlah catatan tentang dinamika global maupun nasional yang tidak hanya akan menjadi kenangan, melainkan juga menjadi sisa masalah yang masih harus dituntaskan di tahun mendatang. Dunia masih harus menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat perang dagang. Sedangkan di dalam negeri, pemerintah dan masyarakat yang peduli keutuhan NKRI masih harus bekerja merawat persatuan dan kesatuan dalam naungan Pancasila dan UUD 1945.

Tahun 2020 pun pasti dinamis. Beberapa pemicunya sudah bisa diprediksi. Awal tahun mendatang, dunia akan heboh saat menyimak proses lanjutan pemakzulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald

Trump. Di dalam negeri, ruang publik juga akan dinamis oleh persiapan Pilkada serentak yang dijadwalkan pada pekan ketiga September 2020. Pasti dinamis karena Pilkada itu diselenggarakan pada 270 daerah pemilihan. Rinciannya, sembilan (9) provinsi memilih gubernur, 224 kabupaten memilih bupati dan 37 kota memilih walikota.

Kendati harus membawa beragam persoalan di tahun baru nanti, Indonesia layak lebih optimistis memasuki tahun 2020. Sebab, modal dasar untuk mewujudkan stabilitas nasional dan ketertiban umum, yakni persatuan dan kesatuan semua elemen bangsa, telah dimulai dan terus berproses. Kecenderungannya pun positif. Memang, di beberapa tempat masih saja muncul kasus-kasus yang merefleksikan terganggunya persatuan dan kesatuan itu. Namun, insiden-insiden bernuansa diskriminasi itu diharapkan tidak menimbulkan gelisah berlebihan.



FOTO-FOTO : ISTIMEWA

Sebab, dari hari ke hari, arus perlawanan masyarakat terhadap perilaku seperti itu semakin kuat. Arus kuat itu bisa diamati di banyak

forum, termasuk media sosial. Perubahan zaman, yang juga ikut mengubah perilaku hidup Generasi Milenial dan Generasi Z, pada gilirannya akan menghadirkan peradaban yang mengutamakan harmoni karena tereliminasi banyak sekat pemisah. Sehingga, diyakini bahwa di kemudian hari, perilaku diskriminatif tidak akan mendapatkan tempat di mana pun, termasuk di negara ini. Mereka yang diskriminatif akan terkucil.

Gejala disharmoni atau masyarakat yang terpolarisasi sudah terlihat dan dirasakan selama kurang lebih satu dekade terakhir. Gejala itu kemudian semakin menguat sejak sebelum dan sepanjang tahun politik 2019. Sumber masalahnya adalah ketidakdewasaan sebagian masyarakat dalam menyikapi perbedaan. Sejumlah eksek

pun bermunculan di berbagai tempat. Menyikapi gejala itu, negara dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang peduli, termasuk para tokoh agama, terus berupaya merekat persatuan dan kesatuan. Paling signifikan adalah langkah atau model penyelesaian masalah yang dipilih Presiden Joko Widodo. Tentu saja dia tidak sendiri. Dia butuh dukungan solid dari teman-temannya, para elit partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju yang mendukungnya pada ajang pemilihan presiden tahun 2019. Tak hanya menguatkan nurani kebangsaan, tetapi juga mendorong mereka mendengar suara hati untuk bagaimana menyikapi fakta tentang masyarakat yang nyaris terberai-berai karena alasan perbedaan itu.

**Bambang Soesatyo**  
Ketua MPR RI



boleh menggoreskan luka baru bagi mereka yang merasa kalah. Menjadi tidak elok pula jika pemenang bersikukuh menerapkan prinsip *the winner takes it all*. Kemenangan itu haruslah menjadi solusi, pun menyembuhkan, serta menjadi sumber kekuatan yang mempersatukan dan merawat keberagaman. Menyatukan kembali warga bangsa yang terpolarisasi menjadi yang paling utama. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat harus diupayakan dengan tulus dan penuh kesungguhan.

### **Tulus dan Kesungguhan**

Sebagaimana dicatat bersama, upaya mengakhiri polarisasi masyarakat tidak berhenti pada pertemuan Jokowi dengan sang rival, Prabowo Subianto, di Stasiun Lebak Bulus Jakarta pada pekan kedua Juli 2019. Tulus dan kesungguhan Jokowi berlanjut saat dia menggodok formasi kabinet. Kejutan dan juga sangat menggembirakan karena Prabowo bersedia masuk dalam Kabinet Indonesia Kerja. Rivalitas keduanya yang begitu sengit di ajang Pilpres 2019 diakhiri dengan cara yang sangat elegan. Demi kepentingan negara dan bangsa yang jauh lebih besar dan strategis, kedua sosok itu mewujudkan kebersamaan dan mengabdikan kepada negara. Memang ada kelompok mencemooh Jokowi, ada pula yang mengejek Prabowo. Respons negatif kepada Jokowi-Prabowo itu karena mereka berpikir sempit dan lebih mengutamakan kepentingan sendiri atau kelompok. Bukan kepentingan bangsa dan negara.

Sedangkan kebersamaan Jokowi-Prabowo dalam pemerintahan sekarang ini lebih mencerminkan niat tulus keduanya untuk mengakhiri polarisasi masyarakat. Keduanya mendorong seluruh elemen bangsa untuk merajut lagi persatuan dan kesatuan demi terwujudnya stabilitas nasional dan ketertiban umum. Mewujudkan dua faktor ini sangat penting, tidak hanya demi kenyamanan semua warga negara, tetapi juga untuk merawat citra bangsa dan negara dalam pergaulan antarbangsa.

Cara Jokowi dan Prabowo menutup rivalitas mereka dalam berpolitik tidak hanya memuat

pesan, tetapi juga mengandung pembelajaran bagi masyarakat, terutama mereka yang awam dalam politik praktis. Keduanya membuktikan bahwa tidak ada yang abadi dalam politik. Tidak ada lawan abadi, pun tak ada pula kawan abadi. Hanya ada kepentingan. Untuk mencapai tujuan, etika yang berlaku adalah taat aturan untuk melakoni persaingan sehat, bukan perilaku politik yang dibungkus sikap bermusuhan. Seperti halnya laga sepak bola, tim pemenang dan tim yang kalah berjabat tangan di akhir pertandingan, berangkuhan, hingga bertukar kaus seragam. Begitu pula dalam berpolitik praktis.

Di permukaan, masyarakat bisa melihat bahwa masih kelompok-kelompok tertentu yang coba mempertahankan dan memelihara polarisasi itu. Jangan terkecoh. Mereka tidak menyuarakan aspirasi masyarakat, tetapi sedang memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Baik kepentingan ekonomi atau kepentingan bisnis, maupun agenda lain demi kepentingan asing.

Pada peringatan Hari Bela Negara tahun ini, Kementerian Pertahanan mengemukakan bahwa Indonesia dewasa ini menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya hingga persoalan pertahanan dan keamanan. "Tantangan dan ancaman yang kompleks tersebut membutuhkan persatuan dari kita semua. Setiap anak negeri jangan pernah mau dipecah belah karena perbedaan sikap politik," kata Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Ada kekuatan asing di balik kelompok-kelompok yang ingin mengubah dasar negara Pancasila. Dan, karena Indonesia kaya akan sumber alam, ada pula kekuatan asing yang ingin menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa agar bisa meruntuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hanya persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa yang bisa mengeliminasi niat-niat jahat itu. Di tahun mendatang, harus ada dorongan kepada seluruh anak bangsa, khususnya Generasi Milenial dan Generasi Z, agar lebih bersemangat merajut persatuan dan kesatuan bangsa. □

Kunjungan TETO

# Taiwan Termasuk Negara Maju

Untuk kesekian kalinya HNW bertemu diplomat atau LSM dari Taiwan. Taiwan sebagai negara yang terbuka dan maju maka hubungan Indonesia-Taiwan perlu ditingkatkan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**AMIS, 21 November 2019, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) kedatangan tamu dari *Taipei Economic and Trade Office* (TETO). Delegasi yang dipimpin John Chen itu diterima oleh HNW di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, lantai 9, Kompleks MPR/DPD/DPD Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut John mengucapkan terima kasih kepada HNW, sebab di tengah kesibukan sebagai politisi dan Wakil Ketua MPR, dia sudi menerima delegasi

TETO yang berjumlah lima orang. “Selamat kepada Bapak yang terpilih kembali menjadi Wakil Ketua MPR. Bapak orang yang sangat populer,” begitu pujian yang diberikan John pada HNW.

Selanjutnya, John mengatakan, negaranya, Taiwan, juga hidup dengan menggunakan nilai-nilai seperti yang terkandung dalam Pancasila. Kehidupan di Taiwan, menurut John, sangat beragam dan menghargai perbedaan. Negara yang bertetangga dengan

Cina itu sangat terbuka terhadap umat Islam. “Ada restoran halal dan tempat ibadah buat umat Muslim”, tuturnya. John berharap, hubungan Indonesia-Taiwan yang selama ini sudah bagus, perlu ditingkatkan. Di Taiwan, jelas John, banyak mahasiswa dan pelajar dari Indonesia menempuh studi di sana. “Saya berharap, pelajar dan mahasiswa dari Indonesia terus bertambah”, ujarnya.

Bagi diplomat Taiwan yang ada di Indonesia, nama HNW bukan suatu yang asing. Mereka sering bertukar pendapat dan minta masukan untuk meningkatkan hubungan kedua negara. Para diplomat atau perwakilan Taiwan di Indonesia, HNW memang diakui sebagai seorang akademisi. Karena itu, lewat TETO, John mengundang HNW untuk memberikan kuliah umum atau stadium general di negara yang juga bertetangga dengan Jepang itu. “Saya berharap hubungan yang sudah baik dengan Indonesia dipertahankan dan terus dijaga”, harap John.

Buat HNW, kedatangan tamu asal Taiwan bukanlah kali pertama. Maka, HNW menyambut dengan tangan terbuka kedatangan delegasi TETO ini. Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor itu menyatakan, sepakat bila pelajar dan mahasiswa dari Indonesia yang belajar di Taiwan lebih banyak lagi. “Saya akui kualitas pendidikan di Taiwan sangat tinggi, selevel dengan negara maju Asia lainnya,” kata HNW. Untuk itu, pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu mendorong agar pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, serta pondok pesantren di Indonesia untuk bisa mendapat beasiswa.

Menanggapi permintaan agar HNW menjadi pembicara utama dalam acara kuliah umum atau stadium general di Taiwan, HNW mengatakan, “insya Allah”. Dia bersyukur bisa mengikuti dan aktif di berbagai forum dunia. Bahkan, berbagai organisasi dunia di mana dia menjadi anggotanya mengakui HNW termasuk salah satu ulama dunia.

Dalam kesempatan itu, HNW menyatakan, sepakat dengan John bila hubungan Taiwan-





Indonesia perlu ditingkatkan. Lewat fraksinya, PKS, di DPR RI, HNW akan mendorong peningkatan hubungan kerjasama itu. Peningkatan hubungan kerjasama ini, bagi HNW perlu diseriisi mengingat Taiwan diakui sebagai negara maju, berkualitas, dan terbuka bagi masyarakat dan bangsa Indo-

nesia. “Kita mendukung peningkatan hubungan ini”, tegasnya.

Kepada John dan delegasi lainnya, HNW menceritakan bahwa kemarin (20 November) dia bersama pimpinan MPR lainnya berkunjung ke kantor Persatuan Umat Budha Indonesia (Permadubhi). Kunjungan itu

dimaksudkan untuk serap aspirasi terkait amandemen UUD NRI Tahun 1945. Amandemen UUD, jelas HNW, merupakan isu yang ada di MPR, karena ada keinginan untuk menghidupkan kembali pokok-pokok haluan negara ala GBHN. GBHN, jelas HNW, merupakan pola pembangunan yang sangat populer pada masa Presiden Soeharto. “Saat reformasi haluan negara ini dihilangkan, namun sekarang ada keinginan untuk menghidupkan kembali. Karena selama ini model pembangunan yang ada berdasarkan pada misi dan visi calon Presiden,” ungkap HNW kepada tamunya.

Mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga hidup di Taiwan, HNW membenarkan hal itu. Dalam sejarah, kata HNW, Presiden Soekarno pernah mengaku terinspirasi dari ajaran San Min Chu I (Tiga Prinsip Rakyat). “San Min Chu I digagas oleh Sun Yat Sen, Bapak modern Tiongkok maupun Taiwan”, ungkap HNW. □

AWG

## Delegasi ICMI

# Harus Ada Percepatan Pembangunan SDM

Menurut Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah persoalan nasionalisme dan pembangunan SDM.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR RI Dr. (HC) Zulkifli Hasan, SE., MM., menerima kunjungan delegasi Ikatan Cendekawan Muslim Indonesia (ICMI). Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua

MPR, Gedung Nusantara III, lantai 9, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/11). Pada pertemuan tersebut delegasi ICMI dipimpin Sekretaris Jenderal ICMI, Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah, IPM.

Kepada Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan, ICMI menyampaikan undangan untuk menjadi pembicara pada acara Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) dan Milad ke-29 ICMI tahun 2019. Silaknas yang diselenggarakan

pada 6-8 Desember 2019 di Universitas Negeri Padang (UNP) Sumatera Barat itu dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri Wakil Presiden KH. Ma'rukh Amin. Tema Silaknas dan Milad ICMI kali ini adalah: "Penguatan Nasionalisme dan Pembangunan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045."

Zulkifli yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar ICMI menyatakan kesediaannya untuk hadir dan menyampaikan pengarahannya. Selain itu, Zulkifli pada saat pertemuan itu, berjanji akan datang lebih awal untuk mengikuti acara dari awal, yaitu pembukaan Silaknas yang dilakukan oleh

Presiden RI.

Menyangkut tema Silaknas, Wakil Ketua MPR mengatakan bahwa tantangan Indonesia saat ini adalah persoalan nasionalisme dan pembangunan SDM. Karena itu sudah waktunya bangsa Indonesia melakukan penguatan nasionalisme. Ini penting, agar bangsa Indonesia yang beragam tidak tercerai berai dan terpecah belah.

"Dulu kita mengenal ada mata pelajaran PMP dan P4, tetapi semua itu kini tidak ada lagi. Maka harus dicarikan jalan keluarnya agar generasi muda kita tidak semakin jauh dari ideologinya sendiri," kata Zulkifli.

Menyangkut Pembangunan SDM, menurut Zulkifli, potensi alam yang dimiliki bangsa Indonesia sangatlah besar. Sehingga banyak bangsa di dunia yang ingin menguasainya. Sayangnya, hingga kini kekayaan bangsa Indonesia itu belum bisa dimaksimalkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, perlu dilakukan percepatan pembangunan SDM agar manusia-manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul. Mampu menjadi pelaku dalam proses pembangunan, bukan hanya menjadi penonton saja.

Pada kesempatan itu, Zulkifli juga menegaskan nikmatnya tinggal di Indonesia. Di Indonesia, menurut politisi Partai Amanat Nasional asal Lampung ini, orang bisa beribadah dengan baik, tanpa merasa takut atau tercekam. Sementara di banyak negara lain, orang tidak bisa menjalankan syariat agamanya dengan leluasa. Ada yang harus sembunyi-sembunyi. Dan ada juga yang tidak bisa menjalankan ibadahnya di tempat ibadah yang baik.

"Di luar negeri banyak masjid yang tutup setelah jam salat. Jadi salat lima waktu itu jadwalnya ada yang sangat pendek. Setelah salat selesai masjidnya tutup. Terlebih lagi pada malam hari, hampir semua masjid dikunci, dan tidak ada orang yang bisa masuk," ungkap Zulkifli Hasan. □

MBO



## Diskusi Pemilihan Kepala Daerah

# Berembus Wacana Mengembalikan Pilkada ke DPRD

Berbiaya mahal dan banyak kepala daerah berurusan dengan KPK menjadi alasan munculnya wacana mengembalikan Pilkada ke DPRD. Mungkinkah itu terjadi?

**A**NGGOTA MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, mengakui, belakangan ini wacana dan pemikiran mengenai pelaksanaan Pilkada dikembalikan ke DPRD kembali menyeruak. "Apalagi terkait Pilkada serentak, tak hanya pada 2020 namun juga 2024", ujar Kamrussamad saat menjadi pembicara dalam 'Diskusi Empat Pilar MPR', di Media Center, Kompleks Parlemen, Jakarta, 22 November 2019.

Dalam diskusi bertema: 'Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Pasal 18 UUD tidak mengharuskan Pilkada Dipilih Langsung)', Kamrussamad mengakui, pelaksanaan Pilkada diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, di mana gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. "Ini diterjemahkan dengan pemilihan langsung", ungkapnya. Terkait dengan cara pemilihan langsung, dia mengajak untuk mengevaluasi

apakah pelaksanaannya sudah berjalan secara substantif, prosedural, dan teknis yang benar. "Bila Pilkada sudah berjalan secara substantif, di mana rakyat memilih secara langsung karena visi dan misi calon kepala daerah, maka hal demikian menarik untuk didiskusikan," papar Kamrussamad.

Namun, dia melihat dari berbagai kasus yang ada, praktik *money politic* masih mendominasi penyelenggaraan Pilkada.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

“Memang ada pengaruh visi dan misi calon kepala daerah, namun *money politic* masih dominan”, ungkapnya. Dia berharap, bila memilih cara demokrasi sebagai sarana untuk mendapat pemimpin, maka masyarakat pemilih perlu ditingkatkan edukasinya.

Pemilu langsung di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang masih belum mapan menjadi salah satu tantangan. “Masyarakat masih dalam kondisi income yang rendah, namun kita menggunakan demokrasi liberal”, tutur Kamrussamad. Demokrasi liberal, menurut Kamrussamad, cocok diterapkan di Negara, seperti Amerika Serikat, karena income perkapita masyarakatnya sudah mencapai US\$ 18.000.

Tak hanya itu yang menjadi persoalan dalam Pilkada. Pria asal Sulawesi Selatan itu menyebut, kampanye Pilkada yang terlalu panjang juga menjadi salah satu problem. Masalah inilah yang perlu dievaluasi. Lamanya kampanye tentu akan membuat biaya yang dikeluarkan terlalu tinggi. Dia menyebut, anggaran Pilkada serentak tahun

2020 mencapai kisaran Rp 90 triliun. “Bayangkan kalau uang sebanyak itu digunakan untuk membangun sekolah, puskesmas, pasar, dan kebutuhan rakyat lainnya”, ucapnya. Agar Pilkada tidak memakan biaya yang mahal, menurut Kamrussamad, calon kepala daerah harus mengedepankan transparansi, akuntabel, dan tak ada mahar. “Ini yang kita dorong,” tegasnya.

Terkait adanya keinginan untuk mengembalikannya pelaksanaan Pilkada ke DPRD, mantan aktivis HMI itu menyebut, belum ada usulan langsung dari pemerintah. “Jadi, masih wacana. Kita tunggu sikap resmi pemerintah”, ujarnya.

Anggota MPR dari Kelompok DPD, Otopianus P. Tebai, dalam kesempatan yang sama mengusulkan beberapa isu. “Pembiayaan Pilkada harus dibatasi”, ujarnya. Anggota DPD dari Papua itu memberi batasan berapa anggaran yang mestinya dikeluarkan. Selain masalah biaya, Oto juga menyinggung potensi putera asli daerah

diperhitungkan dalam Pilkada. Kepala daerah terpilih, menurut Oto, dibatasi satu periode dengan masa waktu 8 tahun. “Tak boleh dua periode”, tuturnya. Agar pelaksanaan Pilkada bisa berjalan dengan baik, alumni SMP PGRI Nabire ini menyarankan agar jumlah anggota KPPS ditambah.

Pengamat politik dari Lingkaran Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, sebagai pembicara ketiga dalam diskusi dengan tegas mengatakan, tak setuju bila Pilkada dikembalikan ke DPRD. Mengapa? Menurut Ray Rangkuti, alasannya banyak. Bila biaya Pilkada disebut banyak, dia lalu membandingkan dengan biaya untuk Pilpres dan Pileg yang juga tidak sedikit. Untuk itu mengapa Pilkada saja yang disorot. Kemudian bila dikatakan banyak kepala daerah ditangkap oleh KPK akibat politik biaya tinggi, Ray Rangkuti juga membandingkan banyaknya anggota DPR, DPRD, jaksa, dan hakim yang juga ditangkap oleh KPK.

Menurut Ray, kualitas demokrasi tertinggi adalah bila rakyat terlibat langsung dalam Pemilu. Dia heran di tengah semakin berkembangnya pembangunan infrastruktur dan kemajuan teknologi, justru masyarakat diajak kembali ke Pemilu model lama. “Pemilihan seperti pada masa Yunani kuno dengan sistem diwakilkan”, tuturnya. Dia menegaskan, bila UU Pilkada mau direvisi, yang diperkuat adalah posisi rakyat. Ini penting, sebab bila Pilkada dikembalikan ke DPRD maka akan menguatkan oligarki partai politik. “Agar Pilkada tak berbiaya mahal maka partai politik perlu didisiplinkan dengan cara tidak meminta mahar kepada calon kepala daerah”, tegasnya. □

AWG



Delegasi OIC Youth Indonesia

# HNW Bersedia Jadi Pembicara Kunci

Untuk pertama kalinya Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan organisasi pemuda negara-negara Islam dunia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., menerima delegasi Organizational Islamic Cooperation (OIC) Youth Indonesia. Pertemuan berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (7/11). Pada kesempatan itu delegasi OIC Youth Indonesia dipimpin ketuanya, Syafii Efendi. Ikut serta dalam pertemuan itu, Sekjen OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Rizkita, Wakil Sekjen Nabila Harahap, dan pengurus lainnya.

Dalam kesempatan itu Syafii meminta kesediaan Hidayat Nur Wahid, untuk hadir dan menjadi pembicara kunci pada acara

Indonesia Islamic Young Leader Summit tersebut. Rencananya, acara Indonesia Islamic Young Leader Summit tersebut digelar di Jakarta pada 22-26 November. Menariknya, menurut Syafii, Islamic Young Leader Summit ini untuk pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia.

“Ini pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Rencananya, pertemuan tersebut akan diikuti perwakilan dari 57 negara anggota OKI, serta 1000 undangan dari kalangan milenial perwakilan dari daerah,” jelas Syafii.

Beberapa isu dibahas dalam Indonesia

Islamic Young Leader Summit ini, antara lain terkait isu keumatan, pemuda, kesehatan, politik dan ekonomi. Rencananya, OIC Youth Indonesia akan mengadakan 2 event utama dalam acara Young Leader Summit ini. Yakni, mengenai Model OIC Indonesia, Entrepreneur Muda, dan Ekonomi Syariah. Salah satu bentuk kegiatannya adalah menampilkan produk-produk usaha dari pengusaha muda muslim, industri halal, dan pariwisata halal di Indonesia.

Menanggapi permohonan ketua delegasi OIC Youth Indonesia itu, Hidayat mengapresiasi rencana pertemuan tersebut. Politisi asal Klaten, Jawa Tengah, ini juga menyatakan kesediaannya untuk hadir dan menjadi *keynote speaker* pada 23 November. Selain itu, Hidayat juga akan mendukung agar acara besar tersebut bisa berjalan dengan sukses.

“Organisasi ini memiliki jaringan nasional dan internasional. Karena itu, kegiatan ini harus di support, apalagi kali ini skalanya internasional. Selain itu, materi yang dibahas bisa memberikan kebaikan kepada kemaslahatan umat Islam,” ujar Hidayat Nur Wahid.

Organizational Islamic Cooperation (OIC) Youth merupakan Organisasi pemuda kerjasama Islam atau Pemuda OKI. Yaitu, sebuah institusi payung bagi organisasi pemuda Islam Indonesia yang konsen terhadap isu strategis pemuda dan dunia Islam. Organisasi ini berpusat di Istanbul Turki dengan anggota 57 negara Islam di seluruh dunia.

Saat ini presiden OIC Youth Indonesia dipegang oleh Syafii Efendi. Ia terpilih sebagai Presiden OIC Youth Indonesia untuk periode 2019-2024 dalam Kongres III OIC Youth Indonesia, Maret 2019. Syafii berharap, organisasi yang dipimpinnya mampu membela kepentingan Islam yang damai di seluruh dunia. Juga menjadikannya sebagai sarana generasi muda Indonesia untuk aktif di kancah Internasional. □

MBO





Kunjungan Pejabat Kedubes Australia di Jakarta

# Papua Tetap Menjadi Bagian dari Republik Indonesia

Pemerintah Australia mendukung upaya Indonesia dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Dan, Australia menolak keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

**D**I INDONESIA kehidupan politik dan demokrasi berlangsung sangat dinamis dan beragam. Bukti keberagaman demokrasi di Indonesia itu salah satunya kita dapat menyaksikan keberadaan partai-partai berdasar agama. Partai-partai tersebut, antara lain Partai Damai Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera. Itu artinya, dalam konteks Indonesia, antara agama, khususnya Islam, dengan demokrasi tidak bertentangan. Sebaliknya, sejak dulu partai-partai berbasis agama Islam ataupun non Islam sudah ikut mewarnai praktik demokrasi di Indonesia.



“Karena itu, kalau masih ada pihak yang mengaitkan Islam dengan radikalisme yang ditujukan untuk menghancurkan negara tidaklah tepat,” ungkap Wakil Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., saat menerima kunjungan Minister Konselor Bidang Politik dan Komunikasi Strategis Kedubes Australia di Jakarta, Dr. Dave Peebles, Rabu (27/11/2019). Ikut serta dalam pertemuan tersebut Claire Scott, Political First Secretary; dan Ario Yudhoatmodjo, senior Political Reseacher

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III, lantai 9, Kompleks MPR/DPR/DPD itu, Hidayat selanjutnya menunjuk contoh sejumlah peristiwa terorisme yang memperlihatkan pelakunya tidak mengenakan cadar, tidak memakai celana singkrang, dan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

tidak berjenggot. Dia menunjuk peristiwa penembakan di Masjid Al Noor dan Linwood Islamic Centre di Christchurch, Selandia Baru, dan juga penyerangan di Jl. Thamrin Jakarta, beberapa waktu silam yang ternyata pelakunya mengenakan celana jeans.

Pada kesempatan itu, Dave Peebles berharap, kedua negara meningkatkan kesepahaman, terutama menyangkut berbagai persoalan yang terjadi, baik di Indonesia maupun di Australia. Serta, meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Kepada Wakil Ketua MPR, Dave juga menyampaikan dukungan pemerintah Australia terhadap NKRI. Dan, Australia menolak keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Karena keberadaan OPM terbukti hanya menimbulkan korban dan keresahan di kalangan masyarakat Papua khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Bagi Australia, tegas Dave. Papua dan Indonesia adalah satu kesatuan tak terpisahkan.

Tamu dari Kedutaan Australia di Jakarta ini juga menyinggung perihal rencana amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD NRI Tahun 1945), dan dinamika yang terjadi di seputar rencana amandemen UUD NRI Tahun 1945 tersebut.

Menanggapi harapan tamunya itu, Hidayat Nur Wahid menyatakan, setuju kedua belah pihak perlu meningkatkan kerjasama dan kesepahaman dalam melihat peristiwa-peristiwa yang terkait Australia dan Indonesia. Menyangkut rencana amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945, Hidayat mengatakan, saat ini MPR terus mengumpulkan aspirasi masyarakat.

“Di era kekinian wacana-wacana yang berkembang di luar adalah sesuatu yang wajar. Tetapi, kesemuanya akan dikembalikan kepada anggota MPR, sesuai mekanisme perubahan UUD,” jelas Hidayat.

Menyangkut wacana mengenai penambahan masa kepemimpinan presiden menjadi tiga periode, menurut Hidayat, usulan tersebut sudah ditolak berbagai kalangan. termasuk oleh Presiden Joko Widodo dan Fraksi PKS. “Karena itu, wacana masa kepemimpinan presiden menjadi tiga periode tidak mungkin dilaksanakan,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera ini. □

MBO

Rakernas IPHI

# Kiat Memperpendek Masa Tunggu Ibadah Haji

Di hadapan para peserta Rakernas Ikatan Persaudaran Haji Indonesia (IPHI), Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid memberi solusi terkait panjangnya daftar tunggu ibadah haji dengan cara menggunakan kuota negara lain.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

RATUSAN anggota Ikatan Persaudaran Haji Indonesia (IPHI) dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Rapat Kerja Nasional ke-15 di Jakarta. Acara pembukaan Rakernas IPHI berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPD/DPD Senayan, Jakarta, 30 November 2019. Dan, Rakernas IPHI yang dibuka oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW), antara lain di hadirinya Ketua Umum IPHI Ismed Hasan Putro; Ketua Dewan Penasihat IPHI, Jenderal (Purn) Djoko Santoso; dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

Di hadapan ratusan peserta Rakernas IPHI itu, HNW mengusulkan tiga kiat agar proses jadwal tunggu ibadah haji tak terlalu lama atau terlalu panjang. *Pertama*, mendorong Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk menggelar konferensi tingkat tinggi guna membahas kuota haji. "Dulu penetapan kuota haji dilakukan oleh OKI saat menggelar konferensi di Amman, Jordania, pada tahun 1987", ujar HNW.

Dalam konferensi OKI itu dihitung satu

orang per-seribu penduduk. Menurut HNW, aturan tersebut sudah tidak tepat lagi, sebab perekonomian umat Islam semakin meningkat, serta infrastruktur dan fasilitas di Arab Saudi semakin baik sehingga dia yakin negara kaya minyak itu mampu menampung jemaah haji lebih banyak. "Untuk itulah perlu

digelar KTT OKI untuk membahas kembali masalah kuota haji", ujar pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu.

*Kedua*, banyak negara Islam, baik di dalam kondisi damai ataupun dalam kondisi konflik, peperangan, tidak menggunakan kuota yang ada secara penuh. Sehingga kekosongan





jajah itu bisa digunakan oleh calon jemaah haji dari Indonesia. “Di Suriah yang lagi konflik maka kuota yang tidak dimanfaatkan bisa digunakan oleh calon jemaah haji kita,” papar HNW. Hal demikian, menurut HNW, juga terjadi di beberapa negara Afrika, juga di Thailand dan Filipina.

*Ketiga*, kuota haji yang tidak digunakan oleh jemaah haji yang ada di Thailand dan Filipina bisa digunakan oleh calon jemaah haji Indonesia. “Untuk itu, perlu melakukan pendekatan diplomasi antar anggota ASEAN ataupun diplomasi bilateral”, tuturnya. Jadi, “Kuota yang ada mending digunakan untuk calon jemaah haji dari Indonesia secara sah daripada digunakan oleh pihak lain yang selanjutnya menimbulkan masalah”, tambahnya.

Memangkas jadwal tunggu ibadah haji di Indonesia, menurut Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor itu, sangat penting sebab waktu tunggu hingga 40 tahun. “Bayi

yang baru lahir hari ini baru bisa naik haji 40 tahun kemudian”, ujar HNW mengandaikan.

Dalam Rakernas yang bertema: ‘Meningkatkan Soliditas Ummat dan Kesiapan IPHI Menyongsong Muktamar VII/2020 untuk Indonesia Maju dan Bermartabat,’ HNW menceritakan pengalamannya tinggal di Arab Saudi selama 13 tahun. “Sudah beberapa kali naik haji”, tuturnya. Selama di sana, HNW mengaku pernah membantu relawan haji, serta menolong jemaah haji yang tersesat. “Beribadah haji merupakan hal yang perlu disyukuri”, ujarnya.

HNW menyatakan, dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia, para tokoh penggeraknya adalah mereka yang mempunyai gelar haji, seperti KH. Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asyhari, Haji Oemar Said Cokroaminoto, Haji Agus Salim, Haji Mohammad Natsir, dan banyak yang lainnya. “Haji Oemar Said Cokroaminoto merupakan Guru Bangsa”, ungkapny.

Merekalah yang menghadirkan Indonesia merdeka.

Lebih lanjut, HNW mengatakan, para haji pada masa pergerakan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah sosok-sosok pejuang. Pada 1903, organisasi Jamiatul Khair mengadakan Konferensi Umat Islam, di mana hasil konferensi itu adalah menyatakan keinginan merdeka dari penjajahan bangsa asing. Dari organisasi itu selanjutnya lahir organisasi Sarikat Dagang Islam, kemudian SI, dan organisasi-organisasi Islam lainnya.

Untuk itulah dia mendorong IPHI agar hadir dan merealisasikan cita-citanya untuk Indonesia. “Kita harap IPHI menjadi pionir bagi para jemaahnya untuk membangkitkan Indonesia”, tegasnya. HNW mendorong keinginan organisasi itu untuk bergerak dalam segala bidang, seperti Muhammadiyah, NU, Persis, dan organisasi Islam lainnya. “Tugas IPHI penting buat ummat”, ujarnya.

Ketua Umum IPHI Ismed Hasan Putro dalam kesempatan itu menuturkan, Rakernas IPHI merupakan momentum yang tepat untuk menjadikan IPHI bagian integral dari Indonesia. Kepengurusan organisasi itu, menurut Ismed, tersebar di seluruh Indonesia. Kini organisasi IPHI beranggotakan 10 juta dan 4,8 calon anggota, calon haji. “Kita memiliki Majelis Taklim yang rutin menggelar pengajian”, jelas Ismed.

Organisasi ini, menurut Ismed, juga bercita-cita mengurus masalah pangan, sembako, di mana mereka akan mendirikan semacam took/warung haji. “Bukan untuk memperkaya diri namun untuk kesejahteraan umat”, paparnya. □

AWG



Diskusi Menakar Peluang Amandemen

# MPR Belum Membahas Amandemen UUD NRI Tahun 1945

Soal perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode atau pemilihan presiden oleh MPR tidak pernah dibicarakan di MPR.

**M**AJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) seolah-olah sudah merencanakan dan membahas soal amandemen UUD NRI Tahun 1945. Wakil Ketua Fraksi PPP MPR Syaifulah Tamliha menegaskan, sampai saat ini MPR belum membahas dan membicarakan tentang amandemen UUD NRI Tahun 1945. MPR hanya membahas tentang pokok-pokok haluan negara, apakah pokok-pokok haluan negara itu diatur melalui Ketetapan MPR atau melalui UU. Jika diatur melalui Ketetapan MPR maka perlu dilakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945.

“Baru sebatas itu. Kalau ditanya kapan target amandemen UUD, kita di MPR belum membahas soal amandemen itu sendiri. Kita tidak pernah bicara sampai soal perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, atau pemilihan presiden oleh MPR. Itu tidak pernah dibicarakan di MPR,” kata Syaifulah Tamliha dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Menakar Peluang Amandemen Konstitusi” di Media Center Parlemen Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019). Turut berbicara dalam diskusi itu Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Idris Laena, anggota MPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon, dan pengamat komunikasi politik Uni-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

versitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing. Menurut Syaifulah Tamliha, sulit untuk melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. Dari pengalamannya sebagai pimpinan Fraksi PPP MPR, dalam soal haluan negara saja masih belum ada kesepakatan. Ada tiga fraksi yang menginginkan pokok-pokok haluan negara diatur dalam UU, dan ada tujuh fraksi ditambah satu DPD yang menginginkan dalam bentuk Ketetapan MPR. “Ini baru soal haluan negara atau perencanaan pembangunan nasional. Apalagi soal masa jabatan presiden tiga periode atau presiden

dipilih MPR. Menurut saya amandemen UUD sulit dilakukan, apalagi menyangkut masa jabatan presiden,” ujarnya.

Tak jauh berbeda, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Idris Laena juga mengatakan bahwa sebenarnya wacana tentang amandemen UUD muncul karena perlunya pokok-pokok haluan negara. “Kalau Ketetapan MPR yang menjadi dasar untuk pokok-pokok haluan negara maka konsekuensinya perlu amandemen UUD NRI Tahun 1945. Fraksi Partai Golkar menawarkan kalau hanya untuk pokok-pokok haluan negara lebih baik dalam



bentuk UU saja. UU adalah hukum negara juga karena dibahas pemerintah bersama DPR dan mengikat semua,” katanya.

Idris Laena mengingatkan agar konstitusi jangan terlalu sering diubah. “Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa UUD memang bisa saja diubah. Tapi jangan lupa UUD adalah konstitusi dasar dari negara kita. Semua UU dan turunannya, termasuk peraturan daerah, mengacu pada UUD. Bayangkan kalau UUD sering dilakukan perubahan maka akan menjadi persoalan tersendiri,” ujarnya.

Sementara itu anggota MPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon berpendapat, amandemen UUD perlu didasarkan pada kajian mendalam dari kalangan perguruan tinggi, bukan untuk kepentingan sesaat. Perubahan UUD sangat

dimungkinkan dan Indonesia sudah melakukan beberapa kali perubahan UUD.

“Tapi jangan sampai amandemen UUD malah menimbulkan persoalan baru. Seringkali kita melakukan perubahan sangat tergantung pada situasi tertentu dan dicari yang menguntungkan. Jadi aturan disesuaikan dengan kepentingan sesaat. Ini bisa membahayakan demokrasi kita. Apalagi ada wacana menambah masa jabatan presiden. Ini bukan hanya memundurkan demokrasi, tetapi malah mematikan demokrasi,” tandasnya.

Sementara itu Emrus Sihombing berpendapat, jika dilakukan amandemen UUD agar jangan diserahkan semata-mata kepada MPR. Sebab, pasti ada kepentingan sesuai perspektif partai politik. “Ada kepentingan politik yang akan mewarnai. Setiap partai

politik juga punya perspektif sendiri yang berbeda dengan partai politik lainnya,” jelasnya.

Karena itu Emrus mengusulkan agar dibentuk tim yang terdiri dari para akademisi dan pakar hukum. Tim yang diperoleh dari hasil seleksi ini akan melakukan kajian tentang urgensi amandemen UUD. Konstitusi bukan semata-mata produk MPR melainkan produk bersama dengan mendengarkan pendapat dan masukan publik. “Hasil kajian tim akademisi dan pakar hukum ini lalu dibandingkan dengan apa yang dibuat di MPR. Dengan demikian bisa dilihat apakah ada atau tidak kepentingan partai politik di MPR. Publik juga bisa melihat sejauh mana urgensi dari amandemen ini,” ujarnya. □

**BSC**

## Silaturahmi dengan Pengurus PHDI

# Soal Amandemen, MPR Tunggu Sikap PHDI

Saat berkunjung ke PHDI, MPR sampaikan maksudnya menjaring aspirasi masyarakat terkait amandemen UUD NRI Tahun 1945. MPR menunggu sikap resmi dari umat Hindu.

**K**EDATANGAN Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dan Arsul Sani di Kantor Pusat Parisada Hindu Dharma (PHDI), Jl. Anggrek Neli, Jakarta, 10 Desember 2019, mendapat sambutan istimewa oleh seluruh jajaran Pengurus PHDI. Begitu tiba di kantor PHDI, pimpinan MPR langsung diterima oleh Ketua Umum PHDI Wisnu Bawa Tenaya.

Jazilul Fawaid dalam pertemuan penuh keakraban dan kekeluargaan itu mengatakan, kehadirannya ke organisasi perwakilan umat Hindu itu untuk meminta masukan terkait adanya rencana MPR melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. “Hanya MPR yang bisa mengubah UUD”, ujarnya. Dia mengungkapkan, selepas MPR melakukan amandemen sebanyak 4 kali, selanjutnya lembaga ini belum pernah lagi melakukan hal yang sama.

Selanjutnya, Jazilul menjelaskan, MPR periode 2014-2019 mengeluarkan rekomendasi tentang sistem ketatanegaraan untuk mengikuti perkembangan zaman. “Bila dibutuhkan, ada upaya untuk menghidupkan kembali haluan negara”, ujar pria asal Bawean, Jawa Timur, itu. Haluan negara



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dirasa perlu, karena saat ini pembangunan yang dilakukan oleh kepala daerah hanya berdasarkan visi dan misi masing-masing, sehingga berjalan sendiri-sendiri dan tak terintegrasi.

Sebagai upaya menyerap aspirasi tentang perlu dan tidaknya amandemen, pimpinan MPR telah melakukan kunjungan

ke berbagai ormas keagamaan dan partai politik. “Ini perlu kita komunikasikan”, tuturnya. “Nah, bila ada keinginan melakukan amandemen, mana saja yang diubah”, ucapnya. Untuk itu, MPR menunggu sikap resmi PHDI terkait dengan itu.

Hal serupa diungkapkan Arsul Sani. Dia mengatakan, kedatangan pimpinan MPR ke



PHDI dan organisasi lainnya untuk mendengar suara masyarakat. Kepada para tokoh umat Hindu tersebut, MPR menyatakan ingin menjadi rumah kebangsaan. Untuk itu, pria asal Pekalongan, Jawa Tengah, itu menyebut perlunya masukan dari umat Hindu.

Dalam kesempatan tersebut, Jazilul menyebut, MPR saat ini dipimpin oleh 10 orang. Dan, inilah pimpinan terbanyak dalam sejarah MPR. “MPR diharap sebagai lembaga permusyawaratan bagi semua fraksi dan kelompok DPD ada”, ujarnya. Dia menilai,

pertemuan dengan PHDI sangat strategis, sebab peran tokoh agama penting untuk ikut memperkuat sendi-sendi bangsa.

Arsul Sani selanjutnya memaparkan, tugas MPR saat ini melakukan Sosialisasi Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) dengan maksud untuk menjaga kerukunan berbangsa. “Bila salah satu pilar tadi lepas maka porak porandalah negeri ini”, tambahnya. Dalam masalah sosialisasi, Empat Pilar ini MPR tidak bisa sendiri. Perlu

keterlibatan semua pihak. “Untuk itu kami mengajak PHDI ikut melakukan sosialisasi”, ucapnya.

KS Arsana, salah satu tokoh umat Hindu yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, organisasinya sepakat Pancasila sebagai dasar Negara, karena Pancasila mampu menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Dia berharap agar Pancasila dijadikan asas bagi semua organisasi untuk menjadi landasan konstitusional. □

AWG

## Diskusi Silaturahmi Kebangsaan

# Silaturahmi Kebangsaan Dapat Ciptakan Stabilitas Politik

Stabilitas politik menjadi kunci untuk menghadapi tantangan, baik ekonomi, soal radikalisme, kohesivitas masyarakat, pada 2020. Safari kebangsaan Pimpinan MPR ke berbagai elemen masyarakat bisa menciptakan stabilitas politik di Indonesia.

**S**AAT ini Pimpinan MPR melakukan silaturahmi kebangsaan ke berbagai elemen masyarakat, tokoh bangsa, organisasi kemasyarakatan untuk menghimpun masukan dan aspirasi berkaitan dengan agenda MPR menghadirkan kembali

haluan negara. Ketua Fraksi PPP MPR, Arwani Thomafi melihat, safari kebangsaan Pimpinan MPR bisa menjadi contoh atau role model sebagai embrio untuk menciptakan stabilitas politik di Indonesia.

“Sudah tepat Pimpinan MPR melakukan

silaturahmi kebangsaan. Dan, ini menjadi role model ke depan, yaitu bagaimana pemimpin-pemimpin kita mengedepankan dan menjaga persatuan dan pada akhirnya memastikan bahwa stabilitas politik sangat penting,” kata Arwani Thomafi dalam Diskusi Empat Pilar



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MPR dengan tema “Makna Silaturahmi Kebangsaan Untuk Indonesia” di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Turut berbicara dalam diskusi ini Ketua Kelompok DPD untuk MPR, Intsiawati Ayus.

Bagi Arwani Thomafi, silaturahmi kebangsaan yang dilakukan Pimpinan MPR sudah menjadi semacam tradisi politik baru di Indonesia. “Bukan karena MPR kurang kerjaan. Tetapi memang pekerjaan MPR seharusnya seperti itu. Sebab, MPR merupakan representasi dari daulat rakyat, anggota MPR dipilih oleh rakyat. Karena itu,

MPR diharapkan memainkan peran strategis untuk merajut ke-Indonesiaan,” kata politisi PPP ini.

Silaturahmi kebangsaan, lanjut Arwani Thomafi, jangan hanya sekadar untuk menghimpun aspirasi terkait dengan rencana MPR untuk menghadirkan kembali haluan Negara, di antaranya melalui amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945. “Bisa lebih dari itu, yaitu MPR sebagai rumah kebangsaan menjadi payung bersama bagi partai politik, masyarakat sipil, juga lembaga-lembaga negara lainnya. Silaturahmi kebangsaan Pimpinan MPR bisa meminimalisir dampak negatif dari tantangan ekonomi,



sosial, politik, pada tahun 2020,” paparnya.

Menurut Arwani, pada 2020 Indonesia menghadapi tantangan semakin kompleks. Ekonomi global yang diwarnai perang dagang AS dan Cina menjadi faktor eksternal yang memengaruhi ekonomi dalam negeri. Belum lagi persoalan kohesivitas kebangsaan, radikalisme berbasis agama maupun berbasis sekuler, dan hajatan Pemilu serentak 2020. “Semua ini berpotensi menjadi masalah. Dan, masalah-masalah itu harus dijawab dengan persatuan dan kesatuan stakeholder bangsa ini,” tuturnya.

“Intinya, stabilitas politik menjadi kunci untuk menghadapi tantangan, baik ekonomi, soal radikalisme, kohesivitas masyarakat, pada tahun 2020. Semua memerlukan stabilitas politik. Safari kebangsaan Pimpinan MPR ke berbagai elemen masyarakat menjadi embrio untuk menciptakan stabilitas politik di Indonesia,” imbuhnya.

Karena itu, Arwani menambahkan, silaturahmi kebangsaan menjadi sangat penting karena pemimpin yang mengedepankan silaturahmi dan prinsip persatuan dan kesatuan menjadi teladan bagi masyarakat. “Pimpinan MPR jangan berhenti pada persoalan amandemen saja, tetapi lebih luas lagi karena MPR adalah rumah kebangsaan untuk mencari solusi bagi persoalan kebangsaan lainnya,” ujar Arwani.

Ketua Kelompok DPD di MPR, Intsiawati Ayus juga melihat silaturahmi kebangsaan yang dilakukan Pimpinan MPR sebagai bentuk upaya atau ikhtiar untuk menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan. “Karena dalam silaturahmi ada sebuah kebersamaan. Dengan kebersamaan maka semua argumentasi dan kepentingan masing-masing sudah selesai dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Tentu semua dalam bingkai persatuan dan kesatuan,” katanya.

Anggota DPD dari Provinsi Riau ini berharap, pimpinan antarparlemen, yaitu DPR dan DPD pun perlu melakukan silaturahmi. “Silaturahmi menjadi teladan untuk tidak mengedepankan rivalitas. Agenda amandemen dan masalah kebangsaan bisa diselesaikan melalui forum silaturahmi. Dan ini sudah banyak contohnya,” ujarnya. □

BSC

Audiensi Pengurus Yayasan Pemuda Nusantara Juara

# Kita Membantu Palestina Karena Alasan Kemanusiaan

Palestina menjadi salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Palestina juga banyak membantu Indonesia, terutama di awal masa kemerdekaan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

INDONESIA dan Palestina memiliki hubungan yang sangat erat. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bangsa Palestina menyumbangkan bantuan tidak sedikit. Palestina adalah negara yang ikut memberi pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Selain itu, banyak di antara warga Palestina mengambil uang mereka di bank untuk disumbangkan kepada Indonesia.

Karena itu, sudah sewajarnya jika bangsa Indonesia membalas kebaikan bangsa Palestina itu, seperti yang pernah diberikan oleh warga Palestina kepada Indonesia. Apalagi, saat ini bangsa Palestina tengah menderita akibat serangan yang tidak pernah berhenti dari zionis Israel.

“Persoalan Palestina adalah permasalahan bagi dunia, bukan hanya Indonesia. Persoalan Palestina bukanlah masalah agama saja, tetapi juga persoalan kemanusiaan. Karena penderitaan yang dialami warga Palestina adalah masalah kemanusiaan maka sudah sepatutnya kita juga membantu mereka. Apalagi mereka juga pernah membantu kita saat kita baru merdeka,” ungkap Wakil Ketua MPR RI Dr.H.M. Hidayat Nur Wahid.

Keinginan untuk membantu bangsa Palestina, kata Hidayat Nur Wahid, sesuai

dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pada alinea pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: ... *Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan perikeadilan.*

Pernyataan itu disampaikan Hidayat Nur Wahid pada saat menerima audiensi pengurus Yayasan Pemuda Nusantara Juara di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/11/2019). Dan, delegasi Yayasan Pemuda Nusantara Juara dipimpin oleh Yanwar Firmansyah.

Kepada Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Yanwar menyampaikan bahwa Yayasan Pemuda Nusantara Juara memiliki rencana menggelar kegiatan Run For Palestina. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam acara tersebut adalah mengumpulkan sumbangan bagi bangsa Palestina.

Mendengar rencana tersebut, Hidayat Nur Wahid berpesan agar para yang tergabung dalam Yayasan Pemuda Nusantara Juara mau berkaca kepada bangsa Palestina.

“Jangan sampai Indonesia yang sudah merdeka jatuh ke tangan penjajah, seperti yang dialami bangsa Palestina,” tegas Hidayat.

Membantu Palestina, menurut Hidayat, tentu saja merupakan sikap yang sangat baik. Tetapi, jangan sampai lupa bahwa negara kita sendiri pun saat ini juga tengah mengalami banyak masalah. “Karena itu, para pemuda juga harus berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan dalam negeri,” katanya.

Persoalan Palestina, lanjut Hidayat, semestinya dirampungkan oleh negara Palestina sendiri, atau dibantu oleh negara-negara tetangganya. Namun, karena mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan maka bangsa Indonesia terketuk hatinya ikut membantu.

Demikian pula persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Semestinya, kata Hidayat, pemerintahlah yang menyelesaikan persoalan bangsa Indonesia. Namun, karena pemerintah tak kunjung mampu menyelesaikan persoalannya maka rakyat Indonesia, khususnya para pemuda, harus turun tangan ikut membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. □

MBO





# Jangan Abai Pada Konvensi ICERD

Berita diskriminasi rasial di akhir 2019 menyeruak dari beberapa negara. Tersebutlah salah satu etnis ditindas oleh kekuasaan mayoritas. Hal itu terjadi karena negara abai pada Konvensi ICERD. Resolusi PBB No. 2106 (XX) yang diputuskan 21 Desember 1965 itu melarang tindakan pembedaan, pengecualian, pembatasan kepada ras dan warna kulit tertentu.

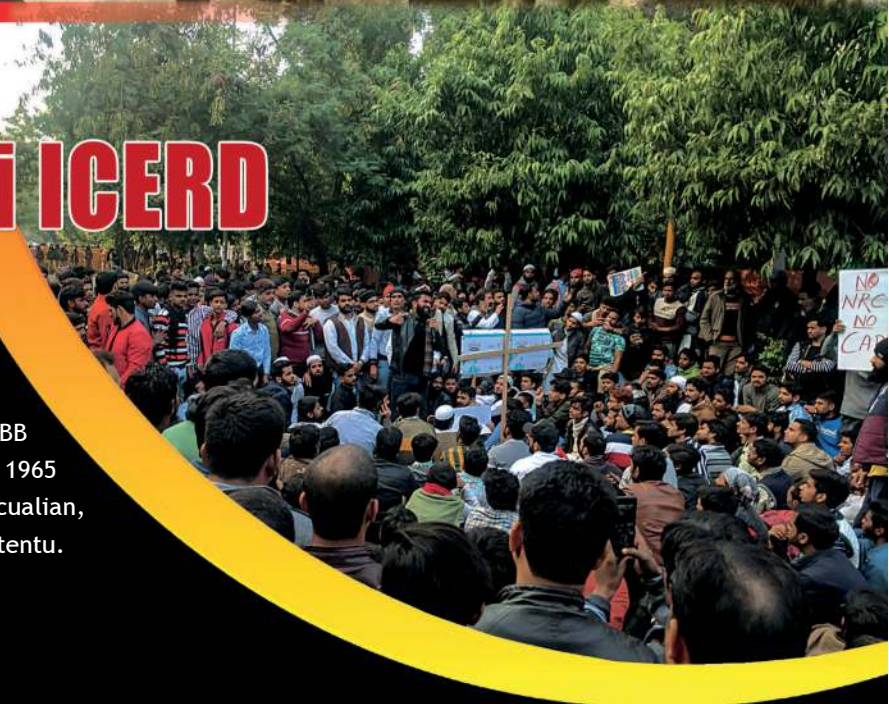


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PERTENGAHAN Desember 2019, di beberapa kota di India dicekam suasana menakutkan. Di Assam, negara bagian yang berada di wilayah timur laut, demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sangat mengenaskan. Lima orang dilaporkan meninggal, dengan rincian tiga ditembak polisi, satu orang dipukuli, dan satu orang lagi tewas saat toko yang didiami terbakar. Tapi ada juga menyebutkan jumlah korban enam meninggal, dan 100 demonstran menderita luka-luka. Kejadian yang demikian, rusuh, membuat perjalanan kereta dibatalkan. Untuk meredam kabar yang simpang siur itu, pemerintah mematikan jaringan internet.

Apa yang terjadi di Assam, terutama Kota Guwahati, juga terjadi di ibukota India, New Delhi. Maraknya demonstrasi yang terjadi di Universitas Jamia Millia Islamia membuat polisi menyerbu kampus. Dalam serbuan itu aparaturnya keamanan yang berbaju coklat selain menembakkan gas air mata ke kerumunan demonstran, juga melakukan tindakan kekerasan dan barbar. Pastinya apa yang dilakukan aparaturnya kepolisian secara represif itu menimbulkan korban dan luka. Selain di Assam dan New Delhi, peristiwa serupa juga terjadi di Bhopal, Jaipur, Ladakh, Kerala, Kolkata, Hyderabad, dan Lucknow.

Kenapa demonstrasi yang terjadi di negerinya Shak Rukh Khan itu demikian tragis sehingga membuat beberapa orang meninggal, ratusan orang mengalami luka berat dan ringan, serta terjadinya pembakaran fasilitas dan angkutan umum? Peristiwa itu terjadi menyusul pengesahan UU Tentang Kewarganegaraan India oleh pemerintah dan parlemen. Kubu Oposisi, umat Islam, dan penggiat HAM menyebut undang-undang itu diskriminatif rasial. Tidak memberi kedudukan yang sama antara umat Islam dan umat yang lain. Salah satu pasalnya mengatakan, undang-undang akan mempercepat pemberian kewarganegaraan bagi imigran yang datang dari negara tetangga, seperti Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan yang beragama Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen. Dengan tidak disebutnya Islam, maka di sinilah undang-undang itu disebut



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

sebagai aturan yang diskriminatif rasial. Padahal jumlah umat Islam di India dan negara tetangganya, nomor dua setelah Hindu.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah India membuat PBB geram. Komisioner HAM PBB, Jeremy Laurence, membuat rilis yang mengatakan undang-undang itu diskriminatif. "Undang-undang itu membatasi akses bagi orang-orang yang ingin memperoleh kewarganegaraan", ujarnya. "Apa yang diputuskan pemerintah India merusak kesetaraan hukum yang merupakan amanah konstitusi", tambahnya. Selanjutnya, dia menegaskan, semua imigran apapun latar

belakangnya wajib dan berhak dihormati, dilindungi, dan dipenuhi hak asasinya. Dia mengharapkan undang-undang itu di-judicial review di lembaga yang menangani masalah undang-undang. "Saya berharap di lembaga itu, dipertimbangkan hukum dengan kewajiban hak asasi manusia", harapnya.

Di pertengahan Desember 2019 pula, etnis keturunan Uyghur yang tinggal di Jepang bersama penggiat HAM di negeri Sakura melakukan demonstrasi di beberapa kota. Mereka menentang upaya genocida, perlakuan tidak adil, diskriminatif rasial, yang dilakukan oleh Pemerintah Cina





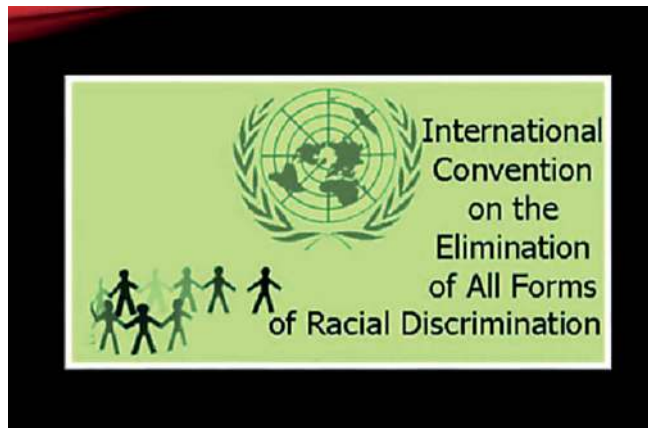
terhadap etnis Muslim Uyghur. Menentang genocida terhadap Muslim Uyghur juga terjadi di beberapa kota di Eropa, Jakarta (Indonesia), bahkan dilakukan pemain sepakbola Arsenal FC asal Turki Mezul Oziel.

Diskriminasi, genocida, dan perlakuan tidak adil yang terjadi di berbagai tempat sebenarnya tidak akan terjadi jika bangsa-bangsa di dunia mengingat dan mengenang apa yang terjadi di Kantor Majelis Umum PBB, Amerika Serikat, 21 Desember 1965. Pada tanggal, bulan, dan tahun itu diusulkan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, ICERD). Setelah melakukan rapat dan lobi-lobi akhirnya ICERD dalam Sidang Umum PBB

selanjutnya, konvensi itu berkembang pada suatu yurisprudensi mengenai penafsiran dan penerapannya. Sejak konvensi ini mempunyai ketetapan hukum tetap atau berlaku pada 4 Januari 1969 hingga Oktober 2015, ICERD telah diratifikasi oleh 88 negara dan yang tergabung dalam komite itu sebanyak 177 negara.

ICERD memiliki 25 pasal. Dalam Pasal 1 mendefinisikan “*diskriminasi ras*” sebagai *segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau sukubangsa, yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam*

*menjamin bahwa semua kekuasaan umum dan lembaga-lembaga baik pada tingkat lokal maupun nasional bertindak sesuai dengan kewajiban ini; (b). Setiap negara pihak tidak akan menyokong, mempertahankan atau membantu diskriminasi rasial yang dilakukan perorangan atau organisasi-organisasi. (c). Setiap negara pihak akan mengambil langkah-langkah efektif guna mengkaji ulang berbagai kebijakan pemerintah, nasional dan lokal, serta mengubah, mencabut atau membatalkan perundang-undangan dan peraturan yang berakibat menciptakan atau meneruskan diskriminasi rasial di mana pun berada. Ayat-ayat selanjutnya senada yang intinya melarang tindakan-tindakan membedakan, mengucilkan, membatasi*



pada saat itu ditetapkan lewat Resolusi No 2106 (XX).

Konvensi ini adalah konvensi hak asasi manusia yang mewajibkan anggota PBB untuk menghapuskan diskriminasi ras dan mengembangkan pengertian di antara semua ras. Konvensi itu juga berisi kewajiban pelarangan penyebaran kebencian dan pengkriminalan keikutsertaan dalam organisasi rasis.

Aturan ini dibuat tidak main-main. Buktinya konvensi memiliki mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran. Bila ada masalah terkait tindak rasial bisa dilaporkan atau diadakan lewat Komite Penghapusan Diskriminasi Ras (*Committee on the Elimination of Racial Discrimination*). Dari sinilah

*bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat yang lain.*

Dalam Pasal 2, di sinilah diatur larangan untuk melakukan tindakan diskriminatif kepada kelompok lain. Kita simak bunyi Pasal 2: *1. Negara-negara pihak mengutuk diskriminasi rasial dan mengambil semua langkah langkah yang sesuai guna menyusun sesegera mungkin kebijakan penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dan memajukan pengertian antarras untuk mencapai tujuan tersebut akan melaksanakan: (a). Setiap negara pihak tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan atau praktik-praktik diskriminasi rasial terhadap perorangan atau kelompok perorangan atau lembaga-lembaga dan*

kelompok lain serta larangan menyebarkan kebencian.

Sebelum ICERD dideklarasikan sebenarnya pada 20 November 1963, PBB telah mendeklarasikan *United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*. Keputusan itu ditetapkan lewat Resolusi 1904 (XVIII). Isinya, penolakan terhadap diskriminasi rasial, penghentian diskriminasi rasial yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagian masyarakat, penghentian propaganda supremasi ras atau warna kulit tertentu. Sayangnya, resolusi itu sebatas seperti pernyataan sikap dan tidak bisa mengikat secara hukum bagi anggotanya. Meski demikian, resolusi ini menjadi cikal bakal lahirnya ICERD.

Diskriminasi rasial terjadi bukan di akhir-akhir tahun ini saja. Hal demikian sudah terjadi sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Dalam *referensi.elsam.or.id* dicontohkan pelanggaran diskriminasi rasial yang besar adalah perdagangan budak pada Abad XVI yang didatangkan dari Afrika ke Amerika dan Inggris. Walaupun perdagangan budak bertentangan dengan pandangan iman Kristen yang dianut oleh sebagian besar warga Amerika dan Inggris, namun kenyataannya peristiswa itu terus berlangsung.

Kejahatan yang dilakukan oleh orang kulit putih, bangsa Amerika Serikat, tidak hanya kepada orang-orang berkulit hitam dari Afrika. Di benua itu, mereka melakukan penyerangan, pembunuhan massal, dan pengusiran dari wilayah-wilayah yang didiami suku asli Amerika, Suku Indian. Selain melakukan cara-cara yang demikian, bangsa kulit putih juga melakukan tindakan yang

merusak suku Indian dengan cara-cara yang halus, yakni memberi minuman keras, *beer*, kepada penerus suku Indian, generasi muda. Akibatnya penerus suku Indian itu menjadi orang yang suka mabuk-mabukan. Tak hanya itu, bangsa kulit putih yang sekarang menjadi dan penguasa bangsa Amerika Serikat menyebar *hoax* (istilah saat ini) dan menstigma kan negatif pada suku Indian. Suku asli Amerika itu dikatakan sebagai suku biadab, suka menari-nari, dan membakar manusia. Stigma itu dalam *referensi.elsam.or.id*, dilakukan lewat film yang ngetrend di tahun 1970-an yang diputar di TVRI yang berjudul *Rin Tin Tin*, *Karl May*, atau di film-film cowboy produk Hollywood lainnya. Akibat stigmatisasi yang dilakukan secara masif, membuat ingatan orang pada suku Indian adalah suku yang kejam dan suka menyerang.

Contoh lain dalam tulisan itu adalah pembantaian umat Yahudi pada masa

Perang Dunia II di Eropa yang dilakukan oleh Pemimpin Nazi, Hitler. Umat Yahudi dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi dan kamar gas sehingga menimbulkan korban. Nasib mengenaskan kepada umat Yahudi terjadi tidak hanya pada masa itu, pada kurun waktu 1420-1498 ketika Tomas de Torquemada menjadi Kepala Pengadilan Inquisisi Spanyol, dia telah membantai umat Yahudi hingga menimbulkan korban sebanyak 2000 orang. Tak hanya itu, dia juga mengusir 200.000 umat Yahudi keluar dari negeri matador itu.

Kejahatan yang dilakukan oleh kulit putih yang bersikap diskriminasi rasial juga terjadi di Afrika Selatan. Dengan politik *apartheid*, bangsa kulit putih di Afrika Selatan membuat kehidupan kaum kulit putih berbeda dengan kulit hitam, pemisahan ras. Politik rasis dan diskriminatif yang merugikan dan mengucilkan kaum kulit hitam itu terjadi dari 1930 hingga 1990. □

AWG/dari berbagai sumber

## Diterima Habibie, Ditolak Mahathir

Etnis Melayu di Malaysia menolak ICERD. Mereka khawatir menjadi kelompok terpinggir bila konvensi ini diratifikasi. Alasannya, aturan itu bertentangan dengan konstitusi. Lain dengan Malaysia, Indonesia sudah meratifikasi ICERD di awal masa reformasi.

DESEMBER 2018, ratusan ribu warga negara Malaysia dari kalangan etnis Melayu, memenuhi Masjid Jami, Masjid Nasional, dan Dataran Merdeka. Di tempat-tempat strategis dan vital di Kuala Lumpur, mereka membawa poster, spanduk, dan atribut-atribut demonstrasi. Mereka datang dari berbagai kota dan negeri dari seluruh penjuru wilayah negeri jiran datang ke Kuala Lumpur demi satu kata: “Bantah (tolak) ICERD”. Mereka menyebut aksi yang dilakukan dengan nama Gerakan 812. Artinya, dilakukan pada tanggal 8 Desember 2018.

Di negara yang demokrasinya masih belum seterbuka Indonesia, pada saat itu bisa terjadi demonstrasi raksasa, karena aksi yang ada didukung oleh pemerintah. Lewat UMNO, Partai Islam se-Malaysia, Gerakan Pembela Ummah, dan komponen masyarakat



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

lain, mereka menggalang massa.

Etnis Melayu menolak ICERD karena konvensi itu dirasa bisa merusak hak-hak

istimewa mereka. Dalam konstitusi Malaysia, disebutkan Islam merupakan agama resmi negara dan Muslim Melayu memiliki status



husus sebagai bumiputera atau pribumi. Dalam Pasal 153 disebutkan, memberi tanggung jawab kepada Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia) untuk “melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri (...) Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain”. Dengan pasal itu maka etnis Melayu mendapat prioritas dalam kuota penerimaan pegawai negeri, beasiswa, dan pendidikan.

Hal inilah yang ingin dipertahankan oleh mereka. Salah seorang pengunjuk rasa, Nurul Qomariyah dengan tegas menolak ICERD. Ia ingin pemerintah mempertahankan konstitusi yang ada. Dia khawatir konvensi itu akan menyingkirkan perlahan-lahan

kedudukan orang Melayu. “Ini negara untuk orang Melayu. Kami ingin orang-orang Melayu menjadi superior, tetapi mengapa orang-orang ini ingin membuat orang Melayu satu level dengan orang Cina dan India?”, ujarnya seperti dikemukakan kepada wartawan asing. Apa yang dikatakan Nurul didukung Hasni Mohammad Alim. Demonstran yang datang dari Seremban, luar Kuala Lumpur, itu mengatakan, orang-orang Malaysia bersedih jika pemerintah menyetujui konvensi. Hal yang sama diungkapkan oleh Siti Mariam Mohd Kassim. Siti yang datang dari Johor Bharu itu menyebut ICERD sesuatu yang tidak baik bagi Malaysia.

Demonstrasi yang dilakukan itu akhirnya

berhasil. Pemerintah mengiyakan apa yang dimau oleh etnis Melayu. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad setuju untuk tidak meratifikasi ICERD. Menurut Mahathir, meratifikasi konvensi tak mudah. Dia menyebut, di satu sisi konvensi mempromosikan kebebasan dan menghapus diskriminasi, namun di sisi yang lain, dalam Konstitusi Malaysia memberikan keistimewaan pada penduduk asli merupakan aturan dasar. “Penghapusan keistimewaan orang Melayu akan bertentangan dengan konstitusi”, ujarnya.

Bila negeri tetangga gaduh masalah ICERD, Indonesia sudah jauh-jauh hari meratifikasi konvensi itu. Di masa pemerintahan Presiden B.J Habibie, ICERD diratifikasi lewat UU. Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan ICERD. Undang-undang itu selanjutnya juga dikuatkan oleh Habibie lewat UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga diterbitkan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam UUD NRI Tahun 1945 persamaan hak dan antidiskriminasi juga tertuang. Lihat pada Pasal 27 dan Bab XA Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J. □

AWG/dari berbagai sumber



Presiden B.J Habibie

## Afrika Selatan, Mandela, dan Tekanan Dunia Internasional

Politik diskriminasi rasial yang dilakukan kaum kulit putih di Afrika Selatan menjadi isu internasional sejak 1930 hingga 1990. Apartheid mendiskriminasi kehidupan kaum kulit hitam dalam berbagai kehidupan. Perjuangan aktivis ANC, seperti Nelson Mandela; dan tekanan dunia internasional membuat kebijakan apartheid di Afrika Selatan dicabut.

**S**ETELAH menguasai dunia pelayaran, satu persatu negara di Benua Afrika dan Asia dicaplok oleh Bangsa Eropa. Jauh setelah nusantara dijajah oleh Belanda, dieksploitasi kekayaan rempah-rempahnya, selanjutnya Afrika Selatan juga mengalami hal yang sama. Sebagai negara yang kaya dengan emas dan berlian mengakibatkan

bangsa Eropa *balapan* untuk bisa menguasai wilayah itu. Kali ini bangsa Inggris yang beruntung mendapatkan Afrika Selatan.

Sebagai pendatang, mulai 1870, Inggris melakukan eksploitasi tambang yang ada di sana. Kedatangan penduduk negara kepulauan di Eropa itu tak sekadar mengeruk emas. Satu persatu hingga berduyun-duyun,

orang-orang kulit putih secara bergelombang datang ke Afrika Selatan. Kekuatan yang mereka miliki, seolah-olah membuat mereka berhak melakukan apa saja. Tanpa rasa malu mereka membentuk pemerintahan. Masalahnya tidak hanya berhenti di situ. Selain membentuk kekuasaan secara sepihak, mereka juga membuat kebijakan yang kelak

apa yang diputuskan itu membuat masalah yang ada menjadi panjang.

Pada tahun 1910, orang-orang kulit putih keturunan bangsa Inggris dan Belanda membuat kebijakan yang mengkastakan penduduk. Penduduk pribumi atau kaum kulit hitam dipisahkan dengan orang kulit putih. Kebijakan yang disebut *apartheid* itu tidak hanya meminggirkan orang kulit hitam dari kehidupan politik, namun juga ekonomi, pendidikan, sosial, dan bidang kehidupan lainnya. Kebijakan yang disebut supremasi kulit putih itu menghilangkan hak memilih bagi orang kulit hitam. Orang kulit hitam dipaksa tinggal di daerah yang telah ditentukan, terpisah dengan kulit putih. Menyedihkan sekali bila orang kulit hitam ingin masuk ke kawasan orang kulit putih, ia harus memiliki izin khusus. Kebijakan *apartheid* semakin menguat ketika Partai Nasional mulai berkuasa pada 1924. Dan, pada 1930, *apartheid* menjadi kebijakan resmi orang kulit putih di Afrika.

Perilaku diskriminatif yang dilakukan oleh orang kulit putih itu mendapat perlawanan dari bangsa Afrika asli. Sebagai bentuk perlawanan dari politik *apartheid*, pada 8 Januari 1912, dibentuklah Kongres Nasional Afrika (*African National Congress*, ANC). Kongres yang didirikan oleh Albert John Lutuli, Sol Plaatje, dan John Dube, mempunyai misi untuk melindungi hak-hak kaum mayoritas kulit hitam.

Dalam perjalanan waktu, pada 1942, bergabunglah seorang sosok yang bernama Nelson Rolihlahla Mandela. Pria kelahiran 18 Juli 1918 di Mvezo, Umtatu, Afrika Selatan, itu merupakan keturunan Ketua Suku Thembu, dari garis ayahnya; dan Ketua Suku Suku Ixhiba, dari garis ibunya. Dengan demikian, Mandela adalah dari keluarga yang dihormati orang-orang kulit hitam di sana. Dua tahun bergabung dalam ANC, Mandela merasa bahwa perjuangan yang dilakukan harus melibatkan anak-anak muda. Untuk itu, ANC perlu dukungan dari kalangan muda. Dari sinilah lahir *African National Congress Youth League* (ANCYL).

Kehidupan politik di Afrika Selatan dari waktu ke waktu saat itu semakin suram.



**Nelson Rolihlahla Mandela**

Pada 1960, partai politik yang anggota dan pengurusnya dari kaum kulit hitam dinyatakan sebagai partai terlarang. Puncak konflik dari warga kulit hitam dengan kulit putih akibat kebijakan *apartheid* disebut terjadi di Sharpeville, 21 Maret 1960. Pada hari, bulan, dan tahun itu ada sekitar 7.000 kulit hitam yang demonstrasi menentang kebijakan diskriminasi rasial. Demonstrasi direspon oleh aparat keamanan dari kalangan kaum kulit putih dengan represif dan barbar. Pentungan dan tembakan diarahkan ke kerumunan massa. Akibatnya, sangat menyedihkan, 69 orang meninggal dunia, 180 terluka, serta puluhan aktivis dan politisi dari kulit putih ditangkap.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Dirasa perjuangan lewat partai politik buntu, karena adanya larangan orang kulit hitam berpartai dan berpolitik, membuat Mandela bersama yang lain membentuk *Umkhonto we Sizwe*. Organisasi ini merupakan sayap bersenjata dari ANC. Sebagai sayap bersenjata maka kerja yang dilakukan persis sama dengan militer, yakni sabotase dan perang gerilya. Tujuan sayap militer ini sama, yakni mengakhiri *apartheid*. Tak hanya itu yang dilakukan oleh Mandela, dia juga mengatur pemogokan pekerja.

Sikap keras Mandela dan pejuang kaum kulit hitam lainnya membuat mereka kerap diadili dan keluar masuk penjara. Puncak perjuangan Mandela dan aktivis lainnya di lapangan terhenti pada 1963. Di pengadilan, dia bersama 10 pemimpin ANC dijatuhi penjara seumur hidup. Mereka dipenjara secara pindah-pindah, namun yang paling terkenal saat berada di Pulau Robben.

Sikap politik kulit putih di Afrika yang demikian mendapat pertentangan dari bangsa-bangsa lain. Pada 1973, Amerika Serikat mengeluarkan resolusi yang mengutuk negara Afrika Selatan yang dikuasai oleh kaum kulit putih. Satu tahun kemudian, PBB melakukan tindakan yang lebih tegas, menskor Afrika Selatan.

Tekanan yang keras dari dunia internasional membuat Afrika Selatan terkucil. Hal demikian rupanya membuat pemerintahan kulit putih tidak kuat menahan beban dari



'embargo' yang dilakukan dunia lain. Mulai 1978, sikap pemerintah di sana berubah. Di bawah Presiden P. W. Botha, muncul reformasi yang mengarah pada dibukanya kesempatan yang adil bagi kaum kulit hitam. Namun, kebijakan itu tak terasa. Kebijakan yang dikeluarkan penuh dengan syarat. Seperti Botha mau melepaskan Mandela dan aktivis yang lain, tetapi mereka harus menghentikan perjuangan. Tawaran ini ditolak Mandela.

Angin perubahan terjadi saat negeri itu

dipimpin Presiden Willem de Klerk. Pada masa ini, dia membuka pintu keterbukaan yang lebar bagi kaum kulit putih. Pada 11 Februari 1990, Mandela dibebaskan. Partai-partai kaum kulit putih yang sebelumnya dilarang, diperbolehkan untuk berpolitik. Semua hak-hak kulit hitam yang sebelumnya diabaikan bahkan tidak diberikan, mulai saat itu dipenuhi dan disamakan dengan kaum kulit putih.

Kebebasan berpolitik bagi semua kaum itulah yang membawa perubahan bagi kehidupan Mandela. Pada Pemilu kali pertama

digelar, Mandela mampu memenangi suara sehingga menjadi Presiden pertama dari kalangan kaum kulit hitam. Dalam masa pemerintahannya, 1994-1999, pada 1996, Mandela menandatangani konstitusi baru untuk mendirikan pemerintahan pusat yang kuat, menjamin hak-hak minoritas serta kebebasan berekspresi.

Mandela dalam pemerintahannya menciptakan rekonsiliasi nasional. Meski kaum kulit putih pada masa kebijakan *apartheid* sangat kejam. Namun Mandela belajar dari pengalaman negara Afrika lain menjadi hancur ketika ditinggalkan kolonialisme kulit putih, untuk itu dia tak mau mengusir kaum kulit putih. Mereka tetap diajak bersama-sama untuk membangun Afrika Selatan. Bangsa kulit putih, menurut Mandela, tetap dilindungi.

Rekonsiliasi nasional yang diciptakan oleh Mandela berwujud dengan pembagian kekuasaan yang setara danimbang di antara etnis-etnis yang ada. Mandela sebagai Presiden, wakilnya dari kaum kulit putih, de Klerk. Kedudukan menteri dibagi antara Partai Nasional (kaum kulit putih) dengan ANC (kaum kulit hitam), serta ada juga etnis lain, seperti dari India yakni Mac Maharaj dan Dullah Omar. □



Nelson Mandela bersama Willem de Klerk

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

AWG/dari berbagai sumber

## Cara Ali Melawan Diskriminasi

Meski Ali berjasa kepada Amerika Serikat, namun dia tetap dicemooh sebagai negro. Diskriminasi rasial yang masif di Amerika membuat munculnya Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika. Ali mendukung gerakan itu dengan melakukan pembangkangan tanpa kekerasan.

**B**AGI penggemar tinju, pasti mengetahui sosok Muhammad Ali. Pria yang aslinya bernama Cassius Marcellus Clay, lahir di Kentucky, Amerika Serikat, 17 Januari 1942, itu merupakan legenda tinju yang pernah dijuluki *the great*. Pria yang menjadi petinju gara-gara sepeda BMX-nya dicuri orang mampu merebut dan mempertahankan gelar dalam waktu yang lama. Saat Olimpiade di Roma, Italia, pada 1960, Ali menjadi kontingen Amerika Serikat. Di cabang olahraga itu, Ali mampu menambah-

kan medali emas bagi bangsanya setelah berhasil mengalahkan petinju Polandia Zbigniew Pietrzykowski di final.

Selepas menjadi petinju amatir, dia terjun ke profesional. Di dunia yang berbayar, kelihaian Ali sangat luar biasa, gayanya yang lincah, pukulannya yang keras dan akurat, membuat dia menjadi juara dunia. Lawannya rata-rata dijatuhkan lewat TKO atau KO. Dari sinilah Ali menjadi petinju yang disegani.

Dari luar orang memandang hidup Ali penuh dengan kebanggaan. Orang melihat





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ke mana-mana Ali selalu dielu-elukan banyak orang. Namun apa yang dilihat orang itu berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh Ali. Sebagai anak keturunan Afrika, Ali dan keturunan Afrika lainnya saat itu mendapat perlakuan diskriminasi rasial dan cemoohan. Meski sudah mempersembahkan emas kepada Amerika Serikat dalam Olimpiade Roma, namun cemoohan “negro” tetap diumpatkan oleh orang kulit putih padanya. Sama sakitnya ketika dia ditolak masuk oleh salah satu restoran di Louisville.

Pada masa itu, di Amerika Serikat dan bisa jadi hingga saat ini, marak terjadi diskriminasi rasial kepada para keturunan Afrika.

Masifnya diskriminasi membuat munculnya Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika. Gerakan yang terjadi pada 1955-1968 merupakan gerakan yang ditujukan untuk melarang diskriminasi rasial terhadap orang Afrika-Amerika dan memulihkan hak-hak suara mereka. Tokoh-tokoh gerakan ini seperti W.E.B. Du Bois, Malcolm X, Rosa Parks, dan Martin Luther King, Jr.

Gerakan yang dilakukan oleh mereka dengan melakukan aksi protes antikekerasan dan pembangkangan sipil. Aksi yang pernah mereka lakukan, seperti Boikot Bus Montgomery, aksi duduk di Greensboro, dan Pawai dari Selma ke Montgomery. Apa yang dilakukan itu sangat ampuh sehingga

menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal demikian membuat pemerintah negara bagian diharap segera tanggap terhadap isu yang muncul.

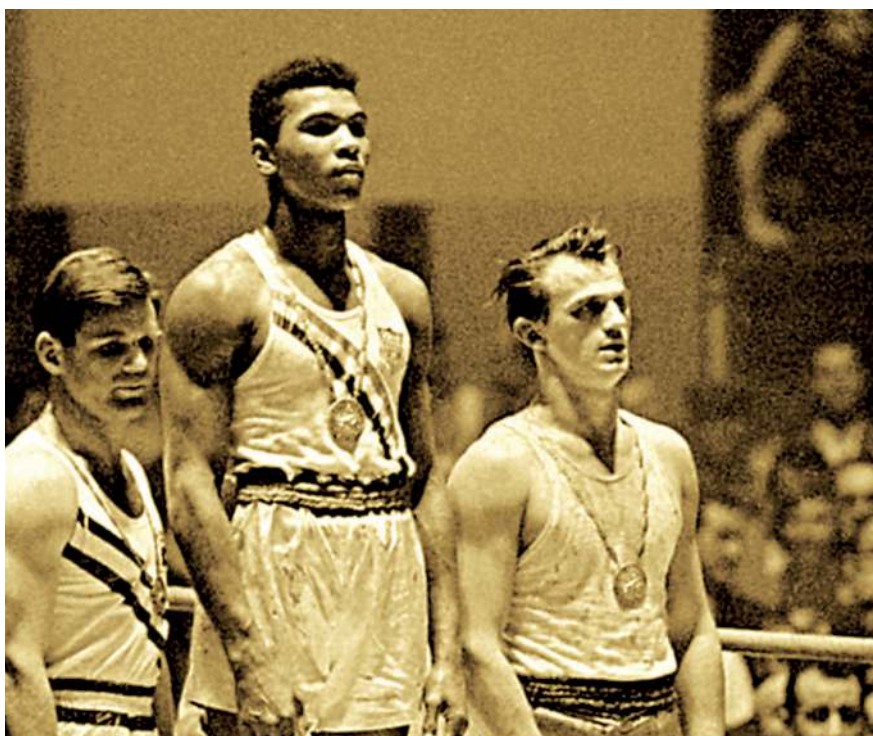
Ali sebagai salah satu korban dari diskriminasi rasial juga melakukan dukungan terhadap gerakan itu. Meski dia suka melakukan ‘kekerasan’ di ring tinju, namun dalam melakukan aksi untuk memulihkan hak-hak suaranya dilakukan dengan cara-cara yang damai, anti kekerasan. Ali melakukan seperti cara-cara yang sudah dilakukan, yakni melakukan pembangkangan.

Pembangkangan yang dilakukan Ali adalah membuang medali emas yang diraih di Roma ke Sungai Ohio. Ali melakukan itu, karena apa yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negaranya itu tidak dihargai malah mendapat perlakuan diskriminatif. Tak hanya itu, setelah menjadi juara dunia kelas berat, Februari 1964, ia mengubah namanya Cassius Marcellus Clay menjadi Muhammad Ali. “Cassius Clay itu nama budak!”, ujarnya.

Dunia tinju profesional memberinya harta melimpah, namun hal itu tak menyurutkan langkah Ali melakukan pembangkangan demi memperjuangkan persamaan hak. Ketika Amerika Serikat berperang di Vietnam, antara tahun 1957 hingga 1975, membuat negara itu mewajibkan kepada warga negaranya untuk mengikuti wajib militer. Ketentuan itu juga berlaku kepada Ali. Namun ketentuan itu ditolak. Alasannya, “saya tidak bertengkar dengan orang-orang Vietnam. Tidak ada orang Vietnam yang pernah memanggil saya negro”. “Mengapa mereka harus meminta saya mengenakan seragam dan pergi 10 ribu mil dari rumah dan menjatuhkan bom serta menghujani tembakan pada orang kulit cokelat Vietnam”, tambahnya.

Akibat menolak wajib militer itu membuat Ali diskor oleh Komisi Tinju. Skor membuat dirinya tidak diizinkan naik ring dan dicabut gelarnya. Dijatuhi hukuman tak membuat Ali sedih. Hukuman yang diberikan rupanya tidak mengurangi kedigdayaan Ali di ring. Setelah naik ring kembali, gelar juara dunia tetap diraih dan dipertahankan. □

AWG/dari berbagai sumber





## Prof. Dr. Armin Arsyad

Dekan Fisip Universitas Hasanuddin

### GBHN Harus Berisi Penjabaran Tujuan Negara



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**S**EJAK MPR giat melakukan berbagai sosialisasi terkait amandemen terbatas UUD soal Pokok-Pokok Haluan Negara (GBHN), saya sebagai akademisi tertarik untuk menelaahnya. Terutama, bagaimana GBHN itu mesti menjadi satu sosok fundamental yang mampu menjabarkan tujuan negara dan cita-cita bangsa.

Jika harus muncul haluan negara model GBHN, isinya merupakan penjabaran dari tujuan negara. GBHN merupakan realisasi pasal-pasal yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945. Contoh, Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa 'Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan'. Artinya, negara berkewajiban memastikan warga negaranya mendapatkan pendidikan yang layak tanpa kecuali. GBHN mesti menjabarkan itu dan memerintahkan pemerintah untuk menjalankan isi UUD tersebut.

Begitu juga dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa 'Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak'. Maka, negara mesti hadir untuk menjalankan perintah UUD tersebut. Mestinya peran GBHN di situ. Jangan sampai lagi warga negara kita mengemis-ngemis menjadi tenaga kerja yang diperlakukan tidak manusiawi di negara lain.

Banyak sekali amanah UUD yang sangat bagus-bagus dan isinya semua untuk kesejahteraan rakyat, tapi belum terealisasi semua. GBHN sebagai panduan negara harus menjadi lokomotif penggerak bangsa ini maju ke depan bersama-sama. □

DER

## Prof. Susi Dwi Harijanti

Guru Besar FH Universitas Padjajaran

### Generasi Muda Harus Dipancing Agar Mau Berpikir Soal Bangsa

**P**ERSOALAN dan tantangan bangsa Indonesia hari ini sangat berat dan makin berat lagi di masa depan. Generasi muda bangsa adalah sosok harapan bangsa, sebab merekalah pemegang tingkat estafet kepemimpinan dan pewaris seluruh tanah air Indonesia yang kaya ini.

Namun, akan sangat berbahaya jika generasi muda sendiri 'cuek' atau 'abai' terhadap bangsanya atau karena pengaruh radikalisme, generasi muda malah melawan dan tidak percaya terhadap negaranya sendiri.

Sebenarnya intelektualitas generasi muda Indonesia sangat baik, namun perlu dipancing keluar atau distimulus agar mereka tertarik. Banyak sekali upaya yang



sudah dilakukan berbagai elemen bangsa untuk membangkitkan rasa nasionalisme generasi muda, salah satunya dengan berbagai perlombaan yang memancing daya intelektual dan kreatifitas anak-anak muda. Lomba Karya Tulis Ilmiah MPR misalnya, itu sangat bagus.

Saya sendiri melihat dalam lomba itu, ternyata pemikiran-pemikiran mereka sangat luar biasa, dan sampai tidak terpikir ada beberapa yang membuat kami kagum. Intinya, ketika mereka diajak berpikir dan berkiprah untuk bangsa, mereka ternyata generasi yang abai terhadap ketatanegaraan bangsa. Mereka adalah generasi yang responsif. □

DER

## UN Diganti, Apa Solusinya?

Di awal menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengeluarkan kebijakan mengganti atau ada yang menyebut menghapus Ujian Nasional (UN). Penggantian atau penghapusan UN itu dengan beberapa alasan. Apa saja? Berikut pendapat para wakil rakyat terkait masalah pendidikan di Indonesia.

**Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.,** Anggota MPR dari Fraksi PAN

### Metode Baru Tak Boleh Sekadar Meluluskan Siswa

**M**ENGHAPUS Ujian Nasional (UN) karena alasan membebani siswa sehingga stres, menurut saya, kurang tepat. Tetapi UN yang ada selama ini memang perlu dikoreksi, bukan karena bikin stres siswa tetapi karena hanya melariskan bimbel (bimbingan belajar). CEO Bimbel lebih bergensi daripada guru. Makanya, yang diangkat menjadi Staf Khusus Istana bukan guru berprestasi tetapi pengelola bimbel berprestasi. Ini bisa menimbulkan kesan ada pengarusutamaan bimbel yang berimplikasi mereduksi pendidikan hanya jadi pengajaran.

Apakah metode pendidikan menghafal dianggap sudah tidak cocok? Saya tidak ingin mengatakan metode menghafal tidak bermanfaat. Metode menghafal tidak harus dibuang. Ia bisa dimanfaatkan sebagai titik awal menumbuhkan kecerdasan reflektif dan kritis. Namun, memang kalau menghafal dijadikan strategi atau metode utama dalam pembelajaran maka tidak akan efektif, terutama ketika kita ingin menguatkan kecerdasan majemuk, meliputi kecerdasan kognitif, psikomotor, dan penguatan kecerdasan afektif. Memang dengan model UN yang hanya mengejar kecerdasan kognitif, metode menghafal sudah cukup efektif. Cuma tidak bisa berharap banyak ketika kita ingin menguatkan multi kecerdasan intelektual, emosional ataupun spiritual anak didik.

Untuk menghasilkan multi kecerdasan anak didik diperlukan variasi strategi dan metode pembelajaran. Metode itu harus mencakup gerak tubuh atau somasi, auditory, visual dan kerja intelektual anak didik. Rancangan pembelajaran inilah yang disebut dengan metode SAVI, yakni pem-

belajaran yang dilakukan dengan menggerakkan Somasi, Auditory, Visual, dan Intelektual. Karena itu guru harus kaya imajinasi dan kreatifitas dalam merancang pembelajaran SAVI ini.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Kalau kebutuhannya hanya untuk mengukur kecerdasan intelegensia cukup menggunakan test obyektif melalui penilaian sumatif atau formatif dengan menyerahkan kepada guru di sekolah. Bahkan, untuk melakukan assessment terhadap kompetensi minimum, literasi numerasi psychomotor dan karakter siswa pun, guru di sekolah harus diberi kepercayaan yang lebih besar.

Mengenai asesmen kompetensi minimum masih ada yang perlu diberi catatan. Dalam hal ini kompetensi literasi dan numerasi keduanya masih berada dalam domain

kognitif, belum menyentuh wilayah kecerdasan psikomotorik yang semestinya juga harus masuk bagian assessment. Sementara mengenai karakter yang memang sangat penting untuk dilakukan assessment, tetapi saya ragu jika yang dipakai adalah metode survei. Metode survei tidak akan mampu mengetahui karakter dan watak siswa secara natural. Survei hanya melihat apa yang di permukaan perilaku siswa didik. Jika ingin mendapatkan informasi mengenai karakter siswa yang natural adalah melalui observasi terhadap everyday life atau kehidupan sehari-hari siswa atau melalui depth interview. Survei hanya memberi informasi berupa angka agregat, tidak bisa digunakan untuk menyelami karakter masing-masing siswa.

Perubahan metode baru itu tidak boleh hanya sekedar agar siswa 'lulus semua' sehingga tidak menyakiti siswa, guru, dan orangtua murid. Perubahan metode baru dalam mengelola pendidikan harus dilakukan atas dasar semangat mewujudkan prinsip-prinsip dan filosofi yang benar mengenai pendidikan. Metode baru itu harus bisa memberi manfaat terhadap upaya mencapai prinsip dan filosofi pendidikan, yaitu pendidikan yang memanusiakan manusia, pendidikan yang bisa dijadikan strategi membangun kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.

Pada dasarnya Indonesia memiliki latar belakang unik yang tidak harus meniru negara-negara lain. Apa yang baik, yang di terapkan oleh negara-negara lain menurut saya hanyalah baik untuk negara masing-

masing. Boleh saja apa yang mereka lakukan kita jadikan referensi, tapi tidak perlu kita ini menjadikan mereka sebagai contoh, yang kemudian kita fotokopi begitu saja untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Karena mereka mempunyai modal sosial budaya bahkan juga ekonomi dan politik yang berbeda dengan modal yang

kita miliki. Misalnya, di Australia, Inggris dan negara-negara Barat lainnya yang bahasa ibunya adalah bahasa Inggris, bisa saja bahasa Inggris diselesaikan di sekolah dasar, dan tidak diajarkan lagi di SMP dan SMA. Karena mereka bisa berbahasa Inggris tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah dan di lingkungan masyarakatnya. Di Indonesia

anak didik kita hanya belajar bahasa Inggris di sekolah, tidak demikian dengan keluarga di rumah dan di tengah pergaulan sosial. Oleh karena itu harus dipertimbangkan ulang kalau ingin pelajaran bahasa Inggris harus selesai di sekolah dasar dan hapus di SMP dan SMA. □

AWG

**Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP.,** Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar

## Tidak Dihapus Tapi Diganti Konsep

**A**PAKAH karena disebut UN sebagai sumber stres bagi siswa, guru, dan orangtua murid maka membuat UN perlu dihapus? Sebenarnya itu hanya salah satu dari sekian banyak alasan saja. Kita bukan menghapus UN, tapi mengganti formatnya dengan yang lebih baik bagi sistem pendidikan. Sebuah sistem penilaian tetap perlu, baik untuk siswa maupun untuk sistem pendidikan itu sendiri. Tanpa adanya penilaian kita tidak akan tahu kita sedang berdiri di mana. Oleh karena itu, ada yang namanya asesmen kompetensi dan survei karakter untuk menilai sistem pendidikan secara keseluruhan, dan ujian sekolah yang menilai siswa. Sedikit stres itu baik, asal jangan sampai di level tidak sehat seperti yang kita lihat selama ini, di mana anak-anak hanya berfokus ke ujian nasional sehingga melupakan pelajaran dan kegiatan-kegiatan.

Sebenarnya UN sendiri pun tidak hanya menghafal, ada pelajaran seperti matematika dan IPA yang perlu menghitung dan berpikir lebih lanjut. Namun demikian, kadang untuk memecahkan soal matematika dan IPA, anak lebih ke menghafal rumus, atau menghafal cara cepat mendapatkan jawaban. Sementara konsep itu sendiri belum tentu dipahami dengan baik. Terkadang juga soal yang disajikan, selain sulit juga tidak relevan, dengan kehidupan. Skill seperti berpikir kritis dan terstruktur kurang teruji.

Sekali lagi UN tidak dihapus, tapi diganti konsepnya. Tetap ada asesmen kompetensi yang dilakukan secara berkala. Bedanya, pertama, dia tidak dilakukan di akhir jenjang, tapi di tengah, seperti kelas 2 SMP dan SMA. Kedua, soal-soalnya mengutamakan skill literasi dan numerasi. Ketiga, ini tidak akan

dijadikan indikator siswa, tapi indikator sistem pendidikan kita secara keseluruhan, sehingga kita bisa mengevaluasi dan menilai kurangnya di mana.

Pengganti UN, yakni asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, apakah mampu menjadi ukuran bagi siswa bahwa dia capak



(pandai)? Tentu tidak 100%. Yang bisa menilai seorang siswa secara komprehensif adalah guru yang sehari-hari bertemu langsung dengan siswa. Oleh karena itu, kita mengadakan Ujian Sekolah di mana wewenang penilaian diberikan sepenuhnya pada guru. Penilaiannya juga didasarkan pada kurikulum K-13, yang mencakup tidak hanya aspek kognitif, tapi juga keterampilan dan sikap. Sedangkan untuk asesmen kompetensi dan survei karakter sendiri dilakukan secara nasional, karena kita perlu

mengagregasi data secara kuantitatif, bukan mengukur kecakapan perorangan.

Apakah metode baru itu hanya sekadar agar siswa 'lulus semua' sehingga tidak menyakiti siswa, guru, dan orangtua murid? Tidak seperti itu. Untuk menentukan kelulusan, sekarang kita serahkan kepada sekolah dan guru melalui ujian sekolah (US). Jika guru dan sekolah menganggap seorang siswa tidak memenuhi kompetensi yang diujikan, maka silahkan saja jika tidak ingin meluluskan. Berarti siswa tersebut masih butuh binaan, mungkin setahun lagi. Sedangkan untuk asesmen kompetensi justru akan menilai sekolah dan guru, mana yang sudah baik dan mana yang belum. Bukan juga untuk menyalahkan, namun mindsetnya adalah untuk memberdayakan mereka yang kurang dengan program-program yang sesuai dari Kemendikbud.

Sebenarnya banyak sekali best practice dari negara-negara lain. Ada yang menerapkan ujian nasional dan bagus, ada juga yang tidak menerapkan ujian nasional dan bagus. Kita tidak bisa *copy paste* seutuhnya, melainkan dikombinasikan dan disesuaikan dengan keadaan kita. Sebagai contoh di Tiongkok, bagus sekali nilai PISA (Programme for International Student Assessment)-nya, tapi anak-anaknya stres. Di Finlandia, secara PISA mungkin tidak sebagus Tiongkok, tapi anak-anaknya bahagia. Kita ambil bagian baiknya yang sesuai dengan karakteristik kita, dan jangan tiru yang buruknya. Sistem pendidikan Indonesia harus mampu menyeimbangkan antara kompetensi, karakter, dan kebahagiaan dalam belajar. □

AWG

Fadel Muhammad di Gorontalo

# Sosialisasi Empat Pilar dan Serap Aspirasi di Gorut



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**M**ENJELANG sore, Selasa (26/11/2019), sebanyak 400 aparatur sipil negara (ASN) memenuhi Gedung Pertemuan Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Provinsi Gorontalo. Sore itu, mereka menjadi peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Acara itu terasa istimewa, karena dihadiri dan menjadi pembicaranya adalah Fadel Muhammad, yang tak lain adalah mantan Gubernur Gorontalo yang kini menjabat Wakil Ketua MPR. Selain Fadel, hadir pula dalam acara itu anggota MPR dari Kelompok DPD, Abdurrahman Abubakar Bahmid; Bupati Gorut Indra Yasin; Kapolres Gorontalo Utara (Gorut), AKBP Dicky Kesumah; dan Dandim Gorut, Letkol Andrea.

Di hadapan peserta sosialisasi yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan TP PKK Gorut, Fadel Muhammad mengungkapkan, tentang lembaga MPR dan tugas-tugas yang diembannya. MPR sekarang, jelas Fadel, dipimpin oleh 10 orang pimpinan, yang merepresentasikan kekuatan partai politik yang lolos parliamentary threshold dan kelompok DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Sepuluh pimpinan MPR ini, kata Fadel, disepakati setelah UU MD3 direvisi. Selain tugas-tugas konstitusional, MPR juga menjalankan tugas yang diamanatkan oleh UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), yaitu melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada

seluruh elemen masyarakat.

Di Gorontalo, ujar alumni ITB itu, nilai-nilai Pancasila dipegang kuat oleh masyarakat meski asal usulnya daerah ini memegang kuat agamanya, Islam. “Pengalaman saya menjadi gubernur dua kali dan sebagai anggota DPR yang bolak balik ke sini, saya yakin nilai-nilai Pancasila dipegang erat masyarakat Gorontalo”, tegas Fadel. Karena itu, daerah yang berada di antara Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah itu tetap damai dan aman, jauh dari konflik.

Dalam kesempatan tersebut, Fadel sebagai pimpinan dan anggota MPR juga melakukan tugas serap aspirasi masyarakat. “Kita juga berbicara mengenai masalah pembangunan di Gorut, terutama mengenai pertanian dan perikanan”, ungkapnyanya. “Apa yang kami lakukan adalah serap aspirasi”, tambahnya. Hasil serap aspirasi, lanjut Fadel, akan dibawa ke MPR, DPD, dan disalurkan ke teman-teman yang ada di DPR.

Menurut Fadel, ada tiga potensi yang ada di Gorut perlu mendapat dukungan. *Pertama*, pariwisata. Menurut Fadel, Gorut berhadapan dengan Filipina serta banyak pulau sehingga sangat potensi untuk dikembangkan menjadi wisata bahari. *Kedua*, perlu membangun infrastruktur. Dia mengungkapkan, di daerah ini terkenal dengan pantai dan Pelabuhan Anggrek. “Kawasan ini bisa menjadi



pertimbangan pemerintah pusat untuk menjadikannya menjadi proyek nasional,” harapnya. *Ketiga*, di Gorut akan dibangun pusat kebudayaan yang terdiri dari berbagai budaya. “Semua aspirasi itu akan dibawa

ke tingkat nasional”, ucap pria yang juga seorang pengusaha itu.

Apa yang disampaikan oleh Fadel dibenarkan oleh Abdurrahman Abubakar Bahmid yang juga jadi narasumber acara

sosialisasi itu. Bahmid menyatakan, Gorontalo yang berbatasan dengan dua provinsi ini memiliki potensi pariwisata. Sektor pariwisata di Gorontalo, menurut Bahmid, lebih bagus dibanding dengan sektor tambang. Dia mengungkapkan, kalau sektor tambang lama-lama akan habis dan dampaknya akan menimbulkan masalah lingkungan. “Untuk memulihkannya memerlukan biaya yang sangat besar”, ujarnya.

Sedang sektor pariwisata dengan biaya pengembangan yang tidak terlalu besar dan dampaknya bisa memberikan keuntungan kepada banyak pihak. “Perekonomian akan tumbuh bila banyak wisatawan datang,” ungkap Bahmid. Oleh karena itu, dia berharap, wisatawan asing yang tiba di Manado, Sulawesi Utara, bisa melanjutkan kunjungannya ke Gorontalo. Untuk itu, Bahmid mengingatkan agar para bupati dan walikota di provinsi itu tidak bekerja sendiri-



sendiri.

Kepada peserta sosialisasi, Bahmid juga menjelaskan bahwa tugas MPR adalah melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR. “Ini penting karena kita khawatir Pancasila akan tergantikan,” ungkapnya. Dia menyebut, pernah ada upaya menggantikan Pancasila dengan dasar yang lain. “Pernah ada pemberontakan PKI yang bertujuan menggantikan Pancasila”, paparnya. “Pemberontakan PKI hanya terjadi dua kali, yaitu pada 1948 dan 1965,” kata Bahmid. Selain itu, juga pernah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh DI/TII. Pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok itu perlu terus diwaspadai. “Adanya media sosial bisa digunakan untuk menyebarkan paham yang tak sesuai dengan Pancasila”, ungkapnya.

Untuk itulah sosialisasi Empat Pilar, menurut Bahmid, sangat penting. Meski demikian, MPR tak bisa sendirian dalam melaksanakan tugas ini. “Selepas sosialisasi, ibu-ibu bisa menyampaikan kepada yang lain”, harapnya. Bagi Bahmid, kita perlu mempertahankan Pancasila, karena dasar negara ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam.

### Kita beda, tapi bersatu

Di hari yang sama, sosialisasi Empat Pilar MPR juga diselenggarakan di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengatakan, MPR saat ini gencar melakukan Sosialisasi Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Meski bangsa Indo-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

nesia beragam, namun bersatu. “Kita berbeda-beda, namun bersatu dalam Indonesia,” ujar Fadel. Selanjutnya, dia berharap, seluruh rakyat mengimplementasikan nilai-nilai Empat Pilar dalam keseharian agar bangsa ini bisa berjalan sesuai dengan harapan.

Di hadapan peserta sosialisasi yang kesemuanya perempuan, Fadel mengaku, sangat senang bisa datang di Gorontalo. Dia teringat saat menjadi gubernur di provinsi itu, membangun sektor perikanan, pertanian, peternakan, juga menekankan pembangunan infrastruktur. Fadel mengakui, provinsi ini makin lama makin maju. “Saya berharap kepada para bupati dan walikota untuk terus meningkatkan pembangunan demi kepentingan rakyat,” ujar Fadel.

Fadel juga menyebutkan bahwa saat ini

ada sejumlah tokoh dari Gorontalo menjadi tokoh nasional. Selain dia sebagai Wakil Ketua MPR, juga terdapat tokoh lainnya, yaitu: Rachmad Gobel menjabat Wakil Ketua DPR. Lalu, Suharso Monoarfa menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Zainudin Amali sebagai Menpora. Sekarang ini, menurut Fadel, masyarakat di berbagai tempat di Indonesia membicarakan tentang Gorontalo. “Sekarang Gorontalo jadi pembicaraan, dan perlu disyukuri,” ujar Fadel, seraya mengajak warga Gorontalo untuk berdoa agar Gorontalo.

Ali Pakayat, tokoh masyarakat di sana, mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Fadel yang telah melakukan sosialisasi. “Kami bangga di sini dijadikan tempat sosialisasi”, ucapnya. □

AWG

# Pilkada Langsung Menghasilkan Kepala Daerah Yang Mendunia

**A**NGGOTA MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Achmad, M.Si., mengatakan, ada dua masalah dalam persoalan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada tahun 2020. Pertama, soal sistem, dan kedua mengenai persyaratan. Sistem pemilihan kepala daerah model seperti ini, di mana rakyat memilih langsung, menurut Achmad, dilakukan sejak bergulirnya era reformasi. Pemilihan itu meliputi pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Achmad menyatakan hal itu, saat menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR, di Media Center, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, 4 November 2019. Di hadapan ratusan wartawan dari berbagai media, baik media cetak, elektronik, maupun media online, Achmad mengakui, Pilkada langsung mempunyai nilai plus dan minus. Namun, katanya, Pilkada langsung dirasa lebih cocok digunakan karena sesuai amanat reformasi.

Dengan Pilkada langsung maka proses yang terjadi memiliki tanggung jawab moral yang lebih tinggi. Parameter kesejahteraan, seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatnya pendapatan masyarakat, menjadi ukuran seorang kepala daerah bisa terpilih kembali. "Sehingga Pilkada langsung lebih menguntungkan masyarakat," paparnya. Untuk itulah, Achmad menilai, Pilkada langsung memiliki kelebihan. "Kalau tokoh ada kekurangan maka perlu diperbaiki," tegas Achmad.

Terkait persyaratan untuk mengikuti Pilkada, menurut Achmad, secara teknis perlu diperketat sehingga kandidat yang ada benar-benar memiliki kompetensi dan kualitas. "Untuk Pilkada Provinsi, bila calonnya dari kalangan militer maka syaratnya harus bintang dua," kata Achmad. Persyaratan administrasi yang demikian, menurut Achmad, bukan untuk membatasi orang untuk mencalonkan diri, namun kebebasan jangan sampai kebablasan. "Dari seleksi seperti itulah maka ke depan kita akan memiliki pemimpin yang berintegritas," ujar Achmad



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

seraya menyatakan, dengan demikian hasil Pilkada memiliki kapabilitas dan aman.

Achmad mengakui, dalam Pilkada selalu muncul masalah money politic, namun dia yakin, bila kehidupan semakin sejahtera dan masyarakat semakin cerdas maka hal demikian akan hilang dengan sendirinya. Meski demikian, Achmad berharap, Bawaslu harus tegas dalam masalah money politic, sehingga sanksi yang diberikan kepada pelanggar bisa membuat jera.

Anggota MPR dari Kelompok DPD, Teras Narang, yang juga narasumber dalam diskusi bertema: "Menuju Pilkada Serentak Tahun 2020," itu mengatakan, Pilkada selalu menarik, sebab selalu ada hal baru. Semua upaya yang dilakukan, kata Teras Narang, memperlihatkan keinginan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Untuk menuju ke sana, lanjut mantan Gubernur Kalimantan Tengah, itu kita harus menjadikan masa lalu sebagai pelajaran. Kepada para peserta diskusi, Teras Narang mengakui bahwa dirinya merupakan produk Pilkada langsung di awal reformasi. "Saya ikut Pilkada langsung pada 2005. Di Pilkada itu untuk kali pertama rakyat memilih langsung kepala daerah. Dan, saya merupakan alumni

pertama", ujarnya.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan Pilkada terus berproses menuju kesempurnaan. Namun, dia mengakui, biaya Pilkada sangat berat dan besar, sehingga APBD tersedot. "Mahal banget biaya Pilkada", ungkapnya. Untuk itu, lembaga di mana dia kini mengabdikan, DPD, mencari siasat agar anggaran Pilkada tak membebani APBD. Teras Narang mengandaikan, bagaimana kalau anggaran Pilkada dibuat untuk membangun sekolah, puskesmas, dan fasilitas masyarakat lainnya, pasti akan terbangun secara berderet. Maka, menurut Teras Narang, masalah biaya inilah yang menjadi pertimbangan.

Dia mengakui, hasil Pilkada langsung bisa memilih pemimpin yang baik dan kompeten. Untuk itulah, dia berharap, prosedur yang ada jangan dipersulit. Terlepas apakah Pilkada nanti dipilih secara langsung atau dikembalikan DPRD, dia berharap agar semua ide dan gagasan ditampung.

Secara hukum, tambah Teras Narang, tafsir Pilkada sangat terbuka, yakni dipilih secara demokratis. Artinya, bisa lewat DPRD atau bisa dipilih langsung oleh rakyat. Berbeda dengan Pemilu Presiden yang







FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

via. Karena itulah mereka kagum dan terus mempelajari Pancasila,” ungkap Elnino M. Husein Mohi, ST. M.Si, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR RI, saat menjadi pembicara tunggal di acara Dialog MPR Rumah Kebangsaan yang berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Dalam dialog bertema: “Pancasila Sebagai Penangkal Radikalisme,” itu, Elnino menyatakan, untuk menangkal isu radikalisme yang kembali menyita perhatian, salah satu cara yang harus dilakukan pemerintah adalah mengembalikan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila menjadi mata pelajaran wajib dalam kurikulum Pendidikan Nasional. Di mana, sejak era reformasi

bergulir, mata pelajaran Moral Pancasila ini tersisih dari kurikulum Pendidikan Nasional Indonesia.

Langkah tersebut, menurut Elnino penting, bertujuan untuk mengokohkan ideologi Pancasila kepada seluruh generasi muda. Selain, untuk menangkal kemungkinan masuknya ideologi lain yang belum tentu sesuai dengan ideologi Pancasila.

“Negara sudah melakukan berbagai cara, namun masih belum mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, perlu partisipasi semua pihak dalam memasyarakatkan Pancasila, khususnya generasi muda,” kata Elnino.

Sementara MPR, menurut Elnino, sudah melakukan sosialisasi Empat Pilar dengan berbagai metode. Mulai dari sosialisasi

yang diperuntukkan bagi siswa-siswi SLTA, mahasiswa, para guru, hingga masyarakat umum. Tetapi itu, kata Elnino, belum cukup karena MPR tidak memiliki relasi di daerah. MPR tidak memiliki kaki yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang ada di pedalaman dan daerah terpencil.

Karena itu, kata politisi Partai Gerindra asal Gorontalo ini, dunia pendidikan harus mengambil peran yang lebih besar untuk menanamkan nilai-nilai berbangsa dan bernegara sejak dini. Antara lain, dengan kembali memasukkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila dalam kurikulum Pendidikan Nasional, dari tingkat sekolah rendah hingga perguruan tinggi. □

MBO







budaya,” tandasnya.

Indonesia sudah dipengaruhi budaya asing. Negara bisa menginfiltrasi negara lain lewat budaya. Budaya tidak hanya bentuk seni, tetapi juga pakaian dan kuliner seperti infiltrasi masakan Amerika, Jepang, Thailand, bahkan Timur Tengah. “Pemerintah seharusnya bisa mendorong budaya Indonesia ekspansi ke negara lain,” tuturnya.

“Untuk mencapai politik, ekonomi, dan budaya yang kuat perlu persatuan, negara yang bersatu. Persatuan menjadi prasyarat. Bersatu membangun Indonesia. Itulah Pancasila,” sambungnya.

“Lewat pagelaran budaya ini mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Karena itu MPR

perlu melakukan pagelaran seni budaya,” imbuhnya.

Sebelumnya Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah menjelaskan, sosialisasi Empat Pilar MPR (Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara), UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara) dilakukan dengan berbagai metode seperti Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar untuk siswa SLTA, outbound, Training of trainers, Focus Group Discussion, ceramah, dan melalui pagelaran seni budaya.

Menurut Siti Fauziah, MPR melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR dengan metode

pagelaran seni budaya dengan tujuan untuk melestarikan seni budaya. Sebab, banyak seni budaya daerah yang jarang ditampilkan bahkan hampir punah. Termasuk seni budaya Lampung.

“Saya sudah lama tidak menyaksikan seni budaya Lampung yang ditampilkan malam ini. Mungkin lebih dari 20 tahun tidak menyaksikan. Kebetulan saya berasal dari Lampung. Ayah saya dari daerah Menggala. Setelah ayah saya wafat, saya tidak pernah lagi pulang ke Lampung. Saya senang bisa menyaksikan kembali seni budaya Lampung yang dulu pernah saya lihat ketika masih anak-anak,” katanya.

BSC

## Dialog Aktualisasi Rekomendasi MPR

# Pancasila Harus Diterapkan dalam Keseharian



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**S**AAT dialog digelar di Ruang Delegasi MPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, 22 November 2019, anggota MPR dari Kelompok DPD, Intsiawati Ayus, mengatakan, para anggota MPR Periode 2014-2019, telah melakukan serap aspirasi masyarakat di seluruh Indonesia. “Serap aspirasi itu ada data dan faktanya”, ujar anggota DPD dari Riau ini. Hasil serap aspirasi, menurut perempuan yang diakrab disapa Ibu lin itu, selanjutnya disusun, dikaji, dan dibedah baik secara akademis maupun politis. “Selanjutnya dari sini lahirlah Rekomendasi MPR Periode 2014-2019”, ungkapnya.

Dalam menjalankan tugas, jelas Intsiawati, MPR dibantu oleh tiga alat kelengkapan yakni Badan Kajian, Badan Sosialisasi, dan Badan Anggaran, serta Lembaga Pengkajian. Untuk merumuskan isu yang ada, tidak hanya dilakukan oleh anggota MPR namun juga butuh masukan dari para pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. “Dari semua itu lalu disimultankan, diracik, oleh akademisi dan politisi”, tuturnya.

Dalam dialog bertema ‘Aktualisasi Rekomendasi MPR Periode 2014-2019’, Intsiawati mengatakan, salah satu butir dari rekomendasi MPR itu adalah mengenai pokok-pokok haluan negara. Dia menegaskan, saat ini ada keinginan untuk menghidupkan kembali haluan negara model GBHN. Terkait masalah GBHN, jelas Intsiawati, bila dihidupkan kembali maka harus jelas diletakkan di mana dasar hukumnya. Apakah lewat Ketetapan MPR atau melalui undang-undang. Saat ini

mengenai landasan pembangunan sudah diatur dalam UU RPJMP.

Nah bila ingin ditetapkan oleh MPR maka harus melalui amandemen. “Syarat amandemen diatur dalam UUD”, ungkapnya. “Dalam Pasal 37 UUD disebutkan, usulan diajukan oleh anggota MPR, di mana anggota DPD juga merupakan anggota MPR”, ucapnya. Dia mengakui, proses usulan, pembahasan, dan keputusan itu melalui proses panjang dan perlu kompromi politik. “Dari sinilah akan banyak dinamika”, ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Intsiawati juga mengatakan, Pancasila harus diimplementasikan dalam segala sendi kehidupan masyarakat. “Sebagai dasar negara, Panca-

sila harus diterapkan dalam keseharian, jangan hanya dijadikan simbol”, tuturnya. Lebih lanjut, Intsiawati mengatakan, Pancasila jangan hanya hidup di tataran formal dan atau diformilkan, namun harus ada dalam segala sendi kehidupan. “Konflik yang terjadi di masyarakat akibat tidak adanya nilai-nilai Pancasila,” tegas Intsiawati.

Dari semua hal yang disampaikan tadi, menurut Intsiawati, bangsa ini harus mampu menciptakan sistem tata negara yang baik. Sistem tata negara yang baik adalah mampu mengayomi seluruh lapisan masyarakat. “Dan masyarakat merasakan sistem itu”, ucapnya. □

AWG



Paham Kebangsaan Mencegah Terorisme

# Pendidikan Unsur Penting Membentengi Radikalisme



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**D**I HADAPAN puluhan wartawan Koordinatoriat Parlemen, anggota Fraksi Partai Demokrat MPR RI, Dede Yusuf Effendi, mengatakan, salah satu penyebab munculnya terorisme adalah faktor kesejahteraan. Dan, semakin besar ketimpangan ekonomi yang terjadi di suatu masyarakat maka semakin besar pula peluang munculnya terorisme.

Terorisme akan makin tumbuh subur jika dunia pendidikan makin jauh meninggalkan

fungsinya ikut menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Serta melupakan tradisi dalam mendiskusikan masalah-masalah ideologi. Sebaliknya, pembelajaran ideologi di sekolah dilakukan sebatas menghafal pasal-pasal dalam ideologi bangsa, seperti sila-sila Pancasila, tanpa disertai pemahaman terhadap makna yang tersembunyi di balik sila-sila tersebut.

“Kurikulum mengandung muatan budi pekerti, pendidikan moral Pancasila, kebang-

saan, dan wawasan nusantara juga makin terpinggirkan. Sebagai gantinya, para siswa mencari ideologi lain dari luar melalui internet, padahal ideologi itu belum tentu sesuai dengan ideologi Pancasila,” ujar Dede Yusuf.

Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan hal itu saat menjadi narasumber pada acara Dialog Empat Pilar MPR yang berlangsung di Ruang Media Centre, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Senin (25/11). Selain Dede Yusuf, dialog yang menengahkan tema: “Paham Kebangsaan untuk Mencegah Terorisme” juga menghadirkan tiga sumber lain, yaitu: Anggota Fraksi Partai Golkar MPR, Dedy Mulyadi; Anggota Fraksi PDI Perjuangan MPR, Muhamad Nabil Harun; Dan, praktisi Prodi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Strategik dan Global UI, Dr. Can. Supto Priyanto.

Lebih lanjut, Dede Yusuf menyatakan, untuk membentengi berkembangnya radikalisme dan terorisme maka dunia pendidikan harus mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila. “Bukan hanya berupa hafalan, tetapi memberi contoh bagaimana praktik menjadi manusia Pancasila yang baik dan benar,” tegas politisi Partai Demokrat ini.

Menurut Dede Yusuf, yang penting bagi pemerintah dalam menangani terorisme tidak dengan cara-cara kekerasan, yang hanya akan menyebabkan Islamophobia. Tetapi dengan cara merangkul semua kelompok, karena semakin erat dirangkul maka semakin kuatlah bangsa ini,” katanya.

Sementara narasumber lain, anggota Fraksi Partai Golkar MPR RI, Dedy Mulyadi, menyatakan bahwa pada zaman Soekarno aksi teror dilakukan dengan cara lebih terlihat, dan menggunakan senjata. Mantan Bupati Purwakarta itu menyebut contohnya aksi G-30-S/PKI, serta DI TII. Di zaman sekarang, menurut Dedy Mulyadi, aksi kekerasan memakan banyak korban jiwa, dan hal seperti itu tak boleh terjadi.

Dedy mengingatkan, ancaman radikalisme di Indonesia tak pernah berkurang, hanya saja bentuknya sudah mengalami perubahan.



Karena itu, pola pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar MPR hendaknya jangan hanya dilakukan dengan cara berpidato di hadapan orang banyak. Tetapi harus bisa menghadirkan Pancasila di setiap relung hati masyarakat melalui praktik nyata dan dilakukan di seluruh waktu yang ada.

Sementara anggota Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Muhamad Nabil Harun, mengatakan, Indonesia berada di tiga persimpangan terorisme. Yaitu, domestik, regional, dan global. Secara domestik, terorisme banyak ditujukan untuk mengancam simbol-simbol Negara, seperti penyerangan terhadap markas polisi dan menteri.

Selanjutnya, secara regional, terorisme

di Indonesia terkoneksi dengan radikalisme yang tumbuh di negara lain. Sedangkan secara global, Indonesia menjadi salah satu target rekrutmen, seperti halnya negara-negara lain. Tetapi, setelah terpojok mereka kembali ke negara asalnya dan menjadi sel-sel terorisme yang hidup terpisah.

Karena itu Gus Nabil, begitu Muhamad Nabil Harun biasa disapa, berharap, pemerintah serius menangani persoalan terorisme dan radikalisme. Bukan hanya melarang cadar dan celana cingkrang semata, tapi terorisme bisa muncul di banyak tempat dengan bentuk berubah-ubah. Untuk itu, Gus Nabil berharap, seluruh kelompok masyarakat harus berpartisipasi

dalam menghadapi bahaya radikalisme.

Pernyataan serupa disampaikan pengamat terorisme Dr. Can Sapto Priyanto. Aksi terorisme, menurut Dr. Sapto Priyanto, dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak terpapar paham kebangsaan sejak kecil. Karena itu, ia mengkhawatirkan kebiasaan upacara bendera yang tidak lagi tampak di semua sekolah, khususnya sekolah swasta.

Hasil penelitian menyebutkan, 45,5% pelaku teror disebabkan oleh kurangnya mendapat paham kebangsaan. “Dan, 55,5% lagi karena masalah-masalah khusus, seperti masalah ekonomi,” ungkap Sapto Priyanto. □

MBO

## Empat Pilar dalam Perspektif Alquran

# PTIQ Perlu Kaji Empat Pilar dari Perspektif Al Qur'an



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) perlu dikaji dari perspektif Alqur'an. Untuk itu, Jazilul mengusulkan dan menggagas penulisan sebuah buku dengan tema “Empat Pilar MPR dalam Perspektif Alqur'an”. Buku ini ditulis oleh para sarjana alumni Institut PTIQ (Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an). Dan, buku ini merupakan kajian yang dilakukan sarjana-sarjana ilmu Alqur'an yang menjadi kontribusi

Ikatan Alumni PTIQ (IKAPTIQ) kepada bangsa dan negara ini.

“Karena saya juga berasal dari alumni PTIQ, saya berharap IKAPTIQ bisa membuat suatu karya semacam buku Empat Pilar dalam perspektif Alqur'an. Nanti bersama saya dan atas izin Rektor PTIQ kita membuat sebuah kajian dalam rangka mengisi kekosongan, apalagi pada saat ini kita dihadapkan pada perang ideologi,” kata Jazilul Fawaid dalam Peringatan Maulid Nabi Muhammad SWA sekaligus Haflah Kebangsaan dan Sosiali-

sasi Empat Pilar MPR di Ma'had Institut PTIQ Jakarta, Kamis malam (28/11/2019). Kegiatan yang diadakan IKAPTIQ bekerjasama dengan MPR RI ini dihadiri Rektor PTIQ Prof. Dr. Nasaruddin Umar, para mahasiswa, dan alumni PTIQ.

Menurut Jazilul, kajian Empat Pilar dari perspektif Alqur'an cukup penting untuk mengisi kekosongan wacana tentang kebangsaan. “Saya pikir kajian ini penting untuk bangsa ini. Bagi sarjana-sarjana Ilmu Alqur'an, kajian ini menjadi kontribusi untuk



mengisi kekosongan wacana tentang pilar-pilar kebangsaan. Para calon sarjana maupun sarjana Ilmu Alqur'an bisa terlibat dalam kajian Empat Pilar dari perspektif Alqur'an ini," ujar politisi PKB ini.

"Nanti tim kajian atau penulis buku bisa dipimpin senior IKAPTIO. Kemudian kita buat karya itu dan kita launching sebagai satu kontribusi IKAPTIO kepada bangsa ini. Bersama kami, para alumni PTIQ duduk bersama menggagas kajian agar Empat Pilar ini selaras dengan apa yang ada dalam Alqur'an," sambungnya.

Jazilul menambahkan, salah satu tugas MPR sebagaimana amanah UU MD3 adalah menyerap aspirasi dan menjaga Empat Pilar

kebangsaan. "Sebagai Ketua IKAPTIO sekaligus Wakil Ketua MPR, saya perlu jelaskan yang dimaksud dengan Empat Pilar adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang menjadi perekat kebangsaan kita, berbeda-beda tapi tetap satu. Biasanya orang menyebut PBNU (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD NRI Tahun 1945). Biar mudah disebut PBNU," terangnya.

Berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Jazilul mencontohkan teladan Nabi Muhammad yang seluruh

hidupnya didedikasikan untuk membangun masyarakat. Unsur penting dalam pembangunan masyarakat adalah software-nya, yaitu akhlak. "Hari-hari ini kita dihadapkan dengan situasi dimana software-nya mulai rusak. Software (akhlak) manusia agak rusak," ujarnya.

Karena itu, Jazilul mengharapkan, para mahasiswa, sarjana, dan alumni PTIQ bisa memberikan warna untuk perubahan, terutama pada akhlak dan moral bangsa ini. "Meskipun kita melakukan pembangunan sarana infrastruktur secara fisik, kalau di dalam diri manusia keropos, tentu lambat laun pembangunan fisik itu tidak akan bermakna bagi bangsa dan negara," ucapnya.

Sementara itu, Rektor PTIQ Prof. Dr. Nasaruddin Umar merasa bangga dengan adanya alumni PTIQ yang menjadi pimpinan MPR. "Saya merasa bangga, ketika dalam Sidang Paripurna MPR, ada alumni PTIQ duduk di jajaran pimpinan sidang. Para mahasiswa bisa mencontoh alumni PTIQ ini. Banyak petinggi di negeri ini adalah alumni PTIQ," ujarnya.

Nasaruddin menambahkan, alumni PTIQ banyak dibutuhkan di masyarakat. "Dua masjid di Los Angeles Amerika Serikat dan masjid di Inggris meminta kepada saya alumni PTIQ untuk menjadi imam di masjid. Imam masjid di sana, tidak sekedar imam salat, tetapi adalah seperti pemimpin umat," tuturnya. □

BSC



Warganet Jakarta Ngobrol Bareng MPR

# Minta Warganet Mitra MPR Jabarkan Empat Pilar MPR



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR Jazilul Fawaid menghadiri pertemuan dengan warganet dalam kegiatan yang dikemas dengan tema “Warganet Jakarta Ngobrol Bareng MPR”. Selain merasa surprise berada di tengah-tengah warganet, ia mengharapkan, warganet (netizen dan blogger) menyebarkan nilai-nilai Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) di dunia maya.

“Saya meminta teman-teman warganet menjadi mitra MPR dalam menjabarkan Empat Pilar MPR. Menebar berita-berita positif terkait MPR, soal ketatanegaraan dan pentingnya soal Pancasila,” katanya dalam acara Ngobrol Bareng MPR dengan Warganet (Netizen/Blogger) di Jakarta, Rabu malam (27/11/2019). Jazilul Fawaid didampingi Staf Khusus Pimpinan MPR, Muhammad Rizal, dan Kepala Biro Humas Siti Fauziah. Ngobrol Bareng Warganet ini diikuti 131 peserta dari kalangan netizen, blogger, dan alumni Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar.

Menurut Jazilul, Ngobrol Bareng dengan warganet ini dengan tujuan agar kalangan milenial mengerti, menghayati, dan mengamalkan Empat Pilar MPR. “Untuk menumbuhkan rasa memiliki pada pilar-pilar kebangsaan sekaligus mempertahankan dan mengeksplorasi nilai-nilai positif atau budaya yang ada. Bukan malah menjadi konsumen dari ideologi, budaya, aliran atau pikiran dari

luar. Kita memiliki ideologi yang orisinal, yakni Pancasila,” paparnya.

Dengan Ngobrol Bareng Netizen, lanjut Jazilul, MPR ingin menjaring aktivis di dunia maya. “MPR perlu menggaet lebih luas anak-anak muda. Artinya, menyebarkan Empat Pilar melalui media massa. Kita perlu Anak muda yang memahami Empat Pilar,” ujar politisi PKB itu.

Jazilul Fawaid mengaku surprise berada di tengah-tengah para warganet, terutama netizen dari kalangan milenial. “Saya merasa surprise karena Pimpinan MPR bisa mengajak warganet menyampaikan pesan positif di dunia maya. Saya merasa surprise karena negara ini harus diisi oleh anak-anak muda, pintar-pintar,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Jazilul menyampaikan pimpinan MPR saat ini berjumlah 10 orang. Semua kekuatan politik terwakili menjadi Pimpinan MPR. Dulu MPR sebagai lembaga tertinggi negara sekarang hanya sebagai lembaga negara. Saat ini kedudukan MPR sejajar dengan DPR, DPD, Mahkamah Agung, sama dengan presiden.

“Meski demikian, MPR tetap memiliki kewenangan tertinggi, yaitu menetapkan dan mengubah UUD. MPR sudah melaksanakan amandemen atau perubahan UUD dalam empat tahap tahun 1999 - 2002,” jelasnya.

Jazilul menambahkan, pada saat ini MPR menerima rekomendasi dari MPR periode 2014 - 2019, yaitu mengamandemen UUD terkait dengan pokok-pokok haluan negara.





“Negara membutuhkan haluan negara agar perencanaan pembangunan bisa dilakukan secara terintegrasi, baik di pusat sampai daerah,” ujarnya.

Sementara itu Staf Khusus Pimpinan MPR, Muhammad Rizal, menambahkan, saat ini MPR juga sedang menyiapkan pokok-pokok haluan negara. Pokok-pokok haluan negara ini dianggap perlu agar pembangunan di negeri ini berjalan berkesinambungan.

Dalam menyiapkan pokok-pokok haluan negara, MPR memerlukan masukan pendapat dari semua kalangan. Termasuk juga dari

warganet. “Kalau ada perubahan (amandemen UUD NRI 1945), bagaimana pendapat netizen,” ucapnya.

Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah menambahkan, MPR tidak mau meninggalkan satu segmen pun untuk terlibat dalam menyosialisasikan Empat Pilar MPR. “Kami lakukan berbagai metode dan berbagai kalangan. Sosialisasi sudah kita lakukan di kalangan SD, SMP, SMA dan juga masyarakat luas. Ini juga kalangan milenial yang tidak akan ditinggalkan,” urainya.

Siti Fauziah mengatakan, kegiatan Ngobrol

Bareng Netizen ini sudah dilakukan sejak 2015 di berbagai kota, seperti Jakarta, Solo, Yogyakarta, Makassar, Manado, Bandung, Jambi, dan Surabaya.

“Pada 2018, kami juga mengadakan deklarasi netizen di Gedung MPR. Berharap ini nanti para netizen mendeklarasikan kembali apa yang akan disampaikan. Harapan MPR para netizen bisa menulis satu kata saja dalam satu hari karena follower banyak, meski hanya dengan satu kata, tapi kalau dibaca para follower jadi banyak,” tuturnya. □

BSC

## Media Expert

# Masif dan Kompak Hubungan Humas MPR dengan Media

**D**I HADAPAN 34 wartawan dari beragam media, Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah menjelaskan berbagai metoda Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Sosialisasi diberikan kepada seluruh elemen masyarakat, mulai dari PAUD,” ujar Siti Fauziah dalam acara Media Expert di Kota Batu, Jawa Timur (8/12/2019).

Karena diberikan kepada seluruh elemen masyarakat maka metode yang diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. “Pada anak PAUD kita sosialisasikan lewat lomba menggambar, mewarnai, dan komik”, tuturnya. Sedangkan untuk pelajar SMA ada lomba cerdas cermat. “Bagi mahasiswa lebih banyak lagi metodenya, seperti legal drafting, outbound, dan debat konstitusi”, ungkapnya.

Tak hanya itu, menurut perempuan dari Bandung, Jawa Barat itu, sebelum dia ke Batu lebih dulu pergi ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Di kota kaya minyak itu, MPR melakukan sosialisasi dengan peserta warganet, netizen, atau pengguna media sosial. Sosialisasi diberikan kepada mereka dianggap penting sebab saat ini ada gejala minat membaca masyarakat, terutama kaum milenial tidak seperti pada masa sebelumnya. “Karena perkembangan zaman sehingga semua yang ada dibuat secara elektronik”, tuturnya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Menurut perempuan yang akrab disapa Bu Titi ini, sosialisasi juga disampaikan lewat seni budaya. Dengan cara seperti itu MPR ikut mengangkat seni budaya yang bisa jadi jarang diminati lagi oleh masyarakat yang ada. Lewat sosialisasi dengan menggunakan budaya, pesan kerukunan dan persatuan disampaikan lewat lakon-lakon yang ada.

Dalam acara bertema ‘Tabulasi Strategi Layanan Publikasi pada Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR Periode 2019-2024’, Siti Fauziah mengatakan, saat ini pimpinan MPR dipimpin oleh 10 orang. “Mereka merepresentasikan partai politik yang lolos parliametary threshold dan Kelompok DPD”, ungkapnya. Dengan jumlah pimpinan MPR sebanyak itu,

Siti Fauziah menyebut, perlu strategi khusus untuk bagaimana mempublikasikan aktivitas pimpinan MPR. Untuk itu, dalam acara yang digelar di Kota Wisata Batu, Setjen MPR meminta saran, masukan, bahkan kritik dari para wartawan. “Kita meminta masukan dari para awak media”, ujarnya.

Apa yang disampaikan oleh Siti Fauziah dibenarkan oleh Plt. Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga, dan Layanan Informasi, Budi Muliawan. Menurut Budi Muliawan, dalam mempublikasikan kegiatan Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR perlu publikasi yang bisa mengikuti perkembangan zaman. “Untuk itu kita meminta masukan dan strategi dari para





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

lka sebagai semboyan negara).

Menurut Siti Fauziah, MPR menggunakan berbagai metode untuk menyosialisasikan Empat Pilar MPR, seperti Lomba Cerdas Cermat untuk siswa SLTA, outbound untuk mahasiswa, training of trainers, bahkan dengan metode pagelaran seni budaya. “Itu semua ada di dunia nyata. Kita tidak mau meninggalkan dunia maya. Karena itu, MPR juga ingin melibatkan warganet untuk menyosialisasikan Empat Pilar MPR. Kita masuk ke semua segmen masyarakat karena warganet ada yang menjadi siswa, mahasiswa, pekerja, dan ibu rumah tangga,” ujarnya.

Siti Fauziah menyebutkan, keinginan MPR terhadap warganet sangat sederhana. Yaitu, meminta warganet untuk menyampaikan nilai-nilai Empat Pilar di media sosial. “Tidak perlu dalam tulisan panjang, cukup satu kalimat saja. Misalnya, dalam satu hari menyampaikan satu nilai Empat Pilar seperti soal kebersamaan, persatuan, gotong royong, cinta Indonesia. Dengan hanya satu atau beberapa kata tentang nilai Empat Pilar bisa mempengaruhi follower untuk mencintai Indonesia,” sebutnya.

Karena itu, MPR membutuhkan peran aktif warganet untuk berpartisipasi memasyarakatkan Empat Pilar MPR. Kalangan warga-

net dipilih sebagai segmen karena dianggap efektif dalam menyebarluaskan Empat Pilar melalui berbagai media sosial seperti blog, facebook, twitter, instagram. Pegiat media sosial lebih efektif untuk menyampaikan pesan-pesan Empat Pilar ke berbagai komunitas yang ada.

Selain itu, kegiatan “Ngobrol Bareng MPR” juga untuk memperkenalkan dan memberi pemahaman tentang MPR sebagai lembaga Negara, baik wewenang maupun tugas-tugas MPR. Dengan demikian, para pegiat media sosial bisa menjembatani visi misi MPR sebagai Rumah Kebangsaan. “MPR terus-menerus akan mengajak warganet untuk bekerjasama memasyarakatkan Empat Pilar MPR dan juga mengharapkan masukan pemikiran untuk MPR,” kata Siti Fauziah.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian PDSI Sekretariat Jenderal MPR, Slamet mengatakan pada waktu lalu penyebaran informasi melalui radio, kemudian televisi, media cetak. Sekarang perkembangan informasi dan teknologi sudah luar biasa cepat. Anak-anak sudah diperkenalkan dengan teknologi informasi. “Dunia internet sangat luar biasa. MPR sangat memperhatikan media sosial ini,” ujarnya.

MPR, lanjut Slamet, juga mengharapkan

masukan dan aspirasi dari warganet terkait masalah kebangsaan dan ketatanegaraan. “Kita perlu masukan dari warganet untuk nanti dijadikan bahan kajian juga di MPR,” ujarnya.

Ketua Komunitas Blogger Balikpapan Bambang Herlandi mengungkapkan, Komunitas Blogger Balikpapan berdiri pada 9 Desember 2007. Komunitas ini berawal dari komunitas IT yang membuat blog-blog. Tercatat anggota komunitas sekitar 200 orang. “Kebanyakan sekarang sudah beralih dari blog ke facebook dan media sosial lainnya,” jelasnya.

Pertemuan “Netizen Balikpapan Ngobrol Bareng MPR” yang dipandu oleh Mira Nurfahla Sahid (social media influencer) berlangsung cukup produktif. Dari pertemuan ini muncul usul-usul yang menarik untuk membantu kerja-kerja MPR. Misalnya, membuat konten yang tidak hanya positif, tetapi juga menarik bagi kalangan milenial, membuat konten dalam bentuk infografis, dan lainnya.

Nicholas Heru, peserta “Netizen Balikpapan Ngobrol Bareng MPR” mengungkapkan, penyebaran pesan dan nilai Empat Pilar MPR melalui media sosial harus didukung di dunia nyata. Media sosial memang efektif untuk menyampaikan pesan dan nilai Empat Pilar, namun implementasi di dunia nyata jauh lebih penting.

“Perlu keteladanan pemimpin di dunia nyata, mulai dari pemimpin di komunitas sampai yang lebih besar. Pemimpin yang mengimplementasikan nilai-nilai Empat Pilar,” tuturnya.

Tak jauh berbeda, warganet Balikpapan lainnya, Kustiyan, juga berpendapat, soal Empat Pilar MPR jangan hanya ramai di media sosial, tetapi yang penting adalah praktiknya di dunia nyata. Dia menyarankan agar MPR juga membuat sosialisasi yang nyata kepada para warganet.

Peserta lainnya, Aji, menyarankan agar konten-konten di media sosial terkait pemasyarakatan Empat Pilar MPR tidak hanya positif, tetapi harus ringan dan menarik kalangan milenial. “Sebab anak-anak milenial sekarang jarang membaca, tetapi lebih senang melihat visual. Dengan konsep ini nilai-nilai Empat Pilar bisa lebih mudah diterima kalangan milenial,” katanya. □

BSC



Kompassimanic SMA Negeri I Ciracap

# Bangun Gotong Royong Lewat Aksi *Bedah Rumah*

**T**AWURAN masal dan kebut-kebutan di jalan raya yang dilakukan oleh segelintir oknum remaja telah merusak citra generasi muda. Seolah-olah, semua generasi muda gemar berlaku anarkis, berantem, dan kebut-kebutan di jalan. Padahal, masih banyak generasi milenial yang mau mengisi hari-harinya dengan kegiatan bermanfaat bagi orang lain. Seperti yang dilakukan siswa-siswi SMA Negeri I Ciracap Sukabumi, Jawa Barat.

Para siswa-siswi yang tergabung dalam

bedah rumah, mereka terlebih dulu membuat proposal kegiatan. Proposal itu bukannya diedarkan langsung ke masyarakat (para donatur), tapi mereka upload rencana kegiatan bedah rumah itu di media sosial, *facebook*, dengan mencantumkan rencana biaya dan foto-foto rumah yang akan dibedah.

Nah, sumbangan dana untuk kegiatan itu diharapkan datang dari para pengguna *facebook*. Berapa pun sumbangan mereka terima, dan berapapun besar dana yang

mereka tidak pulang, tapi menginap di lokasi itu. Baru esoknya, Sabtu dan dilanjutkan Ahad, mereka bergotong royong bersama warga masyarakat mengerjakan rumah itu hingga selesai. "Jika Sabtu atau Ahad belum juga selesai maka setiap pulang sekolah kami tengok hasilnya, sampai selesai," katanya.

Gerakan 99 Rumah Layak Huni untuk Janda Jompo Pajampangan, menurut Beni, sebenarnya hanya alat. Mereka memiliki tujuan yang lebih tinggi dari sekedar menyediakan rumah layak huni bagi para



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Komando Pecinta Alam Siswa-siswi SMA Negeri I Ciracap (Kompassimanic) memiliki kegiatan kemanusiaan yang memilih sarannya pada janda dan orang jompo. Melalui sebuah gerakan yang mereka namakan "Gerakan 99 Rumah Layak Huni untuk Janda Jompo Pajampangan, Kompassimanic," mereka berusaha menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya para janda dan orang jompo.

Bentuk gerakan mereka adalah membedah rumah para janda dan para jompo yang semula tak layak hingga menjadi rumah yang pantas untuk ditempati. Sesuai namanya Gerakan 99, maka sasaran gerakan mereka adalah 99 rumah milik janda dan jompo. Hebatnya, setiap akan melakukan kegiatan

masuk, proyek bedah rumah tetap jalan. "Kalau toh dana yang masuk Rp 1 juta, ya proyek bedah rumah tetap jalan," ungkap Beni Bunyamin, Pembina Kompassimanic yang juga guru SMA Negeri 1 Ciracap, saat dihubungi wartawan Majalah *Majelis* beberapa waktu lalu.

Pokoknya berapa pun dana yang masuk, proyek tetap jalan. Anggota Kompassimanic terjun langsung dalam pelaksanaan bedah rumah tersebut, bersama anggota masyarakat, khususnya tetangga sekitar rumah yang dibedah. Menariknya, setiap kegiatan bedah rumah dimulai pada hari Jum'at.

"Kami mulai merobohkan rumah yang akan dibedah hari Jumat, setelah pulang sekolah," cerita Beni. Selesai merobohkan rumah,

janda dan jompo. Tujuan sesungguhnya yang hendak dicapai adalah membangun kembali budaya gotong royong dan saling bantu di antara warga masyarakat. "Tujuan tersebut dianggap lebih penting, karena saat ini gotong royong dan saling bantu di kalangan warga masyarakat sudah semakin terpinggirkan.

Kompassimanic mengaku tak pernah risau terhadap biaya yang mereka butuhkan untuk kegiatan bedah rumah tersebut. Terlebih saat ini, sudah begitu banyak orang yang makin peduli dengan kegiatan yang mereka lakukan. Bahkan berapapun uang yang dikantongi, kegiatan bedah rumah tetap berjalan sesuai rencana. Mereka yakin, Allah SWT akan selalu menggenapkan ke-



kurangan biaya yang diperlukan.

Selama melaksanakan aksi sosial itu, menurut Beni, pihaknya mendapatkan berbagai pelajaran, khususnya menyangkut sifat masyarakat yang selalu ingin diberi. Kisah menarik, salah satunya terjadi ketika Kompassimanic terpaksa membeli genteng, karena jumlah genteng yang lama tidak mencukupi. Namun, saat hendak membayar mereka kaget, karena si pedagang genteng itu ternyata adalah anak dari pemilik rumah yang sedang diperbaiki.

Cerita lain terjadi, ketika Kompassimanic mendengar kabar bahwa rumah yang hendak mereka bedah sudah dirobohkan sejak pagi hari. Padahal, saat itu mereka masih di sekolah, dan belum berangkat. Hal yang membuat prihatin adalah pembongkaran rumah itu ternyata suruhan aparat desa dan kecamatan. Bahkan, camat dan kepala desa sempat berfoto di depan reruntuhan bangunan rumah yang dirobohkan. "Tapi saat rumah itu dibangun, jangan sampai memberi bantuan kelihatan pun tidak," katanya.

### Anggota Sendiri

Kompassimanic pertama kali melaksanakan aksi sosial, bedah rumah, pada 2008. Saat itu, rumah yang diperbaiki merupakan tempat tinggal milik keluarga salah satu anggota Komando Pecinta Alam Siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciracap sendiri. Ceritanya, pada suatu waktu Beni berkunjung ke rumah siswanya. Tiba di sana, ia tertegun melihat kondisi rumah tersebut. Di mana-mana terlihat compang-camping, reyot, dan tak layak huni.

Melihat kondisi tersebut, Beni Bunyamin mengajak siswa-siswinya untuk membantu memperbaiki rumah itu. Dibantu oleh anggota Kompassimanic, warga masyarakat sekitar,

di antaranya terdapat beberapa tukang, berhasil membedah rumah siswanya itu sehingga layak untuk di tempati. Hanya saja, karena kebutuhan dana untuk bedah rumah itu begitu besar, Beni terpaksa hutang di bank yang jumlahnya mencapai Rp 12 juta.

Sayangnya, aksi bedah rumah tersebut menjadi yang pertama dan satu-satunya pada 2008. Bahkan, setelah itu Kompassimanic tidak pernah melakukan aksi bedah rumah lagi. Mereka kembali ke habitatnya sebagai pencinta alam, dengan kegiatan penghijauan di jalur pantai dan lahan kritis. Baru pada 2016, aksi bedah rumah kembali dilanjutkan. Hingga kini, siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciracap sudah berhasil melakukan bedah rumah para janda dan jompo sebanyak 35 tempat hunian.

Saat ini, menurut Beni, pihaknya semakin banyak mendapat permintaan bedah rumah. Setidaknya sudah ada lima rumah yang terdaftar untuk minta diperbaiki. Sayangnya, kemampuan Kompassimanic untuk melakukan perbaikan tidak sebanding dengan permintaan yang terus berdatangan. Satu bulan mereka hanya bisa merampungkan dua rumah.

Meski begitu, Beni beserta Kompassimanic akan terus melaksanakan kegiatan sosialnya, membantu menyediakan rumah layak huni bagi para janda dan jompo. Target pertama adalah mereka akan berusaha melakukan kegiatan bedah rumah hingga mencapai jumlah 99 rumah, seperti nama gerakannya.

"Selama diberi kesempatan, kami akan terus membantu masyarakat memperoleh rumah layak huni. Kalau 99 sudah tercapai, kami akan berusaha mendapatkan 99 rumah berikutnya," begitu tekad Beni. □

MBO

## Beni Bunyamin

### Berkat Wesel Pos

**S**UKSES program bedah rumah yang dilaksanakan Kompassimanic tak lepas dari keteguhan dan tangan dingin Beni Bunyamin. Sebagai guru SMA Negeri Ciracap dan Pembina Kompassimanic, Beni tak pernah menyerah menghadapi setiap tantangan yang ditemukannya. Termasuk jika harus menanggung risiko biaya, seperti yang terjadi pada bedah rumah pertama, 2008.

Bagi Beni, hidup memang harus bermanfaat bagi orang lain. Itu bukan saja



anjuran dari Nabi Muhammad SAW, seperti yang tertuang dalam hadis yang berbunyi: *Khoirunnaasi anfa'u hum linnaas* (sebaik baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain), tetapi pria kelahiran Bogor 4 April 1967 ini sempat mendapat pelajaran tersebut langsung dari orangtuanya.

"Saat saya masih kuliah di IKIP Bandung, Bapak saya pernah menuliskan hadis tersebut dalam wesel yang beliau kirimkan. Sejak itu, saya benar-benar ingin selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain," kata anak kedua dari sembilan bersaudara pasangan H. Sarif Khumaidah dan Titin Fatimah ini.

Nah, dengan menyediakan rumah layak huni bagi para janda dan jompo, berarti dia telah berusaha ikut mencegah musibah yang diberikan Allah. Beni percaya, kalau para janda dan Jompo ini tersakiti niscaya do'a-do'anya akan diterima oleh Allah. Karena itu, Beni berusaha membantu mereka agar tidak merasa terzholimi. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

## Festival Senam SKJ Djadoel dan Indonesia Bergerak

LAPANGAN MPR/DPR pada 7 Desember 2019 diramaikan oleh sekitar 2000 kaum perempuan yang mengikuti festival senam, Festival yang diberi judul: “Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) Djadoel dan Indonesia Bergerak” ini diselenggarakan dalam rangka HUT ke-20 Dharma Wanita Persatuan (DWP).

Para peserta festival senam ini adalah anggota DWP Instansi Pemerintah Pusat, DWP Provinsi DKI Jakarta, DWP Provinsi Banten, DWP Provinsi Jabar, dan tentunya DWP Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI.

Senam SKJ Djadoel adalah senam massal diiringi irama lagu

yang diangkat kembali, karena selain gerakannya sangat dinamis dan membuat sehat, juga bertujuan mengenang kembali senam yang sangat populer pada era 80 hingga 90-an.

Tujuan festival ini adalah untuk menyukseskan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Dalam penyelenggaraannya acara ini, DWP Pusat bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan DWP Setjen MPR. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono. □

DER

## Setjen MPR Gelar Forum Koordinasi Protokol Lembaga Negara 2019



BERTEMPAT di Ruang GBHN Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/12/2019), Setjen MPR menggelar Forum Koordinasi Protokol Lembaga Negara Tahun 2019. Hadir sebagai peserta adalah para personil protokol Biro Sekretariat Pimpinan Setjen MPR dan DPD.

Hadir sebagai narasumber utama Forum Koordinasi Protokol Lembaga Negara Tahun 2019 adalah Sekretaris Jenderal MPR Dr. H. Ma’ruf Cahyono, SH., MH., dan Kepala Biro Protokol Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Suratna.

Pada intinya, forum tersebut bertujuan untuk menguatkan koordinasi dan komunikasi antarprotokoler dengan berbagai pihak, juga saling belajar, tukar pendapat dan pandangan serta pengalaman seputar tugas keprotokolan.

Selain itu, protokol lembaga negara mesti bersinergi dengan baik, sehingga ketika bertemu dalam menjalankan tugas keprotokolan di lapangan akan terjalin kerjasama dan saling pengertian antara satu dengan lainnya. □

DER

## Perpustakaan MPR dan Perpustakaan Unissula, Semarang Jalin Kerjasama



**B**ERTEMPAT di Gedung Perpustakaan Unissula, Lantai III, Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang, Jawa Tengah, Senin (2/12/2019), Perpustakaan MPR RI dan Perpustakaan Unissula menjalin kerjasama dalam rangka meningkatkan tata kelola perpustakaan.

Penandatanganan naskah kerjasama dilakukan oleh Kepala Biro Humas MPR RI Siti Fauziah, SE., MM., dan Kepala UPT Perpustakaan Unissula Dr. H. Muhammad Ja'far Shodiq, M.Si., Al.CA. Ikut menyaksikan Kepala Bagian Perpustakaan MPR RI, Yusniar, SH., dan ratusan mahasiswa di lingkungan Unissula.

Kepala Biro Humas MPR, Siti Fauziah, dalam sambutannya menyatakan bahwa perpustakaan MPR berkomitmen melakukan upaya perbaikan dalam rangka menciptakan perpustakaan yang baik dan modern, khususnya di bidang informasi ketatanegaraan.

"Penandatanganan kerjasama ini menjadi hal yang strategis mengingat dalam pengelolaan dan pelaksanaan keperpustakaan, termasuk sistem publikasi, akan semakin baik," kata Siti Fauziah. Penandatanganan kerjasama ini, menurut Siti Fauziah, merupakan

inisiatif Setjen MPR RI dan Unissula Semarang.

Dalam pertemuan informal itu Siti Fauziah dan Muhammad Ja'far Shodiq sepakat untuk meningkatkan hubungan antara Humas MPR dan Unissula melalui pertukaran informasi dan publikasi, serta sumber daya informasi legislatif. Khususnya pertukaran informasi dan publikasi ketatanegaraan.

Baik Siti Fauziah maupun Muhammad Ja'far Shodiq mengakui, saat ini teknologi informasi telah berkembang sangat cepat. "Perkembangan teknologi informasi yang cepat memungkinkan kami bisa saling mengisi dan belajar dengan lebih mudah. Semoga kerja sama ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua," kata Siti Fauziah.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan diskusi pustaka akademik bersama Unissula dengan tema: "Memperkuat Kedudukan Produk Hukum MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan." Pembicara utama diskusi ini adalah Dr. Hj. Widayati, SH., MH. dengan moderator H. Winanto, SH., MH. □

JAZ



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**Aboe Bakar Al Habsyi**, Anggota Komisi III DPR

## Berharap Pemberantasan Korupsi Semakin Kuat

**M**ENJELANG akhir tahun 2019, persisnya Jumat (20/12/2019), Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019 – 2023 di Istana Negara, Jakarta. Kelima pimpinan KPK yang dilantik adalah: Firlis Bahuri (Ketua), Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron. Mereka menggantikan pimpinan KPK periode 2015 – 2019 yang sudah habis masa jabatannya. Kelima pimpinan KPK yang dilantik itu sebelumnya telah melewati proses seleksi lewat panitia seleksi yang dibentuk presiden. Mereka juga sudah melewati uji kepatutan dan kelayakan di Komisi Hukum DPR.

Pada hari yang sama Presiden juga melantik lima anggota Dewan Pengawas KPK periode 2019 – 2023. Kelima anggota Dewan Pengawas itu adalah: Tumpak Hatarongan Panggabean (mantan Wakil Ketua KPK), Artidjo Alkostar (mantan Hakim Mahkamah Agung), Albertina Ho (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang), Syamsuddin Haris (Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), dan Harjono (mantan Hakim Mahkamah Konstitusi).

Dewan Pengawas merupakan struktur baru di KPK. Keberadaan Dewan Pengawas

diatur dalam UU KPK hasil revisi, yakni UU No. 19 Tahun 2019. UU ini mengatur, untuk pertama kalinya anggota Dewan Pengawas ditunjuk langsung oleh Presiden. Tugas Dewan Pengawas antara lain mengawal pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Selain itu, memberi izin penyadapan dan penyitaan, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.

Untuk membahas lebih jauh tentang Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang baru ini, Majelis mewawancarai anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al Habsyi. Berikut wawancara dengan Aboe Bakar yang juga Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, pada awal Januari ini. Petikannya.

**Presiden telah melantik Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Apa tanggapan Bapak terhadap pimpinan dan dewan pengawas yang baru saja dilantik?**

Pertama, mereka sudah terpilih dengan proses yang diatur oleh UU, tentu kita harus menghormati dan memberikan kesempatan mereka untuk bekerja. Kedua, saat dilantik mereka bersumpah di bawah kitab suci bahwa mereka akan menjalankan tugas

dengan sebaik mungkin. Saya kira ini adalah garansi bahwa mereka akan menjalankan tugas pemberantasan korupsi dengan sebaik mungkin.

Ketiga, nama-nama yang dipilih dalam Dewan Pengawas KPK terlihat cukup keren. Siapa yang tak kenal Artidjo Alkostar atau pun Albertina Ho. Tentunya kita punya harapan mereka akan bekerja dengan baik untuk mengawal KPK.

Tugas berat mereka adalah meluruskan kerja KPK jika di tengah jalan terlihat tidak lempeng lagi. Tentunya ini tidak mudah, karena mereka perlu mengawasi dalam upaya perbaikan dan penguatan, bukan mengawasi untuk melemahkan.

**Baru kali ini KPK dibayang-bayangi kontroversi, mulai dari revisi UU KPK sampai pada pembentukan Dewan Pengawas, apa komentar Bapak?**

Harus disadari oleh Dewan Pengawas KPK bahwa kehadiran mereka yang ditunjuk presiden cukup membawa kontroversi. Tentunya langkah mereka akan ditunggu publik, jangan sampai langkah yang diambil menguatkan dugaan adanya muatan agenda pihak tertentu. Keberadaan Dewan Pengawas harus meningkatkan profesionalitas dan independensi KPK.

Saat ini merupakan waktu untuk membukti-



kan dua hal, yakni: *Pertama*, keberadaan Dewan Pengawas memang benar adanya. Bahwa tim ini akan dapat meluruskan kerja KPK jika ada persoalan di tengah jalan. *Kedua*, ini adalah untuk membuktikan bahwa presiden memilih orang yang benar, bahwa para anggota Dewan Pengawas memang orang yang memiliki komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi dan memiliki integritas yang tidak bisa ditawar lagi.

**Masih adakah peluang untuk menerbitkan Perppu KPK sebagaimana keinginan masyarakat sipil? Apalagi langkah *judicial review* UU KPK beberapa kali ditolak MK?**

Sebenarnya kapan pun presiden bisa menerbitkan Perppu jika dipandang perlu. Hal ini sangat dimungkinkan seperti pada isu yang lain, semisal penerbitan Perppu Ormas, Perppu Kebiri, Perppu Akses Informasi Keuangan. Bahkan Presiden Jokowi sudah pernah menandatangani Perppu Tentang KPK, yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 2015 pada 18 Februari 2015. Penerbitan Perppu tersebut menyusul kekosongan keanggotaan pimpinan KPK setelah ditinggal Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Saat itu, keduanya diberhentikan karena ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.

**Ada pesimisme di kalangan masyarakat sipil terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Misalnya polisi yang menjadi ketua KPK, bagaimana jika terjadi kasus korupsi di kepolisian, bisa jadi terjadi konflik kepentingan. Apa komentar Bapak?**

Jika dirunut ke belakang, sebenarnya pesimisme itu sudah biasa pada masa awal jabatan KPK. Karena sejak pertama kali ekspektasi publik ke KPK sangat tinggi. Terpilihnya pimpinan KPK periode pertama dengan ketua Taufiequrachman Ruki yang merupakan Irjen Polisi saat itu juga membawa pesimisme publik. Jajak pendapat *Kompas* pada awal komisi ini terbentuk mencatat, sebanyak 61% responden tidak yakin lembaga ini mampu memberantas korupsi.

Namun, pesimisme publik dijawab KPK dengan cepat. Banyak kasus korupsi yang kemudian diungkap, seperti pembelian helikopter Rusia senilai Rp 12 miliar yang melibatkan Gubernur Aceh Abdullah Puteh. Beberapa menteri pun terseret kasus

korupsi oleh KPK, seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri dan Menteri Agama Said Agil Al Munawar. Belum lagi kasus korupsi Perum Bulog yang menyeret direktur utamanya, Widjanarko Puspoyo. Kemudian tertangkapnya anggota KPU, Mulyana W Kusumah. Sampai juga menyeret Ketua KPU Nazaruddin Sjamsudin dan anggota KPU lainnya, Daan Dimara, Rusadi Kantaprawira, dan sejumlah pejabat Sekretariat Jenderal KPU.

Tidak jauh berbeda dengan KPK periode pertama, terpilihnya Antasari Azhar, KPK tetap dihadapkan pada pesimisme publik. Terpilihnya Antasari sendiri juga memicu kontroversi, karena nama ini pernah dikaitkan dengan sejumlah kasus saat menjadi jaksa.



Namun, setelah itu terlihat penanganan beberapa kasus seperti mantan Duta Besar RI untuk Malaysia Rusdihardjo, kasus aliran dana Bank Indonesia yang menyeret sejumlah pejabat BI, termasuk Gubernur BI Burhanudin Abdullah, dan kasus besar yang menarik perhatian publik di periode ini adalah tertangkapnya jaksa Urip Tri Gunawan saat menerima suap.

Karenanya, jika saat ini keberadaan Pimpinan KPK diawali dengan pesimisme publik saya kira wajar saja. Hal ini seharusnya disambut positif oleh para pimpinan, yaitu dengan membuktikan bahwa mereka akan menjadi harapan baru pemberantasan korupsi di Indonesia.

**Bagaimana dengan pembentukan Dewan Pengawas yang dianggap membatasi gerak KPK? Misalnya, untuk melakukan penyadapan harus izin dari Dewan Pengawas?**

Seharusnya tidak ya, karena tugas mereka seharusnya memberikan dukungan kepada KPK. Proses perizinan itu hanya bagian dari pengawasan sebagai bentuk kontrol, tak lebih dari itu. Jika keberadaannya mempersulit, tentunya harus dievaluasi.

**Bisakah Dewan Pengawas KPK independen dan tidak mengintervensi penyelidikan kasus korupsi? Dewan Pengawas sendiri ditunjuk presiden sehingga seolah-olah menjadi perpanjangan tangan presiden?**

Memang seharusnya begitu. Hal itu yang seharusnya terjadi, Dewan Pengawas wajib independen. Jika ternyata mereka memiliki agenda titipan tertentu, seperti yang dikhawatirkan, tentunya akan ada reaksi dari

publik. Secara moral mereka juga telah melanggar sumpah jabatan yang telah diikrarkan saat pelantikan.

**Apa harapan Bapak dengan dilantiknya Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK ini? Apakah terjadi pelemahan KPK atau sebaliknya KPK justru semakin kuat ke depan?**

Tentunya kita ingin pemberantasan korupsi ini akan semakin kuat. Tentunya, kuat bukan hanya dalam artian melakukan penindakan, karena sejatinya penindakan adalah langkah akhir. Melakukan penindakan saja, sama halnya memadamkan api saja saat kebakaran. Ada hal lebih lanjut yang harus dilakukan, yaitu melakukan pencegahan.

Ke depan kita berharap desain pencegahan dan pemberantasan korupsi akan lebih kuat lagi. Sehingga upaya penyelamatan keuangan negara akan dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. □

# Cara Memberi Pemahaman Empat Pilar *untuk Kaum Ibu*



**M**ANTAN Senator dari daerah Gorontalo, **Hana Hasanah Shahab**, punya cerita menarik ketika berbincang tentang Empat Pilar MPR di kalangan kaum ibu. “Saya selalu terpingkal-pingkal jika berbincang dengan kaum ibu, ketika membicarakan Empat Pilar MPR,” cerita perempuan kelahiran Jakarta, 1 September ini, ketika memberikan materi Empat Pilar di hadapan masyarakat Tangerang Selatan, Kamis (12/12/2019).

Betapa tidak, ketika asyik berbincang tentang Empat Pilar, ada saja ibu-ibu yang nyeletuk: “Pusing ah, ngomongin Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang penting dapur ngebul. Yang penting buat ibu-ibu mah mikirin rumah tangga,” kata Hana mengutip ucapan ibu-ibu.

Tapi, Hana pun punya kiat menghadapi ibu-ibu seperti ini. Istri Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad ini lalu memberi penjelasan mengenai dampak bila kaum ibu tidak memahami Empat Pilar dalam kehidupan berbangsa. Agar menarik, Hana menyampaikan penjelasan secara interaktif dengan bahasa rakyat dan diselengi canda.

Hana menjelaskan dengan memberi contoh anak-anak sekarang yang sangat tergantung dengan gadget. “Kalau ibu-ibu biarkan maka segala macam pengaruh negatif dari gadget itu akan memengaruhi perilaku anak, seperti pornografi, kekerasan, dan radikalisme. Mau anak ibu jadi kacau?” kata Hana. Pertanyaan itu dijawab serentak “tidak mau” oleh ibu-ibu. “Nah, kalau begitu, pahami Empat Pilar secara benar, walaupun urusan rumah tangga ibu-ibu banyak,” pinta Hana. □



DER

*Hana Hasanah Shahab*

## Cara Sang Gubernur Melayani Rakyatnya

**G**UBERNUR Sulawesi Selatan, **Nurdin Abdullah**, memiliki cara unik untuk melayani rakyatnya, terutama ketika rakyat ingin bertemu Gubernur. Biasanya tamu diminta nunggu sampai lama, kadang sudah nunggu lama tak ketemu juga. “Kalau saya bebas, mau ketemu datang aja. Kalau saya ada pasti saya temui. Jadi, rakyat mesti dipermudah jangan dipersulit,” katanya di Makassar, Selasa (17/12/2019).

Untuk melayani rakyat, Nurdin menyulap ruang tamunya menjadi seperti interior hotel berbintang, lengkap dengan AC, sofa-sofa empuk, dan ruang pelayanan minuman pribadi. “Jadi rakyat sangat saya layani, sambil menunggu saya, rakyat bisa santai-santai sambil minum kopi atau teh yang teh tersedia,” ujarnya.

Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan yang juga menjadi tamu Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah memuji kenyamanan ruang tunggu untuk rakyat tersebut. “Saya kan mengabdikan untuk rakyat, ya rakyat mesti dibuat nyaman. Itulah implementasi riil bahwa kepala daerah adalah pelayan rakyat,” ungkap Nurdin Abdullah. □

DER



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**Nurdin Abdullah**



**Dwia Aries Tina Palubuhu**

## Cara Menghentikan Demo Rusuh

**R**EKTOR Universitas Hasanuddin Makassar, **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu**, mengaku pusing mendengar berbagai berita tentang demo mahasiswa yang berujung kekerasan atau rusuh. “Saya pusing mendengar demo mahasiswa rusuh, atau perkelahian antarmahasiswa terjadi dimana-mana, termasuk di Makassar ini. Semua itu harus dihentikan” kata Prof. Dwia di Makassar, Senin (16/12/2019).

Prof. Dwia menyimpulkan mungkin ada yang perlu diperbaiki di dunia pendidikan kita, baik di undang-undang maupun konstitusi. Kebetulan MPR sedang ada wacana amandemen terbatas UUD. “Saya rasa perlu juga dikaji seputar dunia pendidikan. Pendidikan mesti dibuat nyaman, terjangkau dan kurikulum lebih baik dan perlu ada panduan soal ekspresi kebebasan berpendapat di kalangan kampus,” ujarnya.

Intinya, Prof. Dwia mendukung amandemen terbatas UUD NRI Tahun soal GBHN. Alasannya, setiap bidang di Indonesia perlu panduan utuh, tegas, dan memiliki prinsip kontinuitas, termasuk bidang pendidikan nasional. □

DER



FOTO-FOTO: JAZ - ISTIMEWA

## TPA Sasana Bina Tunas Bangsa Tempat Penitipan Anak di Kompleks Parlemen

**S**AAT siang beranjak sore, Jumat keempat November lalu, suasana di kawasan Senayan Jakarta terasa teduh. Udara sejuk itu menyingkap kompleks Parlemen, karena beberapa jam sebelumnya, hujan deras mengguyur wilayah Jakarta, tak terkecuali kompleks perkantoran MPR/DPR/DPD RI. Curah hujan membuat suhu panas yang selalu menerpa di sepanjang bulan November itu, pada siang itu matahari tersembunyi di balik. Dan, siang itu suasana pun terasa lebih bersahabat, sejuk dan nyaman.

Kondisi cuaca hari itu tentu saja berpengaruh terhadap anak-anak balita yang berada di Tempat Penitipan Anak (TPA) Sasana Bina Tunas Bangsa yang berada di kompleks Parlemen. Saat itu tampak anak-anak itu lebih santai untuk segera menyongsong datangnya sore. Kala itu, anak-anak ini baru saja bangun dari tidur siang, mereka terlihat masih bermalas-malasan, meski sebenarnya sebagian di antaranya tampak sudah mandi. Namun, tidak seperti biasanya, anak-anak itu tidak bersegera melaksanakan jadwal setelah bangun tidur siang, yaitu makan sore. Mereka memilih bermain-main di kamar sembari bercanda dengan teman-temannya.

Tetapi, karena waktu sudah semakin sore,

para bunda pendamping dan pengasuh anak-anak itu tak membiarkan mereka terus bermalas-malasan. Para bunda segera mengajak anak-anak itu menuju ke tempat makan. Sesampainya di ruang makan, anak-



**Tanti Setyanta Nugraha**

anak itu tampak sangat tertib sebagaimana biasanya. Mereka menuju ke kursi masing-masing, dan duduk dengan tertib, dan mereka tampak akur seolah saudara sekandung. Sejurus kemudian, anak-anak ini melakukan

doa bersama. Setelah itu anak-anak yang berusia tiga hingga lima tahun itu menyantap makan sore secara mandiri. Sedangkan anak-anak yang berusia dua tahun, masih mendapat bantuan dari para pendampingnya.

Menariknya mereka tampak sangat mandiri dan juga patuh pada aturan yang diterapkan di TPA, termasuk saat berada di ruang makan. Buktinya, tidak ada satu anakpun merengek, meminta lauk atau sayur tertentu. Mereka menyantap menu makanan yang sudah disediakan dengan lahap. Hanya ada beberapa anak yang tampak tidak bersemangat, namun mereka pun menikmati jatah makannya hingga habis.

Inilah sebagian suasana sore yang sempat disaksikan dari dekat oleh Majelis *Majelis* saat melihat dari dekat keberadaan TPA Sasana Bina Tunas Bangsa, beberapa waktu lalu. Selain cerita tersebut, masih banyak kisah lain yang senantiasa menyelimuti keberadaan anak-anak di Sasana Bina Tunas Bangsa itu. Pasalnya, anak-anak itu sudah berada di sana sejak pukul 08.30 WIB setiap hari kerja, dan baru kembali bersamaan dengan bubar jam kantor pada pukul 16.30 WIB. Dan, inilah jadian untuk anak-anak yang berada di Sasana Bina Tunas Bangsa setiap harinya. Pukul 09.00 WIB, anak-anak sarapan pagi, kemudian mereka



mengikuti pembinaan dan berbagai kegiatan. Lalu, jam 11.00 WIB anak-anak makan buah, kemudian jam 12.00 WIB makan siang, dilanjutkan tidur siang hingga 15.00 WIB. Setelah bangun, mereka mandi, selanjutnya makan sore, dan bermain sembari menunggu dijemput.

“Jika di TPA lain makan besar hanya diberikan 1 kali, yaitu disiang hari, tapi anak-anak di TPA Sasana Bina Tunas Bangsa ini mendapat jatah makan besar sebanyak tiga kali sehari, dan kebutuhan lain yang bermanfaat bagi pertumbuhannya,” kata Tanti Setyanta Nugraha, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Setjen DPR RI dan BK DPR RI, selaku pengelola TPA Sasana Bina Tunas Bangsa yang ditunjuk. Selain makan tiga kali dan snack 1 kali, anak2 yang diasuh di TPA Bina Tuna Bangsa juga dijaga dengan aman serta mendapatkan perawatan segera dari Poliklinik DPR RI jika ada masalah terkait dengan kesehatan ketika mereka berada di TPA.

### Waiting List

Kehadiran TPA Sasana Bina Tunas Bangsa merupakan sisi lain dari kompleks MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta. Kompleks lembaga legislatif yang selama ini terkesan selalu gaduh, dan sasaran para demonstran, ternyata menyimpan sisi humanis yang tidak banyak diketahui masyarakat luas. Tempat tersebut sangat penting, terutama bagi karyawan yang bekerja di lingkungan perkantoran MPR/DPR/DPD RI yang ingin memberikan asi (air susu

ibu) langsung kepada anak-anaknya. Karena itu, pihak pengelola berusaha sekuat tenaga memperbaiki sarana dan prasarana TPA ini.

Keberadaan TPA Sasana Bina Tunas Bangsa merupakan realisasi dari kegiatan bidang sosial, sekaligus bidang pendidikan, dan tidak memperhitungkan keuntungan. Sebagai tempat penitipan anak, Sasana Bina Tunas Bangsa merupakan salah satu TPA yang berklasifikasi sangat baik dan berada di lokasi strategis. Para pendamping dan pengasuhnya direkrut dengan persyaratan yang tidak mudah, dan melibatkan psikolog. Tidak itu saja, para pengasuh juga telah mendapat pelatihan dan turut dalam program studi banding dengan TPA lain, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dari sisi fasilitas, TPA Sasana Bina Tunas Bangsa juga tidak kalah dibanding tempat penitipan anak lainnya. TPA Sasana Bina Tunas Bangsa menempati gedung cukup besar, seluas sekitar 400 meter, di kompleks parlemen. Di dalamnya terdapat berbagai fasilitas pendukung. Mulai dari arena bermain, tempat ibadah, ruang makan, kamar tidur, dan kamar mandi. Bukan itu saja. TPA ini dilengkapi pula sistem pengamanan yang lengkap. Mulai dari tenaga pengamanan hingga kamera CCTV. Juga dilengkapi fasilitas kesehatan berupa poliklinik yang dilengkapi dengan tenaga perawat, dokter, serta ahli gizi.

Karena itu, banyak orangtua mempercayakan anak-anaknya dititip di sini. Bukan hanya ibu-ibu karyawan DPR, MPR, dan DPD saja, tapi juga ibu-ibu yang bekerja di

kompleks perkantoran terdekat, di luar kompleks parlemen. Namun, pihak pengelola terpaksa membatasi jumlah anak binaan, hanya 22 orang. Ini untuk menyesuaikan sarana dan prasarana yang tersedia.

Maka tak heran, kalau waiting listnya banyak. “Waiting list-nya sangat banyak, sebagian di antaranya menunggu hingga bertahun-tahun. Pasalnya, warga yang sudah berada di sini, rata-rata baru keluar setelah anaknya berumur lima tahun, atau umur maksimum bagi seorang anak untuk tetap boleh tinggal di sini,” jelas Tanti Setyanta Nugraha.

Tanti berharap, TPA Sasana Bina Tunas Bangsa tumbuh menjadi semakin baik. Agar bisa membantu memberi jalan keluar bagi pengasuhan anak-anak karyawan yang bekerja, terutama bagi anggota legislatif dan pegawai MPR, DPR dan DPD RI yang tidak bisa memiliki pengasuh di rumah, atau belum bisa mempercayakan anaknya kepada pengasuh di rumah. Dan, untuk biaya penitipan anak di sini setiap bulannya dikenakan Rp 2 juta per-anak.

TPA Sasana Bina Tunas Bangsa ini berdiri pada 2014 dan peresmian dilakukan oleh Ketua DPR kala itu, Marzuki Ali. Sebagian perlengkapan yang terdapat di TPA ini merupakan sumbangan pribadi dari anggota PIA, para pejabat, dan anggota Dharma Wanita dan tentu bantuan fasilitas dari Setjen dan BK DPR RI. Seperti beberapa alat mainan, buku, perabotan makan dan dapur, serta tempat tidur anak-anak. □

MBO

Bambang Soesatyo, SE., MBA.

# MPR Tak Akan Melangkahi *Kehendak Rakyat*



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEJAK terpilih menjadi Ketua MPR RI untuk masa bakti 2019-2020, Bambang Soesatyo, SE., MBA (57), sibuk melaksanakan safari kebangsaan yang dikemas dalam bentuk silaturahmi dan serap aspirasi terkait rencana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Berbagai kalangan sudah ditemui. Mulai dari petinggi partai politik, tokoh-tokoh ormas dan keagamaan hingga pimpinan media massa.

Namun, dari sekian banyak kegiatan safari kebangsaan dan serap aspirasi dilakukan ternyata masukan yang diperoleh menunjukkan sikap yang berbeda-beda. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, misalnya, setuju amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945, namun PB NU juga merekomendasikan agar Indonesia kembali ke sistem perwakilan dalam pemilihan pemimpin nasional dan daerah.

Rekomendasi ini disampaikan PB NU ini sesuai hasil Musyawarah Nasional Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, 15-17 September 2012. Rekomendasi itu menyebutkan, Presiden-Wakil Presiden dipilih oleh MPR RI, Gubernur-Wakil Gubernur dipilih melalui DPRD Provinsi, Bupati-Wakil Bupati dipilih melalui DPRD Kabupaten, dan Walikota-Wakil Walikota melalui DPRD Kota.

Sementara Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah)

setuju rencana amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara. Dengan adanya haluan negara diharapkan siapapun pemimpin Indonesia punya acuan untuk membumikan Pancasila dalam agenda pembangunan nasional sesuai jati diri dan karakter bangsa.

Keinginan Muhammadiyah untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara ini sesuai hasil Sidang Tanwir Muhammadiyah di Samarinda, Kalimantan Timur, Mei 2014. Muhammadiyah berpendapat, Pokok-Pokok Haluan Negara diperlukan sebagai wadah untuk mengelaborasi tujuan bangsa, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Selain dua usulan tersebut, MPR juga menampung masukan dari kelompok masyarakat yang lain. Misalnya saja, adanya keinginan untuk menghadirkan kembali Utusan Golongan sebagai salah satu fraksi di tubuh MPR. Dan, juga ada usulan penambahan masa kepemimpinan presiden.

Tetapi, jadi atau tidaknya amandemen, menurut Bamsoet, tergantung kehendak rakyat. MPR tak mungkin melangkahi kehendak rakyat Indonesia. Karena itu, MPR akan terus membuka seluas-luasnya ruang dialog kepada seluruh rakyat Indonesia.

"MPR RI punya *golden time* hingga 2023 untuk mengambil keputusan apakah amandemen bisa dilakukan pada periode ini atau





tidak. Karena, jika sudah memasuki 2024 dan mendekati Pemilu, dikhawatirkan ada penilaian politis yang tak sejalan kepentingan bangsa,” kata Bamsoet.

### Bank Century

Terpilihnya Bambang Soesatyo menjadi Ketua MPR seolah memberi semangat dan tenaga baru bagi MPR periode 2019-2024. Ini penting, karena MPR periode ini seperti mendapat beban berat untuk segera merampungkan amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945. Apalagi, rencana perubahan terbatas terhadap konstitusi itu diyakini butuh energi yang tidak sedikit. Dan, itu diharapkan mampu ditopang oleh sosok seperti Bambang Soesatyo.

Kehadiran Bamsoet yang “full power” dinilai penting, mengingat rencana amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 ini sudah digelindingkan oleh dua periode kepemimpinan MPR sebelumnya. Masing-masing MPR periode 2009-2014 yang diketuai Taufiq Kiemas yang dilanjutkan Sidarto Danusubroto. Dan, pimpinan MPR periode 2014-2019 yang diketuai Zulkifli Hasan.

Semangat baru yang muncul bersamaan dengan terpilihnya Bamsoet sebagai Ketua MPR tak lepas dari sosok pria kelahiran Jakarta, 10 September 1962, yang dikenal dekat dengan berbagai kalangan. Mulai dari generasi milenial hingga para purnawirawan. Selain itu, anggota Dewan Pakar KAHMI Pusat ini memiliki rekam jejak yang sangat luas, jika dilihat dari rentetan jabatan yang pernah dan masih dipegangnya.

Bamsoet pernah malang melintang menjadi wartawan, sebelum akhirnya berkhidmat sebagai pengusaha. Kemudian, ia aktif di



berbagai organisasi underbow Golkar, sebelum akhirnya terjun secara penuh di partai berlambang pohon beringin itu.

Tidak hanya sampai di situ, Bamsoet juga dipercaya menjadi Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan dan Industri (ARDIN) Indonesia (2008-sekarang), Dewan Pakar KAHMI Pusat (2018-sekarang), Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia (2010-sekarang), Kepala Badan Bela Negara FKPP (2017-sekarang), dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila (2018-sekarang).

Ibarat kata, kalau di sepakbola dikenal adanya pemain-pemain bintang, maka Bamsoet termasuk salah satu dari sedikit politisi pilihan tanding di ranah legislatif. Hal ini bisa dilihat dari *track record* Bamsoet di Senayan yang terbilang cukup gemilang. Ia kerap menjadi incaran dan sorotan kamera, untuk dimintai komentar serta pendapatnya terkait peristiwa yang terjadi, baik nasional, regional, maupun internasional.

Bamsoet pertama kali terpilih menjadi anggota DPR pada periode 2004-2009 dari dapil Jawa Tengah VII, wilayah Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen. Sejak terpilih sebagai anggota DPR RI pada periode itulah terus melejit. Kapasitasnya sebagai salah satu politisi Partai Golkar tak diragukan, dia disegani baik oleh lawan maupun kawan. Dan, namanya semakin berkibar seiring dengan keikutsertaannya dalam penanganan berbagai kasus di Senayan. Sebut saja kasus Bank Century yang menyeret sejumlah nama petinggi di Republik ini. Juga saat terjadi dualisme kepemimpinan partai Golkar antara Agung Laksono dan Aburizal Bakrie.

### Besar di Jakarta

Berkat kepiawaiannya itulah Bamsoet pun didapuk menempati berbagai pos strategis di Senayan. Sejumlah kepercayaan yang pernah diemban oleh Bambang Soesatyo di DPR RI, antara lain: Anggota Komisi III dan Badan Penganggaran (Banggar) periode 2009-2014, Ketua Komisi III DPR RI 2015-2017, dan Ketua DPR RI (2018-2019).

Setelah menduduki jabatan Ketua DPR menggantikan Setya Novanto, sosok Bamsoet kian diperhitungkan. Di tubuh partainya, Bamsoet berhasil masuk ke jajaran elit Golkar. Terbukti, setelah terpilih menjadi Ketua MPR, Bamsoet masuk ke dalam bursa calon Ketua Golkar. Ia menjadi kompetitor serius bagi petahana Ketua Golkar







Airlangga Hartarto. Namun, pada detik-detik akhir, Bamsoet memilih mundur dari pencalonan, dan dia memberikan karpet merah kepada Airlangga untuk menjadi Ketua Golkar periode keduanya.

Sebagai orang lahir dan dibesarkan di Jakarta, Bamsoet menghabiskan lebih dari separuh waktunya di Ibukota Jakarta. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri VIII Jakarta (1974), kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 49 Jakarta (1977), dan SMA Negeri XIV Jakarta (1981). Setelah menamatkan pendidikan di SLTA, Bamsoet sempat merasakan kuliah di beberapa perguruan tinggi, yaitu: Akademi Accounting Jayabaya, Jakarta (1981-1984); Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia, Jakarta, (1985-1987), dan juga Program MBA., IM Newport Indonesia (1988-1991).

Bagi Bamsoet, dunia politik bukan sesuatu hal yang baru. Karena sejak kuliah, ia sudah aktif di berbagai organisasi. Antara lain, menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Akademi Akuntansi Jayabaya, Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa, Pemimpin Redaksi Majalah Universitas Jayabaya, dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta se-Indonesia. □

MBO



Nama lengkap : **Bambang Soesatyo, SE., MBA**  
 Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 10 September 1962  
 Pendidikan Terakhir : Program MBA, IM Newport Indonesia

#### Riwayat organisasi :

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Ketua Umum ARDIN Indonesia        | 2008 - Sekarang |
| 2. Dewan Pakar KAHMI Pusat           | 2018 - Sekarang |
| 3. Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia  | 2010 - Sekarang |
| 4. Kepala Badan Bela Negara FKPP     | 2017 - Sekarang |
| 5. Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila | 2018 - Sekarang |

#### Riwayat Bidang Legislatif :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Ketua DPR RI                                    | Tahun 2018 - 2019 |
| 2. Ketua Komisi III DPR RI                         | Tahun 2015 - 2018 |
| 3. Anggota Komisi III DPR RI                       | Tahun 2009 - 2014 |
| 4. Anggota Badan Anggaran DPR RI                   | Tahun 2009 - 2014 |
| 5. Anggota Pansus RUU Pencucian Uang               | Tahun 2011        |
| 6. Anggota Pansus Bank Century                     | Tahun 2010 - 2011 |
| 7. Anggota Timwas Bank Century                     | Tahun 2011 - 2014 |
| 8. Anggota Panja RUU Keamanan Nasional (Kamnas)    | Tahun 2012 - 2014 |
| 9. Anggota Panja RUU MPR/DPR/DPRD (MD3)            | Tahun 2014        |
| 10. Anggota Panja RUU Perubahan Tata Tertib DPR RI | Tahun 2014        |

#### Buku-buku yang di tulis :

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Mahasiswa Gerakan dan Pemikiran           | Tahun 1990 |
| 2. Kelompok Cipayang, Pandangan dan Realita  | Tahun 1991 |
| 3. Ekonomi Indonesia 2020                    | Tahun 1995 |
| 4. Skandal Gila Bank Century                 | Tahun 2010 |
| 5. Perang Perangan Melawan Korupsi           | Tahun 2011 |
| 6. Pilpres abal-Abal Republik Amburadul      | Tahun 2011 |
| 7. Republik Galau                            | Tahun 2012 |
| 8. Skandal Bank Century di Tikungan Terakhir | Tahun 2013 |
| 9. Presiden dalam Pusaran Politik Sengkuni   | Tahun 2013 |
| 10. 5 Kiat Praktis Menjadi Pengusaha No. 1   | Tahun 2013 |
| 11. Indonesia Gawat Darurat                  | Tahun 2014 |
| 12. Republik Komedi ½ Presiden               | Tahun 2015 |
| 13. Ngeri Ngeri Sedap                        | Tahun 2017 |
| 14. Dari Wartawan ke Senayan                 | Tahun 2018 |
| 15. Akal Sehat                               | Tahun 2019 |

#### Tanda penghargaan :

- |  |            |
|--|------------|
| - Adhi Karya Award                         | Tahun 1995 |
| - Top Eksekutif Indonesia                  | Tahun 1996 |
| - PWI News Maker Award                     | Tahun 2010 |
| - The Best & The Next Legislator Award     | Tahun 2014 |
| - Golden Democracy Award                   | Tahun 2018 |
| - Best Communicators                       | Tahun 2018 |
| - Anugerah Pers Jawa Tengah                | Tahun 2018 |
| - 10 Tokoh Politik dengan Branding Otentik | Tahun 2018 |
| - The Best and The Next Legislator Award   | Tahun 2019 |
| - Parliament of The Year                   | Tahun 2019 |
| - IJTI Jawa Tengah Award                   | Tahun 2019 |
| - Indonesia Digital Initiative Awards      | Tahun 2019 |

## Praktik Musyawarah dan Keselamatan Bangsa

**P**AGI itu, dalam satu upacara kecil, ketika Sang Saka Merah Putih belum dikibarkan, dan lagu Indonesia Raya belum dinyanyikan, Soekarno, pemimpin pergerakan kemerdekaan, berdiri berpidato di depan para hadirin yang datang di kediamannya di Jalan Pegangsaan, Menteng, Jakarta. Mengawali pidatonya, Bung Karno menyebutkan: “Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan Tanah Air. Bahkan telah beratus-ratus tahun! Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita ada naiknya dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita...”

Bung Karno dan Bung Hatta, yang sedari malam harus berdebat keras dengan *Sumobuco* atau Kepala Staf Umum Operasi Jepang di Indonesia, Mayor Jenderal Nishimura, yang ngotot tidak mau Indonesia memerdekakan diri. Bahkan, sampai Bung Hatta menyindir janji Jenderal Terauchi, dan janji harus ditunaikan oleh seorang Samurai sejati. Nishimura bergeming, Jepang tak akan membantu kemerdekaan Indonesia, karena status quo sebelum Sekutu tiba, walaupun harus terjadi petumpahan darah.

Di akhir pidato, sebelum membacakan teks Proklamasi, Bung Karno mengatakan: “Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia, dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia-sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.”

Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari pidato Bung Karno menjelang pembacaan teks Proklamasi itu. Para pendiri bangsa ini telah menginsyafi bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia, sejatinya adalah perjuangan ratusan tahun lamanya. Perjuangan oleh rakyat bersama pemimpinnya, para sultan, raja-raja dari Aceh di wilayah Barat Indonesia, sepanjang nusantara hingga wilayah



Ternate dan Tidore di Timur Indonesia.

Dalam perjalanan kunjungan kerja ke beberapa daerah, menjumpai situs-situs sejarah perjuangan para pendahulu bangsa. Ada yang menarik ketika mengunjungi Pulau Penyengat di kawasan Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Di sana antara makam para pembesar puak Melayu, berbaring pusara pujangga besar, Raja Ali Haji. Di makamnya yang unik, karya Gurindam 12 berjajar terpatri di atas batu pualam yang mengelilingi makam. Adalah Pasal 11 dari Gurindam yang merujuk kepada kepemimpinan, yang berbunyi: “Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, Hendaklah jadi kepala buang

Oleh:  
**Ahmad Muzani**  
Wakil Ketua MPR RI



perangai yang cela, Hendaklah memegang amanah buanglah khianat, Hendak marah dahulukan hajat, Hendak dimalui jangan memalui, Hendak ramai murahkan perangai”.

Raja Ali Haji hanya satu dari ratusan atau mungkin ribuan pujangga yang ada di kawasan Nusantara, yang mewangi bagai putu manikam nusantara. Ada banyak karya lain yang kemudian menjadi inspirasi bagi para pemimpin bangsa untuk menggali kebaikan-kebaikan yang ada di dalam tradisi masyarakat di seluruh persada Indonesia.

Retradisionalisasi ini yang puncaknya disarikan para pendiri bangsa ke dalam Pancasila, inilah yang belakangan ini kurang dihayati dalam kehidupan kekinian di era milenial. Semakin banyak ahli politik, namun kehidupan politik semakin terasa hambar. Politik seakan kering dari nilai-nilai kebajikan, padahal banyak nilai-nilai tradisi kita yang bisa memberi inspirasi, dan ini sudah hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di sepanjang wilayah Indonesia.

Bagian terakhir, pidato Bung Karno di atas menyebutkan, dua kali frasa musyawarah. Musyawarah adalah penyelamat bangsa, dan kata-kata musyawarah ada di dalam sila keempat Pancasila, yakni: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan.”

Setelah Bung Karno dan Bung Hatta berdebat keras dengan Mayor Jenderal Nishimura, termasuk dengan gertakan akan terjadinya pertumpahan darah, para pemimpin bangsa kemudian kembali bermusyawarah di rumah Laksamana Maida. Inilah yang disebutkan oleh Bung Karno telah berbicara dengan para pemimpin rakyat dari seluruh Indonesia. Mereka kembali merekatkan cita-cita mereka yang tak bisa dihalangi hanya oleh gertak sambal mayor jenderal bala tentara Jepang yang telah kalah perang.

Fragmen menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia terbukti musyawarah telah menjadi jalan keluar yang manjur dalam segala

kebimbangan yang menghimpit para pendiri bangsa. Di antara risiko pertumpahan darah dan tujuan kemerdekaan Indonesia yang dihalang-halangi oleh penjajah Jepang saat itu.

Situasi kekinian, musyawarah yang didasarkan oleh keinginan luhur untuk melanjutkan perjuangan pembangunan Indonesia merdeka. Khususnya dalam proses regenerasi kepemimpinan, kita sudah membangun konsensus bahwa pemilihan umum menjadi sarana sirkulasi kepemimpinan, khususnya pemilihan para legislator yang duduk di DPRD, DPR RI, dan DPD RI.

Konsensus ini sebagai tata cara sirkulasi kekuasaan sudah termaktub di dalam konstitusi kita, pasca amandemen UUD 1945. Model pemilihan ini, yang perlu diperkuat adalah institusi politiknya. Tujuannya, agar partai politik mampu merekrut dan mendapatkan para kader yang handal dalam politik praktis, yaitu mampu menyakinkan para konstituennya untuk bisa dipilih, tetapi di sisi lain juga dipenuhi oleh hikmah dan kebijaksanaan.

Hikmah dan kebijaksanaan yang mengutamakan musyawarah, memang sudah dicontohkan di dalam lembaga MPR RI. Majelis yang membawa nama “Permusyawaratan” jelas memiliki beban historis, sosiologis dan politis, untuk selalu mengutamakan jalan keluar melalui musyawarah dalam permufakatan. Di mana sirkulasi pimpinan MPR lebih mengutamakan musyawarah, tujuannya tak lebih adalah keberlanjutan bernegara dan kesejahteraan rakyat.

Semoga tradisi dan *legacy* ini tetap hidup karena terbukti mampu menyelamatkan kapal besar Indonesia dalam menghadapi pasang surut politik. Legacy yang dijiwai oleh semangat luhur yang sudah diperlihatkan oleh para pendiri bangsa yang terinspirasi oleh perjuangan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu semua harus menjadi ikhtiar besar bangsa ini untuk menuju kejayaan Indonesia Raya. □



## Cerita di Balik UU Kewarganegaraan

Status kewarganegaraan seseorang diberikan karena hukum yang menyatakan kewarganegaraan seseorang, bukan garis darah yang mengalir.

**M**ANTAN Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin buka rahasia di balik UU Kewarganegaraan. Rupanya ada hubungan antara bulutangkis dengan UU Kewarganegaraan. Hamid Awaludin mengaku penggemar berat bulutangkis. Dia tak pernah melewatkan menyaksikan perjuangan pemain bulutangkis Indonesia dalam pertandingan di tingkat internasional. Namun, dari para pemain bulutangkis nasional itu justru ada perasaan yang “menyayat hati” bagi Hamid Awaludin.

“Ceritanya begini. Saya waktu itu masih menjadi mahasiswa di Amerika Serikat. Banyak pemain bulutangkis kita, baik di Thomas Cup, Uber Cup, maupun Olimpiade, yang jelas mewakili Indonesia tapi ternyata tidak punya paspor Indonesia hanya karena keturunan Tionghoa. Saya bisa sebut Hendrawan, Ivana Lie. Yang paling menyayat hati saya waktu itu adalah Tong Sin Fu. Dia sudah tinggal selama 17 tahun di Indonesia dan banyak melahirkan pemain dunia, tapi dia tidak bisa menjadi warga negara Indonesia,” tutur Hamid Awaludin.

Perasaan yang menyayat hati itu terus menggayut dalam pikirannya. Bertolak dari perasaan itu Hamid Awaludin berjanji dalam hati ingin berbuat sesuatu. “Dan, saya berniat suatu saat nanti, jika saya punya kekuasaan saya ingin berbuat sesuatu karena saya adalah pecandu bulutangkis,” ujar mantan Duta Besar Federasi Rusia ini.

Itulah sebabnya, ketika menjadi Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin berhasil melahirkan sebuah UU Kewarganegaraan. “Dalam UU itu ada pasal yang menyebutkan orang asing yang berjasa untuk Indonesia bisa menjadi warga negara Indonesia tanpa harus melalui asimilasi. Jadi, orang-orang bulutangkis seharusnya berterima kasih kepada saya,” ucapnya sambil tersenyum lebar.

“Rahasia” itu diceritakan Hamid Awaludin dalam peluncuran buku “Dinamika Pembentukan UU Kewarganegaraan Republik Indonesia” di Ruang GBHN Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/12/2019). Buku yang diterbitkan oleh Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) ini merupakan risalah rapat-rapat pembahasan RUU Kewarganegaraan. Jadi, isinya merupakan transkrip dari rekaman pembicaraan dalam rapat-rapat pembahasan RUU Kewarganegaraan. Dan, buku ini diterbitkan dalam dua jilid, masing-masing tebalnya lebih dari 400 halaman.

Dalam peluncuran buku hadir para pelaku pembahasan RUU Kewarganegaraan. Selain mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, juga tampak antara lain Mardiana Poo, Lukman Hakim Saefuddin, Nursyahbani Katjasungkana (anggota Pansus RUU Kewarganegaraan RI 2005 – 2006). Serta hadir pula Sekretaris Jenderal MPR Dr. Ma’ruf Cahyono, Pimpinan Fraksi Partai Golkar MPR Ferdiansyah dan Mujib Rohmat, Ketua Umum IKI Rikard Bagun, dan Kasubdit Perwarganegaraan Ditjen AHU Kemenkumham.

Selain perasaan yang menyayat hati tadi, Hamid Awaludin juga mengungkapkan dua motif pembentukan UU Kewarganegaraan, yaitu untuk mengubah paradigma berpikir dan menghilangkan sekat demarkasi. “Paradigma kewarganegaraan selama ini adalah menurut garis darah yang mengalir dalam tubuh. Paradigma ini harus diubah. Orang menjadi warga negara karena hukum yang menyatakan

kewarganegaraan seseorang, bukan garis darah yang mengalir. Jadi, negara yang memberikan status kewarganegaraan kepada seseorang,” tegasnya.

Kedua, untuk menghilangkan garis demarkasi. Selama ini ada garis demarkasi, seperti pengusaha pribumi dan non-pribumi. Garis demarkasi itu bukan hanya untuk kalangan Tionghoa, tetapi juga Arab dan India. “Sekat antara kita dan kalian. Kita ingin menghilangkan sekat itu. Kita mau hanya satu, yaitu Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, dalam *keynote speech* mewakili Pimpinan MPR RI, Sekretaris Jenderal MPR Dr. Ma’ruf Cahyono menyampaikan apresiasi Pimpinan MPR atas peluncuran dua jilid buku dengan judul: “Dinamika Pembentukan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia”. “Ini mungkin baru yang pertama kali dinamika pembentukan UU dibuat dalam bentuk buku,” ujarnya.

Ma’ruf Cahyono mengatakan, pembicaraan tentang kewarganegaraan merupakan domain kajian di MPR. Berbicara tentang kewarganegaraan dan politik hukum kewarganegaraan adalah berbicara tentang tata negara yang menjadi domain kajian MPR.

“Proses dan dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan sangat erat kaitannya dengan tugas MPR. Sesuai UU MD3, MPR terus-menerus melakukan kajian sistem ketatanegaraan, kajian terhadap konstitusi UUD NRI Tahun 1945, dan kajian terhadap implementasi konstitusi. Implementasi konstitusi, seperti UU Kewarganegaraan, menjadi domain kajian di MPR,” katanya.

Menurut Ma’ruf, kajian khusus terhadap kewarganegaraan merupakan kajian implementasi dari pasal dalam UUD NRI Tahun 1945. “Jadi menurut hemat MPR, tepat sekali peluncuran dan diskusi buku ini diadakan di MPR. Kewarganegaraan adalah wacana yang menjadi fokus kajian di MPR. Kita mendapatkan raw material. Karena itu buku ini akan disampaikan kepada Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR,” ujarnya.

Ma’ruf menegaskan UU Kewarganegaraan harus tegak lurus dengan Pancasila, yaitu religiusitas, kemanusiaan, nasionalitas, demokrasi dan keadilan. Rujukannya adalah Pembukaan UUD dan Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945. “MPR sebagai rumah kebangsaan membangun wacana dan diskursus tentang kebangsaan. UU Kewarganegaraan ke depan sebagai kajian bisa merespon kebutuhan saat ini,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum IKI Rikard Bagun menjelaskan, buku ini merupakan rekaman perdebatan atau risalah rapat-rapat dalam pembahasan RUU Kewarganegaraan. Meski demikian, buku ini tidak sekadar rekaman melainkan juga menunjukkan ekspresi sebuah kepedulian wakil rakyat tentang hak sipil yang selama ini kurang diperhatikan.

“Ada anggapan kewarganegaraan hanya ditujukan pada warga keturunan. Tetapi, pada kenyataannya banyak warga Indonesia yang belum mempunyai dokumen kewarganegaraan, seperti KTP, akte kelahiran, kartu keluarga. IKI sudah mengadvokasi dan membantu sebanyak 600 ribu warga untuk memperoleh dokumen kewarganegaraan,” ujarnya. □

BSC



# MAJELIS



## MPR 5 TAHUN KE DEPAN FOKUS KAJIAN AMANDEMEN DAN SOSIALISASI EMPAT PILAR







MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**EMPAT PILAR MPR RI**  
 Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara  
 UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara  
 NKRI Sebagai Bentuk Negara  
 Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara



**EMPAT PILAR MPR**  
 PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



**INDONESIA**  
 MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



**MPR**  
**RUMAH KEBANGSAAN**  
**PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA**  
**DAN KEDAULATAN RAKYAT**



**EMPAT PILAR MPR RI**  
Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara  
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara  
NKRI Sebagai Bentuk Negara  
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara



**EMPAT PILAR MPR**

PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



**INDONESIA**

MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



# Daftar Isi

EDISI NO.01/TH.XIV/JANUARI 2020



## 08 BERITA UTAMA

### MPR 5 Tahun ke Depan

Agenda dan program kerja MPR selama lima tahun ke depan, menjalankan amanah UU MD3, yaitu memasyarakatkan Empat Pilar MPR RI, mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.



## 16 Nasional Pimpinan MPR Bahas Amandemen Terbatas UUD



## 56 Sosialisasi MPR Menjaga Tradisi Budaya Indonesia



## 39 SELINGAN Jangan Abai Pada Konvensi ICERD



## 76 Profil Bambang soesatyo

Pengantar Redaksi .....	04
Lantai Tujuh .....	06
Catatan Akhir Tahun .....	24
Aspirasi Masyarakat .....	47
Diskusi Majelis .....	48
Gema Pancasila .....	66
Varia MPR .....	68
Wawancara .....	70
Figur .....	72
Ragam .....	74
Dari Rumah Kebangsaan .....	80
Rehal .....	82



**COVER**  
Edisi No.01/TH.XIV/Januari 2020  
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa



**Budi Muliawan**  
Koordinator Reportase

## Pengantar Redaksi



### PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

### PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

### PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

### DEWAN REDAKSI

Yana Indrawan, Dyastasita,  
Heri Herawan, Maifrizal

### REDAKTUR PELAKSANA

Budi Muliawan

### KOORDINATOR REPORTASE

Budi Muliawan

### REDAKTUR FOTO

Oni Arief Benyamin,  
Sucipto, Slamet Eko Suprayitno

### REPORTER

Ana Suzana, Yenita Revi,  
Tengku Novan Muda Mulya

### FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,  
Restu, Suprianto, Sugeng, Wira,  
A. Ariyana, Agus Darto

### PENANGGUNG JAWAB

### DISTRIBUSI

Elen Magdalena

### KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayat

### STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Amiruddin,  
Anggun Permana, Kiki Tri Murjono,  
Armansyah, Dhita Fitasari  
Junaid

### SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

### TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,  
Ardi Winangun, Budi Sucahyo,  
Derry Irawan, M. Budiono

## Program MPR Lima Tahun ke Depan

**A**NGGOTA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masa jabatan 2019 – 2024 telah mengucapkan sumpah dan janji di depan Ketua Mahkamah Agung pada 1 Oktober 2019 lalu dalam Sidang Paripurna MPR Awal Masa Jabatan Anggota MPR periode 2019 – 2024. Dalam sidang paripurna MPR dua hari berikutnya, 3 Oktober 2019, dengan agenda pemilihan pimpinan MPR, telah terpilih Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar sebagai Ketua MPR periode 2019 – 2024. Sesuai dengan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Ketua MPR didampingi sembilan orang wakil ketua.

Untuk Wakil Ketua MPR ditetapkan berdasarkan ajuan dari seluruh fraksi parpol dan kelompok DPD, minus fraksi Partai Golkar. Mereka adalah: Ahmad Basarah (Fraksi PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (Fraksi Partai Gerindra), Jazilul Fawaid (Fraksi PKB), Syarifudin Hasan (Fraksi Partai Demokrat), Lestari Moerdijat (Fraksi Partai Nasdem), Hidayat Nur Wahid (Fraksi PKS), Zulkifli Hasan (Fraksi PAN), Arsul Sani (Fraksi PPP), dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD). Jadi, pimpinan MPR periode 2019 – 2024 ini merupakan representasi dari kekuatan partai politik di parlemen.

Setelah dilantik, agenda pertama MPR periode 2019 – 2024 adalah menyiapkan sidang paripurna pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2019 sesuai mandat dari konstitusi. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, "Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat". Dalam sidang paripurna pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Ahad, 20 Oktober 2019, Ir. H. Joko Widodo mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia, dan K.H. Ma'ruf Amin mengucapkan sumpah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Berikutnya, Pimpinan MPR menjalankan rekomendasi dari MPR periode 2014 – 2019, terutama terkait dengan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN. MPR Periode 2014 – 2019 merekomendasikan kepada MPR Periode 2019 – 2024 untuk mengkaji lebih mendalam reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN yang masih menyisakan persoalan tentang bentuk hukum dari haluan negara itu, apakah dalam bentuk Ketetapan MPR (yang berarti harus melakukan amendemen UUD NRI Tahun 1945) atau dalam bentuk Undang-Undang. Karena itulah, sejak awal pelantikan MPR periode 2019 – 2024, muncul isu amandemen UUD NRI Tahun 1945.

Merespon rekomendasi itu, langkah awal Pimpinan MPR adalah menyerap aspirasi masyarakat terkait haluan negara. Untuk mendengar aspirasi masyarakat, Pimpinan MPR melakukan silaturahmi kebangsaan ke berbagai kalangan dan elemen masyarakat, serta partai politik. Setelah agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019, Pimpinan MPR gencar melakukan pertemuan dan silaturahmi kebangsaan, antara lain dengan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Gereja Indonesia (PGI), pimpinan Partai Nasdem, PKS, dan lainnya. Hingga Januari 2020, silaturahmi kebangsaan itu masih berlangsung.

Tampaknya satu hal yang paling menonjol dan menjadi fokus dalam program kerja MPR periode 2019 – 2024 adalah soal haluan negara, baik materi atau isi haluan Negara maupun bentuk hukumnya. Dalam waktu efektif tiga tahun ke depan, paling tidak sudah ada gambaran tentang realisasi haluan negara ini. Sementara program kerja lainnya hampir mengikuti dan melanjutkan program kerja yang sudah berjalan dan sudah dilakukan MPR periode sebelumnya. □

### ALAMAT REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Layanan Informasi, Biro Humas, Sekretariat Jenderal MPR-RI Gedung Nusantara III, Lt. 5 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6, Senayan, Jakarta 10270. Telp. (021) 57895237, 57895238 Fax.: (021) 57895237 Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



### Implementasi Sila-sila Pancasila



- Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur



- Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa.



- Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan



- Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat
- Berhenti besar kepala, mulailah bertampang dada
- Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyawarah



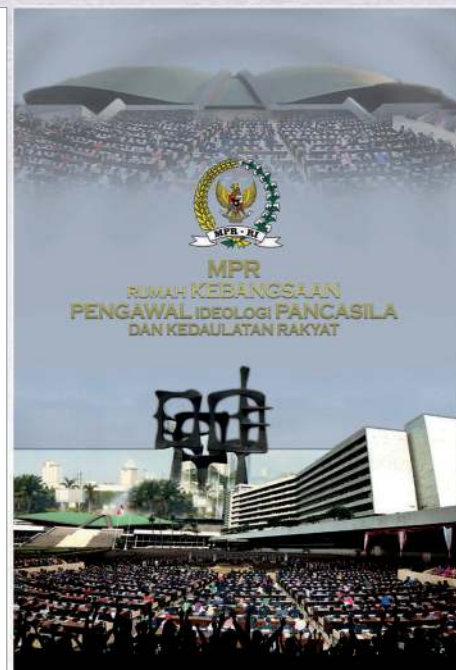
- Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi

**EMPAT PILAR MPR RI**

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara  
 UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara  
 NKRI Sebagai Bentuk Negara  
 Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara



ILUSTRASI: SUSTANTO





Dr. H. Ma'ruf Cahyono, SH., MH. Sekretaris Jenderal MPR RI

## Renstra MPR Periode 2019 - 2024

**M**AJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempunyai rencana strategis (Renstra) selama periode lima tahun. Renstra periode 2014 – 2019 sudah dilaksanakan dengan capaian kinerja yang cukup menggembirakan. MPR sudah menjalankan semua wewenang dan tugas yang dimandatkan konstitusi dan Undang-Undang (UU) dengan sukses. MPR sudah menunaikan amanah konstitusi, yaitu Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945, dengan menyelenggarakan sidang paripurna dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2019. Sidang paripurna sebagai pelaksanaan proses legitimasi kepemimpinan nasional merupakan bagian dari kinerja MPR.

Setelah lima tahun menjalankan wewenang dan tugas dengan baik, MPR juga menyusun rencana strategis untuk masa jabatan 2019 – 2024. MPR menjabarkan wewenang dan tugas yang diamanahkan konstitusi dan UU dalam Renstra yang memuat rencana-rencana kerja setiap tahun, mulai dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, hingga akhir masa jabatan. Renstra MPR mencakup: *Pertama*, Renstra tentang pelaksanaan wewenang konstitusional yang dimandatkan oleh konstitusi. *Kedua*, pelaksanaan tugas yang diamanahkan oleh UU. Amanat konstitusi dan UU itu dipertegas dan dijabarkan kembali melalui Peraturan Tata Tertib MPR. Konstitusi, UU MD3, dan Keputusan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR menjadi dasar penyusunan rencana strategis MPR.

Pada dasarnya MPR periode 2019 – 2024 meneruskan program kerja MPR periode 2014 – 2019, karena program kerja merupakan penjabaran dari tugas yang dimandatkan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pertama, memasyarakatkan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Juga memasyarakatkan produk hukum Ketetapan MPR dan Ketetapan MPRS. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, Ketetapan MPR berada pada hierarki kedua setelah UUD dan di atas UU.

Kedua, Pasal 5 UU MD3 juga memberi tugas kepada MPR untuk mengkaji sistem ketatanegaraan, mengkaji konstitusi, dan mengkaji

pelaksanaan UUD. Ketiga, sebagai lembaga perwakilan yang merupakan representasi perwakilan politik (DPR) dan perwakilan daerah (DPD) yang tergabung dalam MPR maka tugas MPR menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan UUD. Implementasi UUD di masyarakat menjadi obyek kajian MPR. Ketiga hal itu menjadi rencana kerja yang dijalankan lembaga MPR.

Untuk menjalankan Renstra periode lima tahun, 2019 – 2024, MPR memiliki perangkat, yaitu alat kelengkapan lembaga MPR, yakni: Badan Sosialisasi, Badan Kajian, Badan Penganggaran, dan didukung Komisi Kajian Ketatanegaraan. Masing-masing alat kelengkapan MPR itu menyusun program kerja yang menjadi penjabaran Renstra yang didasarkan pada konstitusi, UU, dan Peraturan Tata Tertib MPR. Dari masing-masing alat kelengkapan MPR ini muncul rencana operasional yang terlihat pada kegiatan-kegiatan. Dengan demikian, Renstra periode lima tahun yang dibagi menjadi rencana kerja tahunan tampak pada kegiatan-kegiatan di alat kelengkapan MPR (badan dan Komisi Kajian), termasuk Pimpinan MPR.

Di samping mengaktualisasikan dan menjabarkan Renstra, penyusunan program dan rencana kerja tentu sudah berdasarkan evaluasi pelaksanaan program periode lima tahun sebelumnya. Ini dimaksudkan agar pelaksanaan wewenang dan tugas MPR semakin berkualitas, sesuai sasaran, dan berdampak positif untuk masyarakat. Dari hasil evaluasi akan muncul program-program kegiatan yang memang menjadi kebutuhan, baik kebutuhan sekarang maupun yang akan datang.

### Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014 – 2019

Di dalam Renstra juga termasuk melaksanakan putusan-putusan MPR. Salah satunya Keputusan MPR tentang Rekomendasi MPR masa jabatan 2014 – 2019. Muatan rekomendasi itu antara lain:

1. Pokok-Pokok Haluan Negara untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai substansi dan bentuk hukum, termasuk membangun konsensus politik yang memungkinkan ditetapkannya dalam Ketetapan MPR.
2. Penataan Sistem Ketatanegaraan meliputi: penataan ke-

wenangan MPR, penataan kewenangan DPD, penataan sistem presidensial, penataan kekuasaan kehakiman, dan penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara.

3. Pelaksanaan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika serta Ketetapan MPR RI.

Rekomendasi ini sangat strategis karena muncul dari kehendak masyarakat yang kemudian diformulasi melalui Keputusan MPR. Keputusan MPR ini telah mendapat persetujuan anggota MPR sebagai representasi wakil rakyat dan wakil daerah, sehingga mempunyai posisi yang kuat. Sebagai mandat yang dilegitimasi melalui produk hukum, rekomendasi itu harus menjadi perhatian utama. Rekomendasi ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan dinamika, perkembangan politik maupun kehendak dan aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu, rekomendasi itu menjadi acuan kerja. Program untuk melakukan penyerapan aspirasi akan semakin massif, sehingga jika ada pengambilan keputusan maka momentum politik itu memang sudah sesuai dengan kehendak mayoritas masyarakat. MPR mengolah aspirasi masyarakat dan menjadikan instrumen yang menjembatani antara rakyat dan kebijakan-kebijakan yang diambil

bermasyarakat, mulai dari aspek yang bersifat religius, humanis, nasionalis, demokratis, hingga perilaku adil.

Selain itu, dalam Empat Pilar MPR, roda negara dan pemerintahan berjalan jika semua dijalankan secara konstitusional. Karena itu, tugas MPR untuk menyosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 dan membuat kesadaran berkonstitusi juga sangat penting. Hal ini juga menjadi prioritas agar sosialisasi dan kesadaran berkonstitusi harus sampai pada para stakeholder yang memiliki pengaruh, sehingga sasaran sosialisasi itu membawa manfaat langsung, baik terhadap kehidupan masyarakat maupun penyelenggaraan negara.

Prioritas lainnya terkait dengan rekomendasi MPR masa jabatan 2014 – 2019, khususnya dorongan untuk melakukan perubahan UUD. MPR perlu melakukan kajian lebih mendalam. Dengan kajian itulah kita mampu membuat parameter bahwa aspirasi yang berkembang sudah menjadi *mainstream* atau arus besar. Karena itu, kajian MPR harus mampu menciptakan metode yang mampu merepresentasikan kehendak masyarakat, sehingga kajian-kajian yang dilakukan benar-benar memiliki legitimasi. Badan Pengkajian MPR akan merumuskan sehingga konsep konstitusi yang ingin ditata ke depan berdasarkan analisis yang kuat, pendekatan yang konseptual dan akademik.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Negara, khususnya MPR. Menjadi tugas Badan Pengkajian MPR untuk mengidentifikasi dan pemetaan serta melakukan tahapan-tahapan dalam kurun waktu lima tahun.

Dari identifikasi dan pemetaan pada akhirnya akan diambil kebijakan, apakah tindak lanjut rekomendasi itu berupa perbaikan regulasi dalam tataran konstitusi atau perbaikan regulasi dalam implementasi. Perbaikan regulasi dalam tataran konstitusi menjadi domain MPR. Tetapi, jika tindak lanjut rekomendasi berupa perbaikan dalam implementasi maka cukup dengan UU. Badan Pengkajian akan melakukan kajian lebih mendalam dan lebih kritis. Hasil kajian MPR periode lalu cukup komprehensif yang bisa dijadikan acuan, sehingga hanya memerlukan afirmasi terhadap perubahan aspirasi satu sampai lima tahun ke depan.

### Prioritas

Semua program kerja MPR sama pentingnya. Tapi, karena fondasi bangsa Indonesia adalah ideologi maka internalisasi nilai-nilai Empat Pilar menjadi prioritas. Empat Pilar MPR adalah membangun *nation and character building*. Negara akan semakin kokoh jika kita semua memiliki pegangan kuat terhadap ideologi bangsa. Pada prinsipnya lima sila Pancasila adalah karakter bangsa yang menjadi pedoman bernegara dan acuan tingkah laku dan pola hidup sehari-hari dalam

Tahun 2020 ini, MPR masa jabatan 2019 – 2024 secara efektif mulai melaksanakan wewenang dan tugas sesuai konstitusi dan UU. Pada tahun pertama ini diharapkan muncul terobosan-terobosan yang tertuang dalam rencana kerja dan rencana operasional sebagai acuan pelaksanaan tugas selama satu tahun. Tahun pertama ini menjadi pijakan untuk tahun-tahun berikutnya sampai di akhir masa jabatan. Pada gilirannya, tahun 2024, kita berharap mimpi dan visi MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dapat terwujud dengan kondisi sistem ketatanegaraan yang semakin kokoh, ketahanan masyarakat terhadap ideologi dan dasar negara semakin kuat, kesadaran berkonstitusi yang semakin berkualitas, termasuk demokrasi yang semakin baik, demokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Program dan rencana kerja MPR tidak hanya soal kuantitas dari kegiatan, tapi juga kualitas berdasarkan visi lembaga MPR. Program kerja MPR tidak hanya sarat dengan rencana-rencana kerja, tapi juga sarat dengan *message* atau pesan-pesan untuk terus menjaga nilai-nilai ideologi Pancasila, melaksanakan konstitusi, dan lainnya. Renstra MPR adalah Renstra yang tidak boleh keluar dari mimpi-mimpi kita untuk terus mengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat yang menjadikan MPR sebagai Rumah Rakyat, Rumah Kebangsaan. □

## MPR 5 Tahun ke Depan

# Fokus Kajian Amandemen

## dan Sosialisasi Empat Pilar



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**A**GENDA dan program kerja MPR selama lima tahun ke depan, selain menindaklanjuti tiga muatan rekomendasi dari MPR masa jabatan 2014 – 2019, juga menjalankan amanah UU MD3, yaitu memasyarakatkan Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika), mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.

Hidangan kue, kacang, dan buah jeruk sudah tersedia di meja. Hidangan itu disajikan di sebuah ruangan pertemuan di lantai satu kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jl. T.B. Simatupang, Jakarta Selatan. Kursi-kursi pun sudah disiapkan di depan meja-meja kecil. Pada akhir November 2019 itu, Pimpinan MPR dijadwalkan mengadakan silaturahmi kebangsaan ke Pimpinan PKS. Dalam kondisi cuaca hujan, kedatangan Ketua MPR Bambang Soesatyo didampingi Wakil Ketua Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, Jazilul Fawaid, dan Ahmad Muzani disambut petinggi PKS.

Presiden PKS Sohibul Iman didampingi Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal menyambut kedatangan Bambang Soesatyo di depan pintu masuk Gedung DPP PKS. Setelah bercipika-cipiki, mereka masuk ke ruang pertemuan. Tampak hadir petinggi PKS lainnya, yaitu: Ketua Fraksi PKS MPR Tiffatul Sembiring, Ketua Dewan Syariah Surahman

Hidayat, Sekretaris Majelis Syuro Untung Wahono, dan Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman. Di dalam ruangan, mereka meriung berbincang ringan. Pertemuan memang dilakukan secara informal.

Selain ke PKS, sebelumnya Pimpinan MPR juga melakukan silaturahmi kebangsaan serupa ke Pimpinan Partai Nasdem di kantor DPP Partai Nasdem, Jl. Gondangdia, Jakarta Pusat. Di jadwal berikutnya, Pimpinan MPR juga menyambangi petinggi Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan partai politik lainnya. Bukan hanya partai politik, Pimpinan MPR juga mengadakan silaturahmi kebangsaan ke organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Juga ke beberapa organisasi keagamaan lainnya, seperti Persatuan Gereja Indonesia (PGI) dan Parisada Hindhu Dharma Indonesia (PHDI). Tak kalah penting, Pimpinan MPR juga berkunjung ke kantor redaksi media massa.

Usai pelaksanaan Sidang Paripurna MPR dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019 pada Ahad, 20 Oktober 2019, Pimpinan MPR langsung bergerak menjalankan agenda dan program MPR. Agenda pertama adalah mengadakan silaturahmi kebangsaan ke berbagai elemen masyarakat, baik partai politik maupun organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, serta media media massa. Silaturahmi kebangsaan ini terkait dengan keinginan MPR untuk



menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan pokok-pokok haluan negara.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menjelaskan, silaturahmi kebangsaan ini dilakukan dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat terkait amandemen terbatas dan keinginan menghadirkan haluan negara. “Ini penting bagi MPR. Sebab, kami menerima ‘warisan’ dari MPR periode lalu berupa rekomendasi tentang amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, untuk menyikapi hal penting tersebut, kami rasa perlu melakukan silaturahmi dengan pimpinan partai politik dan tokoh masyarakat,” tutur Bamsoet ketika berkunjung ke DPP PAN, pada pertengahan Desember 2019.

Memang, ada beberapa agenda MPR pada masa bakti 2019 – 2024 ini. Tentu, agenda dan program kerja MPR periode 2019 – 2024 terikat dengan “warisan” rekomendasi dari MPR periode 2014 – 2019. Sebab, pada

dasarnya program kerja MPR periode 2019 – 2024 adalah menindaklanjuti rekomendasi dari MPR masa jabatan sebelumnya. Dalam Sidang Akhir Masa Jabatan MPR pada akhir September 2019, Pimpinan MPR menyebutkan “warisan” muatan rekomendasi dari MPR periode 2014 – 2019 untuk ditindaklanjuti MPR periode 2019 – 2024, antara lain:

*Pertama*, untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, termasuk membangun konsensus politik yang memungkinkan ditetapkannya dalam Ketetapan MPR.

*Kedua*, melakukan penataan sistem ketatanegaraan yang meliputi: penataan kewenangan MPR, penataan kewenangan DPD, penataan sistem presidensial, penataan kekuasaan kehakiman, dan penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai

sumber segala sumber hukum negara. MPR masa jabatan 2019 – 2024 perlu melanjutkan kajian lebih mendalam.

*Ketiga*, melaksanakan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR RI.

Agenda dan program kerja MPR selama lima tahun ke depan, paling tidak, menindaklanjuti tiga muatan rekomendasi dari MPR masa jabatan 2014 – 2019. Ketiga muatan rekomendasi itu juga erat kaitannya dengan tugas MPR sesuai dengan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), yaitu: pertama, memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, serta pelaksanaannya. Ketiga, menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.

### Kajian dan Sosialisasi Empat Pilar

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengungkapkan, MPR terus mengkaji wacana amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 untuk menghadirkan kembali haluan negara (Pokok-Pokok Haluan Negara). Oleh karena itu, Pimpinan MPR terus mendatangi berbagai elemen masyarakat dan tokoh bangsa untuk menyampaikan beberapa rencana agenda MPR pada masa bakti 2019 – 2024. Salah satu yang terpenting adalah rencana MPR untuk menghadirkan kembali haluan negara. “Terkait rekomendasi MPR periode sebelumnya tentang amandemen UUD, Pimpinan MPR melakukan safari ke pimpinan partai politik, ormas, dan organisasi keagamaan, untuk menyerap aspirasi soal amandemen UUD untuk menghadirkan kembali haluan negara,” katanya.

Jazilul tak memungkiri tantangan yang dihadapi MPR ke depan semakin berat, terutama berkaitan dengan wacana amandemen UUD tadi. Pasalnya, amandemen membutuhkan kehendak dari semua pihak, bukan hanya kehendak pimpinan MPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di MPR.

Politisi PKB itu menambahkan bahwa amandemen UUD merupakan tuntutan perkembangan zaman. Sejak terakhir diamandemen pada 2002, tidak pernah muncul pemikiran untuk kembali meng-amandemen UUD NRI Tahun 1945. Baru pada 2019 lalu wacana amandemen ini menguat. “MPR periode lalu, 2014 – 2019, menangkap aspirasi itu, dan pada akhir masa jabatannya di tahun 2019 mengeluarkan rekomendasi kepada MPR periode 2019 - 2024 tentang amandemen terbatas soal GBHN,” jelasnya.

Melalui perangkat Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR, lanjut Jazilul, wacana itu akan dikaji lebih mendalam. Namun, sebelumnya MPR ingin mendengar aspirasi dan masukan dari masyarakat Indonesia soal amandemen ini. “Kita ingin mengetahui apakah mereka (rakyat) setuju amandemen, membutuhkan haluan negara atau tidak, dan apa keinginan rakyat untuk Indonesia ke depan,” ujarnya.

“Aspirasi-aspirasi dan masukan-masukan masyarakat Indonesia tersebut, nantinya akan kami bawa ke MPR untuk kami lakukan kajian secara mendalam. Nanti setelah melalui berbagai prosedur di MPR akan



Jazilul Fawaid

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

muncul apakah amandemen dan GBHN itu dibutuhkan rakyat dan negara Indonesia atau tidak. Pada intinya, apakah amandemen atau tidak semuanya kembali untuk kesejahteraan rakyat seluruhnya,” sambungnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR, Benny K Harman, sejalan dengan pemikiran Jazilul Fawaid. Menurut Benny, setelah 20 tahun amandemen konstitusi, saat ini terjadi dinamika dan perubahan sosial dan muncul tantangan-tantangan baru. Tugas MPR adalah mengkaji apakah konstitusi ini masih adaptif, responsif, dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

“Kita sedang berusaha menjawab perubahan itu, tetapi perubahan yang akan kita lakukan tidak boleh melewati batas-batas koridor Empat Pilar MPR. Kalau ada kehendak melakukan perubahan konstitusi maka hal itu merupakan tuntutan zaman. Bukan sesuatu yang aneh. Tapi kita mau perubahan ke arah mana? Apakah perubahan hanya untuk kepentingan sesaat? Atau apakah perubahan hanya untuk kelompok tertentu?”



Arwani Thomafi

ucapnya.

Benny juga menyebutkan beberapa persoalan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Beberapa persoalan tersebut bisa menjadi kajian MPR. *Pertama*, ancaman serius terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman itu adalah ketidakadilan dan kemiskinan. *Kedua*, ancaman terhadap demokrasi. Ada kompetisi antara demokrasi individual dan demokrasi komunal. Ini harus menjadi kajian di MPR,” ujarnya.

*Ketiga*, berkembangnya paham radikalisme dan sekularisme. Keduanya adalah paham yang berbahaya bagi Indonesia. Sekularisme dan radikalisme menjadi ancaman bagi Pancasila. *Keempat*, terkait kebhinnekaan sebagai identitas dan realitas bangsa Indonesia. “Yang menjadi kerisauan adalah munculnya kompetisi antarkelompok untuk mendominasi visi dan misi bangsa ke depan. Inilah yang akan kami kaji dengan semangat kebersamaan dijiwai nilai-nilai Empat Pilar MPR,” katanya.



Benny K Harman



Maka tak berlebihan bila agenda dan program kerja MPR adalah menjadikan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, yaitu tempat untuk membicarakan masalah-masalah mendasar dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rumah untuk mengamankan ideologi Pancasila, melaksanakan konstitusi UUD NRI Tahun 1945, menjaga keutuhan NKRI, serta mengawal tegaknya kehidupan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Di sinilah pentingnya Sosialisasi Empat Pilar MPR. Pasalnya, banyak generasi muda yang tidak lagi mengenal Pancasila. Bahkan ada di antara mereka yang lebih menyukai ideologi lain di luar Pancasila, sehingga sering ditemukan tindakan intoleran serta sikap dan perilaku yang semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Karena itu, MPR ke depan diharapkan mampu menunjukkan eksistensinya dalam mengatasi persoalan-persoalan ideologis di tengah masyarakat. Tugas itu termaktub dalam UU MD3, yakni memasyarakatkan Empat Pilar. MPR diharapkan menjadi lembaga terdepan memimpin penguatan Empat Pilar secara luas.

Untuk menjawab tantangan-tantangan kebangsaan itu, Ketua Fraksi PPP Arwani Thomafi berpendapat, MPR perlu lebih membumikan Pancasila, terutama di kalangan milenial. Menjadi tugas alat kelengkapan di MPR, seperti Badan Sosialisasi dan Badan Pengkajian, untuk membuat format sosialisasi Empat Pilar MPR yang pas untuk kalangan milenial. “Jadi tidak sekadar sosialisasi Empat Pilar, tapi format yang pas untuk generasi muda. Ini menjadi tantangan MPR dalam menjawab persoalan-persoalan di masyarakat,” katanya.

Tak jauh berbeda, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Idris Laena, mengatakan, prioritas MPR lima tahun ke depan adalah melaksanakan tugas rutin yang diamanahkan oleh UU MD3, yaitu memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. “Sosialisasi Empat Pilar MPR sudah pasti harus dilaksanakan karena ini adalah perintah UU. Jika pada tahun 2019, setiap anggota mendapat lima kali sosialisasi, maka pada tahun 2020 ini akan ditingkatkan menjadi enam kali sosialisasi setahun di daerah pemilihan masing-masing,” ujarnya kepada *Majelis*.

Penambahan kuantitas sosialisasi Empat



**Idris Laena**

Pilar MPR, lanjut Idris Laena, tentu membawa konsekuensi, yaitu penambahan anggaran. “Konsekuensinya anggaran MPR harus lebih diperbesar. Selain itu, metode sosialisasi Empat Pilar MPR perlu dilakukan inovasi-inovasi agar dapat menyentuh kalangan milenial,” tuturnya.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR, El Nino M. Hoesein, mengakui bahwa saat ini belum ada satu lembaga negara pun yang melakukan kajian terhadap UUD NRI Tahun 1945 dengan melibatkan masyarakat. Padahal UUD merupakan aturan hukum dasar di NKRI. “Oleh karena itu, salah satu prioritas MPR ke depan adalah lebih memasifkan lagi pengkajian UUD dengan setiap lapisan masyarakat, baik dalam bentuk sosialisasi maupun kajian dan lainnya,” katanya kepada *Majelis*.

Menurut El Nino, sosialisasi (Empat Pilar MPR) maupun pengkajian UUD ke depan perlu dilakukan secara kreatif sehingga benar-benar efektif dan efisien, terutama



**El Nino M. Hoesein**

disesuaikan dengan perkembangan informasi teknologi yang begitu cepat. Ia mengusulkan beberapa metode dalam sosialisasi dan pengkajian UUD. Pertama, memanfaatkan informasi teknologi seperti podcast, live streaming, dan media sosial lainnya. Dalam hal ini perlu mengajak influencer yang smart dan melek politik sehingga bisa interaktif dengan masyarakat dalam membahas nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kedua, metode sosialisasi dalam bentuk outbound untuk kalangan milenial perlu lebih dilakukan secara masif dengan menambahkan beberapa inovasi dan kreativitas dalam menginternalisasikan nilai-nilai Empat Pilar ke dalam jiwa generasi milenial. Ketiga, dalam kegiatan sosialisasi dan pengkajian perlu melibatkan narasumber dari kalangan NGO, tokoh masyarakat, aktivis organisasi, dan lainnya. Selama ini sosialisasi dan pengkajian hanya melibatkan kalangan akademisi.

Keempat, metode cerdas cermat Empat Pilar MPR yang selama ini hanya dilakukan di tingkat SLTA perlu juga dilaksanakan mulai dari tingkat SD dan perguruan tinggi. “Mungkin seperti cerdas cermat P4 yang pernah diprogramkan oleh pemerintah pada masa Orde Baru,” katanya.

Kelima, semua Pimpinan MPR adalah petugas penjaga konstitusi sekaligus *gatekeeper* yang mengatur arus informasi apabila terjadi amandemen konstitusi. Oleh karena itu, sebelum proses amandemen itu dimulai, perlu melibatkan elemen masyarakat agar pelaksanaan amandemen bisa diterima oleh masyarakat luas. “Tidak seperti RUU KUHP yang pada akhirnya ditolak masyarakat karena kurangnya elemen masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi maupun pengkajian RUU tersebut,” katanya.

Terakhir, lanjut El Nino, satu hal penting yang perlu dicatat adalah transparansi anggaran MPR RI. Selama ini MPR sering memperoleh penghargaan dan pengakuan dari berbagai institusi berkaitan dengan efektivitas penggunaan anggaran. “Namun ada baiknya informasi tentang anggaran MPR juga dapat diakses oleh masyarakat luas. Dengan keterbukaan dan kejujuran anggaran maka rakyat akan semakin percaya kepada lembaga MPR,” tuturnya. □

**DER/EFP/BSC**

# Sekilas Program Kerja MPR Periode Lalu

Beberapa program kerja MPR periode 2014 - 2019 kiranya bisa menjadi acuan untuk program kerja Pimpinan dan anggota MPR periode 2019 - 2024.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**P**IMPINAN dan anggota MPR periode 2014 – 2019 telah selesai menjalankan program kerja selama lima tahun. Program kerja itu juga telah dilaporkan Pimpinan MPR dalam Sidang Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2014 – 2019 pada 28 September 2019 lalu. Apa program kerja MPR selama lima tahun tersebut? Berikut ini beberapa program kerja MPR periode 2014 – 2019 yang kiranya bisa menjadi acuan untuk dilanjutkan dalam program kerja Pimpinan dan anggota MPR periode 2019 – 2024.

Anggota MPR masa jabatan 2014 – 2019 berjumlah 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah hasil pemilihan umum 9 April 2014. Pada 1 Oktober 2014, anggota MPR mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dipandu Ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna Awal Masa Jabatan MPR periode 2014 – 2019. Selanjutnya, dibentuk fraksi dan kelompok DPD yang mencerminkan konfigurasi partai politik peserta pemilihan umum dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dalam Sidang Awal Masa Jabatan MPR Periode 2014 – 2019 pun dilakukan pemilihan Pimpinan MPR (Ketua dan para wakil ketua). Setelah melalui pemungutan suara (voting) sistem paket terpilih paket Ketua MPR Zulkifli Hasan dari Fraksi PAN, dan empat wakil ketua masing-masing Mahyudin (Fraksi Partai Golkar), E.E. Mangindaan (Fraksi Partai Demokrat), Hidayat Nur Wahid (Fraksi PKS), dan Oesman Sapta (Kelompok DPD). Formasi Pimpinan MPR ini berubah pada 2018 (setelah revisi UU MD3), dengan penambahan tiga pimpinan MPR. Ketiga pimpinan MPR tambahan yang dilantik pada 28 Maret 2018 adalah Ahmad Basarah (Fraksi PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (Fraksi Partai Gerindra) dan Muhaimin Iskandar (Fraksi PKB).

Agenda pertama Pimpinan MPR di awal masa jabatan adalah melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum sesuai amanah konstitusi. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 9 ayat (1) menyebutkan: “Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau

berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kala itu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung pada 20 Oktober 2014. Presiden Terpilih Ir. H. Joko Widodo mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia, dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla mengucapkan sumpah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Agenda dan program berikutnya, Pimpinan MPR mendapat tugas untuk menjalankan rekomendasi MPR Masa Jabatan 2009 – 2014. Rekomendasi itu tertuang dalam Keputusan MPR Nomor 4 Tahun 2014. Adapun muatan rekomendasi tersebut meliputi:

1. Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara adendum;
- Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara;
  - Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa;
  - Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya;
  - Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR RI;
  - Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara; dan
  - Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

MPR masa jabatan 2014 – 2019 merealisasikan tujuh rekomendasi itu dalam agenda dan program kerja. Dalam kurun waktu lima tahun, MPR masa jabatan 2014 – 2019 telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut, antara lain dengan membentuk Lembaga Pengkajian MPR, menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR dalam rangka memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kerjanya kepada masyarakat. Sidang Tahunan MPR telah dilaksanakan pada 2015 dan terus berlanjut setiap tahun. Sidang Tahunan MPR terakhir untuk MPR Periode 2014 – 2019 dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2019 lalu.

Untuk rekomendasi melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, Pimpinan MPR telah mendorong pemerintah untuk memasukkan dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai ke tingkat perguruan tinggi. Dalam periode ini pula, atas desakan Pimpinan MPR, pemerintah telah membentuk suatu badan khusus bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018.



Terhadap rekomendasi untuk melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara, MPR periode 2014 – 2019 telah melakukan kegiatan dengar pendapat dengan masyarakat, serta pengkajian dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR. Kesimpulannya, perlu kajian lebih mendalam lagi berkenaan dengan substansi dan bentuk hukumnya, termasuk membangun konsensus politik yang memungkinkan ditetapkannya dalam Ketetapan MPR.

Dengan demikian, secara substansial, MPR masa jabatan 2014-2019 telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014.

Selain menindaklanjuti rekomendasi MPR masa jabatan 2009 – 2014, MPR periode 2014

– 2019 juga melanjutkan agenda dan program kerja memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai mandat UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Program itu berjalan baik. Seluruh anggota MPR telah melaksanakan sosialisasi Empat Pilar kepada seluruh elemen masyarakat di seluruh Indonesia. Melalui berbagai kegiatan yang terprogram secara baik, Badan Sosialisasi tanpa mengenal lelah melaksanakan sosialisasi Empat Pilar MPR dengan berbagai metode, seperti training of trainers, outbound Empat Pilar bagi mahasiswa, bela negara melalui kemah Empat Pilar, sosialisasi untuk memenuhi undangan, dan lain sebagainya.

Sampai dengan September 2019, kinerja MPR dalam melaksanakan mandat UU MD3 sungguh sangat menggembirakan. Dari survei yang dilakukan MPR bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi menunjukkan: tingkat keterpaparan masyarakat oleh kegiatan sosialisasi Empat Pilar mencapai 32,8% penduduk Indonesia atau telah mencapai sekitar 87 juta orang; pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara mencapai angka 99,8%; pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi mencapai 97,8%. Lebih lanjut mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia, 99,1% warga masyarakat mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia, dan bahkan menyatakan siap dan bersedia membela negara dari berbagai ancaman; dan yang menggembirakan lagi, mengenai Bhinneka Tunggal Ika, sebanyak 99,8% warga masyarakat Indonesia berpendapat bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menghormati sesama warga bangsa walaupun berbeda suku, agama, dan keyakinan.

Itulah sekilas agenda dan program kerja selama lima tahun MPR periode 2014 – 2019. Agenda lainnya, antara lain: Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, peringatan Hari Konstitusi setiap 18 Agustus, peringatan Hari Lahir MPR setiap 29 Agustus, melakukan pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya. □

**BSC**



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**Jazilul Fawaid** Wakil Ketua MPR RI

## Kerja MPR Harus Berdampak Baik bagi Rakyat

**P**ADA awal 2020, pimpinan dan anggota MPR periode 2019 – 2024 mulai efektif menjalankan program kerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selama lima tahun ke depan. Setelah melaksanakan agenda besar, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019 pada 20 Oktober 2019, Pimpinan MPR periode 2019-2024 langsung tancap gas. Hampir tanpa jeda, Pimpinan MPR langsung melakukan silaturahmi kebangsaan ke berbagai elemen masyarakat untuk menyerap aspirasi terkait rekomendasi MPR Periode 2014 – 2019, khususnya untuk mengkaji lebih mendalam soal reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN.

Untuk mengetahui lebih jauh program kerja MPR lima tahun ke depan, wartawan Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid. Berikut petikan wawancara dengan politisi PKB ini.

**Apa yang menjadi prioritas utama program kerja MPR dalam lima tahun ke depan?**

Pertama-tama saya sampaikan memasuki tahun 2020 ini menjadi semangat baru buat bangsa Indonesia, mudah-mudahan ke depan semua masalah bangsa bisa diselesaikan dan Indonesia bisa mencapai kemajuan seperti yang ditargetkan pemerintah. Dan, khusus MPR yang memiliki tugas menjaga Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI

Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) ini semakin kokoh di tengah permasalahan bangsa, baik nasional maupun internasional.

Di awal tahun 2020 ini muncul permasalahan nasional dan internasional, seperti bencana alam yang sangat ekstrim, seperti banjir, tanah longsor, dan lainnya. Juga permasalahan internasional, antara lain memanasnya kawasan Teluk yang harus diprediksi, karena akan berdampak kepada perekonomian dalam negeri, seperti kenaikan harga minyak bumi atau dampak negatif lainnya.

Saya harap Indonesia, melalui pemerintah bisa memainkan perannya dan meminimalisir dampak-dampak negatifnya. MPR secara kelembagaan bersama pemerintah bisa berperan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Program MPR ke depan, prioritasnya masih membahas dan mengkaji amandemen UUD NRI Tahun 1945 sesuai rekomendasi MPR periode lalu, periode 2014-2019. Yang lainnya adalah MPR mesti memiliki peran diplomasi dengan negara-negara lain sehingga MPR bisa menjadi bagian dari penguatan hubungan internasional.

**Bagaimana dengan program sosialisasi? Tetap berlanjut? Apakah ada inovasi metode sosialisasi?**

Sosialisasi Empat Pilar MPR sebagai bentuk pelaksanaan perintah UU MD3 ke depan masih sangat diperlukan dan menjadi

program MPR. Apalagi di era saat ini di mana tantangan bangsa, baik dari dalam dan luar, sangat tinggi dan makin kompleks. Sejak MPR periode 2019-2024 dilantik sampai saat ini kami Pimpinan MPR telah melakukan sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat. Di lapangan, saya melihat masyarakat memang sangat perlu memahami nilai-nilai luhur bangsanya, yakni Empat Pilar.

Soal inovasi-inovasi, pola-pola atau metode-metode sosialisasi, perlu ada peningkatan dan pembaruan. Sosialisasi mesti mengena dan disesuaikan dengan elemen masyarakat yang sangat beragam sebagai target sosialisasi. Misalnya, sosialisasi untuk para pelajar SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi. Juga sosialisasi dengan target elemen masyarakat profesional, birokrasi, masyarakat umum, nelayan, petani, buruh. Tujuannya agar mereka memahami apa yang disampaikan, terutama generasi muda.

Sosialisasi kepada generasi muda bangsa penekanannya terletak pada dua sisi, yaitu agama dan Negara. Dua sisi ini yang tak terpisahkan ini akan membentengi generasi muda kita dari pemahaman-pemahaman radikal. Selain itu, sosialisasi juga diharapkan akan membentengi generasi muda dari bahaya narkoba, seks bebas, kriminalitas, itulah sebabnya di situ ada penekanan agama. Namun, sekali lagi disampaikan dengan gaya bahasa yang dipahami generasi muda, tidak kaku dan tidak membosankan.

Intinya, ke depan, pimpinan dan anggota MPR mesti mampu juga memberikan sinyal yang kuat terkait pemahaman Empat Pilar kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang sangat beragam tersebut tumbuh ketertarikannya dan memberikan respon yang kuat juga untuk berpartisipasi dalam sosialisasi. Kemudian, setelah memahami serta menjalankan Empat Pilar, kemudian dengan kesadaran sendiri melakukan sosialisasi Empat Pilar di tengah-tengah lingkungannya masing-masing.

Jadi, tujuan akhirnya diharapkan memang seperti itu. MPR hanya sebagai pemicu agar masyarakat tergerak kesadarannya secara pribadi mencari informasi tentang Empat Pilar, lalu memahami, menjalankan, dan menularkannya kepada lingkungan sekitar.

Satu lagi terkait sosialisasi. Mesti dibangun atau terbangun sinergitas antara MPR dan lembaga lain, seperti BPIP, lembaga-lembaga negara lain, kementerian-kementerian untuk melakukan Sosialisasi Empat Pilar. Sebagai contoh kerjasama dengan Kementerian Pendidikan agar Pancasila masuk kurikulum pendidikan nasional dan lainnya. Sebab, memasyarakatkan Empat Pilar sejatinya adalah tanggung jawab bersama.

Keterlibatan lembaga-lembaga negara dan kementerian dalam penguatan Empat Pilar sangat penting, agar jangan sampai lembaga-lembaga negara dan kementerian disusupi aliran-aliran yang tidak sesuai dengan Empat Pilar. Mulai tahun 2020 ini dan ke depannya, saya sangat berharap lembaga-lembaga negara ikut concern pada penguatan Empat Pilar, entah bentuknya seperti apa nanti, kita ramu bersama-sama.

**Bagaimana dengan program pengkajian? Apakah akan memperdalam dan menyerap aspirasi masyarakat soal amendemen UUD untuk menghadirkan pokok-pokok haluan negara? Bagaimana konkretnya?**

Amandemen UUD merupakan tuntutan perkembangan zaman, sebab sejak amendemen terakhir pada 2002 tidak pernah muncul pemikiran untuk melakukan amendemen kembali. Wacana ini menguat di tahun 2019 yang menjadikan amendemen sebagai sebuah kebutuhan. MPR periode lalu, 2014-2019, menangkap itu dan pada akhir masa jabatannya di 2019 mengeluarkan rekomendasi kepada MPR periode 2019-2024 tentang amendemen terbatas soal GBHN.

Saat rekomendasi tentang amendemen terbatas soal GBHN ini kami terima, tentu kami bahas dan dikaji di MPR, sebab MPR memiliki perangkat terkait pengkajian. Tapi,

karena MPR adalah lembaga musyawarah dan mufakat maka untuk soal amendemen harus mengikutserakan masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia diminta masukannya, apakah mereka butuh amendemen, butuh GBHN atau tidak, dan apa keinginan rakyat untuk Indonesia ke depan.

Untuk itu, kami Pimpinan MPR melakukan kegiatan serap aspirasi dengan melakukan silaturahmi, menyambangi berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, seperti kepada tokoh-tokoh bangsa, para pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, hingga ke pimpinan media massa. Kepada elemen-elemen masyarakat tersebut, kami sampaikan soal wacana amendemen, dan kami tentunya mendengar masukan, aspirasi mereka.

Aspirasi-aspirasi dan masukan-masukan masyarakat Indonesia tersebut, nantinya, akan kami bawa ke MPR untuk kami lakukan kajian secara mendalam. Nanti setelah melalui berbagai prosedur di MPR maka akan muncul apakah amendemen dan GBHN itu dibutuhkan rakyat dan negara Indonesia atau tidak. Pada intinya, apakah akan ada amendemen atau tidak, semuanya kembali untuk kesejahteraan rakyat seluruhnya.

**Bagaimana dengan program kerja MPR terkait dengan pelaksanaan rekomendasi MPR periode sebelumnya 2014 - 2019? Misalnya soal penguatan kewenangan DPD, penguatan kewenangan kekuasaan kehakiman?**

Hal tersebut juga tergantung hasil kajian dari masukan aspirasi masyarakat Indonesia, apakah amendemen menyentuh juga hal-hal tersebut. Jika rakyat menghendaki adanya penguatan tersebut maka akan menjadi agenda untuk dibahas.

**Apakah soal amendemen UUD masuk dalam program kerja MPR lima tahun ke depan? Batas waktu tiga tahun apakah akan melakukan atau tidak amendemen UUD?**

Saat ini ada proses pematangan terkait wacana amendemen UUD, yakni melalui masukan aspirasi dari masyarakat, dan sampai saat ini proses tersebut masih berjalan. Soal apakah ada batas waktu proses penerimaan masukan dari masyarakat, saya katakan tidak ada batas waktu. Jika keluar hasil kajian dan Pimpinan MPR bersepakat soal amendemen, di tahun ini bisa mulai dibentuk Panitia Kerja Amendemen atau Panitia Adhoc terkait amendemen. Untuk itulah dilihat dahulu hasil kajian di MPR yang mengolah masukan-masukan dari berbagai

elemen masyarakat Indonesia. Baru setelah itu Pimpinan MPR mengambil langkah melalui pembentukan Panitia Kerja.

**Ada keinginan MPR periode ini meninggalkan legacy amendemen UUD, apa pendapat Bapak?**

Legacy tentu yang baik-baik. Sesuatu yang baik untuk rakyat dan bangsa tentu saja menjadi harapan kami. Kami berharap dapat bekerja sesuai amanah yang dibebankan kepada kami sebagai Pimpinan MPR, dan kami berupaya agar kerja kami bisa berdampak baik secara luas bagi rakyat Indonesia, serta memberikan legacy yang bermanfaat untuk rakyat dan negara.

Intinya, kita semua berupaya dengan



amandemen ataupun tidak harus menjadi jalan bagi percepatan kemakmuran Indonesia, walaupun Fraksi PKB mempertimbangkan untuk amendemen. Kalau, rakyat Indonesia menginginkan adanya amendemen dan amendemen tersebut sebuah jalan mempercepat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat maka itulah legacy kami.

Maka, yang ditekankan adalah perubahan tersebut mesti menjadikan Indonesia lebih baik. Buat apa ada perubahan tapi tidak mengubah keadaan Indonesia menjadi lebih baik. Jadi, bagi Pimpinan MPR, jika ada amendemen, itu adalah atas kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bukan kehendak dan kepentingan golongan tertentu. □

Pertemuan dengan Partai Nasdem

Pimpinan MPR  
**Bahas Amandemen Terbatas UUD**



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Perubahan terbatas UUD NRI Tahun 1945 bukanlah semata-mata perhitungan matematis sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, tetapi memerlukan konsensus politik seluruh kekuatan politik.

**K**ETUA MPR RI Bambang Soesatyo bersama para Wakil Ketua MPR RI lainnya bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan jajaran pengurus pusat Partai Nasdem. Selain untuk mempererat ikatan kebangsaan antara lembaga MPR RI dengan partai politik, silaturahmi ini juga untuk membahas agenda MPR RI ke depan, khususnya terkait perubahan terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI Tahun 1945) untuk menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara.

“Sesuai hasil Kongres ke-2 Partai Nasdem beberapa waktu lalu, Partai Nasdem memiliki perhatian khusus terkait wacana amandemen UUD NRI Tahun 1945. Partai Nasdem, sebagaimana juga MPR RI, sepakat untuk sama-sama mendengarkan masukan rakyat terkait perubahan terbatas UUD NRI Tahun 1945 tersebut,” ujar Bamsoet saat memimpin rombongan pimpinan MPR RI bersilaturahmi ke kantor

DPP Partai Nasdem, di Jakarta, Rabu (13/11/19).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Lestari Moerdijat (F-Nasdem), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Arsul Sani (F-PPP). Sedangkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh didampingi Ketua DPP Charles Meikyansah, Willy Aditya, Hermawi Taslim, Suyoto, dan Zulfan Lindan.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menuturkan, pandangan dan dukungan Surya Paloh sebagai salah satu senior dalam perpolitikan Indonesia dengan jam terbang yang tinggi, sangat diperlukan untuk mempermudah kinerja MPR RI dalam perubahan terbatas UUD NRI 1945. Sehingga bisa terjadi konsensus antarberbagai elemen bangsa, khususnya dari partai politik, yang merupakan tulang punggung demokrasi.

“Perubahan terbatas UUD NRI Tahun 1945 bukanlah semata-mata perhitungan matematis sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 UUD



NRI Tahun 1945, tetapi memerlukan konsensus politik seluruh kekuatan politik. Tidak boleh ada voting dalam urusan hukum dasar ini. Dan, yang jauh lebih penting adalah seluruh rakyat Indonesia memang mem-

butuhkannya,” tutur Bamsuet.

“Sebagai bangsa yang memegang teguh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana sila pertama Pancasila, perkumpulan organisasi sosial keagamaan di Indonesia

memiliki kekuatan sosial yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, MPR RI menilai, konsensus dalam perubahan terbatas UUD NRI Tahun 1945 juga perlu melibatkan para pemuka agama. Sehingga hasil perubahan tersebut selain memiliki kekuatan politik, juga memiliki kekuatan sosial keagamaan,” pungkas Bamsuet.

Dalam kesempatan tersebut, Surya Paloh menaruh harapan sekaligus keyakinan, di bawah kepemimpinan Bambang Soesatyo, MPR dapat melahirkan negarawan-negarawan baru. MPR diharapkan dapat menjaga marwah sebagai lembaga perekat bangsa, dengan mengoptimalkan peran di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. □

BSC

Silaturahmi ke DPP PAN

# Tetap Dalam Posisi Mendorong Amandemen Terbatas

Pimpinan MPR sambangi Pimpinan DPP PAN terkait amandemen terbatas dan pentingnya munculnya GBHN dalam konstitusi Indonesia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**A**MANDEMEN terbatas UUD NRI Tahun 1945 untuk memunculkan kembali Pokok Pokok Haluan Negara model GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) sudah menjadi ruang diskusi yang panjang di tengah masyarakat. Terjadi pro dan kontra seiring dengan pembahasan dan kajian mendalam yang dilakukan oleh MPR periode 2014-2019.

Hasil kajian lengkap tentang usulan amandemen terbatas tersebut kemudian menjadi sebuah keputusan dikeluarkan oleh

MPR periode 2014-2019 dalam bentuk rekomendasi yang diserahkan kepada MPR periode 2019-2024. Pimpinan MPR periode 2019-2024 pun bekerja cepat, pasca dilantik Oktober 2019 lalu, langsung membahas tentang rekomendasi MPR periode 2014-2019 tentang amandemen terbatas dan perlunya arah pembangunan nasional model GBHN.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsuet) mengungkapkan bahwa pem-

bahasan dan keputusan soal perlu tidaknya amandemen terbatas tersebut sangatlah penting. “MPR sangat hati-hati dalam soal ini. Kita tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan, sebab kami tahu betul dampaknya jika sampai salah mengambil keputusan,” katanya, usai bertemu Pimpinan DPP PAN, di Jakarta, Selasa (12/11/2019). Turut hadir para Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, Lestari Moerdijat, dan Syarifuddin







Hasan.

Dalam konteks kehati-hatian itulah, menurut Bamsuet, Pimpinan MPR mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu sebelum mengambil keputusan. MPR perlu meminta masukan dari berbagai elemen masyarakat Indonesia, mulai dari para pimpinan partai politik dan tokoh-tokoh masyarakat, organi-

sasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan, seperti Ketua Muhammadiyah, PBNU, Wali Gereja dan lainnya.

Maka digagaslah kegiatan ‘Silaturahmi Kebangsaan’ dengan agenda menyambangi para pimpinan parpol dan tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan diskusi, mendengarkan masukan-masukan seputar

amandemen terbatas untuk memunculkan GBHN.

“Silaturahmi Kebangsaan ini muncul dan sudah kami gelorakan sejak sebelum pelantikan Presiden RI beberapa waktu lalu. Agenda tersebut adalah kerja-kerja politik yang dilakukan Pimpinan MPR dalam rangka menjangir aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat atas kebutuhan konstitusi bangsa Indonesia,” terangnya.

Hasilnya, kata Bamsuet, dalam silaturahmi pertama dengan Pimpinan DPP PAN terkait amandemen terbatas, PAN secara tegas menyatakan tetap dalam posisi untuk mendorong dilakukannya amandemen terbatas, dan perlunya dihadirkan kembali Pokok Pokok Haluan Negara model GBHN.

“Tentunya nanti dalam agenda silaturahmi selanjutnya akan muncul masukan dan pendapat lain. Intinya, MPR membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kepada kami, kira-kira arah konstitusi negara kita mau dibawa kemana ke depan,” ujarnya. □



DER

Silaturahmi ke DPP PKS

# Pimpinan MPR Serap Aspirasi Amandemen UUD NRI Tahun 1945

PKS menegaskan, amandemen UUD NRI Tahun 1945 harus didasarkan pada aspirasi dan kehendak rakyat Indonesia bukan didasarkan pada kepentingan elit atau kelompok tertentu saja.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**D**ALAM rangkaian silaturahmi kebangsaan ke berbagai elemen masyarakat, Pimpinan MPR berkunjung ke DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jl. Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2019). Ketua MPR Bambang Soesatyo memimpin rombongan MPR dan diterima Presiden PKS Sohibul Iman dan jajaran DPP PKS.

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Jazilul Fawaid (F-PKB), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), dan Arsul Sani (F-PPP). Sedangkan jajaran pimpinan DPP PKS yang hadir, antara lain Presiden PKS Sohibul Iman, Sekretaris Jenderal Mustafa Kamal, Sekretaris Majelis Syuro Untung Wahono, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Suharna Surapranata, Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Almuzammil Yusuf, dan Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring.

Usai pertemuan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, wacana perubahan masa kepemimpinan Presiden - Wakil Presiden dari 2 periode menjadi 3 periode dengan masa jabatan 5 tahun/periode, ataupun wacana perpanjangan masa perodesasi kepemimpinan menjadi cukup 1 periode dengan masa jabatan 7 tahun, bukanlah bersumber dari kajian internal MPR

RI. Melainkan disampaikan publik sebagai respon atas masifnya pemberitaan MPR RI yang akan melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945.

“MPR RI tak bisa membendung respon masyarakat yang memberikan banyak usulan terkait amandemen UUD NRI Tahun 1945. Waktu, persiapan, dan kajian juga masih sangat panjang. Biarkan wacana itu berkembang sebagai bagian dari dialektika bangsa. Jikapun ada perubahan masa kepemimpinan presiden - wakil presiden, baik dari perodesasi maupun masa jabatan, maupun berbagai perubahan lainnya dalam UUD NRI Tahun 1945, itu bukanlah untuk pemerintah saat ini. Melainkan untuk yang akan datang,” ujar Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, silaturahmi kebangsaan yang dilakukan MPR RI kepada pengurus partai politik dilakukan, selain untuk bertukar gagasan, juga sebagai langkah memperkuat kemitraan MPR RI dengan partai politik. Sebelumnya, pimpinan MPR RI sudah berkunjung ke PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, Demokrat, dan PAN.

“Diskusi yang sangat produktif dengan PKS menghasilkan banyak pemikiran segar dan menyegarkan. Antara lain, usulan penegasan menjadikan MPR RI sebagai

lembaga legislatif yang selalu mengedepankan musyawarah dibanding voting dalam setiap pengambilan keputusan. Sehingga perlunya dilakukan amandemen guna mengubah Pasal 2 Ayat 3 UUD NRI 1945. Usulan PKS untuk menghadirkan lembaga pemberantasan korupsi yang permanen melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945 juga merupakan sebuah wacana menarik yang perlu disimak,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini memaparkan, saat ini setidaknya ada enam usulan pokok yang berkembang di masyarakat seputar amandemen UUD NRI 1945. Pertama, perubahan terbatas untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara. Kedua, kembali ke UUD 1945 yang asli, setelah itu baru kemudian melakukan perubahan melalui adendum.

“Ketiga, kembali ke UUD sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Keempat, penyempurnaan UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen keempat. Kelima, perubahan UUD NRI Tahun 1945 secara menyeluruh. Dan keenam, tidak perlu melakukan amandemen. Semua usulan tersebut akan dilaborasi lebih lanjut oleh MPR RI, khususnya melalui Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI,” papar Bamsoet.



Terkait wacana amandemen UUD NRI 1945, PKS menegaskan, keinginan amandemen UUD NRI Tahun 1945 harus didasarkan pada aspirasi dan kehendak rakyat Indonesia. Bukan didasarkan pada kepentingan elit atau kelompok tertentu saja.

“Wacana amandemen UUD juga harus melibatkan ahli-ahli di bidangnya dan benar-benar lahir dari kehendak dan keinginan rakyat. Oleh karena itu, PKS akan sangat mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi dan kehendak rakyat Indonesia dalam mendukung atau menolak amandemen

UUD NRI Tahun 1945,” kata Presiden PKB Sohibul Iman.

Jika aspirasi dan kehendak rakyat menginginkan amandemen UUD NRI Tahun 1945, lanjut Sohibul, maka PKS memperjuangkan dua hal dan menolak dua hal. Dua hal yang diusulkan dan diperjuangkan dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah PKS mendorong dibentuknya lembaga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat permanen dalam konstitusi. Bukan lembaga ad hoc atau sementara yang selama ini menjadi per-

debatan elit.

“Kedua, PKS mendorong perubahan pasal 2 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 tentang MPR yang berbunyi ‘segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak’. “Menurut kami putusan dengan suara terbanyak ini harus diganti dengan musyawarah mufakat yang menjadi semangat nilai-nilai Pancasila. Jika tidak terpenuhi mufakat baru kemudian diputuskan dalam suara terbanyak,” jelas Sohibul.

Sedangkan dua hal yang ditolak PKS dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah, PKS menolak wacana perpanjangan kekuasaan presiden dan wakil presiden tiga periode. “PKS berkomitmen untuk menjaga semangat reformasi dan demokrasi dengan membatasi kekuasaan, bukan memperbesar kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan,” terang Sohibul.

Kedua, PKS menolak wacana pemilihan presiden dan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan tetap menginginkan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat Indonesia. “Pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR adalah langkah mundur demokrasi dan menghilangkan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya,” imbuh Sohibul. □

BSC

Bertemu PP Muhammadiyah

# Muhammadiyah Setuju Amandemen Terbatas



**K**ETUA MPR Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, dan Arsul Sani, pada 16 Desember 2019 melakukan kunjungan ke jajaran Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, di Kantor Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta. Kedatangan pimpinan MPR ini disambut langsung oleh jajaran pengurus organisasi yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan itu. “Selamat datang di Kantor Pusat Muhammadiyah”, ujar Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir. “Suatu kehormatan bagi Muhammadiyah bisa bertemu dengan pimpinan MPR”, tambah pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, itu.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang Soesatyo mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh jajaran pengurus Muhammadiyah yang sangat terbuka. Dikatakan, kedatangan pimpinan MPR untuk melakukan silaturahmi kebangsaan. Di mana silaturahmi ini, menurut pria yang akrab dipanggil Bamsuet, juga telah dilakukan ke PBNU, PHDI, Permabudhi, serta berbagai partai politik. “Sejak dilantik kami melakukan silaturahmi ke berbagai kelompok masyarakat dan partai politik untuk menyerap

aspirasi terkait konstitusi”, ujarnya.

Bamsuet mengatakan, apakah UUD NRI Tahun 1945 saat ini dirasakan oleh masyarakat masih ‘up to date’ atau masih bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman, sehingga tak perlu dilakukan perubahan. Atau ada hal-hal yang lain sehingga konstitusi ini perlu dilakukan penyempurnaan lewat amandemen. Terkait itulah membuat MPR melakukan penyerapan dan meminta

masukan ke berbagai kelompok masyarakat dan partai politik.

Melakukan serap aspirasi dan keinginan untuk melakukan amandemen, menurut Bamsuet, karena hal itu merupakan Rekomendasi MPR Periode 2014-2019. Salah satu rekomendasi itu adalah tentang pokok-pokok haluan negara. “Rekomendasi yang ingin menghidupkan kembali haluan negara ala GBHN sebagai pedoman pembangunan”,



tuturnya.

Mantan aktivis FKPPi itu mengakui, selama MPR melakukan serap aspirasi, wacana yang muncul terkait amandemen berkembang tidak hanya soal menghidupkan kembali haluan Negara, namun juga pada masalah-masalah yang lain, seperti periode jabatan Presiden hingga 3 periode, hingga soal Pemilihan Presiden sebaiknya dikembalikan ke MPR. Menanggapi melebarnya keinginan tersebut, Bamsuet menilai sebagai hal yang wajar. “Pendapat yang demikian sah-sah saja”, ungkapnya. Semua pendapat dihargai. Dia mengakui, tantangan bangsa ini ke depan semakin berat sehingga masalah-masalah yang demikian perlu dipikirkan bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Haedar Nashir mengatakan, terkait isu-isu kebangsaan, Muhammadiyah mempunyai pandangan bahwa bangsa Indonesia dibangun secara berkesinambungan dengan waktu yang panjang. Setelah Orde Lama, Orde Baru, selanjutnya masa reformasi. Masa reformasi, kata Haedar, sebagai koreksi dari masa-masa sebelumnya. Salah satu buah dari reformasi, menurut Haedar Nashir, adalah Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. “Untuk itulah Pemilihan Presiden langsung oleh rakyat harus dipertahankan”, ujarnya seraya memberi alasan, Pemilihan Presiden langsung merupakan tonggak pertama reformasi.



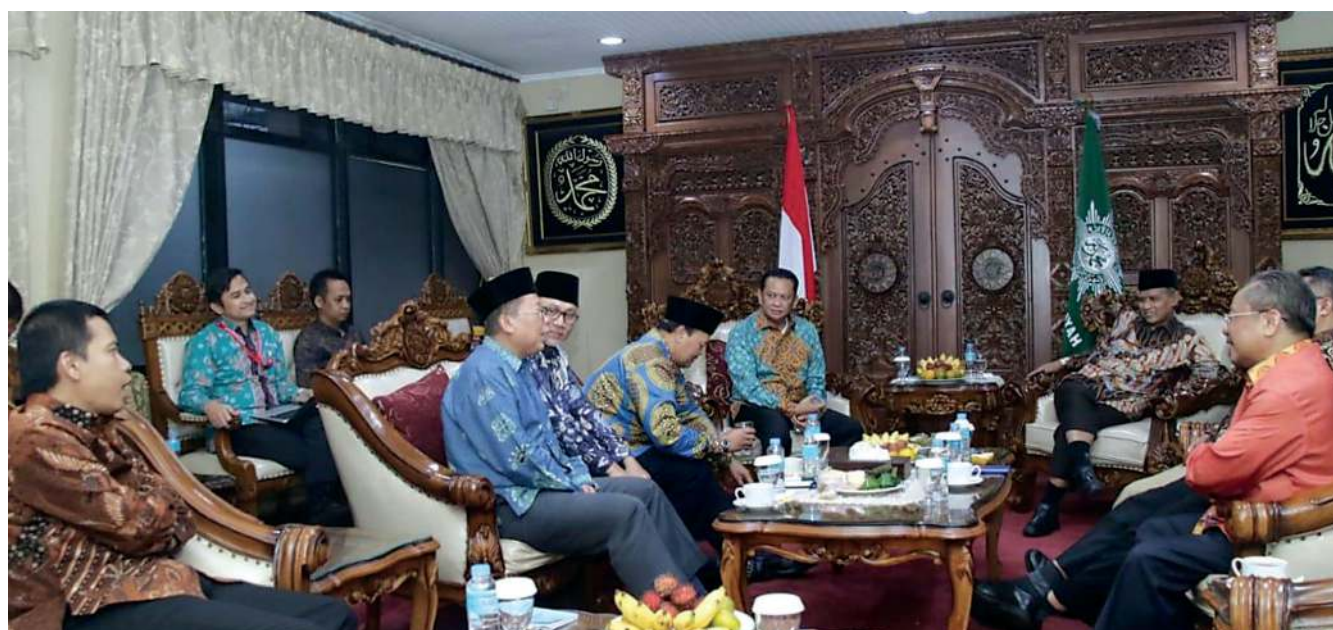
Terkait amandemen, Haedar mengatakan, harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendasar. Dia setuju amandemen terbatas untuk menghidupkan kembali GBHN. Dia menyebut GBHN sebagai wadah untuk mengelaborasi tujuan bangsa, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. “Presiden harus punya pedoman dalam pembangunan”, tuturnya. “Visi dan misi Presiden tak boleh lepas dari GBHN”, tambahnya. Untuk itulah, dia kembali menegaskan, Muhammadiyah setuju amandemen terbatas untuk menghidupkan kembali haluan negara.

Sedangkan masalah masa jabatan Presiden, Haedar Nashir menegaskan, cukup

dua periode. Baginya tak boleh ada kekuasaan yang tidak terbatas.

Dalam silaturahmi yang diliput berbagai media, Bamsuet menerima tiga buku terbitan Muhammadiyah yang berisi mengenai masalah kebangsaan dan keummatan. Dengan buku-buku tersebut, pikiran Muhammadiyah tentang masalah-masalah yang disampaikan oleh MPR bisa digali. Bamsuet sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Haedar Nashir bahwa untuk mengupas masalah GBHN perlu dilakukan kajian yang mendalam. “Amandemen juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat”, tegasnya. □

AWG



## Kemenangan yang Mempersatukan

Nurani kebangsaan mendorong Joko Widodo dan kawan-kawan dalam Koalisi Indonesia Maju memilih model penyelesaian politik yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Inilah catatan terpenting bagi warga bangsa selama mengarungi 2019, tahun politik itu.

**D**ALAM hitungan hari, tahun segera berganti, 2019 berakhir, untuk kemudian bersama menyongsong tahun 2020. Ada sejumlah catatan tentang dinamika global maupun nasional yang tidak hanya akan menjadi kenangan, melainkan juga menjadi sisa masalah yang masih harus dituntaskan di tahun mendatang. Dunia masih harus menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat perang dagang. Sedangkan di dalam negeri, pemerintah dan masyarakat yang peduli keutuhan NKRI masih harus bekerja merawat persatuan dan kesatuan dalam naungan Pancasila dan UUD 1945.

Tahun 2020 pun pasti dinamis. Beberapa pemicunya sudah bisa diprediksi. Awal tahun mendatang, dunia akan heboh saat menyimak proses lanjutan pemakzulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald

Trump. Di dalam negeri, ruang publik juga akan dinamis oleh persiapan Pilkada serentak yang dijadwalkan pada pekan ketiga September 2020. Pasti dinamis karena Pilkada itu diselenggarakan pada 270 daerah pemilihan. Rinciannya, sembilan (9) provinsi memilih gubernur, 224 kabupaten memilih bupati dan 37 kota memilih walikota.

Kendati harus membawa beragam persoalan di tahun baru nanti, Indonesia layak lebih optimistis memasuki tahun 2020. Sebab, modal dasar untuk mewujudkan stabilitas nasional dan ketertiban umum, yakni persatuan dan kesatuan semua elemen bangsa, telah dimulai dan terus berproses. Kecenderungannya pun positif. Memang, di beberapa tempat masih saja muncul kasus-kasus yang merefleksikan terganggunya persatuan dan kesatuan itu. Namun, insiden-insiden bernuansa diskriminasi itu diharapkan tidak menimbulkan gelisah berlebihan.



FOTO-FOTO : ISTIMEWA

Sebab, dari hari ke hari, arus perlawanan masyarakat terhadap perilaku seperti itu semakin kuat. Arus kuat itu bisa diamati di banyak

forum, termasuk media sosial. Perubahan zaman, yang juga ikut mengubah perilaku hidup Generasi Milenial dan Generasi Z, pada gilirannya akan menghadirkan peradaban yang mengutamakan harmoni karena tereliminasi banyak sekat pemisah. Sehingga, diyakini bahwa di kemudian hari, perilaku diskriminatif tidak akan mendapatkan tempat di mana pun, termasuk di negara ini. Mereka yang diskriminatif akan terkucil.

Gejala disharmoni atau masyarakat yang terpolarisasi sudah terlihat dan dirasakan selama kurang lebih satu dekade terakhir. Gejala itu kemudian semakin menguat sejak sebelum dan sepanjang tahun politik 2019. Sumber masalahnya adalah ketidakdewasaan sebagian masyarakat dalam menyikapi perbedaan. Sejumlah eksek

pun bermunculan di berbagai tempat. Menyikapi gejala itu, negara dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang peduli, termasuk para tokoh agama, terus berupaya merekat persatuan dan kesatuan. Paling signifikan adalah langkah atau model penyelesaian masalah yang dipilih Presiden Joko Widodo. Tentu saja dia tidak sendiri. Dia butuh dukungan solid dari teman-temannya, para elit partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju yang mendukungnya pada ajang pemilihan presiden tahun 2019. Tak hanya menguatkan nurani kebangsaan, tetapi juga mendorong mereka mendengar suara hati untuk bagaimana menyikapi fakta tentang masyarakat yang nyaris terberai-berai karena alasan perbedaan itu.

**Bambang Soesatyo**  
Ketua MPR RI



boleh menggoreskan luka baru bagi mereka yang merasa kalah. Menjadi tidak elok pula jika pemenang bersikukuh menerapkan prinsip *the winner takes it all*. Kemenangan itu haruslah menjadi solusi, pun menyembuhkan, serta menjadi sumber kekuatan yang mempersatukan dan merawat keberagaman. Menyatukan kembali warga bangsa yang terpolarisasi menjadi yang paling utama. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat harus diupayakan dengan tulus dan penuh kesungguhan.

### **Tulus dan Kesungguhan**

Sebagaimana dicatat bersama, upaya mengakhiri polarisasi masyarakat tidak berhenti pada pertemuan Jokowi dengan sang rival, Prabowo Subianto, di Stasiun Lebak Bulus Jakarta pada pekan kedua Juli 2019. Tulus dan kesungguhan Jokowi berlanjut saat dia menggodok formasi kabinet. Kejutan dan juga sangat menggembirakan karena Prabowo bersedia masuk dalam Kabinet Indonesia Kerja. Rivalitas keduanya yang begitu sengit di ajang Pilpres 2019 diakhiri dengan cara yang sangat elegan. Demi kepentingan negara dan bangsa yang jauh lebih besar dan strategis, kedua sosok itu mewujudkan kebersamaan dan mengabdikan kepada negara. Memang ada kelompok mencemooh Jokowi, ada pula yang mengejek Prabowo. Respons negatif kepada Jokowi-Prabowo itu karena mereka berpikir sempit dan lebih mengutamakan kepentingan sendiri atau kelompok. Bukan kepentingan bangsa dan negara.

Sedangkan kebersamaan Jokowi-Prabowo dalam pemerintahan sekarang ini lebih mencerminkan niat tulus keduanya untuk mengakhiri polarisasi masyarakat. Keduanya mendorong seluruh elemen bangsa untuk merajut lagi persatuan dan kesatuan demi terwujudnya stabilitas nasional dan ketertiban umum. Mewujudkan dua faktor ini sangat penting, tidak hanya demi kenyamanan semua warga negara, tetapi juga untuk merawat citra bangsa dan negara dalam pergaulan antarbangsa.

Cara Jokowi dan Prabowo menutup rivalitas mereka dalam berpolitik tidak hanya memuat

pesan, tetapi juga mengandung pembelajaran bagi masyarakat, terutama mereka yang awam dalam politik praktis. Keduanya membuktikan bahwa tidak ada yang abadi dalam politik. Tidak ada lawan abadi, pun tak ada pula kawan abadi. Hanya ada kepentingan. Untuk mencapai tujuan, etika yang berlaku adalah taat aturan untuk melakoni persaingan sehat, bukan perilaku politik yang dibungkus sikap bermusuhan. Seperti halnya laga sepak bola, tim pemenang dan tim yang kalah berjabat tangan di akhir pertandingan, berangkuhan, hingga bertukar kaus seragam. Begitu pula dalam berpolitik praktis.

Di permukaan, masyarakat bisa melihat bahwa masih kelompok-kelompok tertentu yang coba mempertahankan dan memelihara polarisasi itu. Jangan terkecoh. Mereka tidak menyuarakan aspirasi masyarakat, tetapi sedang memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Baik kepentingan ekonomi atau kepentingan bisnis, maupun agenda lain demi kepentingan asing.

Pada peringatan Hari Bela Negara tahun ini, Kementerian Pertahanan mengemukakan bahwa Indonesia dewasa ini menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya hingga persoalan pertahanan dan keamanan. "Tantangan dan ancaman yang kompleks tersebut membutuhkan persatuan dari kita semua. Setiap anak negeri jangan pernah mau dipecah belah karena perbedaan sikap politik," kata Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Ada kekuatan asing di balik kelompok-kelompok yang ingin mengubah dasar negara Pancasila. Dan, karena Indonesia kaya akan sumber alam, ada pula kekuatan asing yang ingin menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa agar bisa meruntuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hanya persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa yang bisa mengeliminasi niat-niat jahat itu. Di tahun mendatang, harus ada dorongan kepada seluruh anak bangsa, khususnya Generasi Milenial dan Generasi Z, agar lebih bersemangat merajut persatuan dan kesatuan bangsa. □

Kunjungan TETO

# Taiwan Termasuk Negara Maju

Untuk kesekian kalinya HNW bertemu diplomat atau LSM dari Taiwan. Taiwan sebagai negara yang terbuka dan maju maka hubungan Indonesia-Taiwan perlu ditingkatkan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**AMIS, 21 November 2019, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) kedatangan tamu dari *Taipei Economic and Trade Office* (TETO). Delegasi yang dipimpin John Chen itu diterima oleh HNW di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, lantai 9, Kompleks MPR/DPD/DPD Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut John mengucapkan terima kasih kepada HNW, sebab di tengah kesibukan sebagai politisi dan Wakil Ketua MPR, dia sudi menerima delegasi

TETO yang berjumlah lima orang. “Selamat kepada Bapak yang terpilih kembali menjadi Wakil Ketua MPR. Bapak orang yang sangat populer,” begitu pujian yang diberikan John pada HNW.

Selanjutnya, John mengatakan, negaranya, Taiwan, juga hidup dengan menggunakan nilai-nilai seperti yang terkandung dalam Pancasila. Kehidupan di Taiwan, menurut John, sangat beragam dan menghargai perbedaan. Negara yang bertetangga dengan

Cina itu sangat terbuka terhadap umat Islam. “Ada restoran halal dan tempat ibadah buat umat Muslim”, tuturnya. John berharap, hubungan Indonesia-Taiwan yang selama ini sudah bagus, perlu ditingkatkan. Di Taiwan, jelas John, banyak mahasiswa dan pelajar dari Indonesia menempuh studi di sana. “Saya berharap, pelajar dan mahasiswa dari Indonesia terus bertambah”, ujarnya.

Bagi diplomat Taiwan yang ada di Indonesia, nama HNW bukan suatu yang asing. Mereka sering bertukar pendapat dan minta masukan untuk meningkatkan hubungan kedua negara. Para diplomat atau perwakilan Taiwan di Indonesia, HNW memang diakui sebagai seorang akademisi. Karena itu, lewat TETO, John mengundang HNW untuk memberikan kuliah umum atau stadium general di negara yang juga bertetangga dengan Jepang itu. “Saya berharap hubungan yang sudah baik dengan Indonesia dipertahankan dan terus dijaga”, harap John.

Buat HNW, kedatangan tamu asal Taiwan bukanlah kali pertama. Maka, HNW menyambut dengan tangan terbuka kedatangan delegasi TETO ini. Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor itu menyatakan, sepakat bila pelajar dan mahasiswa dari Indonesia yang belajar di Taiwan lebih banyak lagi. “Saya akui kualitas pendidikan di Taiwan sangat tinggi, selevel dengan negara maju Asia lainnya,” kata HNW. Untuk itu, pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu mendorong agar pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, serta pondok pesantren di Indonesia untuk bisa mendapat beasiswa.

Menanggapi permintaan agar HNW menjadi pembicara utama dalam acara kuliah umum atau stadium general di Taiwan, HNW mengatakan, “insya Allah”. Dia bersyukur bisa mengikuti dan aktif di berbagai forum dunia. Bahkan, berbagai organisasi dunia di mana dia menjadi anggotanya mengakui HNW termasuk salah satu ulama dunia.

Dalam kesempatan itu, HNW menyatakan, sepakat dengan John bila hubungan Taiwan-







Indonesia perlu ditingkatkan. Lewat fraksinya, PKS, di DPR RI, HNW akan mendorong peningkatan hubungan kerjasama itu. Peningkatan hubungan kerjasama ini, bagi HNW perlu diseriisi mengingat Taiwan diakui sebagai negara maju, berkualitas, dan terbuka bagi masyarakat dan bangsa Indo-

nesia. “Kita mendukung peningkatan hubungan ini”, tegasnya.

Kepada John dan delegasi lainnya, HNW menceritakan bahwa kemarin (20 November) dia bersama pimpinan MPR lainnya berkunjung ke kantor Persatuan Umat Budha Indonesia (Permadubhi). Kunjungan itu

dimaksudkan untuk serap aspirasi terkait amandemen UUD NRI Tahun 1945. Amandemen UUD, jelas HNW, merupakan isu yang ada di MPR, karena ada keinginan untuk menghidupkan kembali pokok-pokok haluan negara ala GBHN. GBHN, jelas HNW, merupakan pola pembangunan yang sangat populer pada masa Presiden Soeharto. “Saat reformasi haluan negara ini dihilangkan, namun sekarang ada keinginan untuk menghidupkan kembali. Karena selama ini model pembangunan yang ada berdasarkan pada misi dan visi calon Presiden,” ungkap HNW kepada tamunya.

Mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga hidup di Taiwan, HNW membenarkan hal itu. Dalam sejarah, kata HNW, Presiden Soekarno pernah mengaku terinspirasi dari ajaran San Min Chu I (Tiga Prinsip Rakyat). “San Min Chu I digagas oleh Sun Yat Sen, Bapak modern Tiongkok maupun Taiwan”, ungkap HNW. □

AWG

## Delegasi ICMI

# Harus Ada Percepatan Pembangunan SDM

Menurut Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah persoalan nasionalisme dan pembangunan SDM.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR RI Dr. (HC) Zulkifli Hasan, SE., MM., menerima kunjungan delegasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua

MPR, Gedung Nusantara III, lantai 9, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/11). Pada pertemuan tersebut delegasi ICMI dipimpin Sekretaris Jenderal ICMI, Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah, IPM.

Kepada Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan, ICMI menyampaikan undangan untuk menjadi pembicara pada acara Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) dan Milad ke-29 ICMI tahun 2019. Silaknas yang diselenggarakan

pada 6-8 Desember 2019 di Universitas Negeri Padang (UNP) Sumatera Barat itu dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri Wakil Presiden KH. Ma'rukh Amin. Tema Silaknas dan Milad ICMI kali ini adalah: "Penguatan Nasionalisme dan Pembangunan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045."

Zulkifli yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar ICMI menyatakan kesediaannya untuk hadir dan menyampaikan pengarahannya. Selain itu, Zulkifli pada saat pertemuan itu, berjanji akan datang lebih awal untuk mengikuti acara dari awal, yaitu pembukaan Silaknas yang dilakukan oleh

Presiden RI.

Menyangkut tema Silaknas, Wakil Ketua MPR mengatakan bahwa tantangan Indonesia saat ini adalah persoalan nasionalisme dan pembangunan SDM. Karena itu sudah waktunya bangsa Indonesia melakukan penguatan nasionalisme. Ini penting, agar bangsa Indonesia yang beragam tidak tercerai berai dan terpecah belah.

"Dulu kita mengenal ada mata pelajaran PMP dan P4, tetapi semua itu kini tidak ada lagi. Maka harus dicarikan jalan keluarnya agar generasi muda kita tidak semakin jauh dari ideologinya sendiri," kata Zulkifli.

Menyangkut Pembangunan SDM, menurut Zulkifli, potensi alam yang dimiliki bangsa Indonesia sangatlah besar. Sehingga banyak bangsa di dunia yang ingin menguasainya. Sayangnya, hingga kini kekayaan bangsa Indonesia itu belum bisa dimaksimalkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, perlu dilakukan percepatan pembangunan SDM agar manusia-manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul. Mampu menjadi pelaku dalam proses pembangunan, bukan hanya menjadi penonton saja.

Pada kesempatan itu, Zulkifli juga menegaskan nikmatnya tinggal di Indonesia. Di Indonesia, menurut politisi Partai Amanat Nasional asal Lampung ini, orang bisa beribadah dengan baik, tanpa merasa takut atau tercekam. Sementara di banyak negara lain, orang tidak bisa menjalankan syariat agamanya dengan leluasa. Ada yang harus sembunyi-sembunyi. Dan ada juga yang tidak bisa menjalankan ibadahnya di tempat ibadah yang baik.

"Di luar negeri banyak masjid yang tutup setelah jam salat. Jadi salat lima waktu itu jadwalnya ada yang sangat pendek. Setelah salat selesai masjidnya tutup. Terlebih lagi pada malam hari, hampir semua masjid dikunci, dan tidak ada orang yang bisa masuk," ungkap Zulkifli Hasan. □

MBO



## Diskusi Pemilihan Kepala Daerah

# Berembus Wacana Mengembalikan Pilkada ke DPRD

Berbiaya mahal dan banyak kepala daerah berurusan dengan KPK menjadi alasan munculnya wacana mengembalikan Pilkada ke DPRD. Mungkinkah itu terjadi?

**A**NGGOTA MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, mengakui, belakangan ini wacana dan pemikiran mengenai pelaksanaan Pilkada dikembalikan ke DPRD kembali menyeruak. "Apalagi terkait Pilkada serentak, tak hanya pada 2020 namun juga 2024", ujar Kamrussamad saat menjadi pembicara dalam 'Diskusi Empat Pilar MPR', di Media Center, Kompleks Parlemen, Jakarta, 22 November 2019.

Dalam diskusi bertema: 'Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Pasal 18 UUD tidak mengharuskan Pilkada Dipilih Langsung)', Kamrussamad mengakui, pelaksanaan Pilkada diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, di mana gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. "Ini diterjemahkan dengan pemilihan langsung", ungkapnya. Terkait dengan cara pemilihan langsung, dia mengajak untuk mengevaluasi

apakah pelaksanaannya sudah berjalan secara substantif, prosedural, dan teknis yang benar. "Bila Pilkada sudah berjalan secara substantif, di mana rakyat memilih secara langsung karena visi dan misi calon kepala daerah, maka hal demikian menarik untuk didiskusikan," papar Kamrussamad.

Namun, dia melihat dari berbagai kasus yang ada, praktik *money politic* masih mendominasi penyelenggaraan Pilkada.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

“Memang ada pengaruh visi dan misi calon kepala daerah, namun *money politic* masih dominan”, ungkapnya. Dia berharap, bila memilih cara demokrasi sebagai sarana untuk mendapat pemimpin, maka masyarakat pemilih perlu ditingkatkan edukasinya.

Pemilu langsung di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang masih belum mapan menjadi salah satu tantangan. “Masyarakat masih dalam kondisi income yang rendah, namun kita menggunakan demokrasi liberal”, tutur Kamrussamad. Demokrasi liberal, menurut Kamrussamad, cocok diterapkan di Negara, seperti Amerika Serikat, karena income perkapita masyarakatnya sudah mencapai US\$ 18.000.

Tak hanya itu yang menjadi persoalan dalam Pilkada. Pria asal Sulawesi Selatan itu menyebut, kampanye Pilkada yang terlalu panjang juga menjadi salah satu problem. Masalah inilah yang perlu dievaluasi. Lamanya kampanye tentu akan membuat biaya yang dikeluarkan terlalu tinggi. Dia menyebut, anggaran Pilkada serentak tahun

2020 mencapai kisaran Rp 90 triliun. “Bayangkan kalau uang sebanyak itu digunakan untuk membangun sekolah, puskesmas, pasar, dan kebutuhan rakyat lainnya”, ucapnya. Agar Pilkada tidak memakan biaya yang mahal, menurut Kamrussamad, calon kepala daerah harus mengedepankan transparansi, akuntabel, dan tak ada mahar. “Ini yang kita dorong,” tegasnya.

Terkait adanya keinginan untuk mengembalikannya pelaksanaan Pilkada ke DPRD, mantan aktivis HMI itu menyebut, belum ada usulan langsung dari pemerintah. “Jadi, masih wacana. Kita tunggu sikap resmi pemerintah”, ujarnya.

Anggota MPR dari Kelompok DPD, Otopianus P. Tebai, dalam kesempatan yang sama mengusulkan beberapa isu. “Pembiayaan Pilkada harus dibatasi”, ujarnya. Anggota DPD dari Papua itu memberi batasan berapa anggaran yang mestinya dikeluarkan. Selain masalah biaya, Oto juga menyinggung potensi putera asli daerah

diperhitungkan dalam Pilkada. Kepala daerah terpilih, menurut Oto, dibatasi satu periode dengan masa waktu 8 tahun. “Tak boleh dua periode”, tuturnya. Agar pelaksanaan Pilkada bisa berjalan dengan baik, alumni SMP PGRI Nabire ini menyarankan agar jumlah anggota KPPS ditambah.

Pengamat politik dari Lingkaran Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, sebagai pembicara ketiga dalam diskusi dengan tegas mengatakan, tak setuju bila Pilkada dikembalikan ke DPRD. Mengapa? Menurut Ray Rangkuti, alasannya banyak. Bila biaya Pilkada disebut banyak, dia lalu membandingkan dengan biaya untuk Pilpres dan Pileg yang juga tidak sedikit. Untuk itu mengapa Pilkada saja yang disorot. Kemudian bila dikatakan banyak kepala daerah ditangkap oleh KPK akibat politik biaya tinggi, Ray Rangkuti juga membandingkan banyaknya anggota DPR, DPRD, jaksa, dan hakim yang juga ditangkap oleh KPK.

Menurut Ray, kualitas demokrasi tertinggi adalah bila rakyat terlibat langsung dalam Pemilu. Dia heran di tengah semakin berkembangnya pembangunan infrastruktur dan kemajuan teknologi, justru masyarakat diajak kembali ke Pemilu model lama. “Pemilihan seperti pada masa Yunani kuno dengan sistem diwakilkan”, tuturnya. Dia menegaskan, bila UU Pilkada mau direvisi, yang diperkuat adalah posisi rakyat. Ini penting, sebab bila Pilkada dikembalikan ke DPRD maka akan menguatkan oligarki partai politik. “Agar Pilkada tak berbiaya mahal maka partai politik perlu didisiplinkan dengan cara tidak meminta mahar kepada calon kepala daerah”, tegasnya. □

AWG



Delegasi OIC Youth Indonesia

# HNW Bersedia Jadi Pembicara Kunci

Untuk pertama kalinya Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan organisasi pemuda negara-negara Islam dunia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., menerima delegasi Organizational Islamic Cooperation (OIC) Youth Indonesia. Pertemuan berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (7/11). Pada kesempatan itu delegasi OIC Youth Indonesia dipimpin ketuanya, Syafii Efendi. Ikut serta dalam pertemuan itu, Sekjen OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Rizkita, Wakil Sekjen Nabila Harahap, dan pengurus lainnya.

Dalam kesempatan itu Syafii meminta kesediaan Hidayat Nur Wahid, untuk hadir dan menjadi pembicara kunci pada acara

Indonesia Islamic Young Leader Summit tersebut. Rencananya, acara Indonesia Islamic Young Leader Summit tersebut digelar di Jakarta pada 22-26 November. Menariknya, menurut Syafii, Islamic Young Leader Summit ini untuk pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia.

“Ini pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Rencananya, pertemuan tersebut akan diikuti perwakilan dari 57 negara anggota OKI, serta 1000 undangan dari kalangan milenial perwakilan dari daerah,” jelas Syafii.

Beberapa isu dibahas dalam Indonesia

Islamic Young Leader Summit ini, antara lain terkait isu keumatan, pemuda, kesehatan, politik dan ekonomi. Rencananya, OIC Youth Indonesia akan mengadakan 2 event utama dalam acara Young Leader Summit ini. Yakni, mengenai Model OIC Indonesia, Entrepreneur Muda, dan Ekonomi Syariah. Salah satu bentuk kegiatannya adalah menampilkan produk-produk usaha dari pengusaha muda muslim, industri halal, dan pariwisata halal di Indonesia.

Menanggapi permohonan ketua delegasi OIC Youth Indonesia itu, Hidayat mengapresiasi rencana pertemuan tersebut. Politisi asal Klaten, Jawa Tengah, ini juga menyatakan kesediaannya untuk hadir dan menjadi *keynote speaker* pada 23 November. Selain itu, Hidayat juga akan mendukung agar acara besar tersebut bisa berjalan dengan sukses.

“Organisasi ini memiliki jaringan nasional dan internasional. Karena itu, kegiatan ini harus di support, apalagi kali ini skalanya internasional. Selain itu, materi yang dibahas bisa memberikan kebaikan kepada kemaslahatan umat Islam,” ujar Hidayat Nur Wahid.

Organizational Islamic Cooperation (OIC) Youth merupakan Organisasi pemuda kerjasama Islam atau Pemuda OKI. Yaitu, sebuah institusi payung bagi organisasi pemuda Islam Indonesia yang konsen terhadap isu strategis pemuda dan dunia Islam. Organisasi ini berpusat di Istanbul Turki dengan anggota 57 negara Islam di seluruh dunia.

Saat ini presiden OIC Youth Indonesia dipegang oleh Syafii Efendi. Ia terpilih sebagai Presiden OIC Youth Indonesia untuk periode 2019-2024 dalam Kongres III OIC Youth Indonesia, Maret 2019. Syafii berharap, organisasi yang dipimpinnya mampu membela kepentingan Islam yang damai di seluruh dunia. Juga menjadikannya sebagai sarana generasi muda Indonesia untuk aktif di kancah Internasional. □

MBO



## Kunjungan Pejabat Kedubes Australia di Jakarta

# Papua Tetap Menjadi Bagian dari Republik Indonesia

Pemerintah Australia mendukung upaya Indonesia dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Dan, Australia menolak keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

**D**I INDONESIA kehidupan politik dan demokrasi berlangsung sangat dinamis dan beragam. Bukti keberagaman demokrasi di Indonesia itu salah satunya kita dapat menyaksikan keberadaan partai-partai berdasar agama. Partai-partai tersebut, antara lain Partai Damai Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera. Itu artinya, dalam konteks Indonesia, antara agama, khususnya Islam, dengan demokrasi tidak bertentangan. Sebaliknya, sejak dulu partai-partai berbasis agama Islam ataupun non Islam sudah ikut mewarnai praktik demokrasi di Indonesia.



“Karena itu, kalau masih ada pihak yang mengaitkan Islam dengan radikalisme yang ditujukan untuk menghancurkan negara tidaklah tepat,” ungkap Wakil Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., saat menerima kunjungan Minister Konselor Bidang Politik dan Komunikasi Strategis Kedubes Australia di Jakarta, Dr. Dave Peebles, Rabu (27/11/2019). Ikut serta dalam pertemuan tersebut Claire Scott, Political First Secretary; dan Ario Yudhoatmodjo, senior Political Reseacher

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III, lantai 9, Kompleks MPR/DPR/DPD itu, Hidayat selanjutnya menunjuk contoh sejumlah peristiwa terorisme yang memperlihatkan pelakunya tidak mengenakan cadar, tidak memakai celana singkrang, dan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

tidak berjenggot. Dia menunjuk peristiwa penembakan di Masjid Al Noor dan Linwood Islamic Centre di Christchurch, Selandia Baru, dan juga penyerangan di Jl. Thamrin Jakarta, beberapa waktu silam yang ternyata pelakunya mengenakan celana jeans.

Pada kesempatan itu, Dave Peebles berharap, kedua negara meningkatkan kesepahaman, terutama menyangkut berbagai persoalan yang terjadi, baik di Indonesia maupun di Australia. Serta, meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Kepada Wakil Ketua MPR, Dave juga menyampaikan dukungan pemerintah Australia terhadap NKRI. Dan, Australia menolak keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Karena keberadaan OPM terbukti hanya menimbulkan korban dan keresahan di kalangan masyarakat Papua khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Bagi Australia, tegas Dave. Papua dan Indonesia adalah satu kesatuan tak terpisahkan.

Tamu dari Kedutaan Australia di Jakarta ini juga menyinggung perihal rencana amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD NRI Tahun 1945), dan dinamika yang terjadi di seputar rencana amandemen UUD NRI Tahun 1945 tersebut.

Menanggapi harapan tamunya itu, Hidayat Nur Wahid menyatakan, setuju kedua belah pihak perlu meningkatkan kerjasama dan kesepahaman dalam melihat peristiwa-peristiwa yang terkait Australia dan Indonesia. Menyangkut rencana amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945, Hidayat mengatakan, saat ini MPR terus mengumpulkan aspirasi masyarakat.

“Di era kekinian wacana-wacana yang berkembang di luar adalah sesuatu yang wajar. Tetapi, kesemuanya akan dikembalikan kepada anggota MPR, sesuai mekanisme perubahan UUD,” jelas Hidayat.

Menyangkut wacana mengenai penambahan masa kepemimpinan presiden menjadi tiga periode, menurut Hidayat, usulan tersebut sudah ditolak berbagai kalangan. termasuk oleh Presiden Joko Widodo dan Fraksi PKS. “Karena itu, wacana masa kepemimpinan presiden menjadi tiga periode tidak mungkin dilaksanakan,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera ini. □

MBO

Rakernas IPHI

# Kiat Memperpendek Masa Tunggu Ibadah Haji

Di hadapan para peserta Rakernas Ikatan Persaudaran Haji Indonesia (IPHI), Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid memberi solusi terkait panjangnya daftar tunggu ibadah haji dengan cara menggunakan kuota negara lain.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

RATUSAN anggota Ikatan Persaudaran Haji Indonesia (IPHI) dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Rapat Kerja Nasional ke-15 di Jakarta. Acara pembukaan Rakernas IPHI berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPD/DPD Senayan, Jakarta, 30 November 2019. Dan, Rakernas IPHI yang dibuka oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW), antara lain di hadirinya Ketua Umum IPHI Ismed Hasan Putro; Ketua Dewan Penasihat IPHI, Jenderal (Purn) Djoko Santoso; dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

Di hadapan ratusan peserta Rakernas IPHI itu, HNW mengusulkan tiga kiat agar proses jadwal tunggu ibadah haji tak terlalu lama atau terlalu panjang. *Pertama*, mendorong Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk menggelar konferensi tingkat tinggi guna membahas kuota haji. "Dulu penetapan kuota haji dilakukan oleh OKI saat menggelar konferensi di Amman, Jordania, pada tahun 1987", ujar HNW.

Dalam konferensi OKI itu dihitung satu

orang per-seribu penduduk. Menurut HNW, aturan tersebut sudah tidak tepat lagi, sebab perekonomian umat Islam semakin meningkat, serta infrastruktur dan fasilitas di Arab Saudi semakin baik sehingga dia yakin negara kaya minyak itu mampu menampung jemaah haji lebih banyak. "Untuk itulah perlu

digelar KTT OKI untuk membahas kembali masalah kuota haji", ujar pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu.

*Kedua*, banyak negara Islam, baik di dalam kondisi damai ataupun dalam kondisi konflik, peperangan, tidak menggunakan kuota yang ada secara penuh. Sehingga kekosongan





jajah itu bisa digunakan oleh calon jemaah haji dari Indonesia. “Di Suriah yang lagi konflik maka kuota yang tidak dimanfaatkan bisa digunakan oleh calon jemaah haji kita,” papar HNW. Hal demikian, menurut HNW, juga terjadi di beberapa negara Afrika, juga di Thailand dan Filipina.

*Ketiga*, kuota haji yang tidak digunakan oleh jemaah haji yang ada di Thailand dan Filipina bisa digunakan oleh calon jemaah haji Indonesia. “Untuk itu, perlu melakukan pendekatan diplomasi antar anggota ASEAN ataupun diplomasi bilateral”, tuturnya. Jadi, “Kuota yang ada mending digunakan untuk calon jemaah haji dari Indonesia secara sah daripada digunakan oleh pihak lain yang selanjutnya menimbulkan masalah”, tambahnya.

Memangkas jadwal tunggu ibadah haji di Indonesia, menurut Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor itu, sangat penting sebab waktu tunggu hingga 40 tahun. “Bayi

yang baru lahir hari ini baru bisa naik haji 40 tahun kemudian”, ujar HNW mengandaikan.

Dalam Rakernas yang bertema: ‘Meningkatkan Soliditas Ummat dan Kesiapan IPHI Menyongsong Muktamar VII/2020 untuk Indonesia Maju dan Bermartabat,’ HNW menceritakan pengalamannya tinggal di Arab Saudi selama 13 tahun. “Sudah beberapa kali naik haji”, tuturnya. Selama di sana, HNW mengaku pernah membantu relawan haji, serta menolong jemaah haji yang tersesat. “Beribadah haji merupakan hal yang perlu disyukuri”, ujarnya.

HNW menyatakan, dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia, para tokoh penggeraknya adalah mereka yang mempunyai gelar haji, seperti KH. Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asyhari, Haji Oemar Said Cokroaminoto, Haji Agus Salim, Haji Mohammad Natsir, dan banyak yang lainnya. “Haji Oemar Said Cokroaminoto merupakan Guru Bangsa”, ungkapnya.

Merekalah yang menghadirkan Indonesia merdeka.

Lebih lanjut, HNW mengatakan, para haji pada masa pergerakan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah sosok-sosok pejuang. Pada 1903, organisasi Jamiatul Khair mengadakan Konferensi Umat Islam, di mana hasil konferensi itu adalah menyatakan keinginan merdeka dari penjajahan bangsa asing. Dari organisasi itu selanjutnya lahir organisasi Sarikat Dagang Islam, kemudian SI, dan organisasi-organisasi Islam lainnya.

Untuk itulah dia mendorong IPHI agar hadir dan merealisasikan cita-citanya untuk Indonesia. “Kita harap IPHI menjadi pionir bagi para jemaahnya untuk membangkitkan Indonesia”, tegasnya. HNW mendorong keinginan organisasi itu untuk bergerak dalam segala bidang, seperti Muhammadiyah, NU, Persis, dan organisasi Islam lainnya. “Tugas IPHI penting buat ummat”, ujarnya.

Ketua Umum IPHI Ismed Hasan Putro dalam kesempatan itu menuturkan, Rakernas IPHI merupakan momentum yang tepat untuk menjadikan IPHI bagian integral dari Indonesia. Kepengurusan organisasi itu, menurut Ismed, tersebar di seluruh Indonesia. Kini organisasi IPHI beranggotakan 10 juta dan 4,8 calon anggota, calon haji. “Kita memiliki Majelis Taklim yang rutin menggelar pangajian”, jelas Ismed.

Organisasi ini, menurut Ismed, juga bercita-cita mengurus masalah pangan, sembako, di mana mereka akan mendirikan semacam took/warung haji. “Bukan untuk memperkaya diri namun untuk kesejahteraan umat”, paparnya. □



AWG

Diskusi Menakar Peluang Amandemen

# MPR Belum Membahas Amandemen UUD NRI Tahun 1945

Soal perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode atau pemilihan presiden oleh MPR tidak pernah dibicarakan di MPR.

**M**AJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) seolah-olah sudah merencanakan dan membahas soal amandemen UUD NRI Tahun 1945. Wakil Ketua Fraksi PPP MPR Syaifulah Tamliha menegaskan, sampai saat ini MPR belum membahas dan membicarakan tentang amandemen UUD NRI Tahun 1945. MPR hanya membahas tentang pokok-pokok haluan negara, apakah pokok-pokok haluan negara itu diatur melalui Ketetapan MPR atau melalui UU. Jika diatur melalui Ketetapan MPR maka perlu dilakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945.

“Baru sebatas itu. Kalau ditanya kapan target amandemen UUD, kita di MPR belum membahas soal amandemen itu sendiri. Kita tidak pernah bicara sampai soal perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, atau pemilihan presiden oleh MPR. Itu tidak pernah dibicarakan di MPR,” kata Syaifulah Tamliha dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Menakar Peluang Amandemen Konstitusi” di Media Center Parlemen Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019). Turut berbicara dalam diskusi itu Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Idris Laena, anggota MPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon, dan pengamat komunikasi politik Uni-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

versitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing. Menurut Syaifulah Tamliha, sulit untuk melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. Dari pengalamannya sebagai pimpinan Fraksi PPP MPR, dalam soal haluan negara saja masih belum ada kesepakatan. Ada tiga fraksi yang menginginkan pokok-pokok haluan negara diatur dalam UU, dan ada tujuh fraksi ditambah satu DPD yang menginginkan dalam bentuk Ketetapan MPR. “Ini baru soal haluan negara atau perencanaan pembangunan nasional. Apalagi soal masa jabatan presiden tiga periode atau presiden

dipilih MPR. Menurut saya amandemen UUD sulit dilakukan, apalagi menyangkut masa jabatan presiden,” ujarnya. Tak jauh berbeda, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Idris Laena juga mengatakan bahwa sebenarnya wacana tentang amandemen UUD muncul karena perlunya pokok-pokok haluan negara. “Kalau Ketetapan MPR yang menjadi dasar untuk pokok-pokok haluan negara maka konsekuensinya perlu amandemen UUD NRI Tahun 1945. Fraksi Partai Golkar menawarkan kalau hanya untuk pokok-pokok haluan negara lebih baik dalam





bentuk UU saja. UU adalah hukum negara juga karena dibahas pemerintah bersama DPR dan mengikat semua,” katanya.

Idris Laena mengingatkan agar konstitusi jangan terlalu sering diubah. “Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa UUD memang bisa saja diubah. Tapi jangan lupa UUD adalah konstitusi dasar dari negara kita. Semua UU dan turunannya, termasuk peraturan daerah, mengacu pada UUD. Bayangkan kalau UUD sering dilakukan perubahan maka akan menjadi persoalan tersendiri,” ujarnya.

Sementara itu anggota MPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon berpendapat, amandemen UUD perlu didasarkan pada kajian mendalam dari kalangan perguruan tinggi, bukan untuk kepentingan sesaat. Perubahan UUD sangat

dimungkinkan dan Indonesia sudah melakukan beberapa kali perubahan UUD.

“Tapi jangan sampai amandemen UUD malah menimbulkan persoalan baru. Seringkali kita melakukan perubahan sangat tergantung pada situasi tertentu dan dicari yang menguntungkan. Jadi aturan disesuaikan dengan kepentingan sesaat. Ini bisa membahayakan demokrasi kita. Apalagi ada wacana menambah masa jabatan presiden. Ini bukan hanya memundurkan demokrasi, tetapi malah mematikan demokrasi,” tandasnya.

Sementara itu Emrus Sihombing berpendapat, jika dilakukan amandemen UUD agar jangan diserahkan semata-mata kepada MPR. Sebab, pasti ada kepentingan sesuai perspektif partai politik. “Ada kepentingan politik yang akan mewarnai. Setiap partai

politik juga punya perspektif sendiri yang berbeda dengan partai politik lainnya,” jelasnya.

Karena itu Emrus mengusulkan agar dibentuk tim yang terdiri dari para akademisi dan pakar hukum. Tim yang diperoleh dari hasil seleksi ini akan melakukan kajian tentang urgensi amandemen UUD. Konstitusi bukan semata-mata produk MPR melainkan produk bersama dengan mendengarkan pendapat dan masukan publik. “Hasil kajian tim akademisi dan pakar hukum ini lalu dibandingkan dengan apa yang dibuat di MPR. Dengan demikian bisa dilihat apakah ada atau tidak kepentingan partai politik di MPR. Publik juga bisa melihat sejauh mana urgensi dari amandemen ini,” ujarnya. □

**BSC**

## Silaturahmi dengan Pengurus PHDI

# Soal Amandemen, MPR Tunggu Sikap PHDI

Saat berkunjung ke PHDI, MPR sampaikan maksudnya menjaring aspirasi masyarakat terkait amandemen UUD NRI Tahun 1945. MPR menunggu sikap resmi dari umat Hindu.

**K**EDATANGAN Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dan Arsul Sani di Kantor Pusat Parisada Hindu Dharma (PHDI), Jl. Anggrek Neli, Jakarta, 10 Desember 2019, mendapat sambutan istimewa oleh seluruh jajaran Pengurus PHDI. Begitu tiba di kantor PHDI, pimpinan MPR langsung diterima oleh Ketua Umum PHDI Wisnu Bawa Tenaya.

Jazilul Fawaid dalam pertemuan penuh keakraban dan kekeluargaan itu mengatakan, kehadirannya ke organisasi perwakilan umat Hindu itu untuk meminta masukan terkait adanya rencana MPR melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. “Hanya MPR yang bisa mengubah UUD”, ujarnya. Dia mengungkapkan, selepas MPR melakukan amandemen sebanyak 4 kali, selanjutnya lembaga ini belum pernah lagi melakukan hal yang sama.

Selanjutnya, Jazilul menjelaskan, MPR periode 2014-2019 mengeluarkan rekomendasi tentang sistem ketatanegaraan untuk mengikuti perkembangan zaman. “Bila dibutuhkan, ada upaya untuk menghidupkan kembali haluan negara”, ujar pria asal Bawean, Jawa Timur, itu. Haluan negara



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dirasa perlu, karena saat ini pembangunan yang dilakukan oleh kepala daerah hanya berdasarkan visi dan misi masing-masing, sehingga berjalan sendiri-sendiri dan tak terintegrasi.

Sebagai upaya menyerap aspirasi tentang perlu dan tidaknya amandemen, pimpinan MPR telah melakukan kunjungan

ke berbagai ormas keagamaan dan partai politik. “Ini perlu kita komunikasikan”, tuturnya. “Nah, bila ada keinginan melakukan amandemen, mana saja yang diubah”, ucapnya. Untuk itu, MPR menunggu sikap resmi PHDI terkait dengan itu.

Hal serupa diungkapkan Arsul Sani. Dia mengatakan, kedatangan pimpinan MPR ke



PHDI dan organisasi lainnya untuk mendengar suara masyarakat. Kepada para tokoh umat Hindu tersebut, MPR menyatakan ingin menjadi rumah kebangsaan. Untuk itu, pria asal Pekalongan, Jawa Tengah, itu menyebut perlunya masukan dari umat Hindu.

Dalam kesempatan tersebut, Jazilul menyebut, MPR saat ini dipimpin oleh 10 orang. Dan, inilah pimpinan terbanyak dalam sejarah MPR. “MPR diharap sebagai lembaga permusyawaratan bagi semua fraksi dan kelompok DPD ada”, ujarnya. Dia menilai,

pertemuan dengan PHDI sangat strategis, sebab peran tokoh agama penting untuk ikut memperkuat sendi-sendi bangsa.

Arsul Sani selanjutnya memaparkan, tugas MPR saat ini melakukan Sosialisasi Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) dengan maksud untuk menjaga kerukunan berbangsa. “Bila salah satu pilar tadi lepas maka porak porandalah negeri ini”, tambahnya. Dalam masalah sosialisasi, Empat Pilar ini MPR tidak bisa sendiri. Perlu

keterlibatan semua pihak. “Untuk itu kami mengajak PHDI ikut melakukan sosialisasi”, ucapnya.

KS Arsana, salah satu tokoh umat Hindu yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, organisasinya sepakat Pancasila sebagai dasar Negara, karena Pancasila mampu menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Dia berharap agar Pancasila dijadikan asas bagi semua organisasi untuk menjadi landasan konstitusional. □

AWG

## Diskusi Silaturahmi Kebangsaan

# Silaturahmi Kebangsaan Dapat Ciptakan Stabilitas Politik

Stabilitas politik menjadi kunci untuk menghadapi tantangan, baik ekonomi, soal radikalisme, kohesivitas masyarakat, pada 2020. Safari kebangsaan Pimpinan MPR ke berbagai elemen masyarakat bisa menciptakan stabilitas politik di Indonesia.

**S**AAT ini Pimpinan MPR melakukan silaturahmi kebangsaan ke berbagai elemen masyarakat, tokoh bangsa, organisasi kemasyarakatan untuk menghimpun masukan dan aspirasi berkaitan dengan agenda MPR menghadirkan kembali

haluan negara. Ketua Fraksi PPP MPR, Arwani Thomafi melihat, safari kebangsaan Pimpinan MPR bisa menjadi contoh atau role model sebagai embrio untuk menciptakan stabilitas politik di Indonesia.

“Sudah tepat Pimpinan MPR melakukan

silaturahmi kebangsaan. Dan, ini menjadi role model ke depan, yaitu bagaimana pemimpin-pemimpin kita mengedepankan dan menjaga persatuan dan pada akhirnya memastikan bahwa stabilitas politik sangat penting,” kata Arwani Thomafi dalam Diskusi Empat Pilar



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MPR dengan tema “Makna Silaturahmi Kebangsaan Untuk Indonesia” di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Turut berbicara dalam diskusi ini Ketua Kelompok DPD untuk MPR, Intsiawati Ayus.

Bagi Arwani Thomafi, silaturahmi kebangsaan yang dilakukan Pimpinan MPR sudah menjadi semacam tradisi politik baru di Indonesia. “Bukan karena MPR kurang kerjaan. Tetapi memang pekerjaan MPR seharusnya seperti itu. Sebab, MPR merupakan representasi dari daulat rakyat, anggota MPR dipilih oleh rakyat. Karena itu,

MPR diharapkan memainkan peran strategis untuk merajut ke-Indonesiaan,” kata politisi PPP ini.

Silaturahmi kebangsaan, lanjut Arwani Thomafi, jangan hanya sekadar untuk menghimpun aspirasi terkait dengan rencana MPR untuk menghadirkan kembali haluan Negara, di antaranya melalui amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945. “Bisa lebih dari itu, yaitu MPR sebagai rumah kebangsaan menjadi payung bersama bagi partai politik, masyarakat sipil, juga lembaga-lembaga negara lainnya. Silaturahmi kebangsaan Pimpinan MPR bisa meminimalisir dampak negatif dari tantangan ekonomi,



sosial, politik, pada tahun 2020,” paparnya.

Menurut Arwani, pada 2020 Indonesia menghadapi tantangan semakin kompleks. Ekonomi global yang diwarnai perang dagang AS dan Cina menjadi faktor eksternal yang memengaruhi ekonomi dalam negeri. Belum lagi persoalan kohesivitas kebangsaan, radikalisme berbasis agama maupun berbasis sekuler, dan hajatan Pemilu serentak 2020. “Semua ini berpotensi menjadi masalah. Dan, masalah-masalah itu harus dijawab dengan persatuan dan kesatuan stakeholder bangsa ini,” tuturnya.

“Intinya, stabilitas politik menjadi kunci untuk menghadapi tantangan, baik ekonomi, soal radikalisme, kohesivitas masyarakat, pada tahun 2020. Semua memerlukan stabilitas politik. Safari kebangsaan Pimpinan MPR ke berbagai elemen masyarakat menjadi embrio untuk menciptakan stabilitas politik di Indonesia,” imbuhnya.

Karena itu, Arwani menambahkan, silaturahmi kebangsaan menjadi sangat penting karena pemimpin yang mengedepankan silaturahmi dan prinsip persatuan dan kesatuan menjadi teladan bagi masyarakat. “Pimpinan MPR jangan berhenti pada persoalan amandemen saja, tetapi lebih luas lagi karena MPR adalah rumah kebangsaan untuk mencari solusi bagi persoalan kebangsaan lainnya,” ujar Arwani.

Ketua Kelompok DPD di MPR, Intsiawati Ayus juga melihat silaturahmi kebangsaan yang dilakukan Pimpinan MPR sebagai bentuk upaya atau ikhtiar untuk menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan. “Karena dalam silaturahmi ada sebuah kebersamaan. Dengan kebersamaan maka semua argumentasi dan kepentingan masing-masing sudah selesai dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Tentu semua dalam bingkai persatuan dan kesatuan,” katanya.

Anggota DPD dari Provinsi Riau ini berharap, pimpinan antarpallemen, yaitu DPR dan DPD pun perlu melakukan silaturahmi. “Silaturahmi menjadi teladan untuk tidak mengedepankan rivalitas. Agenda amandemen dan masalah kebangsaan bisa diselesaikan melalui forum silaturahmi. Dan ini sudah banyak contohnya,” ujarnya. □

BSC

Audiensi Pengurus Yayasan Pemuda Nusantara Juara

# Kita Membantu Palestina Karena Alasan Kemanusiaan

Palestina menjadi salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Palestina juga banyak membantu Indonesia, terutama di awal masa kemerdekaan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

INDONESIA dan Palestina memiliki hubungan yang sangat erat. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bangsa Palestina menyumbangkan bantuan tidak sedikit. Palestina adalah negara yang ikut memberi pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Selain itu, banyak di antara warga Palestina mengambil uang mereka di bank untuk disumbangkan kepada Indonesia.

Karena itu, sudah sewajarnya jika bangsa Indonesia membalas kebaikan bangsa Palestina itu, seperti yang pernah diberikan oleh warga Palestina kepada Indonesia. Apalagi, saat ini bangsa Palestina tengah menderita akibat serangan yang tidak pernah berhenti dari zionis Israel.

“Persoalan Palestina adalah permasalahan bagi dunia, bukan hanya Indonesia. Persoalan Palestina bukanlah masalah agama saja, tetapi juga persoalan kemanusiaan. Karena penderitaan yang dialami warga Palestina adalah masalah kemanusiaan maka sudah sepatutnya kita juga membantu mereka. Apalagi mereka juga pernah membantu kita saat kita baru merdeka,” ungkap Wakil Ketua MPR RI Dr.H.M. Hidayat Nur Wahid.

Keinginan untuk membantu bangsa Palestina, kata Hidayat Nur Wahid, sesuai

dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pada alinea pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: ... *Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan perikeadilan.*

Pernyataan itu disampaikan Hidayat Nur Wahid pada saat menerima audiensi pengurus Yayasan Pemuda Nusantara Juara di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/11/2019). Dan, delegasi Yayasan Pemuda Nusantara Juara dipimpin oleh Yanwar Firmansyah.

Kepada Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Yanwar menyampaikan bahwa Yayasan Pemuda Nusantara Juara memiliki rencana menggelar kegiatan Run For Palestina. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam acara tersebut adalah mengumpulkan sumbangan bagi bangsa Palestina.

Mendengar rencana tersebut, Hidayat Nur Wahid berpesan agar para yang tergabung dalam Yayasan Pemuda Nusantara Juara mau berkaca kepada bangsa Palestina.

“Jangan sampai Indonesia yang sudah merdeka jatuh ke tangan penjajah, seperti yang dialami bangsa Palestina,” tegas Hidayat.

Membantu Palestina, menurut Hidayat, tentu saja merupakan sikap yang sangat baik. Tetapi, jangan sampai lupa bahwa negara kita sendiri pun saat ini juga tengah mengalami banyak masalah. “Karena itu, para pemuda juga harus berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan dalam negeri,” katanya.

Persoalan Palestina, lanjut Hidayat, semestinya dirampungkan oleh negara Palestina sendiri, atau dibantu oleh negara-negara tetangganya. Namun, karena mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan maka bangsa Indonesia terketuk hatinya ikut membantu.

Demikian pula persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Semestinya, kata Hidayat, pemerintahlah yang menyelesaikan persoalan bangsa Indonesia. Namun, karena pemerintah tak kunjung mampu menyelesaikan persoalannya maka rakyat Indonesia, khususnya para pemuda, harus turun tangan ikut membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. □

MBO



# Jangan Abai Pada Konvensi ICERD

Berita diskriminasi rasial di akhir 2019 menyeruak dari beberapa negara. Tersebutlah salah satu etnis ditindas oleh kekuasaan mayoritas. Hal itu terjadi karena negara abai pada Konvensi ICERD. Resolusi PBB No. 2106 (XX) yang diputuskan 21 Desember 1965 itu melarang tindakan pembedaan, pengecualian, pembatasan kepada ras dan warna kulit tertentu.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PERTENGAHAN Desember 2019, di beberapa kota di India dicekam suasana menakutkan. Di Assam, negara bagian yang berada di wilayah timur laut, demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sangat mengenaskan. Lima orang dilaporkan meninggal, dengan rincian tiga ditembak polisi, satu orang dipukuli, dan satu orang lagi tewas saat toko yang didiami terbakar. Tapi ada juga menyebutkan jumlah korban enam meninggal, dan 100 demonstran menderita luka-luka. Kejadian yang demikian, rusuh, membuat perjalanan kereta dibatalkan. Untuk meredam kabar yang simpang siur itu, pemerintah mematikan jaringan internet.

Apa yang terjadi di Assam, terutama Kota Guwahati, juga terjadi di ibukota India, New Delhi. Maraknya demonstrasi yang terjadi di Universitas Jamia Millia Islamia membuat polisi menyerbu kampus. Dalam serbuan itu aparaturnya keamanan yang berbaju coklat selain menembakkan gas air mata ke kerumunan demonstran, juga melakukan tindakan kekerasan dan barbar. Pastinya apa yang dilakukan aparaturnya kepolisian secara represif itu menimbulkan korban dan luka. Selain di Assam dan New Delhi, peristiwa serupa juga terjadi di Bhopal, Jaipur, Ladakh, Kerala, Kolkata, Hyderabad, dan Lucknow.

Kenapa demonstrasi yang terjadi di negerinya Shak Rukh Khan itu demikian tragis sehingga membuat beberapa orang meninggal, ratusan orang mengalami luka berat dan ringan, serta terjadinya pembakaran fasilitas dan angkutan umum? Peristiwa itu terjadi menyusul pengesahan UU Tentang Kewarganegaraan India oleh pemerintah dan parlemen. Kubu Oposisi, umat Islam, dan penggiat HAM menyebut undang-undang itu diskriminatif rasial. Tidak memberi kedudukan yang sama antara umat Islam dan umat yang lain. Salah satu pasalnya mengatakan, undang-undang akan mempercepat pemberian kewarganegaraan bagi imigran yang datang dari negara tetangga, seperti Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan yang beragama Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen. Dengan tidak disebutnya Islam, maka di sinilah undang-undang itu disebut



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

sebagai aturan yang diskriminatif rasial. Padahal jumlah umat Islam di India dan negara tetangganya, nomor dua setelah Hindu.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah India membuat PBB geram. Komisioner HAM PBB, Jeremy Laurence, membuat rilis yang mengatakan undang-undang itu diskriminatif. "Undang-undang itu membatasi akses bagi orang-orang yang ingin memperoleh kewarganegaraan", ujarnya. "Apa yang diputuskan pemerintah India merusak kesetaraan hukum yang merupakan amanah konstitusi", tambahnya. Selanjutnya, dia menegaskan, semua imigran apapun latar

belakangnya wajib dan berhak dihormati, dilindungi, dan dipenuhi hak asasinya. Dia mengharapkan undang-undang itu di-judicial review di lembaga yang menangani masalah undang-undang. "Saya berharap di lembaga itu, dipertimbangkan hukum dengan kewajiban hak asasi manusia", harapnya.

Di pertengahan Desember 2019 pula, etnis keturunan Uyghur yang tinggal di Jepang bersama penggiat HAM di negeri Sakura melakukan demonstrasi di beberapa kota. Mereka menentang upaya genocida, perlakuan tidak adil, diskriminatif rasial, yang dilakukan oleh Pemerintah Cina





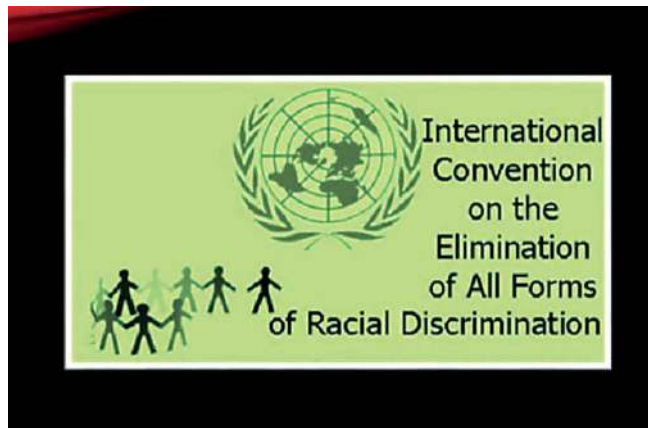
terhadap etnis Muslim Uyghur. Menentang genocida terhadap Muslim Uyghur juga terjadi di beberapa kota di Eropa, Jakarta (Indonesia), bahkan dilakukan pemain sepakbola Arsenal FC asal Turki Mezul Oziel.

Diskriminasi, genocida, dan perlakuan tidak adil yang terjadi di berbagai tempat sebenarnya tidak akan terjadi jika bangsa-bangsa di dunia mengingat dan mengenang apa yang terjadi di Kantor Majelis Umum PBB, Amerika Serikat, 21 Desember 1965. Pada tanggal, bulan, dan tahun itu diusulkan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, ICERD). Setelah melakukan rapat dan lobi-lobi akhirnya ICERD dalam Sidang Umum PBB

selanjutnya, konvensi itu berkembang pada suatu yurisprudensi mengenai penafsiran dan penerapannya. Sejak konvensi ini mempunyai ketetapan hukum tetap atau berlaku pada 4 Januari 1969 hingga Oktober 2015, ICERD telah diratifikasi oleh 88 negara dan yang tergabung dalam komite itu sebanyak 177 negara.

ICERD memiliki 25 pasal. Dalam Pasal 1 mendefinisikan “*diskriminasi ras*” sebagai *segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau sukubangsa, yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam*

*menjamin bahwa semua kekuasaan umum dan lembaga-lembaga baik pada tingkat lokal maupun nasional bertindak sesuai dengan kewajiban ini; (b). Setiap negara pihak tidak akan menyokong, mempertahankan atau membantu diskriminasi rasial yang dilakukan perorangan atau organisasi-organisasi. (c). Setiap negara pihak akan mengambil langkah-langkah efektif guna mengkaji ulang berbagai kebijakan pemerintah, nasional dan lokal, serta mengubah, mencabut atau membatalkan perundang-undangan dan peraturan yang berakibat menciptakan atau meneruskan diskriminasi rasial di mana pun berada. Ayat-ayat selanjutnya senada yang intinya melarang tindakan-tindakan membedakan, mengucilkan, membatasi*



pada saat itu ditetapkan lewat Resolusi No 2106 (XX).

Konvensi ini adalah konvensi hak asasi manusia yang mewajibkan anggota PBB untuk menghapuskan diskriminasi ras dan mengembangkan pengertian di antara semua ras. Konvensi itu juga berisi kewajiban pelarangan penyebaran kebencian dan pengkriminalan keikutsertaan dalam organisasi rasis.

Aturan ini dibuat tidak main-main. Buktinya konvensi memiliki mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran. Bila ada masalah terkait tindak rasial bisa dilaporkan atau diadakan lewat Komite Penghapusan Diskriminasi Ras (*Committee on the Elimination of Racial Discrimination*). Dari sinilah

*bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat yang lain.*

Dalam Pasal 2, di sinilah diatur larangan untuk melakukan tindakan diskriminatif kepada kelompok lain. Kita simak bunyi Pasal 2: *1. Negara-negara pihak mengutuk diskriminasi rasial dan mengambil semua langkah langkah yang sesuai guna menyusun sesegera mungkin kebijakan penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dan memajukan pengertian antarras untuk mencapai tujuan tersebut akan melaksanakan: (a). Setiap negara pihak tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan atau praktik-praktik diskriminasi rasial terhadap perorangan atau kelompok perorangan atau lembaga-lembaga dan*

kelompok lain serta larangan menyebarkan kebencian.

Sebelum ICERD dideklarasikan sebenarnya pada 20 November 1963, PBB telah mendeklarasikan *United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*. Keputusan itu ditetapkan lewat Resolusi 1904 (XVIII). Isinya, penolakan terhadap diskriminasi rasial, penghentian diskriminasi rasial yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagian masyarakat, penghentian propaganda supremasi ras atau warna kulit tertentu. Sayangnya, resolusi itu sebatas seperti pernyataan sikap dan tidak bisa mengikat secara hukum bagi anggotanya. Meski demikian, resolusi ini menjadi cikal bakal lahirnya ICERD.

Diskriminasi rasial terjadi bukan di akhir-akhir tahun ini saja. Hal demikian sudah terjadi sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Dalam *referensi.elsam.or.id* dicontohkan pelanggaran diskriminasi rasial yang besar adalah perdagangan budak pada Abad XVI yang didatangkan dari Afrika ke Amerika dan Inggris. Walaupun perdagangan budak bertentangan dengan pandangan iman Kristen yang dianut oleh sebagian besar warga Amerika dan Inggris, namun kenyataannya peristiswa itu terus berlangsung.

Kejahatan yang dilakukan oleh orang kulit putih, bangsa Amerika Serikat, tidak hanya kepada orang-orang berkulit hitam dari Afrika. Di benua itu, mereka melakukan penyerangan, pembunuhan massal, dan pengusiran dari wilayah-wilayah yang didiami suku asli Amerika, Suku Indian. Selain melakukan cara-cara yang demikian, bangsa kulit putih juga melakukan tindakan yang

merusak suku Indian dengan cara-cara yang halus, yakni memberi minuman keras, *beer*, kepada penerus suku Indian, generasi muda. Akibatnya penerus suku Indian itu menjadi orang yang suka mabuk-mabukan. Tak hanya itu, bangsa kulit putih yang sekarang menjadi dan penguasa bangsa Amerika Serikat menyebar *hoax* (istilah saat ini) dan menstigma kan negatif pada suku Indian. Suku asli Amerika itu dikatakan sebagai suku biadab, suka menari-nari, dan membakar manusia. Stigma itu dalam *referensi.elsam.or.id*, dilakukan lewat film yang ngetrend di tahun 1970-an yang diputar di TVRI yang berjudul *Rin Tin Tin*, *Karl May*, atau di film-film cowboy produk Hollywood lainnya. Akibat stigmatisasi yang dilakukan secara masif, membuat ingatan orang pada suku Indian adalah suku yang kejam dan suka menyerang.

Contoh lain dalam tulisan itu adalah pembantaian umat Yahudi pada masa

Perang Dunia II di Eropa yang dilakukan oleh Pemimpin Nazi, Hitler. Umat Yahudi dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi dan kamar gas sehingga menimbulkan korban. Nasib mengenaskan kepada umat Yahudi terjadi tidak hanya pada masa itu, pada kurun waktu 1420-1498 ketika Tomas de Torquemada menjadi Kepala Pengadilan Inquisisi Spanyol, dia telah membantai umat Yahudi hingga menimbulkan korban sebanyak 2000 orang. Tak hanya itu, dia juga mengusir 200.000 umat Yahudi keluar dari negeri matador itu.

Kejahatan yang dilakukan oleh kulit putih yang bersikap diskriminasi rasial juga terjadi di Afrika Selatan. Dengan politik *apartheid*, bangsa kulit putih di Afrika Selatan membuat kehidupan kaum kulit putih berbeda dengan kulit hitam, pemisahan ras. Politik rasis dan diskriminatif yang merugikan dan mengucilkan kaum kulit hitam itu terjadi dari 1930 hingga 1990. □

AWG/dari berbagai sumber

## Diterima Habibie, Ditolak Mahathir

Etnis Melayu di Malaysia menolak ICERD. Mereka khawatir menjadi kelompok terpinggir bila konvensi ini diratifikasi. Alasannya, aturan itu bertentangan dengan konstitusi. Lain dengan Malaysia, Indonesia sudah meratifikasi ICERD di awal masa reformasi.

DESEMBER 2018, ratusan ribu warga negara Malaysia dari kalangan etnis Melayu, memenuhi Masjid Jami, Masjid Nasional, dan Dataran Merdeka. Di tempat-tempat strategis dan vital di Kuala Lumpur, mereka membawa poster, spanduk, dan atribut-atribut demonstrasi. Mereka datang dari berbagai kota dan negeri dari seluruh penjuru wilayah negeri jiran datang ke Kuala Lumpur demi satu kata: "Bantah (tolak) ICERD". Mereka menyebut aksi yang dilakukan dengan nama Gerakan 812. Artinya, dilakukan pada tanggal 8 Desember 2018.

Di negara yang demokrasinya masih belum seterbuka Indonesia, pada saat itu bisa terjadi demonstrasi raksasa, karena aksi yang ada didukung oleh pemerintah. Lewat UMNO, Partai Islam se-Malaysia, Gerakan Pembela Ummah, dan komponen masyarakat



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

lain, mereka menggalang massa.

Etnis Melayu menolak ICERD karena konvensi itu dirasa bisa merusak hak-hak

istimewa mereka. Dalam konstitusi Malaysia, disebutkan Islam merupakan agama resmi negara dan Muslim Melayu memiliki status





husus sebagai bumiputera atau pribumi. Dalam Pasal 153 disebutkan, memberi tanggung jawab kepada Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia) untuk “melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri (...) Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain”. Dengan pasal itu maka etnis Melayu mendapat prioritas dalam kuota penerimaan pegawai negeri, beasiswa, dan pendidikan.

Hal inilah yang ingin dipertahankan oleh mereka. Salah seorang pengunjuk rasa, Nurul Qomariyah dengan tegas menolak ICERD. Ia ingin pemerintah mempertahankan konstitusi yang ada. Dia khawatir konvensi itu akan menyingkirkan perlahan-lahan

kedudukan orang Melayu. “Ini negara untuk orang Melayu. Kami ingin orang-orang Melayu menjadi superior, tetapi mengapa orang-orang ini ingin membuat orang Melayu satu level dengan orang Cina dan India?”, ujarnya seperti dikemukakan kepada wartawan asing. Apa yang dikatakan Nurul didukung Hasni Mohammad Alim. Demonstran yang datang dari Seremban, luar Kuala Lumpur, itu mengatakan, orang-orang Malaysia bersedih jika pemerintah menyetujui konvensi. Hal yang sama diungkapkan oleh Siti Mariam Mohd Kassim. Siti yang datang dari Johor Bharu itu menyebut ICERD sesuatu yang tidak baik bagi Malaysia.

Demonstrasi yang dilakukan itu akhirnya

berhasil. Pemerintah mengiyakan apa yang dimau oleh etnis Melayu. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad setuju untuk tidak meratifikasi ICERD. Menurut Mahathir, meratifikasi konvensi tak mudah. Dia menyebut, di satu sisi konvensi mempromosikan kebebasan dan menghapus diskriminasi, namun di sisi yang lain, dalam Konstitusi Malaysia memberikan keistimewaan pada penduduk asli merupakan aturan dasar. “Penghapusan keistimewaan orang Melayu akan bertentangan dengan konstitusi”, ujarnya.

Bila negeri tetangga gaduh masalah ICERD, Indonesia sudah jauh-jauh hari meratifikasi konvensi itu. Di masa pemerintahan Presiden B.J Habibie, ICERD diratifikasi lewat UU. Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan ICERD. Undang-undang itu selanjutnya juga dikuatkan oleh Habibie lewat UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga diterbitkan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam UUD NRI Tahun 1945 persamaan hak dan antidiskriminasi juga tertuang. Lihat pada Pasal 27 dan Bab XA Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J. □

AWG/dari berbagai sumber



Presiden B.J Habibie

## Afrika Selatan, Mandela, dan Tekanan Dunia Internasional

Politik diskriminasi rasial yang dilakukan kaum kulit putih di Afrika Selatan menjadi isu internasional sejak 1930 hingga 1990. Apartheid mendiskriminasi kehidupan kaum kulit hitam dalam berbagai kehidupan. Perjuangan aktivis ANC, seperti Nelson Mandela; dan tekanan dunia internasional membuat kebijakan apartheid di Afrika Selatan dicabut.

**S**ETELAH menguasai dunia pelayaran, satu persatu negara di Benua Afrika dan Asia dicaplok oleh Bangsa Eropa. Jauh setelah nusantara dijajah oleh Belanda, dieksploitasi kekayaan rempah-rempahnya, selanjutnya Afrika Selatan juga mengalami hal yang sama. Sebagai negara yang kaya dengan emas dan berlian mengakibatkan

bangsa Eropa *balapan* untuk bisa menguasai wilayah itu. Kali ini bangsa Inggris yang beruntung mendapatkan Afrika Selatan.

Sebagai pendatang, mulai 1870, Inggris melakukan eksploitasi tambang yang ada di sana. Kedatangan penduduk negara kepulauan di Eropa itu tak sekadar mengeruk emas. Satu persatu hingga berduyun-duyun,

orang-orang kulit putih secara bergelombang datang ke Afrika Selatan. Kekuatan yang mereka miliki, seolah-olah membuat mereka berhak melakukan apa saja. Tanpa rasa malu mereka membentuk pemerintahan. Masalahnya tidak hanya berhenti di situ. Selain membentuk kekuasaan secara sepihak, mereka juga membuat kebijakan yang kelak

apa yang diputuskan itu membuat masalah yang ada menjadi panjang.

Pada tahun 1910, orang-orang kulit putih keturunan bangsa Inggris dan Belanda membuat kebijakan yang mengkastakan penduduk. Penduduk pribumi atau kaum kulit hitam dipisahkan dengan orang kulit putih. Kebijakan yang disebut *apartheid* itu tidak hanya meminggirkan orang kulit hitam dari kehidupan politik, namun juga ekonomi, pendidikan, sosial, dan bidang kehidupan lainnya. Kebijakan yang disebut supremasi kulit putih itu menghilangkan hak memilih bagi orang kulit hitam. Orang kulit hitam dipaksa tinggal di daerah yang telah ditentukan, terpisah dengan kulit putih. Menyedihkan sekali bila orang kulit hitam ingin masuk ke kawasan orang kulit putih, ia harus memiliki izin khusus. Kebijakan *apartheid* semakin menguat ketika Partai Nasional mulai berkuasa pada 1924. Dan, pada 1930, *apartheid* menjadi kebijakan resmi orang kulit putih di Afrika.

Perilaku diskriminatif yang dilakukan oleh orang kulit putih itu mendapat perlawanan dari bangsa Afrika asli. Sebagai bentuk perlawanan dari politik *apartheid*, pada 8 Januari 1912, dibentuklah Kongres Nasional Afrika (*African National Congress*, ANC). Kongres yang didirikan oleh Albert John Lutuli, Sol Plaatje, dan John Dube, mempunyai misi untuk melindungi hak-hak kaum mayoritas kulit hitam.

Dalam perjalanan waktu, pada 1942, bergabunglah seorang sosok yang bernama Nelson Rolihlahla Mandela. Pria kelahiran 18 Juli 1918 di Mvezo, Umtatu, Afrika Selatan, itu merupakan keturunan Ketua Suku Thembu, dari garis ayahnya; dan Ketua Suku Suku Ixhiba, dari garis ibunya. Dengan demikian, Mandela adalah dari keluarga yang dihormati orang-orang kulit hitam di sana. Dua tahun bergabung dalam ANC, Mandela merasa bahwa perjuangan yang dilakukan harus melibatkan anak-anak muda. Untuk itu, ANC perlu dukungan dari kalangan muda. Dari sinilah lahir *African National Congress Youth League* (ANCYL).

Kehidupan politik di Afrika Selatan dari waktu ke waktu saat itu semakin suram.



**Nelson Rolihlahla Mandela**

Pada 1960, partai politik yang anggota dan pengurusnya dari kaum kulit hitam dinyatakan sebagai partai terlarang. Puncak konflik dari warga kulit hitam dengan kulit putih akibat kebijakan *apartheid* disebut terjadi di Sharpeville, 21 Maret 1960. Pada hari, bulan, dan tahun itu ada sekitar 7.000 kulit hitam yang demonstrasi menentang kebijakan diskriminasi rasial. Demonstrasi direspon oleh aparat keamanan dari kalangan kaum kulit putih dengan represif dan barbar. Pentungan dan tembakan diarahkan ke kerumunan massa. Akibatnya, sangat menyedihkan, 69 orang meninggal dunia, 180 terluka, serta puluhan aktivis dan politisi dari kulit putih ditangkap.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Dirasa perjuangan lewat partai politik buntu, karena adanya larangan orang kulit hitam berpartai dan berpolitik, membuat Mandela bersama yang lain membentuk *Umkhonto we Sizwe*. Organisasi ini merupakan sayap bersenjata dari ANC. Sebagai sayap bersenjata maka kerja yang dilakukan persis sama dengan militer, yakni sabotase dan perang gerilya. Tujuan sayap militer ini sama, yakni mengakhiri *apartheid*. Tak hanya itu yang dilakukan oleh Mandela, dia juga mengatur pemogokan pekerja.

Sikap keras Mandela dan pejuang kaum kulit hitam lainnya membuat mereka kerap diadili dan keluar masuk penjara. Puncak perjuangan Mandela dan aktivis lainnya di lapangan terhenti pada 1963. Di pengadilan, dia bersama 10 pemimpin ANC dijatuhi penjara seumur hidup. Mereka dipenjara secara pindah-pindah, namun yang paling terkenal saat berada di Pulau Robben.

Sikap politik kulit putih di Afrika yang demikian mendapat pertentangan dari bangsa-bangsa lain. Pada 1973, Amerika Serikat mengeluarkan resolusi yang mengutuk negara Afrika Selatan yang dikuasai oleh kaum kulit putih. Satu tahun kemudian, PBB melakukan tindakan yang lebih tegas, menskor Afrika Selatan.

Tekanan yang keras dari dunia internasional membuat Afrika Selatan terkucil. Hal demikian rupanya membuat pemerintahan kulit putih tidak kuat menahan beban dari



'embargo' yang dilakukan dunia lain. Mulai 1978, sikap pemerintah di sana berubah. Di bawah Presiden P. W. Botha, muncul reformasi yang mengarah pada dibukanya kesempatan yang adil bagi kaum kulit hitam. Namun, kebijakan itu tak terasa. Kebijakan yang dikeluarkan penuh dengan syarat. Seperti Botha mau melepaskan Mandela dan aktivis yang lain, tetapi mereka harus menghentikan perjuangan. Tawaran ini ditolak Mandela.

Angin perubahan terjadi saat negeri itu

dipimpin Presiden Willem de Klerk. Pada masa ini, dia membuka pintu keterbukaan yang lebar bagi kaum kulit putih. Pada 11 Februari 1990, Mandela dibebaskan. Partai-partai kaum kulit putih yang sebelumnya dilarang, diperbolehkan untuk berpolitik. Semua hak-hak kulit hitam yang sebelumnya diabaikan bahkan tidak diberikan, mulai saat itu dipenuhi dan disamakan dengan kaum kulit putih.

Kebebasan berpolitik bagi semua kaum itulah yang membawa perubahan bagi kehidupan Mandela. Pada Pemilu kali pertama

digelar, Mandela mampu memenangi suara sehingga menjadi Presiden pertama dari kalangan kaum kulit hitam. Dalam masa pemerintahannya, 1994-1999, pada 1996, Mandela menandatangani konstitusi baru untuk mendirikan pemerintahan pusat yang kuat, menjamin hak-hak minoritas serta kebebasan berekspresi.

Mandela dalam pemerintahannya menciptakan rekonsiliasi nasional. Meski kaum kulit putih pada masa kebijakan *apartheid* sangat kejam. Namun Mandela belajar dari pengalaman negara Afrika lain menjadi hancur ketika ditinggalkan kolonialisme kulit putih, untuk itu dia tak mau mengusir kaum kulit putih. Mereka tetap diajak bersama-sama untuk membangun Afrika Selatan. Bangsa kulit putih, menurut Mandela, tetap dilindungi.

Rekonsiliasi nasional yang diciptakan oleh Mandela berwujud dengan pembagian kekuasaan yang setara danimbang di antara etnis-etnis yang ada. Mandela sebagai Presiden, wakilnya dari kaum kulit putih, de Klerk. Kedudukan menteri dibagi antara Partai Nasional (kaum kulit putih) dengan ANC (kaum kulit hitam), serta ada juga etnis lain, seperti dari India yakni Mac Maharaj dan Dullah Omar. □



Nelson Mandela bersama Willem de Klerk

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

AWG/dari berbagai sumber

## Cara Ali Melawan Diskriminasi

Meski Ali berjasa kepada Amerika Serikat, namun dia tetap dicemooh sebagai negro. Diskriminasi rasial yang masif di Amerika membuat munculnya Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika. Ali mendukung gerakan itu dengan melakukan pembangkangan tanpa kekerasan.

**B**AGI penggemar tinju, pasti mengetahui sosok Muhammad Ali. Pria yang aslinya bernama Cassius Marcellus Clay, lahir di Kentucky, Amerika Serikat, 17 Januari 1942, itu merupakan legenda tinju yang pernah dijuluki *the great*. Pria yang menjadi petinju gara-gara sepeda BMX-nya dicuri orang mampu merebut dan mempertahankan gelar dalam waktu yang lama. Saat Olimpiade di Roma, Italia, pada 1960, Ali menjadi kontingen Amerika Serikat. Di cabang olahraga itu, Ali mampu menambah-

kan medali emas bagi bangsanya setelah berhasil mengalahkan petinju Polandia Zbigniew Pietrzykowski di final.

Selepas menjadi petinju amatir, dia terjun ke profesional. Di dunia yang berbayar, kelihaian Ali sangat luar biasa, gayanya yang lincah, pukulannya yang keras dan akurat, membuat dia menjadi juara dunia. Lawannya rata-rata dijatuhkan lewat TKO atau KO. Dari sinilah Ali menjadi petinju yang disegani.

Dari luar orang memandang hidup Ali penuh dengan kebanggaan. Orang melihat





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ke mana-mana Ali selalu dielu-elukan banyak orang. Namun apa yang dilihat orang itu berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh Ali. Sebagai anak keturunan Afrika, Ali dan keturunan Afrika lainnya saat itu mendapat perlakuan diskriminasi rasial dan cemoohan. Meski sudah mempersembahkan emas kepada Amerika Serikat dalam Olimpiade Roma, namun cemoohan “negro” tetap diumpatkan oleh orang kulit putih padanya. Sama sakitnya ketika dia ditolak masuk oleh salah satu restoran di Louisville.

Pada masa itu, di Amerika Serikat dan bisa jadi hingga saat ini, marak terjadi diskriminasi rasial kepada para keturunan Afrika.

Masifnya diskriminasi membuat munculnya Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika. Gerakan yang terjadi pada 1955-1968 merupakan gerakan yang ditujukan untuk melarang diskriminasi rasial terhadap orang Afrika-Amerika dan memulihkan hak-hak suara mereka. Tokoh-tokoh gerakan ini seperti W.E.B. Du Bois, Malcolm X, Rosa Parks, dan Martin Luther King, Jr.

Gerakan yang dilakukan oleh mereka dengan melakukan aksi protes antikekerasan dan pembangkangan sipil. Aksi yang pernah mereka lakukan, seperti Boikot Bus Montgomery, aksi duduk di Greensboro, dan Pawai dari Selma ke Montgomery. Apa yang dilakukan itu sangat ampuh sehingga

menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal demikian membuat pemerintah negara bagian diharap segera tanggap terhadap isu yang muncul.

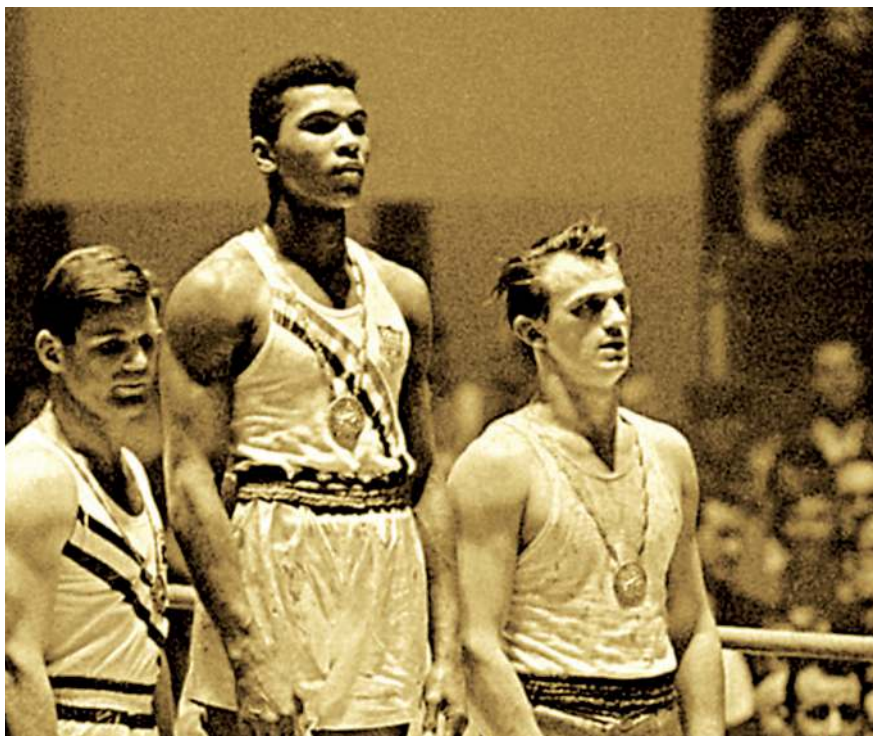
Ali sebagai salah satu korban dari diskriminasi rasial juga melakukan dukungan terhadap gerakan itu. Meski dia suka melakukan ‘kekerasan’ di ring tinju, namun dalam melakukan aksi untuk memulihkan hak-hak suaranya dilakukan dengan cara-cara yang damai, anti kekerasan. Ali melakukan seperti cara-cara yang sudah dilakukan, yakni melakukan pembangkangan.

Pembangkangan yang dilakukan Ali adalah membuang medali emas yang diraih di Roma ke Sungai Ohio. Ali melakukan itu, karena apa yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negaranya itu tidak dihargai malah mendapat perlakuan diskriminatif. Tak hanya itu, setelah menjadi juara dunia kelas berat, Februari 1964, ia mengubah namanya Cassius Marcellus Clay menjadi Muhammad Ali. “Cassius Clay itu nama budak!”, ujarnya.

Dunia tinju profesional memberinya harta melimpah, namun hal itu tak menyurutkan langkah Ali melakukan pembangkangan demi memperjuangkan persamaan hak. Ketika Amerika Serikat berperang di Vietnam, antara tahun 1957 hingga 1975, membuat negara itu mewajibkan kepada warga negaranya untuk mengikuti wajib militer. Ketentuan itu juga berlaku kepada Ali. Namun ketentuan itu ditolak. Alasannya, “saya tidak bertengkar dengan orang-orang Vietnam. Tidak ada orang Vietnam yang pernah memanggil saya negro”. “Mengapa mereka harus meminta saya mengenakan seragam dan pergi 10 ribu mil dari rumah dan menjatuhkan bom serta menghujani tembakan pada orang kulit cokelat Vietnam”, tambahnya.

Akibat menolak wajib militer itu membuat Ali diskor oleh Komisi Tinju. Skor membuat dirinya tidak diizinkan naik ring dan dicabut gelarnya. Dijatuhi hukuman tak membuat Ali sedih. Hukuman yang diberikan rupanya tidak mengurangi kedigdayaan Ali di ring. Setelah naik ring kembali, gelar juara dunia tetap diraih dan dipertahankan. □

AWG/dari berbagai sumber



## Prof. Dr. Armin Arsyad

Dekan Fisip Universitas Hasanuddin

### GBHN Harus Berisi Penjabaran Tujuan Negara



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**S**EJAK MPR giat melakukan berbagai sosialisasi terkait amandemen terbatas UUD soal Pokok-Pokok Haluan Negara (GBHN), saya sebagai akademisi tertarik untuk menelaahnya. Terutama, bagaimana GBHN itu mesti menjadi satu sosok fundamental yang mampu menjabarkan tujuan negara dan cita-cita bangsa.

Jika harus muncul haluan negara model GBHN, isinya merupakan penjabaran dari tujuan negara. GBHN merupakan realisasi pasal-pasal yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945. Contoh, Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa 'Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan'. Artinya, negara berkewajiban memastikan warga negaranya mendapatkan pendidikan yang layak tanpa kecuali. GBHN mesti menjabarkan itu dan memerintahkan pemerintah untuk menjalankan isi UUD tersebut.

Begitu juga dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa 'Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak'. Maka, negara mesti hadir untuk menjalankan perintah UUD tersebut. Mestinya peran GBHN di situ. Jangan sampai lagi warga negara kita mengemis-ngemis menjadi tenaga kerja yang diperlakukan tidak manusiawi di negara lain.

Banyak sekali amanah UUD yang sangat bagus-bagus dan isinya semua untuk kesejahteraan rakyat, tapi belum terealisasi semua. GBHN sebagai panduan negara harus menjadi lokomotif penggerak bangsa ini maju ke depan bersama-sama. □

DER

## Prof. Susi Dwi Harijanti

Guru Besar FH Universitas Padjajaran

### Generasi Muda Harus Dipancing Agar Mau Berpikir Soal Bangsa

**P**ERSOALAN dan tantangan bangsa Indonesia hari ini sangat berat dan makin berat lagi di masa depan. Generasi muda bangsa adalah sosok harapan bangsa, sebab merekalah pemegang tingkat estafet kepemimpinan dan pewaris seluruh tanah air Indonesia yang kaya ini.

Namun, akan sangat berbahaya jika generasi muda sendiri 'cuek' atau 'abai' terhadap bangsanya atau karena pengaruh radikalisme, generasi muda malah melawan dan tidak percaya terhadap negaranya sendiri.

Sebenarnya intelektualitas generasi muda Indonesia sangat baik, namun perlu dipancing keluar atau distimulus agar mereka tertarik. Banyak sekali upaya yang



sudah dilakukan berbagai elemen bangsa untuk membangkitkan rasa nasionalisme generasi muda, salah satunya dengan berbagai perlombaan yang memancing daya intelektual dan kreatifitas anak-anak muda. Lomba Karya Tulis Ilmiah MPR misalnya, itu sangat bagus.

Saya sendiri melihat dalam lomba itu, ternyata pemikiran-pemikiran mereka sangat luar biasa, dan sampai tidak terpikir ada beberapa yang membuat kami kagum. Intinya, ketika mereka diajak berpikir dan berkiprah untuk bangsa, mereka ternyata generasi yang abai terhadap ketatanegaraan bangsa. Mereka adalah generasi yang responsif. □

DER

## UN Diganti, Apa Solusinya?

Di awal menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengeluarkan kebijakan mengganti atau ada yang menyebut menghapus Ujian Nasional (UN). Penggantian atau penghapusan UN itu dengan beberapa alasan. Apa saja? Berikut pendapat para wakil rakyat terkait masalah pendidikan di Indonesia.

**Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.,** Anggota MPR dari Fraksi PAN

### Metode Baru Tak Boleh Sekadar Meluluskan Siswa

**M**ENGHAPUS Ujian Nasional (UN) karena alasan membebani siswa sehingga stres, menurut saya, kurang tepat. Tetapi UN yang ada selama ini memang perlu dikoreksi, bukan karena bikin stres siswa tetapi karena hanya melariskan bimbel (bimbingan belajar). CEO Bimbel lebih bergensi daripada guru. Makanya, yang diangkat menjadi Staf Khusus Istana bukan guru berprestasi tetapi pengelola bimbel berprestasi. Ini bisa menimbulkan kesan ada pengarusutamaan bimbel yang berimplikasi mereduksi pendidikan hanya jadi pengajaran.

Apakah metode pendidikan menghafal dianggap sudah tidak cocok? Saya tidak ingin mengatakan metode menghafal tidak bermanfaat. Metode menghafal tidak harus dibuang. Ia bisa dimanfaatkan sebagai titik awal menumbuhkan kecerdasan reflektif dan kritis. Namun, memang kalau menghafal dijadikan strategi atau metode utama dalam pembelajaran maka tidak akan efektif, terutama ketika kita ingin menguatkan kecerdasan majemuk, meliputi kecerdasan kognitif, psikomotor, dan penguatan kecerdasan afektif. Memang dengan model UN yang hanya mengejar kecerdasan kognitif, metode menghafal sudah cukup efektif. Cuma tidak bisa berharap banyak ketika kita ingin menguatkan multi kecerdasan intelektual, emosional ataupun spiritual anak didik.

Untuk menghasilkan multi kecerdasan anak didik diperlukan variasi strategi dan metode pembelajaran. Metode itu harus mencakup gerak tubuh atau somasi, auditory, visual dan kerja intelektual anak didik. Rancangan pembelajaran inilah yang disebut dengan metode SAVI, yakni pem-

belajaran yang dilakukan dengan menggerakkan Somasi, Auditory, Visual, dan Intelektual. Karena itu guru harus kaya imajinasi dan kreatifitas dalam merancang pembelajaran SAVI ini.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Kalau kebutuhannya hanya untuk mengukur kecerdasan intelegensia cukup menggunakan test obyektif melalui penilaian sumatif atau formatif dengan menyerahkan kepada guru di sekolah. Bahkan, untuk melakukan assessment terhadap kompetensi minimum, literasi numerasi psychomotor dan karakter siswa pun, guru di sekolah harus diberi kepercayaan yang lebih besar.

Mengenai asesmen kompetensi minimum masih ada yang perlu diberi catatan. Dalam hal ini kompetensi literasi dan numerasi keduanya masih berada dalam domain

kognitif, belum menyentuh wilayah kecerdasan psikomotorik yang semestinya juga harus masuk bagian assessment. Sementara mengenai karakter yang memang sangat penting untuk dilakukan assessment, tetapi saya ragu jika yang dipakai adalah metode survei. Metode survei tidak akan mampu mengetahui karakter dan watak siswa secara natural. Survei hanya melihat apa yang di permukaan perilaku siswa didik. Jika ingin mendapatkan informasi mengenai karakter siswa yang natural adalah melalui observasi terhadap everyday life atau kehidupan sehari-hari siswa atau melalui depth interview. Survei hanya memberi informasi berupa angka agregat, tidak bisa digunakan untuk menyelami karakter masing-masing siswa.

Perubahan metode baru itu tidak boleh hanya sekedar agar siswa 'lulus semua' sehingga tidak menyakiti siswa, guru, dan orangtua murid. Perubahan metode baru dalam mengelola pendidikan harus dilakukan atas dasar semangat mewujudkan prinsip-prinsip dan filosofi yang benar mengenai pendidikan. Metode baru itu harus bisa memberi manfaat terhadap upaya mencapai prinsip dan filosofi pendidikan, yaitu pendidikan yang memanusiakan manusia, pendidikan yang bisa dijadikan strategi membangun kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.

Pada dasarnya Indonesia memiliki latar belakang unik yang tidak harus meniru negara-negara lain. Apa yang baik, yang di terapkan oleh negara-negara lain menurut saya hanyalah baik untuk negara masing-

masing. Boleh saja apa yang mereka lakukan kita jadikan referensi, tapi tidak perlu kita ini menjadikan mereka sebagai contoh, yang kemudian kita fotokopi begitu saja untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Karena mereka mempunyai modal sosial budaya bahkan juga ekonomi dan politik yang berbeda dengan modal yang

kita miliki. Misalnya, di Australia, Inggris dan negara-negara Barat lainnya yang bahasa ibunya adalah bahasa Inggris, bisa saja bahasa Inggris diselesaikan di sekolah dasar, dan tidak diajarkan lagi di SMP dan SMA. Karena mereka bisa berbahasa Inggris tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah dan di lingkungan masyarakatnya. Di Indonesia

anak didik kita hanya belajar bahasa Inggris di sekolah, tidak demikian dengan keluarga di rumah dan di tengah pergaulan sosial. Oleh karena itu harus dipertimbangkan ulang kalau ingin pelajaran bahasa Inggris harus selesai di sekolah dasar dan hapus di SMP dan SMA. □

AWG

**Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP.,** Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar

## Tidak Dihapus Tapi Diganti Konsep

**A**PAKAH karena disebut UN sebagai sumber stres bagi siswa, guru, dan orangtua murid maka membuat UN perlu dihapus? Sebenarnya itu hanya salah satu dari sekian banyak alasan saja. Kita bukan menghapus UN, tapi mengganti formatnya dengan yang lebih baik bagi sistem pendidikan. Sebuah sistem penilaian tetap perlu, baik untuk siswa maupun untuk sistem pendidikan itu sendiri. Tanpa adanya penilaian kita tidak akan tahu kita sedang berdiri di mana. Oleh karena itu, ada yang namanya asesmen kompetensi dan survei karakter untuk menilai sistem pendidikan secara keseluruhan, dan ujian sekolah yang menilai siswa. Sedikit stres itu baik, asal jangan sampai di level tidak sehat seperti yang kita lihat selama ini, di mana anak-anak hanya berfokus ke ujian nasional sehingga melupakan pelajaran dan kegiatan-kegiatan.

Sebenarnya UN sendiri pun tidak hanya menghafal, ada pelajaran seperti matematika dan IPA yang perlu menghitung dan berpikir lebih lanjut. Namun demikian, kadang untuk memecahkan soal matematika dan IPA, anak lebih ke menghafal rumus, atau menghafal cara cepat mendapatkan jawaban. Sementara konsep itu sendiri belum tentu dipahami dengan baik. Terkadang juga soal yang disajikan, selain sulit juga tidak relevan, dengan kehidupan. Skill seperti berpikir kritis dan terstruktur kurang teruji.

Sekali lagi UN tidak dihapus, tapi diganti konsepnya. Tetap ada asesmen kompetensi yang dilakukan secara berkala. Bedanya, pertama, dia tidak dilakukan di akhir jenjang, tapi di tengah, seperti kelas 2 SMP dan SMA. Kedua, soal-soalnya mengutamakan skill literasi dan numerasi. Ketiga, ini tidak akan

dijadikan indikator siswa, tapi indikator sistem pendidikan kita secara keseluruhan, sehingga kita bisa mengevaluasi dan menilai kurangnya di mana.

Pengganti UN, yakni asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, apakah mampu menjadi ukuran bagi siswa bahwa dia capak



(pandai)? Tentu tidak 100%. Yang bisa menilai seorang siswa secara komprehensif adalah guru yang sehari-hari bertemu langsung dengan siswa. Oleh karena itu, kita mengadakan Ujian Sekolah di mana wewenang penilaian diberikan sepenuhnya pada guru. Penilaiannya juga didasarkan pada kurikulum K-13, yang mencakup tidak hanya aspek kognitif, tapi juga keterampilan dan sikap. Sedangkan untuk asesmen kompetensi dan survei karakter sendiri dilakukan secara nasional, karena kita perlu

mengagregasi data secara kuantitatif, bukan mengukur kecakapan perorangan.

Apakah metode baru itu hanya sekadar agar siswa 'lulus semua' sehingga tidak menyakiti siswa, guru, dan orangtua murid? Tidak seperti itu. Untuk menentukan kelulusan, sekarang kita serahkan kepada sekolah dan guru melalui ujian sekolah (US). Jika guru dan sekolah menganggap seorang siswa tidak memenuhi kompetensi yang diujikan, maka silahkan saja jika tidak ingin meluluskan. Berarti siswa tersebut masih butuh binaan, mungkin setahun lagi. Sedangkan untuk asesmen kompetensi justru akan menilai sekolah dan guru, mana yang sudah baik dan mana yang belum. Bukan juga untuk menyalahkan, namun mindsetnya adalah untuk memberdayakan mereka yang kurang dengan program-program yang sesuai dari Kemendikbud.

Sebenarnya banyak sekali best practice dari negara-negara lain. Ada yang menerapkan ujian nasional dan bagus, ada juga yang tidak menerapkan ujian nasional dan bagus. Kita tidak bisa *copy paste* seutuhnya, melainkan dikombinasikan dan disesuaikan dengan keadaan kita. Sebagai contoh di Tiongkok, bagus sekali nilai PISA (Programme for International Student Assessment)-nya, tapi anak-anaknya stres. Di Finlandia, secara PISA mungkin tidak sebagus Tiongkok, tapi anak-anaknya bahagia. Kita ambil bagian baiknya yang sesuai dengan karakteristik kita, dan jangan tiru yang buruknya. Sistem pendidikan Indonesia harus mampu menyeimbangkan antara kompetensi, karakter, dan kebahagiaan dalam belajar. □

AWG

Fadel Muhammad di Gorontalo

# Sosialisasi Empat Pilar dan Serap Aspirasi di Gorut



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**M**ENJELANG sore, Selasa (26/11/2019), sebanyak 400 aparatur sipil negara (ASN) memenuhi Gedung Pertemuan Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Provinsi Gorontalo. Sore itu, mereka menjadi peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Acara itu terasa istimewa, karena dihadiri dan menjadi pembicaranya adalah Fadel Muhammad, yang tak lain adalah mantan Gubernur Gorontalo yang kini menjabat Wakil Ketua MPR. Selain Fadel, hadir pula dalam acara itu anggota MPR dari Kelompok DPD, Abdurrahman Abubakar Bahmid; Bupati Gorut Indra Yasin; Kapolres Gorontalo Utara (Gorut), AKBP Dicky Kesumah; dan Dandim Gorut, Letkol Andrea.

Di hadapan peserta sosialisasi yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan TP PKK Gorut, Fadel Muhammad mengungkapkan, tentang lembaga MPR dan tugas-tugas yang diembannya. MPR sekarang, jelas Fadel, dipimpin oleh 10 orang pimpinan, yang merepresentasikan kekuatan partai politik yang lolos parliamentary threshold dan kelompok DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Sepuluh pimpinan MPR ini, kata Fadel, disepakati setelah UU MD3 direvisi. Selain tugas-tugas konstitusional, MPR juga menjalankan tugas yang diamanatkan oleh UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), yaitu melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada

seluruh elemen masyarakat.

Di Gorontalo, ujar alumni ITB itu, nilai-nilai Pancasila dipegang kuat oleh masyarakat meski asal usulnya daerah ini memegang kuat agamanya, Islam. "Pengalaman saya menjadi gubernur dua kali dan sebagai anggota DPR yang bolak balik ke sini, saya yakin nilai-nilai Pancasila dipegang erat masyarakat Gorontalo", tegas Fadel. Karena itu, daerah yang berada di antara Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah itu tetap damai dan aman, jauh dari konflik.

Dalam kesempatan tersebut, Fadel sebagai pimpinan dan anggota MPR juga melakukan tugas serap aspirasi masyarakat. "Kita juga berbicara mengenai masalah pembangunan di Gorut, terutama mengenai pertanian dan perikanan", ungkapnyanya. "Apa yang kami lakukan adalah serap aspirasi", tambahnya. Hasil serap aspirasi, lanjut Fadel, akan dibawa ke MPR, DPD, dan disalurkan ke teman-teman yang ada di DPR.

Menurut Fadel, ada tiga potensi yang ada di Gorut perlu mendapat dukungan. *Pertama*, pariwisata. Menurut Fadel, Gorut berhadapan dengan Filipina serta banyak pulau sehingga sangat potensi untuk dikembangkan menjadi wisata bahari. *Kedua*, perlu membangun infrastruktur. Dia mengungkapkan, di daerah ini terkenal dengan pantai dan Pelabuhan Anggrek. "Kawasan ini bisa menjadi





pertimbangan pemerintah pusat untuk menjadikannya menjadi proyek nasional,” harapnya. *Ketiga*, di Gorut akan dibangun pusat kebudayaan yang terdiri dari berbagai budaya. “Semua aspirasi itu akan dibawa

ke tingkat nasional”, ucap pria yang juga seorang pengusaha itu.

Apa yang disampaikan oleh Fadel dibenarkan oleh Abdurrahman Abubakar Bahmid yang juga jadi narasumber acara

sosialisasi itu. Bahmid menyatakan, Gorontalo yang berbatasan dengan dua provinsi ini memiliki potensi pariwisata. Sektor pariwisata di Gorontalo, menurut Bahmid, lebih bagus dibanding dengan sektor tambang. Dia mengungkapkan, kalau sektor tambang lama-lama akan habis dan dampaknya akan menimbulkan masalah lingkungan. “Untuk memulihkannya memerlukan biaya yang sangat besar”, ujarnya.

Sedang sektor pariwisata dengan biaya pengembangan yang tidak terlalu besar dan dampaknya bisa memberikan keuntungan kepada banyak pihak. “Perekonomian akan tumbuh bila banyak wisatawan datang,” ungkap Bahmid. Oleh karena itu, dia berharap, wisatawan asing yang tiba di Manado, Sulawesi Utara, bisa melanjutkan kunjungannya ke Gorontalo. Untuk itu, Bahmid mengingatkan agar para bupati dan walikota di provinsi itu tidak bekerja sendiri-